Editor : Agus Hendrayady

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
(TEORI DAN PRAKTEK)



Muhammad Hasan | Rosidah | Ahmad Farouq Mulku Zahari
Ahmad Mustanir | Hardianti | Abdul Jabbar | Ade Putra Ode Amane
Ade Iskandar | Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang
Wisber Wiryanto | Iwan Henri Kusnadi | Ani Heryani | Siti Waliah
Mochamad Rizki Fitrianto | Firdaus | Muliani | Sisca Nopralia | Afriyanni
Yuliana | Muhammad Rais Rahmat Razak
Irfan Murtadho Yusuf | Adhityo Nugraha Barsei

BUNGA RAMPAI

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (TEORI DAN PRAKTEK)

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
(TEORI DAN PRAKTEK)

Muhammad Hasan | Rosidah
Ahmad Farouq Mulku Zahari | Ahmad Mustanir
Hardianti | Abdul Jabbar
Ade Putra Ode Amane | Ade Iskandar
Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang
Wisber Wiryanto | Iwan Henri Kusnadi
Ani Heryani | Siti Waliah
Mochamad Rizki Fitrianto | Firdaus
Muliani | Sisca Nopralia
Afriyanni | Yuliana
Muhammad Rais Rahmat Razak
Irfan Murtadho Yusuf | Adhityo Nugraha Barsei

Penerbit

CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
(TEORI DAN PRAKTEK)

Muhammad Hasan | Rosidah
Ahmad Farouq Mulku Zahari | Ahmad Mustanir
Hardianti | Abdul Jabbar
Ade Putra Ode Amane | Ade Iskandar
Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang
Wisber Wiryanto | Iwan Henri Kusnadi
Ani Heryani | Siti Waliah
Mochamad Rizki Fitrianto | Firdaus
Muliani | Sisca Nopralia
Afriyanni | Yuliana
Muhammad Rais Rahmat Razak
Irfan Murtadho Yusuf | Adhityo Nugraha Barsei

Editor :
Agus Hendrayady

Tata Letak :
Karisma Tanan

Desain Cover :
Qonita Azizah

Ukuran :
A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman :
x, 378

ISBN :
978-623-195-044-4

Terbit Pada :
Januari 2023

Hak Cipta 2023 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA
(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk program penulisan buku bersama dapat dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca. Program penulisan buku bersama ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Administrasi Pembangunan.

Sistematika buku "Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)" ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 22 Bab, diantaranya: Bab 1. Pengertian Administrasi dan Pengertian Pembangunan yang membahas tentang Pengertian Administrasi, serta Pengertian Pembangunan; Bab 2. Konsep Dasar Administrasi Pembangunan membahas tentang Pembangunan Nasional, dan Pembangunan Administrasi serta Pembangunan Infrastruktur; Bab 3. Sejarah Perkembangan Administrasi Pembangunan membahas tentang Administrasi Pembangunan dalam Tinjauan Historis, dan Lahirnya American Society for Public Administration (ASPA) dan Development Administration Group (DAG), serta Bantuan Luar Negeri bagian dari Politik Luar Negeri; Bab 4. Tujuan Mempelajari Administrasi Pembangunan membahas tentang Karakteristik Administrasi Pembangunan, dan Ciri Perumusan Administrasi Pembangunan, serta Tujuan dan Fungsi Administrasi Pembangunan; Bab 5. Aspek yang Mempengaruhi Administrasi Pembangunan membahas tentang Aspek Politik, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial Budaya, dan Aspek Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Aspek Kelembagaan; Bab 6. Permsalahan dalam Pembangunan membahas tentang Konsep Dasar Pembangunan, dan Permasalahan dalam Pembangunan Nasional, serta Konsep Sustainable Development Goals (SDGs); Bab 7. Perkembangan Teori Pembangunan dan Isu Sentral Pembangunan membahas

tentang Pengertian Pembangunan, Liberalisme, Pembangunan Liberal, dan Teori Modernisasi dalam Pembangunan, serta Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN); Bab 8. Penyempurnaan Administrasi Bagi Pembangunan yang membahas tentang Administrasi dan Organisasi Pemerintah, Sistem Kepegawaian, Pembinaan Kelembagaan Ekonomi, dan Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, serta Penelitian serta Pengembangan Ilmu; Bab 9. Strategi Pembangunan Administrasi yang membahas tentang Inovasi Administrasi Pembangunan, serta Modernisasi Administrator Pembangunan; Bab 10. Perencanaan dan Administrasi Pembangunan yang membahas tentang Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan Perencanaan dan Administrasi Pembangunan di Indonesia, serta Solusi yang Ditawarkan; Bab 11. Peranan dan Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Berencana yang membahas tentang Fungsi Pemerintah, Orientasi Pemerintah dalam Administrasi Pembangunan (The Administration of Development), Orientasi Pemerintahan dalam Pembangunan Administrasi (The Development of Administration), dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan Berencana/Berkelanjutan, serta Tantangan Administrasi Pembangunan dan Reformasi Administrasi; Bab 12. Perencanaan dan Kebijakan dalam Administrasi Pembangunan yang membahas tentang Kebutuhan akan Administrasi Pembangunan, dan Perencanaan Pembangunan, serta Kebijakan Perencanaan Pembangunan; Bab 13. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang membahas tentang Pengertian Perencanaan Pembangunan, serta Pelaksanaan Pembangunan; Bab 14. Perkembangan Praktek Administrasi Pembangunan Di Negara-Negara Berkembang yang membahas tentang Perkembangan Administrasi Pembangunan, dan Perkembangan Administrasi Pembangunan di Malaysia, serta Perkembangan Administrasi Pembangunan di Indonesia; Bab 15. Pembangunan Nasional yang Multidimensional yang membahas tentang Konsep Pembangunan, dan Pembangunan Nasional, serta Pembangunan Nasional

yang Multidimensional; Bab 16. Aktor Pembangunan dalam Perspektif Good Governance yang membahas tentang Aktor-Aktor Pembangunan dalam Governance, serta Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan; Bab 17. Administrasi Pembiayaan Pembangunan yang membahas tentang Administrasi Pembangunan, Pembiayaan Pembangunan, Administrasi Pembiayaan Pembangunan, Dasar Hukum Administrasi Pembangunan, Fungsi Administrasi Pembiayaan, Sumber Pembiayaan Pembangunan, Proses Penyusunan Anggaran, dan Kegunaan Anggaran Pembiayaan, serta Isi Anggaran dan Proses Pembiayaan Pembangunan; Bab 18. Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia yang membahas tentang Konsep Pemberdayaan Masyarakat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia, Program Pemberdayaan yang Dilakukan oleh Pihak Swasta, dan Program Pemberdayaan yang Dilakukan oleh Perguruan Tinggi, serta Program Pemberdayaan yang Dilakukan oleh Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat: Bab 19. Evaluasi Keberhasilan Pembangunan yang membahas tentang Pengertian Evaluasi, Tujuan Evaluasi dan Fungsi Evaluasi, Tahapan Evaluasi, dan Keberhasilan Pembangunan, serta Pengertian Pembangunan; Bab 20. Pembangunan Kelembagaan di Indonesia yang membahas tentang Pengembangan Kelembagaan, serta Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM); Bab 21. Reformasi Administrasi Publik di Indonesia yang membahas tentang Birokrasi dan Perilaku Masyarakat, serta Reformasi Administrasi melalui Perampingan Birokrasi; Bab 22. Perbandingan Praktek Administrasi Pembangunan di Indonesia yang membahas tentang Program Penanggulangan Kemiskinan, dan Perbandingan Program Pembangunan Pemerintah, serta Pelajaran yang diambil.

Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai inisiator program penulisan buku bersama ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Bandung, Januari 2023
Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....v

1 PENGERTIAN ADMINISTRASI DAN PENGERTIAN PEMBANGUNAN.....1

Pengertian Administrasi.....1

Pengertian Pembangunan.....7

2 KONSEP DASAR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.....25

Pendahuluan.....25

Pembangunan Nasional.....26

Pembangunan Administrasi.....30

Pembangunan Infrastruktur.....33

Penutup.....35

3 SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.....39

Pendahuluan.....39

Administrasi Pembangunan Dalam Tinjauan Historis.....41

Lahirnya American Society for Public Administration (ASPA), Comparative Administration Group (CAG) dan Development Administration Group (DAG).....43

Bantuan Luar Negeri Bagian Dari Politik Luar Negeri.....45

4 TUJUAN MEMPELAJARI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.....55

Pendahuluan.....55

Karakteristik Administrasi Pembangunan.....59

Ciri Perumusan Administrasi Pembangunan 61
Tujuan dan Fungsi
Administrasi Pembangunan 66
5 ASPEK YANG MEMPENGARUHI
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 77
Pendahuluan 77
Aspek Politik 78
Aspek Ekonomi 80
Aspek Sosial Budaya.....81
Aspek Perkembangan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 83
Aspek Kelembagaan 85
6 PERMASALAHAN DALAM PEMBANGUNAN.....91
Konsep Dasar Pembangunan 91
Permasalahan dalam Pembangunan Nasional.....94
Konsep Sustainable Development Goals
(SDGs) 100
7 PERKEMBANGAN TEORI PEMBANGUNAN
& ISU SENTRAL PEMBANGUNAN 107
Pendahuluan 107
Pengertian Pembangunan 108
Liberalisme 109
Pembangunan Liberal 111
Teori Modernisasi dalam Pembangunan.....113
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 119
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 121
8 PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI
BAGI PEMBANGUNAN 127
Administrasi dan Organisasi Pemerintahan 129

Sistem Kepegawaian 131
Pembinaan Kelembagaan Ekonomi 132
Administrasi Perencanaan
dan Pelaksanaan Pembangunan 133
Penelitian Serta Pengembangan Ilmu 134
Peraturan Perundang-undangan..... 135
9 STRATEGI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI 139
Pendahuluan 139
Inovasi Administrasi Pembangunan 142
Modernisasi Administrator Pembangunan 145
Penutup..... 149
10 PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN 155
Pendahuluan 155
Perencanaan Pembangunan..... 155
Administrasi Pembangunan 159
Perencanaan dan Administrasi Pembangunan
Di Indonesia 162
Solusi yang Ditawarkan 164
Penutup..... 167
11 PERANAN DAN FUNGSI PEMERINTAH
DALAM PEMBANGUNAN BERENCANA 173
Fungsi Pemerintahan..... 173
Orientasi Pemerintahan dalam Administrasi..... 179
Orientasi Pemerintahan Dalam Pembangunan.... 181
Peran Pemerintah Dalam Pembangunan 183
Tantangan Administrasi Pembangunan
dan Reformasi Administrasi..... 188

12 PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 197
Kebutuhan akan Administrasi Pembangunan 197
Perencanaan Pembangunan 199
Kebijakan Perencanaan Pembangunan 203
13 PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 211
Pendahuluan 211
Pengertian Perencanaan Pembangunan 214
Pelaksanaan Pembangunan 226
14 PERKEMBANGAN PRAKTEK ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG 231
Perkembangan Administrasi Pembangunan 231
Perkembangan Administrasi Pembangunan di Malaysia 235
Perkembangan Administrasi Pembangunan di Indonesia 239
15 PEMBANGUNAN NASIONAL YANG MULTI DIMENSIONAL 247
Konsep Pembangunan 247
Pembangunan Nasional 248
Pembangunan Nasional yang Multi Dimensional 249
Penutup 263
16 AKTOR PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE 267
Pendahuluan 267
Aktor-Aktor Pembangunan dalam Governance 269
Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan 272

17 ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 281
Pendahuluan 281
Administrasi Pembangunan 282
Pembiayaan Pembangunan 283
Administrasi Pembiayaan Pembangunan 284
Dasar Hukum Adminstrasi Pembangunan 286
Fungsi Administrasi Pembiayaan 287
Prinsip Administrasi Pembiayaan 288
Sumber Pembiayaan Pembangunan 288
Proses Penyusunan Anggaran 292
Kegunaan Anggaran Pembiayaan 293
Isi Anggaran dan Proses Pembiayaan Pembangunan 293
18 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA 297
Konsep Pemberdayaan Masyarakat 297
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia 301
Program Pemberdayaan yang Dilakukan oleh Pihak Swasta 304
Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Perguruan Tinggi 305
Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat 306
19 EVALUASI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN 313
Pendahuluan 313
Pengertian Evaluasi 314
Tujuan Evaluasi dan Fungsi Evaluasi 316

Tahapan Evaluasi 317
Keberhasilan Pembangunan 318
Pengertian Pembangunan 320
Ringkasan.....326
20 PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN DI INDONESIA 331
Pendahuluan 331
Pengembangan Kelembagaan.....333
Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 345
Penutup.....346
21 REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA 349
Birokrasi dan Perilaku Masyarakat.....352
Reformasi Administrasi melalui Perampingan Birokrasi.....359
22 PERBANDINGAN PRAKTIK ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA 367
Pendahuluan 367
Progam Penanggulangan Kemiskinan 368
Perbandingan Program Pembangunan Pemerintah.....371
RPJMN 2004 – 2009 371
RPJMN 2010 – 2014 372
RPJMN 2015 – 2019 373
RPJMN 2020 – 2024 374
Pelajaran yang Diambil.....375

1

PENGERTIAN ADMINISTRASI DAN PENGERTIAN PEMBANGUNAN

Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd.
Universitas Negeri Makassar

Pengertian Administrasi

Administrasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengatur manajemen organisasi bisnis, lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi, kantor pemerintah atau organisasi nirlaba. Fungsi utama administrasi adalah pembentukan rencana, kebijakan, dan prosedur, pengaturan tujuan dan sasaran, menegakkan peraturan, dan lain-lain.

Administrasi meletakkan kerangka dasar organisasi, di mana manajemen merupakan fungsi dari organisasi. Sifat administrasi adalah birokratis. Ini adalah istilah yang lebih luas karena melibatkan fungsi peramalan, perencanaan, pengorganisasian dan pengambilan keputusan di tingkat tertinggi organisasi. Administrasi mewakili lapisan atas hierarki manajemen organisasi. Otoritas tingkat atas ini adalah pemilik atau mitra organisasi yang menginvestasikan modalnya untuk memulai organisasi.

Administrasi pada dasarnya berkaitan dengan perumusan tujuan, rencana dan kebijakan. Administrasi yang baik di tempat akan memastikan keberhasilan suatu organisasi. Administrasi berarti keseluruhan penentuan kebijakan, penetapan tujuan utama, identifikasi tujuan umum, dan peletakan program dan proyek yang luas. Lebih lanjut lagi menurut Newman (1953), administrasi berarti bimbingan,

kepemimpinan dan kontrol dari upaya kelompok menuju beberapa tujuan bersama.

Menurut Pfiffner dan Presthus (1960) administrasi berarti suatu kegiatan atau proses yang terutama berkaitan dengan sarana untuk melaksanakan tujuan yang telah ditentukan. Seperti yang ditunjukkan dengan jelas oleh definisi tersebut, administrasi terutama berkaitan dengan sarana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini artinya adalah cara dimana sesuatu dilakukan atau diperoleh. Ketika sekelompok individu bekerja untuk mencapai tujuan bersama, pembagian kerja diperlukan, sehingga setiap individu akan tahu apa yang harus dilakukan atau ada kebutuhan akan struktur otoritas untuk mengontrol dan mengkoordinasikan aktivitas individu yang terlibat. Dengan demikian membagi pekerjaan di antara para anggota, memiliki peran yang tepat yang ditugaskan kepada setiap anggota dalam kelompok, mengikuti instruksi pemimpin hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian ini, administrasi adalah kegiatan yang terutama berkaitan dengan sarana yang juga membutuhkan kerja sama.

Menurut Simon, Smithburg, dan Thompson (1950), administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Aktivitas manusia disebut kooperatif jika memiliki efek yang tidak ada jika kooperatif tidak terjadi. Dengan demikian, administrasi dapat didefinisikan sebagai usaha lengkap kelompok untuk mengendalikan, membimbing, dan beradaptasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan tujuan bersama kita adalah untuk mendidik sekelompok individu di bidang pemasaran obat-obatan. Dengan mengingat tujuan tersebut, dihimpun para ahli di bidang pemasaran khusus obat, yang berorientasi pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai bersama kelompok. Misalkan, jika masing-masing ahli bertindak dengan caranya sendiri tanpa berkonsultasi dengan yang lain, akan terjadi kekacauan dalam kelompok.

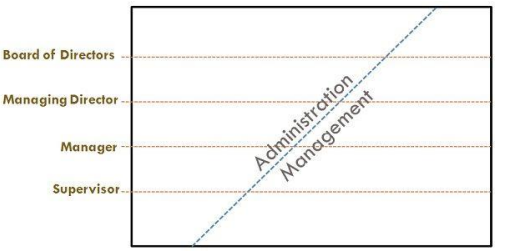
Masing-masing ahli dapat meminta kelompoknya untuk bertemu di tempat tertentu, waktu tertentu di mana dia akan memberikan ceramah, seperti salah satu dari mereka mungkin meminta kelompok untuk bertemu pada jam 9.00 pagi di lokasi tertentu di kota untuk kuliah, yang lain mungkin meminta kelompok yang sama untuk bertemu pada jam 9.30 pagi di lokasi yang berbeda di kota untuk kuliah dan segera. Hal ini akan menyebabkan banyak kebingungan dan kekacauan karena setiap ahli bertindak secara independen tanpa berkonsultasi atau bekerja sama dengan yang lain, sehingga tidak dapat mencapai tujuan bersama mereka. Di sisi lain, jika mereka bekerja sama satu sama lain dan berdiskusi bagaimana mereka bisa mencapai tujuan yang diberikan. Mungkin para ahli dapat menyusun jadwal yang menguntungkan semua orang yang pada akhirnya akan membantu mereka mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, hakekat administrasi adalah pemanfaatan tindakan kooperatif untuk pencapaian tujuan bersama.

Elemen kunci kedua dari definisi di atas adalah tujuan atau maksud. Ketika mengumpulkan sejumlah individu di lokasi tertentu, hal pertama yang akan mereka tanyakan adalah mengapa mereka dikumpulkan, apa tujuan berkumpulnya kelompok tersebut? Tanpa tujuan atau sasaran, tidak ada anggota dalam kelompok yang tahu apa yang harus dilakukan dan mereka tidak akan terlibat dalam aktivitas apa pun. Ketika seseorang menentukan tujuan, dan kelompok diberitahu tentang hal itu, maka anggota kelompok akan mulai berpikir tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut dan mereka akan mulai bekerja sama satu sama lain. Tujuan merupakan salah satu unsur terpenting dalam administrasi. Jika tidak ada tujuan bersama, anggota kelompok tidak akan berkumpul dan bekerja sama satu sama lain. Tujuan, sasaran, atau minat yang sama selalu mengarah pada pemikiran, perasaan, dan tindakan dalam arah yang sama untuk semua anggota kelompok yang sangat penting untuk pencapaian tujuan itu.

Manajemen didefinisikan sebagai tindakan mengelola orang dan pekerjaan mereka, untuk mencapai tujuan bersama dengan menggunakan sumber daya organisasi. Ini menciptakan lingkungan di mana manajer dan bawahannya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok. Ini adalah sekelompok orang yang menggunakan keterampilan dan bakat mereka dalam menjalankan sistem organisasi yang lengkap. Ini adalah aktivitas, fungsi, proses, disiplin, dan banyak lagi (Ahmad et al., 2020).

Perencanaan, pengorganisasian, memimpin, memotivasi, mengendalikan, koordinasi dan pengambilan keputusan adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen menyatukan 5M organisasi, yaitu *men, material, machines, methods, and money*. Ini adalah kegiatan yang berorientasi pada hasil, yang berfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan.

Sederhananya, manajemen dapat dipahami sebagai keterampilan menyelesaikan pekerjaan dari orang lain. Ini tidak persis sama dengan administrasi, yang mengacu pada proses mengelola seluruh organisasi secara efektif. Poin terpenting yang membedakan manajemen dari administrasi adalah bahwa yang pertama berkaitan dengan mengarahkan atau membimbing operasi organisasi, sedangkan yang kedua menekankan pada peletakan kebijakan dan penetapan tujuan organisasi.



Gambar 1.1 Administrasi dan Manajemen

Secara garis besar, manajemen memperhatikan fungsi pengarahan dan pengendalian organisasi, sedangkan administrasi berkaitan dengan fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Dengan berjalannya waktu, perbedaan antara kedua istilah ini semakin kabur, karena

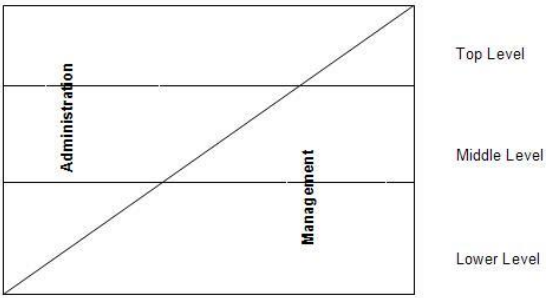
manajemen meliputi perencanaan, perumusan kebijakan, dan implementasi juga, sehingga mencakup fungsi administrasi.

Perbedaan utama antara manajemen dan administrasi diberikan di bawah ini:

1. Manajemen adalah cara sistematis untuk mengelola orang dan hal-hal di dalam organisasi. Administrasi didefinisikan sebagai tindakan mengelola seluruh organisasi oleh sekelompok orang.
2. Manajemen adalah aktivitas tingkat bisnis dan fungsional, sedangkan administrasi adalah aktivitas tingkat tinggi.
3. Sementara manajemen berfokus pada implementasi kebijakan, perumusan kebijakan dilakukan oleh administrasi.
4. Fungsi administrasi meliputi legislasi dan penetapan. Sebaliknya, fungsi manajemen adalah eksekutif dan pemerintahan.
5. Administrasi mengambil semua keputusan penting organisasi sementara manajemen membuat keputusan di bawah batas yang ditetapkan oleh administrasi.
6. Sekelompok orang, yang merupakan karyawan organisasi secara kolektif dikenal sebagai manajemen. Di sisi lain, administrasi mewakili pemilik organisasi.
7. Manajemen dapat dilihat dalam organisasi yang menghasilkan laba seperti perusahaan bisnis. Sebaliknya, administrasi ditemukan di kantor pemerintah dan militer, rumah sakit, organisasi keagamaan, dan semua perusahaan nirlaba.
8. Manajemen adalah semua tentang rencana dan tindakan, tetapi administrasi berkaitan dengan membingkai kebijakan dan menetapkan tujuan.
9. Manajemen memainkan peran eksekutif dalam organisasi. Berbeda dengan administrasi, yang perannya sangat menentukan.

10. Manajer menjaga manajemen organisasi, sedangkan administrator bertanggung jawab atas administrasi organisasi.
11. Manajemen berfokus pada mengelola orang dan pekerjaan mereka. Di sisi lain, administrasi berfokus pada pemanfaatan sumber daya organisasi sebaik mungkin.

Secara praktis, tidak ada perbedaan antara manajemen dan administrasi. Setiap manajer memperhatikan keduanya, fungsi manajemen administratif dan fungsi manajemen operatif seperti yang ditunjukkan pada gambar. Namun, manajer yang lebih tinggi dalam hierarki menunjukkan lebih banyak waktu untuk fungsi administratif dan tingkat yang lebih rendah menunjukkan lebih banyak waktu untuk mengarahkan dan mengendalikan kinerja pekerja yaitu manajemen.



Gambar 1.2 Administrasi dan Manajemen Pada Berbagai Tingkatan Manajerial

Manajemen melibatkan konsepsi, inisiasi, dan penyatuan berbagai elemen; mengkoordinasikan, menggerakkan, mengintegrasikan komponen organisasi yang beragam sambil mempertahankan kelangsungan hidup organisasi menuju beberapa tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah seni menyelesaikan sesuatu melalui dan bersama orang-orang dalam kelompok yang terorganisir secara formal.

Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa keduanya adalah istilah yang berbeda, tetapi secara praktis akan menemukan bahwa istilah-istilah tersebut kurang lebih sama. Seorang manajer melakukan aktivitas administratif dan fungsional. Meskipun manajer yang bekerja di tingkat paling atas dikatakan sebagai bagian dari administrasi sedangkan manajer yang bekerja di tingkat menengah atau bawah mewakili manajemen. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa administrasi berada di atas manajemen.

Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah sebuah konsep yang diperdebatkan baik secara teoretis maupun politik, dan secara inheren kompleks dan ambigu (Thomas, 2004; Hasan & Azis, 2018). Visi pembebasan rakyat, yang menjiwai praktik pembangunan pada tahun 1950-an dan 1960-an, telah digantikan oleh visi liberalisasi ekonomi. Tujuan transformasi struktural telah diganti dengan tujuan integrasi spasial. Dinamika transformasi ekonomi dan masyarakat jangka panjang telah terlepas dari pandangan dan perhatian ditempatkan pada pertumbuhan jangka pendek dan membangun kembali keseimbangan keuangan. Pergeseran penilaian kinerja yang ahistoris dapat dimaknai sebagai bentuk postmodernisasi analisis kebijakan pembangunan (Gore, 2000)

Pendekatan post-modern sebagai konstruksi sosial dan tertanam dalam episteme ekonomi tertentu yang menilai beberapa aset di atas yang lain. Dengan mengungkap letak interpretasi ekonomi dan kemiskinan seperti itu, pendekatan post-modern mencari sistem nilai alternatif sehingga kaum miskin tidak terstigmatisasi dan aset spiritual dan budaya mereka diakui (Hickey & Mohan, 2003).

Salah satu kerancuan yang sering ditemui dalam literatur pembangunan adalah antara pembangunan sebagai proses imanen dan tidak disengaja serta pembangunan sebagai kegiatan yang disengaja (Cowen & Shenton, 1998). Jika pembangunan berarti perubahan yang baik, muncul

pertanyaan tentang apa yang baik dan perubahan seperti apa yang penting. Karena pembangunan bergantung pada nilai-nilai dan konsepsi alternatif tentang kehidupan yang baik, tidak ada jawaban yang seragam atau unik (Kanbur, 2006).

Akan meremehkan untuk mengatakan bahwa definisi pembangunan telah menjadi kontroversial dan tidak stabil dari waktu ke waktu. Seperti yang dikatakan Thomas (2004), pembangunan adalah "diperebutkan, . kompleks, dan ambigu". Gore (2000) mencatat bahwa pada tahun 1950-an dan 1960-an "visi pembebasan rakyat" mendominasi, berdasarkan "transformasi struktural". Persepsi ini cenderung terlepas dari pandangan bagi banyak kontributor literatur pembangunan. Perspektif kedua adalah definisi yang dianut oleh lembaga donor pembangunan internasional yang. Ini adalah definisi pembangunan yang terkait langsung dengan pencapaian pengentasan kemiskinan dan tujuan pembangunan milenium (MDGs).

Ada perspektif ketiga dari sekelompok penulis yang secara luas diidentifikasi oleh Hickey dan Mohan (2003) sebagai pasca-modernis. Posisi pasca-modern adalah bahwa pembangunan adalah wacana (kumpulan ide) yang benar-benar membentuk dan membingkai realitas dan relasi kuasa. Ini dilakukan karena wacana menghargai hal-hal tertentu di atas yang lain. Misalnya, mereka yang tidak memiliki aset ekonomi dipandang 'lebih rendah' dari sudut pandang materialistis. Dalam hal pembangunan nyata mungkin ada wacana baru berdasarkan sistem nilai alternatif yang menempatkan nilai yang jauh lebih tinggi pada aset spiritual atau budaya, dan di mana mereka yang tidak memiliki aset ekonomi yang signifikan akan dianggap memiliki kekayaan yang signifikan (Hasan, 2018; Hasan et al., 2022).

Tidak mengherankan, ada banyak kebingungan atas berbagai macam konseptualisasi yang berbeda, seperti yang dikemukakan Cowen dan Shenton (1998). Mereka membedakan antara perkembangan imanen (tidak disengaja atau mendasari) seperti perkembangan kapitalisme, dan perkembangan segera (disengaja atau

diinginkan) seperti proses yang disengaja untuk mengembangkan Dunia Ketiga yang dimulai setelah Perang Dunia II sebagai sebagian besar muncul dari kolonisasi (Hasan et al., 2020).

Tema umum dalam sebagian besar definisi adalah bahwa pembangunan mencakup 'perubahan' dalam berbagai aspek kondisi manusia. Memang, salah satu definisi paling sederhana tentang 'pembangunan' mungkin adalah gagasan Chambers (2004) tentang perubahan yang baik, meskipun hal ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang apa itu baik dan perubahan seperti apa.

Meskipun tema perubahan mungkin dikesampingkan, apa yang dimaksud dengan perubahan yang baik pasti akan diperebutkan seperti yang dikatakan Kanbur (2006), karena tidak ada jawaban yang seragam atau unik. Pandangan yang mungkin lazim di satu bagian komunitas pembangunan belum tentu dianut oleh bagian lain dari komunitas itu, atau di masyarakat yang lebih luas (Tahir et al., 2022).

Istilah "pembangunan" memiliki berbagai arti bagi orang yang berbeda dan dapat dijelaskan dalam konteks yang berbeda. Misalnya, kebutuhan pembangunan penduduk yang kelaparan harus berbeda dengan kebutuhan gizi yang cukup. Pembangunan sering dibingungkan dengan “pertumbuhan ekonomi yang diukur semata-mata dalam hal peningkatan pendapatan pra-kapita atau produk nasional bruto tahunan, terlepas dari distribusinya dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pertumbuhan yang efektif” (Mahmoud, 1991). Seers (1972) menegaskan bahwa “perkembangan berarti kondisi untuk mewujudkan kepribadian manusia, oleh karena itu, evaluasinya harus mempertimbangkan tiga kriteria terkait, di mana telah terjadi pengurangan (1) kemiskinan, (2) pengangguran, (3) ketimpangan”.

Menurut Pearson (1992), pembangunan melibatkan "peningkatan kualitatif, kuantitatif atau keduanya - dalam penggunaan sumber daya yang tersedia". Dia juga menegaskan bahwa pembangunan tidak mengacu pada satu perspektif tertentu tentang perbaikan sosial, politik

dan ekonomi. Sebaliknya, itu adalah istilah hibrida untuk segudang strategi yang diadopsi untuk transformasi sosial ekonomi dan lingkungan dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan.

Pembangunan adalah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan politik secara menyeluruh. Itu tidak terbatas pada wilayah dan waktu tertentu. Konsep pembangunan bervariasi dari daerah ke daerah dari waktu ke waktu. Para ekonom telah memberikan kontribusi paling besar dalam pembahasan konsep pembangunan. Mereka telah memberikan konsep pembangunan dari perspektif ekonomi. Menurut mereka, pembangunan adalah proses multifase di mana pertumbuhan ekonomi mengarah pada pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan. Perubahan infrastruktur ekonomi dan sosial juga terjadi melalui pembangunan.

Istilah "pembangunan" memiliki arti yang berbeda dalam konteks yang berbeda dan dapat dijelaskan dalam berbagai konteks. Pembangunan harus dianggap sebagai kemajuan menuju tujuan multidimensi seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketidaksetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pearson (1992) mendefinisikan pembangunan sebagai “perbaikan, kualitatif, kuantitatif, atau keduanya, dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.” Dia juga mengklaim bahwa pembangunan tidak berhubungan dengan satu sudut pandang tentang kemajuan sosial, politik, atau ekonomi. Sebaliknya, itu adalah kata campuran untuk berbagai taktik yang digunakan untuk mengubah kondisi sosial ekonomi dan lingkungan dari yang ada menjadi yang diinginkan.

Gran (1983) mendefinisikan “pembangunan sebagai proses sosial dan praktis yang bertujuan untuk membebaskan potensi manusia sehingga orang memperoleh kontrol maksimum yang layak secara sosial dan praktis atas semua sumber daya yang tersedia yang diperlukan untuk realisasi kebutuhan dan keamanan dasar manusia.”

Menurut Burkey (1993), “pembangunan juga merupakan suatu proses dimana seorang individu mengembangkan harga diri dan menjadi lebih percaya diri, mandiri, kooperatif, dan toleran terhadap orang lain dengan menyadari kekurangannya juga. Sebagai potensinya untuk perubahan positif. Ini terjadi melalui bekerja dengan orang lain, memperoleh pengetahuan baru, dan partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik komunitas mereka.

Rogers (1990) mengatakan, “pembangunan adalah proses perubahan sosial yang panjang dan partisipatif dalam masyarakat yang tujuannya adalah kemajuan material dan sosial dari mayoritas penduduk melalui pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan mereka.”

Menurut Perroux (1978), pembangunan didefinisikan sebagai “kombinasi perubahan mental dan sosial di antara penduduk yang memutuskan untuk meningkatkan produk nyata dan global mereka, secara kumulatif dan berkelanjutan.”

Pembangunan adalah prosedur yang mengarah pada pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif, atau perluasan bagian fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, dan demografis. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat, serta untuk membangun atau memperluas pendapatan daerah dan lapangan kerja sambil melindungi sumber daya lingkungan. Pembangunan dapat diamati dan bermanfaat, tetapi tidak selalu secara instan, dan melibatkan aspek perubahan kualitas serta pembentukan lingkungan untuk melanjutkan perubahan itu.

Ekonom pemenang hadiah Nobel Amartya Sen telah dua kali mengubah pemikiran kita, tentang apa yang kita maksud dengan pembangunan. Ekonomi tradisional berfokus pada pendapatan sebagai ukuran utama kesejahteraan sampai karyanya yang inovatif pada tahun 1980-an menunjukkan bahwa kemiskinan melibatkan lebih banyak deprivasi dalam kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang tidak ditangkap oleh pendapatan saja. "*Capabilities Approach*" menyebabkan pengenalan Indeks

Pembangunan Manusia PBB, dan selanjutnya Indeks Kemiskinan Multidimensi, yang keduanya bertujuan untuk mengukur pembangunan dalam pengertian yang lebih luas ini. Kemudian pada tahun 1999, Sen mengajukan argumennya bahwa kebebasan tidak hanya merupakan sarana tetapi juga tujuan pembangunan. Pandangan Sen kini diterima secara luas bahwa pembangunan harus dinilai dari dampaknya terhadap masyarakat, tidak hanya dari perubahan pendapatan mereka tetapi secara lebih umum dalam hal pilihan, kemampuan dan kebebasan mereka, dan kita harus memperhatikan distribusi perbaikan ini, bukan hanya rata-rata sederhana untuk masyarakat.

Tetapi untuk mendefinisikan pembangunan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak sesuai dengan arti istilah tersebut bagi sebagian besar dari kita. Pembangunan juga membawa konotasi perubahan yang langgeng. Memberikan kelambu atau pompa air kepada seseorang seringkali merupakan cara yang sangat baik dan hemat biaya untuk meningkatkan kesejahteraannya, tetapi jika perbaikan tersebut hilang ketika kita berhenti menyediakan kelambu atau pompa, biasanya kita tidak akan menggambarkannya sebagai pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan terdiri dari lebih dari perbaikan kesejahteraan warga negara, bahkan didefinisikan secara luas, yaitu menyampaikan sesuatu tentang kapasitas sistem ekonomi, politik dan sosial untuk menyediakan keadaan bagi kesejahteraan itu secara berkelanjutan dan jangka panjang.

Bukan berita baru bagi siapa pun yang bekerja di bidang pembangunan bahwa masalahnya rumit dalam arti bahwa membuat kemajuan melibatkan penanganan banyak masalah yang berbeda. Tetapi mengatakan bahwa ekonomi adalah sistem adaptif yang kompleks menyiratkan sesuatu yang agak spesifik tentang sifat dinamisnya. Sistem adaptif kompleks di sini sebagai istilah untuk menggambarkan jenis sistem non-linier tertentu yang muncul di mana-mana. Perekonomian terdiri dari serangkaian orang, perusahaan, produk, dan institusi yang berinteraksi satu sama lain, masing-masing

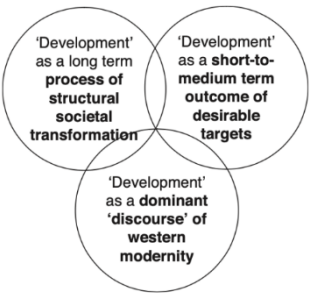
beradaptasi dengan keadaan yang berubah saat mereka melakukannya. Jaringan agen adaptif ini berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan sistem adaptif yang kompleks dari jenis yang dipelajari. Profesi ekonomi arus utama lamban dalam menerima ide-ide ini, tetapi untungnya para ilmuwan telah mempelajari sistem adaptif yang kompleks setidaknya selama tiga puluh tahun dan mereka telah membuat kemajuan yang cukup besar dalam menjelaskan sifat-sifatnya. Terlepas dari keragaman yang sangat besar dari sistem ini, mereka memiliki beberapa karakteristik penting yang sama, berdasarkan matematika yang mendasarinya. Ada alasan teoretis dan empiris yang baik untuk berpikir bahwa sistem ekonomi dan sosial mungkin berbagi karakteristik ini, dan lintasan dunia nyata dari sistem ekonomi dan sosial tampaknya lebih cocok dengan sifat sistem adaptif yang kompleks daripada yang cocok dengan model arus utama yang sederhana.

Ekonomi arus utama mengalami kesulitan menjelaskan bagaimana sistem ekonomi dan sosial berkembang untuk menciptakan kapasitas ini, dan khususnya model ekonomi kita kesulitan menjelaskan mengapa beberapa negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sementara yang lain tidak. Hal ini sebagian karena para ekonom pada umumnya terpaku pada model yang dapat dengan mudah diselesaikan secara matematis. Sementara itu, telah berkembang gerakan dalam fisika, biologi, dan beberapa ilmu sosial lainnya, yang sering disebut ilmu kompleksitas. Beberapa ekonom terutama Eric Beinhocker dan Tim Harford telah mulai membuat alasan yang menarik untuk membawa ide-ide ini lebih terpusat ke dalam analisis kita tentang sistem ekonomi dan sosial. Salah satu pelajaran utama dari teori kompleksitas adalah bahwa sistem adaptif yang kompleks dapat memiliki properti seluruh sistem yang tidak sesuai dengan properti komponen individual.

Pandangan pengembangan ini sebagai properti yang muncul dari suatu sistem sesuai dengan definisi pembangunan yang masuk akal yang dijelaskan sebelumnya. Pembangunan lebih dari sekedar

peningkatan kesejahteraan manusia, pembangunan juga menggambarkan kapasitas sistem untuk menyediakan keadaan bagi kesejahteraan yang berkelanjutan. Pengembangan adalah karakteristik dari sistem, perbaikan berkelanjutan dalam kesejahteraan individu adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilainya. Hal ini berimplikasi penting bagi kebijakan pembangunan, baik bagi negara-negara berkembang sendiri yang ingin menempatkan ekonomi dan masyarakat mereka ke jalur pembangunan yang lebih cepat, maupun bagi pihak luar yang ingin membantu proses tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 proposisi utama terkait konsep pembangunan. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa anggota komunitas pembangunan akan menolak satu atau lebih dari ini, sementara yang lain akan sangat setuju. Bahkan dalam konseptualisasi yang diperdebatkan secara individual ada ruang untuk keragaman pandangan yang cukup besar, dan aliran pemikiran yang berbeda juga cenderung tumpang tindih. Perdebatan definisi yang sangat beragam ini mencakup kesepakatan umum tentang pandangan bahwa pembangunan mencakup perubahan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek masyarakat manusia. Dimensi pembangunan sangat beragam, termasuk struktur ekonomi, sosial, politik, hukum dan kelembagaan, teknologi dalam berbagai bentuk (termasuk ilmu fisika atau alam, teknik dan komunikasi), lingkungan, agama, seni dan budaya. Ada 3 definisi yang dapat dilihat dari pembangunan yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.3 Definisi Pembangunan

Yang pertama adalah sejarah dan jangka panjang dan bisa dibilang relatif bebas nilai, pembangunan sebagai proses perubahan. Yang kedua terkait dengan kebijakan dan evaluatif atau dipimpin indikator, didasarkan pada pertimbangan nilai, dan memiliki jangka waktu jangka pendek hingga menengah, pembangunan seperti MDGs, misalnya. Yang ketiga adalah post-modernis, menarik perhatian pada konsepsi pembangunan yang etnosentris dan sarat ideologis Barat dan meningkatkan kemungkinan konsepsi alternatif.

Konseptualisasi pertama adalah bahwa pembangunan adalah proses perubahan struktural masyarakat. Thomas (2000, 2004) menyebut makna pembangunan ini sebagai suatu proses perubahan sejarah. Pandangan ini, tentang 'transformasi struktural' dan 'transformasi ekonomi dan masyarakat jangka panjang', seperti yang dicatat Gore, adalah salah satu yang mendominasi pada tahun 1950-an dan 1960-an pada khususnya. Saat ini, orang mungkin berargumen bahwa definisi pembangunan ini ditekankan oleh bagian akademik atau penelitian dari komunitas pembangunan, tetapi ada sedikit penekanan pada perspektif ini di bagian praktisi dari komunitas pembangunan.

Karakteristik utama dari perspektif ini adalah fokusnya pada proses perubahan struktural masyarakat, bersifat historis dan memiliki pandangan jangka panjang. Ini berarti bahwa pergeseran masyarakat besar dalam satu dimensi, misalnya dari masyarakat pedesaan atau masyarakat berbasis pertanian ke perkotaan atau masyarakat berbasis industri (yang kadang-kadang disebut pergeseran dari karakteristik tradisional ke modern), juga akan terjadi implikasi radikal dalam dimensi lain, seperti perubahan struktural masyarakat dalam posisi masing-masing kelas dan kelompok dalam hubungan produksi misalnya. Ini berarti bahwa pembangunan melibatkan perubahan struktur sosio-ekonomi, termasuk kepemilikan, organisasi produksi, teknologi, struktur kelembagaan dan hukum.

Dalam perkembangan konseptualisasi ini berkaitan dengan pandangan yang luas tentang perubahan sosial

ekonomi yang beragam. Prosesnya tidak berhubungan dengan serangkaian tujuan tertentu dan karenanya tidak harus bersifat preskriptif. Sama halnya, ia tidak mendasarkan analisisnya pada harapan apa pun bahwa semua masyarakat akan mengikuti proses pembangunan yang kira-kira sama.

Semua negara berubah dari waktu ke waktu, dan umumnya mengalami pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial. Proses ini telah terjadi selama berabad-abad, dan dapat diterima secara umum sebagai pembangunan dalam konteks diskusi ini. Perspektif tentang pembangunan ini tidak harus terkait dengan perubahan yang disengaja atau baik. Memang, dalam beberapa kasus pembangunan melibatkan kemunduran, krisis dan situasi problematis lainnya, tetapi semua ini dapat diakomodasi dalam perspektif perubahan sosial-ekonomi yang luas ini.

Terlepas dari sifatnya yang umumnya non-preskriptif, pendekatan ini memiliki resonansi yang kuat dengan meta-narasi yang mendominasi. Ini adalah visi besar transformasi masyarakat, baik transformasi yang diinginkan sebagai modernisasi, atau transformasi yang diinginkan sebagai proses emansipasi dari keterbelakangan. Ini adalah perspektif-perspektif berbeda yang, secara umum, berusaha menentukan satu jalur umum mereka sendiri menuju masyarakat industri untuk negara-negara yang baru merdeka. Meskipun meta-narasi ini memiliki resonansi yang kuat dengan definisi pembangunan sebagai perubahan struktural masyarakat, mereka dianggap tidak memuaskan dalam kekuatan penjelas pada akhir 1980-an. Hickey dan Mohan (2003) berpendapat bahwa kegagalan pendekatan teori pembangunan ini adalah salah satu alasan mengapa terjadi pergeseran dari definisi pembangunan sebagai hal yang bersamaan dengan perubahan struktural.

Perspektif kedua tentang pembangunan dapat dilihat dari beberapa kritik yang telah diuraikan di atas. Thomas (2000, 2004) mencirikan pendekatan kedua ini sebagai visi atau ukuran perubahan progresif dan Gore (2000) menghubungkannya dengan penilaian kinerja.

Pandangan ini lebih sempit definisinya dan bersifat teknokratis atau instrumental – memang, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa pandangan ini terlalu teknokratis. Pada tingkat yang paling dasar, ini hanya berkaitan dengan pembangunan yang terjadi dalam kerangka indikator kinerja jangka pendek hingga menengah, tujuan atau hasil yang dapat diukur dan dibandingkan dengan target (misalnya perubahan dalam tingkat kemiskinan atau pendapatan). Oleh karena itu, ia memiliki elemen yang jauh lebih penting yang cenderung disukai oleh para praktisi dalam komunitas pembangunan terutama di badan-badan pembangunan internasional. Tujuan pengurangan kemiskinan pada umumnya, dan MDG pada khususnya, sekarang memainkan peran utama dalam pemikiran internasional.

Fitur utama dari perspektif kedua ini adalah fokusnya pada hasil perubahan sehingga memiliki pandangan jangka pendek yang relatif, membuat beberapa komentator, seperti Gore, melabelinya sebagai "ahistoris". Ini agak bermasalah bagi banyak anggota komunitas pembangunan yang lebih akademis karena mengandaikan serangkaian tujuan atau sasaran (pada dasarnya birokrasi atau pemerintah) yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang yang dianggap mendapat manfaat dari pembangunan. Artinya, ada anggapan paternalistik tentang apa yang baik untuk kesejahteraan manusia berdasarkan seperangkat nilai dan karakteristik universal. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kepemilikan tidak begitu banyak dalam konteks pemerintah atau negara tetapi lebih dalam konteks masyarakat, dan orang miskin pada khususnya. Dengan kata lain, ada masalah tentang tujuan dan nilai siapa yang diungkapkan dalam konteks pendekatan pembangunan yang kedua ini, dan apakah artikulasi tujuan itu dalam arti apa pun demokratis atau melibatkan partisipasi efektif masyarakat sipil. Ada kekhawatiran bahwa pandangan pembangunan jangka pendek dan instrumental ini kehilangan visi besar transformasi masyarakat yang disorot Gore, dan memisahkan konsepsi pembangunan dari struktur sosio-ekonomi, hubungan sosial dan politik.

Hal ini menggemakan kekhawatiran bahwa penelitian dapat bertindak untuk mendepolitisasi pembangunan dengan mengambil pendekatan teknokratis (Ferguson, 1994). Ada juga kekhawatiran besar bahwa fokus semata-mata pada kemiskinan (atau, pada periode waktu sebelumnya, pada pertumbuhan ekonomi) akan menyebabkan pengabaian dimensi pembangunan lain yang penting dan saling terkait.

Konseptualisasi pembangunan yang ketiga menggunakan pendekatan yang sangat berbeda sehingga perbandingan langsung dengan dua lainnya yang diuraikan dalam bab ini sulit dilakukan. Untuk alasan ini kami bermaksud untuk memberikan perhatian lebih dari pendekatan sebelumnya.

Dua karakterisasi pembangunan kita yang pertama masing-masing didasarkan pada visi perubahan dan hasil. Definisi ketiga didasarkan pada pandangan bahwa pembangunan terdiri dari perubahan yang buruk dan hasil yang buruk melalui pemaksaan gagasan etnosentris Barat tentang pembangunan di Dunia Ketiga. Ini adalah konseptualisasi pembangunan pasca-modern (seseorang mungkin juga menyebut ini sebagai posisi pasca-pembangunan, pasca-kolonial atau pasca-strukturalis').

Pendekatan pasca-modern bukanlah konseptualisasi pembangunan sebagai serangan frontal terhadap ‘industri pembangunan’ (termasuk peneliti, praktisi, dan lembaga bantuan). Pendekatan 'pasca-modern' antara lain diambil dari Michel Foucault (1966, 1969). Elemen kunci dari pendekatan ini adalah, bagi post-modernis, pembangunan (dan kemiskinan) adalah konstruksi sosial yang tidak ada dalam pengertian objektif di luar wacana (kumpulan ide, konsep, dan teori) dan yang hanya dapat mengetahui realitas melalui wacana. Dalam pendekatan ini tidak ada yang namanya 'realitas objektif.

Konseptualisasi pertama tentang pembangunan mencakup pandangan luas tentang perubahan struktural dengan dua alur yang satu cenderung bersifat preskriptif dan yang lainnya non-preskriptif. Deskripsi yang lebih preskriptif dapat dikaitkan dengan teori pembangunan

yang mencakup konsep modernisasi (yaitu memiliki tipe ideal yang diharapkan sebagian besar negara berkembang dalam jangka panjang) dengan kontribusi signifikan dari ilmu politik (Apter, 1967) dan dari ekonomi atau sejarah ekonomi (Rostow, 1960). Ini adalah yang pertama dari dua deksripsi ini dalam konseptualisasi pertama, dan konseptualisasi kedua, yang menurut post-modernis menyiratkan bahwa beberapa orang dan negara lebih rendah dari orang lain yang lebih maju. Pandangan post-modernis akan menyarankan bahwa mereka yang membangun konsep atau wacana (seperti, misalnya, dalam persepsi keterbelakangan beberapa komunitas pedesaan dalam hal teknologi produksi pertanian) mengingat hal ini melekat unsur inferioritas-superioritas. Memang, pusat kritik pasca-modern adalah bahwa pembangunan telah didefinisikan sebagai sinonim dengan modernitas yang disajikan dalam wacana sebagai kondisi superior. Hal ini menjadi inti kutukan para ahli teori pasca-modern terhadap pembangunan sebagai wacana yang dibangun di Utara sebagai modernitas dan dipaksakan di Selatan. Wacana dibangun secara sosial dan memberi nilai pada aset tertentu yang tidak dimiliki Selatan. Dengan demikian, dikatakan, Selatan dipandang sebagai inferior. Misalnya, pendekatan pengobatan tradisional atau non-modern/non-Barat, atau aspek masyarakat lainnya, dianggap inferior. Edward Said, yang telah mengembangkan beberapa gagasan ini, berpendapat bahwa representasi politik-intelektual Barat tentang Dunia Ketiga telah menjadi bagian integral untuk mensubordinasi Dunia Ketiga melalui konsep orientalisme.

Kritik terhadap konseptualisasi pembangunan pasca-modern biasanya berfokus pada nihilisme yang dirasakannya, perayaannya terhadap perampasan yang parah sebagai bentuk otonomi budaya, gagasan romantisnya tentang orang biadab yang mulia, dan asumsi bahwa semua gerakan sosial Selatan bersifat emansipatoris. Post-modernisme juga menderita kontradiksi internal (Foucault menyebutnya 'kontradiksi performatif'), yaitu jika kita hanya dapat mengetahui realitas melalui wacana lalu mengapa kita harus mempercayai satu akun (seperti post-modernisme) lebih dari yang.

Daftar Pustaka

Ahmad, M. I. S., Mustari, S. E., & Hasan, M. (2020). *Pengantar Manajemen*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Burkey, S. (1993). *People First: A Guide to Self-reliance, Participatory Rural Development.* London: Zed books.

Chambers, R. (2004). Ideas for Development. *IDS Working Paper 238*. Sussex: IDS.

Cowen, M., & Shenton, R. (1998). *Doctrines of Development*. London: Routledge.

Gore, C. (2000). The Rise and Fall of the Washington Consensus as a Paradigm for Developing Countries'. *World Development, 28*(5), 789-804.

Gran, G. (1983). *Development by People: Citizen Construction of a Just World*. New York: Praeger.

Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: Pustaka Taman Ilmu.

Hasan, M. (2018). Pendidikan Untuk Semua: Pembangunan dan Pendidikan Dalam Perspektif Ideologi-Ideologi Pendidikan. In *Prosiding Seminar Nasional Administrasi Pendidikan & Manajemen Pendidikan* (pp. 10-17).

Hasan, M., Alim, A. M. S., Alfiani, A. S. M., Sachrir, M. I., Shafar, M. R., Hanim, N. F., ... & Audia, S. R. (2020). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Hasan, M., Hartoto, H., Abdelina, A., Riyaldi, M. H., Aswanto, A., Akbar, T., ... & Nugroho, L. (2022). Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis. Bandung: Widina Media Utama.

Hickey, S., & Mohan, G. (2003) Relocating Participation within a Radical Politics of Development: Citizenship and Critical Modernism. Draft Working Paper Prepared for *Conference on 'Participation: From Tyranny to Transformation? Exploring New Approaches to Participation in Development'*, 27-28 February 2003, University of Manchester, Manchester.

Kanbur, R. (2006). *What's Social Policy got to do with Economic Growth?* Available at http://www.arts.cornell.edu/poverty/kanbur/ (accessed November 20, 2022).

Mahmoud, F. (1991). *African Women and Feminists Schools of Thought*. In Suliman, M. (ed.)

Newman, W.H. (1953). Administrative Action. New York: Prentice Hall Inc.

Pfiffner, J.M., & Presthus, R.V. (1960). *Public Administration Forthteen Edition*. New York: The Ronald Press Company.

Rogers, R. (1990). *Return Migration, Migrants' Savings and Sending Countries' Economic Development: Lessons from Europe*.

Rostow, W.W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.

Seers, D. (1972). What are we Trying to Measure?. *Journal of Development Studies, 8*(3), 21-36.

Simon, H.A., Smithburg, D.W., & Thompson, V.A. (1950). *Public Administration*. New York: Alfred A. Knopf.

Tahir, T., Dinar, M., Ahmad, M. I. S., Hasan, M., Ilyas, M., & Arisah, N. (2022). *Ekonomi Pembangunan Teori dan Aplikasi*. Penerbit Tahta Media Group.

Thomas, A. (2000). Development as Practice in a Liberal Capitalist World. *Journal of International Development, 12(*6), 773-787.

Thomas, A. (2004) The Study of Development. Paper prepared for *DSA Annual Conference*, 6 November, Church House, London.

Profil Penulis



Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd.

Lahir di Ujung Pandang, 6 September 1985. Merupakan dosen tetap dan peneliti di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri makassar, Indonesia (2007), gelar magister Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Makassar, Indonesia (2009), dan gelar Dr. (Doktor) dalam bidang Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Makassar, Indonesia (2020). Tahun 2020 hingga tahun 2024 menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Sebagai peneliti yang produktif, telah menghasilkan lebih dari 100 artikel penelitian, yang terbit pada jurnal dan prosiding, baik yang berskala nasional maupun internasional. Sebagai dosen yang produktif, telah menghasilkan puluhan buku, baik yang berupa buku ajar, buku referensi, dan buku monograf. Selain itu telah memiliki puluhan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Muhammad Hasan merupakan editor maupun reviewer pada puluhan jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Minat kajian utama riset Muhammad Hasan adalah bidang Pendidikan Ekonomi, Literasi Ekonomi, Pendidikan Informal, Transfer Pengetahuan, Bisnis dan Kewirausahaan. Disertasi Muhammad Hasan adalah tentang Literasi dan Perilaku Ekonomi, yang mengkaji transfer pengetahuan dalam perspektif pendidikan ekonomi informal yang terjadi pada rumah tangga keluarga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga dengan kajian tersebut membuat latar belakang keilmuannya lebih beragam dalam perspektif multiparadigma, khususnya dalam paradigma sosial. Muhammad Hasan sangat aktif berorganisasi sehingga saat ini juga merupakan anggota dari beberapa organisasi profesi dan keilmuan, baik yang berskala nasional maupun internasional karena prinsipnya adalah kolaborasi merupakan kunci sukses dalam karir akademik sebagai dosen dan peneliti.

Email Penulis: m.hasan@unm.ac.id

2

KONSEP DASAR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Rosidah, S.Sos., M.Si
Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung

Pendahuluan

Ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, tentunya termasuk didalamnya Ilmu administrasi. Hal ini merupakan tantangan bagi ilmu administrasi dalam memenuhi tantangan yang kesemuanya berkisar pada kepentingan umat manusia.

Pada Administrasi pembangunan memiliki pendekatan yang pada perkembangannya telah telah tumbuh pada disiplin ilmu pengetahuan dengan mengembangkan peralatan analisis dan penyusunan model, biarpun masih jauh dari memadai dalam administrasi pembangunan. Sondang P. Siagian. Administrasi pembangunan meliputi dua pengertian yaitu tentang Administrasi dan Pembangunan.

Perkembangan Administrasi yang merupakan proses kerjasama dalam suatu organisasi yang bertujuan efektif dan efisien. Tentunya sangat beperngaruh dalam perkembangan pembangunan. Pendapat Herbert A. Simons: "*Administrations can be defined as the activities of group cooperating to accomplish common goals* ". Memunjukkan bahwa administrasi dapat merumuskan segala kegiatan kelompok yang bekerjasama untuk dapat mencapai tujuan-tujuan bersama. Kemudian pendapat ari Leonard B. White: *"Administrations can be defined as the*

activities of groups efforts, public or provate, civil or military " . Hal ini menunjukan bahawa administasi merupakan suatu proses yang pada umumnya ada pada setiap usaha di dalam kelompok – kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, didalam organisasi dengan ukuran besar atau kecil. Dan pada pendapat Sondang P. Siagian : " *Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya .*

Definisi dari Siagian berpendapat tentang Pembanguan sebagai suatu usaha atau rangkaian rbangsa, Negara dan pemerintah, menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa *(Nation Building*) . Dalam pendapatnya juga menyatakan bahwa paling sedikit ada tujuh pokok pikiram yang muncul dalam definisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per defnisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan serangkaian yang dilakukan dalam pembangunan yang terus menerus dan melindungi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara seperti melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana Pengamalan dalam Sila Pancasila yang meliputi:

1. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain mencakup tanggungjawab bersama dari semua golongan yang mencakup semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang

berlandaskan landasan moral, etik dan spiritual yang kokoh untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan Pancasila

2. Pengamalan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara sehingga ketidak adilan bisa dihapuskan.
3. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia, diantaranya mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara sehingga makin kuat rasa kesetiakawanan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
4. Pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang antara lain mencakup makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik demokrasi Pncasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab politik warga Negara serta ikut sertanya masyarakat dalam pelaksanaan politik di Indonesia.
5. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada tercapainya kemakmuran yang adil dan menyeluruh Rakyat Indonesia.

Berdasarkan tujuan yang tercantum didalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bahwa tugas pembangunan nasional adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyskat dan harus memiliki keadilan tampa membedakan suku, agama dan ras sehingga tujuan dari kemerdekaan Republik Indonesia bisa terwujud.

Dalam pembangunan nasional memiliki asas beberapa prinsip pokok yang diterapkan dan menjadi dasar dalam sebuah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Adapun asas-asas antara lain:

1. Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa : bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakan dan dikendalikan oleh keimanan dna ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Asas Manfaat : bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kegiatan kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga Negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa.
3. Asasa Demokrasi Pancasila : bahwa upaya dan tujuan dalam pembangunan nasional akan meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Asas adil dan merata : bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyararakat dan seluruh wilayah tanah air dimana setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan Negara.
5. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan : bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai

kepentingan dunia dan akhirat, material dan spriritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan Negara, pusat dan daerah serta antar daerah, kepentingan perikehidupan darat dan dirgantara serta kepentingan nasional dan internasional.

6. Asas Hukum : bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga Negara dan penyelenggara Negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta Negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hokum.
7. Asas Kemandirian : bahwa pembangunan nasional berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa
8. Asas Kejuangan : bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan penyelenggara Negara dan msyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan/atau golongan
9. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : bahwa agar pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir dan batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaranya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggungjawab dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Pembangunan nasional merupakan pengamalan dari sila-sila pancasila sehingga masyarakat mamiliki mental yang kuat untuk dapat menghadapi perkambangan pembangunan yang tentunya akan menggulirkan etika dan mental masyarakat dengan persaingan dalam dunia globalisasi. Pembangunan yang memiliki dedikasi dan mental yang kuat tentunya akan menjadikan pembangunan bukan pembanguanan fisik saja tetapi

mampu membangun spiritual yang jelas-jelas sangat berpengaruh kepada kemajuan pembangunan suatu bangsa.

Pembangunan Administrasi

Pada tahun 1992 muncul paradigma administrasi publik yang bersifat reformatif yaitu *reinventing government*. Paradigma ini dicetuskan oleh Osborne dan Gaebler (2017) kemudian dioperasionalkan Osborne dan Plastrik (2017). Pada paradigma ini pemerintah harus bersifat:

1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan

   Haruslah menjadi pengarah dari para pelaksana.

2. Pemerintah sebagai milik masyarakat

   Haruslah lebih memberdayakan masyarakat ketimbang terus menerus melayani.

3. Pemerintah sebagai institusi yang hidup dan kompetisi

   Haruslah menyuntikkan semangat persaingan kepada masyarakat untuk mengembangkan dirinya dengan menghadirkan lembaga swasta dalam menangani urusan-urusan yang biasanya dimonopoli pemerintah.

4. Pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai misi

   Haruslah lebih memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berkreasi, bukan mengaturnya dengan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang ketat.

5. Pemerintah sebagai sebuah pabrik yang berorientasi kepada hasil dalam strategi pembiayaannya.

6. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat

   Haruslah lebih mementingkan kepuasan pelanggan, bukan hanya memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi.

7. Pemerintah sebagai badan usaha

   Haruslah pandai-pandai mencari uang bukan hanya pintar membelanjakannya.

8. Pemerintaha sebagai yang memiliki daya antisipatif

   Harus mencegah dari pada menanggulangi.

9. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan

   Harus menggeser pola kerja hirarki ke model kerja partisipasi dan kerja sama.

10. Pemerintah sebagai pihak yang berorientasi kepada pasar.

11. Harus mendongkrak perubahan lewat penguasaannya terhadap mekanisme pasar. (Pasolong, 2017: 40-41)

Paradigma *Reinveinting Government* dikenal juga *New Public Management* (NPM). Paradigma di atas menjadi populer sebagai prinsip *good governance*. Dalam paradigma ini diungkapkan bahwa ada tujuh prinsip dalam NPM, yaitu:

1. Pemanfaatan manajemen professional dalam sektor publik
2. Penggunaan indikator kinerja
3. Penekanan yang lebih besar pada *control output*
4. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi
5. Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil
6. Penekanan gaya sektor swasta pada penerapan manajemen
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. (Pasolong, 2017: 42-44)

Pendekatan admnistrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pula kearah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisis dan menyusun berbagai model, biarpun masih jauh memadai. Menurut *nation-building* Sondang P. Siagian (2018:4) administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu

tentang administrasi dan tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri (2017:15) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan admnistrasi yang baik.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Sedangkan menurut Sondang P.Siagian (2018) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalalah pembanguan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (kuncoro 2017:20) pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro,2018) contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2018).

Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2019 :47) pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai dengan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Gran dalam Yumono (2019 : 54).

Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik, yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat (Hudson, et al:2018). Secara umum, Infrastruktur adalah istilah yang berhubungan maknanya dengan struktur di bawah struktural *(structure beneath a structureal).* Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan *layer* (lapisan) dari struktur yang ada, Ibaratnya menyediakan *support* atau layanan (*service*).

Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. Di infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

1. Digunakan bersama-sama (*shared*) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
3. Lebih dipandang sebagai sebuah *service (considered a service)*, termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan *(device)* fisik.
4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.

5. Terpisah *(distinct)* dari struktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang-orang.

Sedangkan menurut para ahli yang lain Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial (Socrates: 2018:20).

Bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Contoh dari pembangunan fisik adalah:

1. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dan lain-lain
2. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
3. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa:

1. Pembangunan bidang keagamaan
2. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
3. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
4. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran
5. Pembuatan surat keterangan berdomisili.

Penutup

Pembangunan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara, daerah dan desa atau kelurahan karena dengan adanya suatu pembangunan yang merata di semua lini atau bidang maka sejahtera masyarakatnya, salah satu maju atau tidaknya suatu desa ditentukan dengan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik yang dilaksanakan oleh aparat desa atau aparatur pemerintah serta masyarakat pada umumnya karena suatu pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan asas pemerintahan yang baik serta menerapkan prinsip keterbukaan kepada publik serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pembangunan yang terdiri dari pembangunan fisik artinya pembangunan diluar non fisik seperti sosial, budaya dan ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara, daerah atau satuan terkecil dari suatu desa untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik lagi dari segi segi perekonomian maupun segi sosial serta budaya lainnya yang berpengaruh terhadap adanya suatu pembangunan dalam maupun luar daerah atau desa tertentu, hal ini dmaksudkan pembangunan yang merata disegala bidang merupakan pelaksanaan dari program pemerintah melalui anggaran yang telah diberikan untuk kemajuan suatu daerah atau desa yang dilaksanakan dengan semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh suatu daerah atau desa dengan melakukan semua program tersebut guna mencapai tujuan dari pada organisasi yang ingin dicapai dari suatu masyarakat yang ingin ada kemajuan. Dengan Administrasi yang baik, maka pembangunan akan memenuhi sasaran yang akan dituju. Karena keterkaitan administrasi dengan pembangunan tentunya dapat mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

Daftar Pustaka

Arsiyah. 2019. Pemberdayaan Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Wacana* Vol. 12(2).

Hagul, Peter.,2019. Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat. CV Rajawali. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara R.I .1996 Sistem Admiistrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, Gunung Agung

Listyaningsih. 2018. Administrasi Pembangunan; Pendekatan Konsep dan Implementasi.Yogyakarta : Graha Ilmu

Mardikanto. 2019. PembangunanBerbasis Masyarakat. Bandung : CV. Alfabeta.

Margono, S. 2018. Membentuk Pola Prilaku Manusia Pembangunan. IPB. Press.

Pasolong,Harbani,. 2019 Teori Administrasi Publik, Bandung, CV. Alfabeta

Siagian.Sonang 2020, Administrasi Pembangunan, Jakarta, Bumi Aksara

Suharso. 2016. Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Profil Penulis



Rosidah, S.Sos., M.Si

Lahir di Tanjung Baru pada tanggal 5 April 1976. Pendidikan penulis di mulai SDN Tanjung Baru Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Kemudian melanjutkan di SMPN Sukarame Bandar Lampung dan SMAS Gajah Mada Bandar Lampung. Jenjang Strata satu di raih di UTB Lampung (S1) dan selanjutnya jenjang strata dua diperoleh di UNILA pada Magister Ilmu Administrasi.

Organisasi Profesi yaitu: IAPA (*Indonesian Assosiation for Public Administration*). Penelitian Peneliti Pemula (Simlitabmas) tahun 2018, lalu penelitian berjudul Analisis Pelayanan BPJS Pada Rumah Sakit Graha Husada Bandar Lampung pada Jurnal Persvektive Business 2 (Ilmu Administrasi Niaga UTB), *Public Participation In Preventing Covid-19 Outbreaks In Lampung Province, Indonesia-Journal of Public Administration.* Implementasi Pelayanan Kredit Usaha Rakyat PT. Bank Rakyat Indonesia. Unit natar di Kabupaten Lampung Selatan an Jurnal Progress Administrasi Publik. Pelayanan PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung. Jurnal Progress Administrasi Publik. Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Kenakalan Pelajar Di Kabupaten Lampung Selatan Jurnal Dinamika *The Infiuence of Delivery of Female Labor (TKW) on Family Social Economic Life in Way* Jepara Sub-District, Lampung Timur District in 2014-2017.

Email Penulis: idahros40@gmail.com

3

SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Ahmad Farouq Mulku Zahari, S.Sos., M.A.P
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Pendahuluan

Pembahasan mengenai administrasi pembangunan bertalian erat dengan perjalanan konsep, dan praktek administrasi negara/publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau kehidupan umat manusia secara umum. Dalam tinjauan historis, pada dasarnya setiap manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya, terutama dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya. Bahkan sejak manusia lahir, tumbuh berkembang menjadi dewasa, sampai menutup mata (meninggal dunia), selalu membutuhkan campur tangan manusia lain. Dengan kata lain, tidak ada satupun manusia dimuka bumi yang dapat bertahan hidup melangsungkan kehidupannya tanpa adanya bantuan dan kerjasama dengan manusia lainnya.

Sudah menjadi konsekuensi sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa menjalin interaksi dan kerjasama dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi baik dalam konteks individu dalam rumah tangga, lingkungan sosial tempat bekerja, seperti; memperoleh rasa aman, ingin mendapatkan kasih sayang serta mengaktualisasikan segala potensi yang ada dalam menjalani kehidupan. Bahkan dalam tataran kenegaraan, permerintah dalam suatu negara perlu untuk menjalin hubungan diplomatik (kerjasama) dengan negara lain,

untuk mencapai kemakmuran bersama, melalui kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan dan kerjasama di bidang lainnya. Seberat apapun permasalahan yang ada dan sesulit apapun persoalan yang dihadapi akan terasa ringan jika diselesaikan secara bersama-sama. Hal inilah yang menjadi point penting adanya kerjasama baik antara individu satu dengan individu lainnya, atau antara negara satu dengan negara lainnya, sehingga diperlukan peran dari administrasi negara.

Sejak berakhirnya Perang Dunia (PD) II, kisaran tahun 1945 menyebabkan perubahan besar pada administrasi negara. Administrasi negara kembali mendapat perhatian ketika program-program sosial yang besar mulai dicanangkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi kala itu, terutama pada negara-negara yang kalah dalam perang. Misal Simon (1947) dalam (Duadji, 2014), mengemukakan pandangannya dengan mengetengahkan bahwa administrasi negara adalah berkenaan dengan pengambilan keputusan. Namun, di lain pihak Simon juga mempertanyakan keabsahan administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Di tengah-tengah berkembangnya ilmu pengetahuan serta majunya ilmu sosial lain, hal tersebut menyebabkan terjadinya krisis identitas dalam ilmu administrasi. Tidak terhenti disitu saja, para pakar administrasi negara terus mencari jalan untuk menemukan solusi.

Selain harus mengenali perilaku manusia yang semakin kompleks, untuk menjadi suatu disiplin ilmu, maka administrasi negara harus dapat mengatasi persoalan nilai dan norma dari berbagai situasi dan kondisi yang mempengaruhi administrasi itu sendiri, dalam hal ini berkenaan dengan ekologi administrasi, Dhal (1947) menegaskan bahwa administrasi sebagai suatu ilmu perlu untuk mengembangkan studi perbandingan administrasi (*Comparative Administration*), yang memang pada saat itu merupakan sesuatu yang langka dilakukan, (Duadji, 2014).

Administrasi Pembangunan Dalam Tinjauan Historis

Suatu kelaziman disiplin ilmu pengetahuan terus berkembang dari tahun ketahun, tidak terkecuali dalam ilmu administrasi pembangunan yang juga terus mengalami perkembangan. Administrasi pembangunan merupakan sarana instrumental untuk menetapkan, memantapkan serta melaksanakan tujuan nasional dalam pembangunan suatu negara. Konsep administrasi pembangunan mulai mendapatkan perhatian khusus di kalangan para ilmuwan sejak permulaan dasa warsa enam puluhan. Namun jauh sebelum itu, administrasi pembangunan sebagai suatu ide telah muncul sejak berakhirnya Perang Dunia kedua (PD II), (Siagian, 1981). Dikatakan demikian bukan tanpa dasar, di mana hal ini dapat dilihat dari munculnya pola baru dalam pelaksanaan hubungan antar bangsa di dunia. Dengan melihat pola yang ada, maka paling tidak ada dua pola yang berkembang yakni sebagai berikut:

Pola Pertama, adalah bahwa ada negara-negara yang muncul sebagai pihak pemenang dalam Perang Dunia (PD) II dan disisi lain ada negara-negara yang kalah dalam perang. Perlu diketahui bahwa dengan adanya Perang Dunia (PD) II tersebut, mengakibatkan terjadinya kekacauan dan ketidakstabilan dalam suatu negara yang terlibat perang, baik dari sisi politik, sosial maupun ekonomi. Kondisi tersebut terutama dirasakan oleh negara-negara yang kalah dalam perang. Negara-negara yang menang pun menunjukan keinginannya untuk mencoba membantu negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia (PD) II itu untuk membangun kembali puing-puing reruntuhannya. Namun, sebenarnya secara tidak langsung dengan adanya bantuan itu, menunjukkan bahwa ada hasrat dari negara yang menang untuk menguasai kembali negara-negara yang kalah perang atau negara bekas jajahan mereka sebelumnya.

Contoh nyata pada saat itu, yakni adanya usaha dari pemerintah Amerika Serikat untuk membantu negara-negara di Eropa Barat, terutama negara yang kalah dalam perang, baik sebagai bekas sekutu maupun sebagai

musuhnya, untuk membangun kembali perekonomian Eropa Barat yang hancur sebagai akibat dari perang tersebut. Sebagai upaya keseriusan dari negara 'Paman Sam' tersebut untuk membantu bangsa-bangsa di Eropa Barat melalui bantuan luar negerinya maka dibentuk Undang-Undang yang dikenal dengan '*Point Four Program'* atau biasa dikenal dengan bantuan *'Marshall Plan"* dimana jendral Marshall sebagai arsiteknya. Selain itu, nama ini juga disesuaikan dengan nama Sekretaris Amerika Serikat yaitu George Marshall, (Ngusmanto, 2015). Seiring perkembangannya ternyata bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat mendapatkan efek yang positif, melihat kondisi itu maka bantuan luar negeri yang diberikan Amerika Serikat tidak hanya sebatas pada negara-negara di Eropa Barat saja. Sehingga dengan demikian bantuan yang diberikan diperluas keseluruh dunia bahkan termasuk di beberapa negara komunis yang notabenenya bertentangan dengan ideologi Amerika Serikat yang liberal.

Pola Kedua, yakni adanya negara-negara yang baru mencul setelah terjadinya Perang Dunia (PD) II. Ini pada umumnya terletak di benua Asia dan Afrika yang notabenenya masuk dalam kategori negara-negara 'dunia ketiga' yakni negara-negara yang sedang berkembang atau sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Sementara itu, negara-negara bekas penjajah masuk dalam kategori negara maju setelah mereka memiskinkan negara jajahanya melalui kolonialisme dan imperialisme. Dengan adanya hal tersebut muncul beberapa istilah negara di dunia, yakni negara 'Dunia Pertama', Negara 'Dunia Kedua' dan Negara 'Dunia Ketiga'.

Istilah negara **Dunia Pertama** diperuntukan bagi negara-negara maju terutama yang telah mencapai tahap industrialisasi serta pendapatan perkapita masyarakatnya sangat tinggi. Istilah ini diperuntukan bagi negara-negara di Eropa Barat, seperti Amerika utara, Amerika Serikat, Kanada dan Jepang. Istilah negara **Dunia Kedua** diperuntukan bagi negara-negara yang menganut ideologi kiri atau paham sosialis/komunis

tanpa memperhatikan lagi industri dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai. Dan yang tergolong dalam negara **Dunia Ketiga** adalah negara-negara yang tidak termasuk dalam kategori Dunia Pertama maupun Dunia Kedua, yakni terutama negara-negara terbelakang yang secara geografis berada di benua Asia dan Afrika.

Lebih jauh, sudah menjadi hal yang lumrah bagi sebuah negara penjajah, demi menjaga 'eksistensi' dan 'kelangsungan penjajahannya', maka mereka melakukan pendekatan dengan gaya dan cara baru dalam menjalin hubungan dengan negara-negara bekas jajahannya. Itu semua dilakukan sebagai upaya dalam mengembangkan sumber ekonominya, karena bagaimanapun juga negara bekas jajahannya masih dapat memberikan dampak positif bagi mereka, yang mana negara bekas jajahan tersebut memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah ruah dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara penjajah sebagai sumber bahan baku untuk keberlangsungan industri mereka. Selain itu, negara bekas jajahan itu dijadikan sebagai bangsa pasar (konsumen) terutama dalam memasarkan hasil-hasil industri tersebut.

Lahirnya American Society for Public Administration (ASPA), Comparative Administration Group (CAG) dan Development Administration Group (DAG)

Administrasi pembangunan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi negara/publik. Administrasi pembangunan lahir dari adanya studi perbandingan administrasi (*Comparative Administration*), terutama dilakukan di negara-negara yang sedang berkembang (Asia dan termasuk beberapa negara di Amerika Latin). Dengan adanya kesungguhan dari para akademisi sarjana administrasi negara dalam pengembangan administrasi, maka terbentuklah Ikatan Sarjana Administrasi di Amerika Serikat yang dikenal dengan ***American Society for Public Administration*** **(ASPA)**. Keanggotaan dalam ikatan ini memiliki cukup banyak pengalaman di negara terbelakang, terutama dalam pemberian bantuan luar negeri di bidang teknik

(khususnya adminisrasi) sebingga mereka perlu untuk mengembangkan disiplin ilmu baru tersebut. Sebagai upaya tindak lanjut yang lebih sistematis dalam pengembangan administrasi, *American Society for Public Administration* (ASPA) membentuk kelompok kerja yang dinamakan ***Comparative Administration Group* (CAG)** pada tahun 1960 oleh para pakar administrasi, seperti John D. Montgomery, Dwight Waldo, William J. Siffin, George F. Grant, Edward W.Weidner, dan Fred W. Riggs, (Duadji, 2014). Pembentukan kepanitiaan CAG didasarkan atas benua-benua di dunia. Di antara panitia yang ada, panitia dari benua Asialah (*Asia Committe*) yang paling aktif dalam mengembangkan administrasi pembangunan.

Seiring perkembangannya, para ahli dari Asia pun mengalami proses pematangan, sehingga memunculkan kesadaran dan menambah keyakinan mereka dalam perbaikan administrasi serta pengembangan konsep-konsep administrasi pembangunan di Asia. Para ahli administrasi di negara Dunia Ketiga (terutama Asia) tersebut menyadari bahwa perbaikan dan pengembangan konsep-konsep adminisrtasi pembangunan di Asia tidak dapat diserahkan kepada sarjana-sarjana asing, dengan pandangan bahwa bangsa-bangsa Asia lah yang lebih mengetahui tentang seluk-beluk masalah-masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mencari cara serta solusi untuk menyelesaikannya ketimbang menyerahkan masalah-masalah itu ke pihak asing. Namun, Pandangan itu tidak hanya difokuskan pada dibidang administrasi semata, tetapi juga di bidang lain yang merupakan masalah dari mereka.

Sebagai contoh konkrit upaya yang dilakukan oleh para ahli tersebut adalah berdirinya suatu ikatan administrasi pembangunan di Asia yang dikenal dengan ***Development Administration Group* (DAG)** pada tanggal 14 Desember 1966 di Teheran, Iran. Dimana ikatan sarjana ini masih bergabung dan berada di bawah naungan ***Eastern Regional Organization for Public Administration* (EROPA)** yang merupakan suatu organisasi non

pemerintah yang bergerak dalam upaya penyempurnaan administrasi di wilayah Asia.

Development Administration Group (DAG) merupakan organisasi atau wadah yang didirikan oleh tujuh orang pelopor, yang mana mereka merupakan para ahli administrasi di Asia yang bekerja pada lembaga-lembaga administrasi negara tempat mereka berasal, (Siagian,1981). Adapun Ketujuh orang pelopor terebut adalah:

1. Dr. Iraj Ayman (Iran)
2. Dr.Ahmed (Pakistan)
3. Dr. Ajit Bannerjee (India)
4. Dr. Abelardo Samonte (Filipina)
5. Dr. S.S. Hsueh (Hong Kong)
6. Dr. Hahn-Been Lee (Korea)
7. Dr. Sondang P. Siagian (Indonesia)

Mengingat kondisi di negara-negara Asia yang sedang berkembang, serta adanya keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, DAG menyadari bahwa agar konsep mengenai administrasi pembangunan terus berkembang maka perlu ada kerjasama dengan pihak lain agar dapat diterapakan secara berkesinambungan dan mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga perlu ada kerjasama yang dilakukan dengan negara lain yang berbeda benua dan letak geografis. Kerjasama yang terjalin tidak hanya dibidang administrasi saja tetapi juga ditujukan dalam bidang lain, seperti politik, militer dan ekonomi. Pelaksanaan kerjasama di bidang administrasi didasarkan pada pandangan bahwa tanpa adanya perbaikan administrasi maka kegiatan pembangunan tidak akan berlangsung.

Bantuan Luar Negeri Bagian Dari Politik Luar Negeri

Setelah berakhirnya Perang Dunia (PD) II, terlihat adanya pola baru dalam pelaksanaan politk luar negeri yang dilaksanakan beberapa negara di dunia. Pola baru ini

merupakan langkah nyata yang mempengaruhi pula perkembangan dalam administrasi pembangunan. Pola bantuan luar negeri ini nampaknya telah menjadi hal yang universal dalam artian telah terjadi dalam beberapa negara yang ada. Ini semua merupakan cara sebuah negara dalam memainkan politik internasional sekaligus sebagai penyeimbang kekuasaan (*balance of power*) antara negara pemberi bantuan terhadap negara sipenerima bantuan (negara pengutang). Bantuan luar negeri tersebut dapat berupa 'utang' yang diberikan oleh negara pemberi utang ke negara sipenerima utang. Namun, perlu digaris bawahi bahwa utang luar negeri yang diberikan selain dapat membawa dampak positif (sesaat) juga dapat membawa dampak negatif secara terus menerus dan berkepanjangan bagi negara sipenerima utang.

Berbicara tentang utang, tentu berbeda antara utang 'individu' dengan utang dalam 'lingkup negara'. Sebuah ilustrasi, misal: seseorang mengutang (meminjam uang di sebuah Bank) maka pihak Bank tidak dapat mendikte atau mempengaruhi sipengutang untuk apa saja uang pinjaman itu digunakan, dengan kata lain sipengutang memiliki kebebasan dalam penggunaan uang pinjaman tersebut. Apabila sipengutang tidak dapat melunasi utangnya (sesuai dengan jangka waktu kesepakatan antara kedua pihak~ pengutang dengan pihak bank), maka konsekuensi yang ditanggung hanyalah individu sipengutang (tidak berdampak pada orang lain yang tidak memiliki sangkut paut dengan utang tersebut). Sementara berbicara utang dalam lingkup 'negara' dimana apabila negara sipenerima utang belum dapat melunasi utangnya (sesuai kesepakatan dengan negara sipemberi utang~ dengan tingkat bunga tertentu) maka negara sipemberi utang memiliki peluang dan kesempatan untuk mendikte negara sipenerima utang apabila utang tersebut belum dilunasi. Cara mendikte tersebut dapat berupa '*deal-deal*' dalam pengelolaan kekayaan alam negara pengutang yang berkedok investasi. Sehingga tepatlah kiranya jika, Siagian (1981), mengatakan bahwa; '*bantuan luar negeri yang diberikan sesungguhnya bukanlah untuk kepentingan nasional negara sipenerima utang, tapi*

semata-mata untuk kepentingan nasional negara sipemberi utang'. Dengan demikian, bahwa utang yang diberikan sewaktu-waktu menjadi 'bom waktu' bagi negara penerima utang, sehingga berlakulah istilah *no free lunch* atau tidak ada makan siang gratis.

Lebih lanjut, pada hakekatnya bantuan luar negeri tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, (Siagian, 1981) dan (Ngusmanto, 2015) yakni:

1. **Bantuan di Bidang Politik**, secara umum berkenaan dengan perolehan kekuasaan, dalam artian pengaruh negara pemberi bantuan terhadap negara penerima bantuan. Hal ini dapat dilihat melalui: a) mempertahankan kekuasaan kelas yang berkuasa atau kelompok elit yang dianggap sejalan atau memihak dengan kepentingan nasional negara pemberi bantuan, b) memperluas area pengaruh dalam upaya memperkuat posisi elit yang sedang berkuasa, c) berusaha melakukan pencegahan terhadap kelompok yang dicurigai menjadi lawan penguasa negara tersebut atau dengan kata lain kelompok yang tidak sejalan dengan kemauan, arahan dari negara pemberi bantuan serta menjaga sikap politisi negara yang diberi bantuan, d) upaya itu dilakukan untuk 'menyandera' dan 'mengikat' negara penerima bantuan dari pengaruh kekuasaan negara lain yang tidak satu frekuensi dengan kepentingan negara pemberi bantuan.
2. **Bantuan di Bidang Ekonomi**. Sebagaimana telah disinggung di atas, hal paling mendasar yang dapat dilihat dalam bantuan di bidang ekonomi adalah bantuan yang diberikan tidaklah gratis melainkan harus ada pengembalian berupa utang pokok disertai dengan bunga utangnya. Tidak hanya itu, pemberian utang itu juga didasari dengan motif bahwa negara yang sedang berkembang (negara penerima bantuan utang) menjadi sumber bahan mentah bagi negara pemberi bantuan dan menjadi bagian dari pemasaran produksi barang industrinya. Oleh karena bantuan ekonomi berbentuk utang, umumnya akan menjerat, mencekik, dan menjadi beban bagi generasi penerus

secara berkepanjangan dan turun-temurun. Tidak hanya sampai disitu saja, ada pembayaran lain yang berbentuk 'sikap bersahabat', dan tidak jarang dengan adanya sikap bersahabat semacam itu menyebabkan negara penerima bantuan menjadi tameng pembela kepentingan negara pemberi bantuan dalam berbagai pertemuan forum internasional.

3. **Bantuan di Bidang Militer**. Bantuan militer ini pada umumnya diberikan pada negara-negara yang sedang berkembang di mana pemerintahannya berpihak pada negara pemberi bantuan atau paling tidak bersikap tidak memihak (netral), itu dilakukan agar supaya negara penerima bantuan tetap berada dalam pengaruh negara pemberi bantuan (*sphere of influence*). Hal ini dapat dilihat dengan adanya kerjasama berupa latihan militer secara bersama-sama, pemberian hibah berupa alat tempur seperti; kapal perang, pesawat tempur ataupun tank-tank untuk keperluan latihan (dan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk perang) yang alat-alat itu relatif tidak diperlukan lagi oleh negara pemberi bantuan karena sebagian besar merupakan alat konvensional (sementara bagi negara terbelakang masih sangat berguna), penjualan senjata dan alat tempur, pemberian bantuan pendidikan militer bagi perwira menengah keatas, serta pengiriman tenaga ahli dari negara maju ke negara yang sedang berkembang sebagai upaya dalam meningkatkan profesionalisme para militer, dan
4. **Bantuan di Bidang Teknik**. Hal ini dapat berupa pengiriman para tenaga ahli (pakar) untuk menjadi konsultan di negara yang sedang berkembang. Ini biasa menjadi motif dari negara pembari bantuan untuk memberikan bantuan ke negara sedang berkembang, dalam artian bantuan itu akan diberikan dengan catatan diikutsertakan dengan konsultan di dalamnya. Selain itu juga, bantuan di bidang teknik ini berupa membangun institusi di negara yang mebutuhkan serta bantuan dalam bentuk fisik

lainnya. Bantuan dalam bidang teknik ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan administrasi pembangunan terutama bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, dan administrasi yang berupa pengiriman tenaga ahli untuk menjadi penasehat dalam perbaikan sistem administrasi dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja. Para ahli itu dipekerjakan sebagai tenaga pengajar pada lembaga pendidikan dan pelatihan atau biasa dikenal dengan **Lembaga Administrasi Negara**. Adapun lembaga administrasi negara yang ada di negara berkembang digolongkan dalam tiga bagian, (Duadji, 2014):

a. Lembaga administrasi negara yang ada merupakan bagian dari salah satu Universitas terbaik, seperti; ***College of Public Administration*** yang merupakan salah satu Fakultas pada Universitas di Filipina dan ***The School of Public Administration*** pada *Seoul National University* di Korea Selatan.

b. Lembaga administrasi negara yang merupakan bagian integral dari pemerintah. Dalam hal yang demikian biasanya Lembaga Adminisrasi Negara ditempatkan sedekat mungkin dengan pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden dan/atau Perdana Menteri) sebagaimana dalam status Lembaga Administrasi Negara yang ada di Indonesia

c. Mandiri, dengan status Universitas. Bentuk seperti ini dapat dilihat di India dengan ***The Indian Institute of Public Administration*** yang berstatus Universitas. Selain itu, bentuk seperti ini juga dapat di temui di Thailand yang memiliki suatu Lembaga Administrasi negara yang disebut dengan ***National Institute of Development Administration*** (NIDA).

Hal menarik lainnya dari pemberian bantuan luar negeri adalah dampak yang akan ditimbulkannya terutama bagi negara penerima bantuan tersebut. Merujuk pada Chalid (2006) dalam (Ngusmanto, 2015) merangkum beberapa

pengalaman atas negara pemberi bantuan yang berdampak pada negara penerima bantuan utang yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mendorong para pemimpin dunia terutama para pemimpin di negara yang sedang berkembang agar menjadi bagian dari jaringan luas yang mengutamakan kepentingan komersial negara pemberi bantuan (Amerika Serikat) dan pada akhirnya para pemimpin itu akan terjerat pada belitan utag yang akan memastikan loyalitas mereka. Sehingga pihak Amerika Serikat dapat memanfaatkannya kapanpun mereka mau (untuk memenuhi kebutuhan politik, ekonomi atau militer mereka). Sebaliknya, mereka mencoba untuk memperkuat posisi politis mereka dengan membawa kawasan industri, pembangkit tenaga listrik, dan bandar udara kepada rakyat mereka. Para pemilik perusahaan raksasa/kontruksi dari Amerika Serikat akan menjadi luar biasa kaya. Mereka memainkan peran di mana segelintir manusia berenang dalam kekayaan dan di sisi lain ada manusia yang tenggelam dalam kemiskinan, polusi, kekerasan, dan keterbelakangan.
2. Semua negara yang sedang berkembang yang menerima bantuan utang sampai kapanpun tidak akan pernah terlepas dari utang yang mereka lakukan. Dengan kata lain tidak ada satu negarapun yang bebas dari jeratan utang, dimana negara penerima utang wajib untuk mebayar utang pokoknya disertai dengan bunga utangnya.
3. Utang membuat suatu bangsa kehilangan 'harga diri' dan menurunkan derajad posisi tawarnya bagi negara-negara lain serta lembaga-lembaga internasional. Utang tidak dibuat dengan sendirinya oleh pemerintah negara yang sedang berkembang, melainkan dikondisikan dengan para pemilik uang, supaya negara yang sedang berkembang terus berutang karena memberi utang adalah suntikan kehidupan bagi negara pemberi utang.

4. Negara pemberi bantuan utang sesungguhnya tidaklah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan persolan utang bagi negara penerima utang. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana negara pengutang bisa membayar kembali tanpa peduli dampaknya bagi masyarakat, dan bagaimna agar negara pengutang untuk menambah utang atau mengambil utang yang baru lagi. Tentu ini semua tidak terlepas dari peran para 'pembisik' yang sudah didesain untuk menjalankan perannya sebagai 'konsultan' yang telah mereka datangkan sebelumnya.
5. Apabila negara pengutang tidak dapat untuk mebayar utangnya maka opsi yang diberlakukan adalah privatisasi perusahaan negara yang bukan jasa. Privatisasi dalam artian manajemen dan pengelolaannya dikelola oleh pihak swasta bukan lagi dikelola oleh negara.
6. Syarat yang harus dipenuhi negara pengutang adalah liberalisasi segala sektor yang berkaitan dengan jasa terutama menyangkut kepentingan umum, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan akan kebutuhan tenaga listrik. Adanya liberalisasi tersebut tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan biaya bagi masyarakat yang ingin membutuhkan jasa tersebut, yang sudah barang tentu akan menciptakan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Peran pemerintah dalam melayani masyarakatnya pun akan berkurang, dan inilah salah satu ciri dari penerapan paham liberalisme.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat beberapa persoalan yang dihadapi negara-negara dunia ketiga atau negara yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan dalam kegagalannya mengimplementasikan bantuan luar negeri, bukan semata-mata ketidaksiapan administrasi negara pada negara yang sedang berkembang, yang kemudian melahirkan administrasi pembangunan seperti yang telah disampaikan sebelumnya, melainkan ada penyebab lain yang tidak kalah penting, yaitu; adanya bantuan luar negeri yang tidak berwujud seratus persen (100%) dalam

bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk ‘paket’ yang berupa bantuan ekonomi, politik, militer dan teknik yang semuanya ditentukan oleh negara sipemberi bantuan dan semua paket bantuan tersbut dibiayai dan sumber dananya diambil dari bantuan/utang tersebut, sehingga negara yang sedang berkembang tidak ada pilihan lain, mau tidak mau, suka tidak suka dengan secara terpaksa menerima ‘bantuan paket’ yang telah ditetapkan. Belum lagi dengan adanya penyalahgunaan dari pihak internal negara penerima utang atas utang-utang yang diterima tersebut. Hal ini dapat berupa tindakan korupsi oleh penguasa dan kroni-kroninya, tidak jarang rakyat menjadi korban sehingga ‘kesejahteraan rakyat’ sulit untuk diwujudkan bagaikan panggang yang jauh dari api.

Daftar Pustaka

Duadji, Noverman. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Gaha Ilmu.

Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Siagian, S.P. 1981. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Profil Penulis



Ahmad Farouq Mulku Zahari, S.Sos., M.A.P

Penulis lahir di Baadia, Kota Baubau pada tanggal 28 Oktober 1993. Penulis menempuh pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Halu Oleo pada tahun 2011-2015 dan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 dengan mengambil Jurusan Administrasi Pembangunan pada Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo pada tahun 2015-2017 dan mendapatkan gelar Magister Administrasi Pembangunan (M.A.P.).

Jika Menulis adalah upaya untuk 'mengabadikan' pemikiran, sedangkan mengajar adalah upaya untuk 'mengkristalkan' pemikiran, maka penulis pun memilih kedua-duanya dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Penulis mengawali karier sebagai dosen pada tahun 2018 ketika penulis lolos pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan saat Ini penulis Menjadi Dosen PNS pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, yang berada di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Email Penulis: ahmadfarouqmulku@gmail.com

4

TUJUAN MEMPELAJARI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Pendahuluan

Implementasi program-program untuk membangun sebuah negara sudah memunculkan kebutuhan baru dalam mengembangkan sebuah sikap berdisiplin secara ilmiah dan dijadikan fasilitas untuk membangun sebuah kenegaraan ataupun kebangsaan yang dilakukan lewat pengadministrasian. Sebuah cabang studi pembelajaran bisa muncul jika rakyat pada sebuah negara memerlukan seperangkat pengetahuan lagi, dengan tidak lupa pengetahuan-pengetahuan yang terdahulu. Begitu juga pada pendisiplinan pengetahuan pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah untuk terwujudnya pembangunan-pembangunan masyarakat. Ilmu itu sekarang dikatakan menjadi "Administrasi Pembangunan".

Selaku disiplin secara ilmu, tujuan mempelajari administrasi pembangunan dijadikan orientasi mengenai bisa atau tidaknya sebuah negara untuk melakukan pembangunan pada rakyat agar bisa menjadi makmur secara menyeluruh dalam berbagai bentuk. Ketetapan dalam melakukan pembangunan yang sudah ditentukan, perencanaan membangun yang sudah dibuat, pembiayaan yang sudah disediakan, kegiatan pekerjaan yang sudah dirincikan dapat dilihat kegunaannya jika keseluruhannya sudah terlaksana secara optimal, selaras pada perencanaan sebelumnya.

Pada hakikatnya administrasi pembangunan merupakan cabang dari administrasi negara, hingga ketentuan-ketentuan umumnya yang terdapat pada administrasi publik juga diberlakukan terhadap administrasi pembangunan. Untuk menerapkan administrasi pembangunan, harus diberikan banyak perhatian-perhatian dibandingkan cuma menjelaskan pelaksanaan administrasi pemerintah pada maknanya secara luas, misalnya melakukan sesuatu agar situasi tetap aman, menghukum, serta menertibkan, melakukan pengumpulan pajak-pajak, melayani masyarakat, serta menjalin kerja sama bersama negara lainnya. Administrasi pembangunan memiliki sifat yang dinamik serta inovatif, sebab bersangkutan pada usaha untuk mengubah kehidupan-kehidupan sosial (Anggara & Sumantri, 2016).

Administrasi Pembangunan merupakan output dari pandangan-pandangan ahli-ahli yang bertujuan untuk mengembangkan administrasi yang ada pada negara-negara berkembang. Siagian (2001: 5) mengemukakan pendapatnya mengenai administrasi pembangunan, yaitu merupakan semua usaha yang dilaksanakan pada sebuah negara agar dapat berkembang, tumbuh, serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta memiliki perencanaan pada seluruh sisi hidup dalam sebuah negara yang berkaitan dengan pencapaian target yang diharapkan. Makna administrasi pembangunan yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo pada Ngusmanto (2015: 41) merupakan sebuah administrasi untuk upaya membangun kehidupan sosial serta ekonomi dan memiliki sifat yang dinamik berinovasi dan berusaha untuk merubah beragam konsep dalam hidup rakyat lewat pengerahan serta mengalokasikan sumber daya dalam membangun sebuah negara (Siagian, 2001).

Pada pertumbuhannya ahli-ahli studi administrasi publik menjabarkan makna yang tidak sama pada dua hal (Wakhid, 2017), yakni;

1. Administrasi di negara-negara yang sedang berkembang.

   Seperti yang dijabarkan oleh Fred W Riggs mengenai "Prismatic Society". Pada buku yang ia tulis itu Riggs melakukan pengembangan sebuah jenis tentang karakteristik birokrasi pada sebuah lingkungan masyarakat yang tidak ada kemajuannya (refracted type) namun tidak termasuk golongan rakyat yang belum modern dan masih menerapkan tradisinya (fused type). Jenis ini ia katakan menjadi "Sala Model" pada sebuah kawasan "rakyat yang prismatik". Jenis tersebut adalah tindakan rakyat yang masih tradisional dan mengarah pada rakyat yang masih tradisional menuju ke rakyat yang lebih memajukan kehidupannya serta sudah ada industri yang berkembang di tengah-tengah mereka.

2. Administrasi yang berada pada negara-negara sudah maju.

   Pada dua mekanisme administrasi yang tidak sama itu, ahli-ahli administrasi terdorong melakukan pengembangan pada ilmu yang terkomparatif tentang pertumbuhan administrasi yang terdapat pada negara yang tengah melakukan perkembangan serta administrasi negara-negara maju. Lalu mereka mengatakan dirinya menjadi sekelompok pembelajaran yang terkomparatif (CAG - Comparative Administration Group).

Output pada (CAG - Comparative Administration Group) memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada negara-negara berkembang, tentang karakteristik birokrasi-birokrasi pada sebuah kawasan warga yang kehidupannya kurang baik (refracted type) namun tidak termasuk ke dalam kawasan rakyat yang masih tradisional (fused type). Jenis tersebut dikatakan sebagai "Sala model" pada sebuah kawasan "rakyat yang prismatik". Kelanjutan dari pada temuan (CAG - Comparative Administration Group) memutuskan harusnya dilakukan pembentukan administrasi

pembangunan, agar dapat lebih memajukan kehidupan rakyat pada negara-negara berkembang.

Perlunya dibentuk administrasi pembangunan tersebut disebabkan beberapa alasan-alasan, antara lain:

1. Mengenai konsep studi administrasi publik yang telah lama dikuasai serta ditumbuhkan tetapi tak mudah bisa dipindahkan kepada negara-negara yang tengah melakukan pembangunan. Terdapat penyebab yang bisa menyebabkan, misalnya penyebab adanya sejarah-sejarah di masa lalu, mekanisme pemerintahan, mekanisme hukum serta undang-undang, kebudayaan, pengkonfigurasian warga, geografis, level pengetahuan, serta tahapan ekonomi negara-negara. Sehingga mekanisme administrasi negara yang harus dibuat, dilakukan pengembangan, serta dilindungi wajib berdasarkan keperluan khusus pada negara-negara tersebut, jadi bisa dilakukan pembentukan administrasi pembangunan.
2. Agar pelayanan yang dilakukan pada bagian administrasi bisa tercapai targetnya, ahli-ahli terdorong agar membuat sebuah disiplin secara ilmu yang baru dan bisa diimplemetasikan pada penyelenggaraan semua program untuk membangun beserta semua motifnya. Keutamaan berdisiplin secara ilmu yang baru itu begitu terasa sebab fakta yang ada menjabarkan mengenai negara-negara yang termasuk dalam kategori negara-negara terbelakang dan tentunya termasuk ke dalam golongan negara-negara yang paling tua di lingkup internasional. Namun karena negara tersebut sangat lama dijajah, menjadikan negara tersebut banyak ketinggalan pada beragam sisi sosial serta kehidupannya. Sadar karena ketinggalan itu, negara tersebut berusaha untuk melakukan pembangunan. Sebab dari konsep, arti, pendekatan-pendekatan, serta orientasi administrasi publik tak terlalu bisa memecahkan permasalahan-permasalahan pada saat membangun suatu negara, pakar-pakar dimotivasi untuk melakukan pengembangan sikap berdisiplin secara ilmu yang

baru lalu dikatakan menjadi administrasi pembangunan.

3. Agar studi administrasi dapat dikembangkan dengan baik dan berdasarkan tuntutan kegiatan langsung di lokasi, pakar-pakar yang memiliki pengalaman pada negara ini serta negara-negara lainnya dan telah ditempatkannya untuk pelayanan di negara asing, dirasakan perlu melakukan pengembangan ilmu yang membandingkan pada jurusan administrasi yakni, administrasi yang membangun yang sebuah targetnya dengan mengetahui hal-hal yang membedakan pada beragam manajemen administrasi publik yang diberlakukan.
4. Banyak perbedaan pada negara-negara yang maju dibandingkan negara-negara yang kurang mampu. Di sisi lain, sangat berfokus pada keutamaan kolaborasi dalam negara sebagai upaya agar program-program dalam melakukan pembangunan tetap lancar. Pada saat berusaha untuk mengembangkan pemerintahan pada sebuah negara yang tengah melakukan pembangunan patut melakukan peranannya yang begitu penting untuk melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai aparatur pemerintahan. Dalam menjembatani 2 karakteristik yang tidak sama pada administrasi negara-negara kaya dan negara-negara berkembang perlu dilakukan pengkajian studi itu sendiri yang lebih khusus dan mengarah untuk membangun yakni admninistrasi pembangunan (Utomo, 2008).

Karakteristik Administrasi Pembangunan

Pada buku Administrasi Pembangunan karya Bintoro Tjokroamidjojo menjabarkan tentang Administrasi Pembangunan yang memiliki karakteristik yang kian baik dibandingkan administrasi negara.

Adapun karakteristik yang membedakan kedua administrasi itu ditunjukkan pada ciri-ciri yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Anggara & Sumantri, 2016):

Ciri-ciri Administrasi Negara	Ciri-ciri Administrasi Pembangunan
1. Sering terdapat pada kawasan masyarakat negara-negara maju.	1. Banyak memperhatikan rakyat-rakyat yang memiliki perbedaan, utamanya pada kawasan negara-negara berkembang.
2. Ada sekelompok individu yang lebih memandang peranan administrasi negara pada mekanisme dalam merumuskan kebijakan, namun tidak terlalu menekankannya. Terdapat pula pihak yang netral pada target-target dalam membangun.	2. Sangat berperan serta memiliki kepentingan pada target-target dalam membangun dengan optimal pada pembuatan kebijakan ataupun pada pengimplementasian secara efisien. Administrasi pun terlibat untuk memberikan pengaruh pada pencapaian target-target dalam membangun rakyat serta membantu tercapainya target-target sosialisasi, ekonomi dan sebagainya yang dibuatkan kebijakan pada mekanisme pemerintahan.
3. Banyak berfokus terhadap penerapan yang baik atau efektif dibandingkan cabang-cabang program pemerintahan di masa sekarang. Berfokus pada waktu sekarang.	3. Lebih berfokus terhadap upaya-upaya yang mendukung untuk merubah pada kondisi yang dipandang optimal bagi sebuah kelompok rakyat untuk kedepannya. Berfokus pada masa mendatang.
4. Berfokus pada penugasan-penugasan yang biasanya dilakukan (rutinitas) pada saat melayani rakyat (*public service*) serta patuh pada pemerintah. Administrasi negara banyak bersifat "*Balancing Agen*" atau melayani masyarakat secara lebih luas.	4. Banyak mengacu terhadap penerapan fungsi-fungsi dalam membangun (*development functions*) yang diberikan oleh pejabat pemerintahan. Pada hal tersebut keterampilan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang membangun serta melaksanakannya dengan efisien.
5. Dampak pada semua yang dijabarkan pada poin sebelumnya, bisa dikatakan Administrasi Negara banyak memandang pada ketertiban aparat-aparat dari administrasi tersebut.	5. Administrasi patut menghubungkan dirinya pada formulasi pembuatan kebijakan yang target-targetnya adalah ekonomi, sosial. Bisa disebut juga administrasi pada kebijakan serta hal-hal yang terkandung dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.
6. Pada Administrasi Negara terdapat hal-hal yang menjadikan aparat pamerintahan hanya menjadi pelaksana saja.	6. Dalam Administrasi Pembangunan, pihak yang melaksanakan administrasi bisa dalam bentuk kelompok yang melakukan tindakan agar terjadi perubahan.
7. Banyak melakukan pendekatan-pendekatan yang resmi.	7. Banyak melakukan pendekatan pada kawasan (*Ekological Approach*). Memiliki orientasi terhadap program (*action oriented*) serta memiliki sifat untuk memecahkan permasalahan.

Ciri Perumusan Administrasi Pembangunan

Dua ciri pokok yang menjadi perbedaan serta dilihat terpenting serta memperlihatkan tentang semakin majunya pendekatan-pendekatan Administrasi Pembangunan antara lain:

1. Ciri pokok yang pertama ialah berorientasi pada upaya-upaya untuk mengubah situasi menjadi lebih kondusif. Administrasi bertujuan untuk mendukung banyaknya hal-hal yang berubah dalam beragam program ataupun bidang-bidang dalam hidup yang berhubungan serta bisa memberi akhir yang didalamnya terdapat mekanisme yang membangun.

   Thompson mengemukakan pendapatnya mengenai Administrasi Pembangunan mencakup keterampilan sebuah kelompok dalam melaksanakan "*innovate*" (melaksanakan hal-hal perubahan)

2. Ciri pokok yang kedua, pendekatan-pendekatan pada Administrasi Pembangunan mengenai diperbaikinya serta disempurnakannya administrasi berkaitan dengan faktor yang dikembangkan pada bidang-bidang lainnya, misalnya perekonomian, sosial, pemerintahan, dan sejenisnya. Upaya-upaya untuk mengubah hal-hal pada jurusan yang lain itu. Memperbaiki administrasi tidak cuma bagi kebutuhan administrasi tersebut, namun melayani administrasi yang berupaya memperbaiki serta mengubah pada bagian-bagian tersebut, agar bisa diselenggarakan dengan kian optimal. Administrasi pembangunan memiliki arti mampu dalam memberikan tampungan karena terdapatnya dampak-dampak pada pembangunan.

Montgomery serta Esman dalam Development Administration in Malaysia, menyampaikan pendapatnya yaitu "Administrasi Pembangunan mencakup memperbaiki aparat-aparat negara dan penerapannya oleh pemerintah (*The Development of Administration*) serta dapat pula memiliki makna memperbaiki dalam

menjalankan upaya untuk membangun (*Administration of The Development*) (Anggara & Sumantri, 2016).

S.P.Siagian menjabarkan dari makna Administrasi Pembangunan, yaitu: "Administrasi Pembangunan merupakan semua upaya yang dilaksanakan rakyat dalam melakukan perbaikan pada kehidupan mereka selaku negara pada beragam nilai hidup bernegara itu sebagai upaya mencapai target-target yang sudah ditetapkan (Siagian, 2001).

Keutamaan pendekatan-pendekatan terhadap administrasi pembangunan dimaknai menjadi mekanisme dalam mengendalikan upaya-upaya yang dilakukan oleh negara ataupun pemerintahan dalam merealisasikan perkembangan yang menjadi rencana yang mengarah pada sebuah kondisi yang makin kondusif. Administrasi Pembangunan dipandang kian optimal serta pada beragam prinsip hidup bernegara. Secara umum, target-target tersebut ialah membina negara (*Nation Building*) serta pertumbuhan sosial ekonomi. Pertumbuhan yang mengarah untuk maju biasa dikatakan modern oleh ahli-ahli.

Jika pengertian itu diteliti kelanjutannya maka bisa dilihat ada gagasan-gagasan yang penting yang harus dipahami jika individu membahas mengenai pembangunan.

1. Pembangunan adalah sebuah mekanisme proses. Mekanisme proses diartikan menjadi sebuah aktivitas yang selalu dilakukan; mekanisme proses tersebut bisa dikelompokkan jadi tahapan yang mandiri (*independent phase of a process*). Langkah-langkah tersebut bisa diciptakan sesuai dengan periode masa, pembiayaan, ataupun output-output yang diinginkan bisa didapatkan.
2. Pembangunan adalah upaya yang dengan sengaja dilakukan. Apabila terdapat program yang terlihat layaknya pembangunan, namun sebetulnya tidak dengan sengaja dilaksanakan serta menimbulkan masalah pada kalangan rakyat, tidak bisa dikategorikan sebagai pembangunan.

3. Pembangunan dilaksanakan sesuai rencana serta rencana tersebut berfokus terhadap perkembangan serta melakukan perubahan.
4. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernisasi pada hal ini didefinisikan menjadi metode kehidupan yang ada serta menjadi lebih optimal dibandingkan yang terdahulu dan keterampilan yang banyak berkuasa kondisi kawasan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan swa-sembada serta melakukan pengurangan pada tergantungnya terhadap kelompok lainnya.
5. Modernisasi yang diwujudkan lewat membangun tersebut memiliki sifat yang banyak dimensi. Maknanya adalah modernisasi tersebut meliputi semua nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara, yang terpokok adalah nilai perpolitikan, perekonomian, sosial-kebudayaan, tahan serta aman dalam lingkup negara serta pengadministrasian.
6. Seluruh hal-hal yang sudah dikatakan sebelumnya tertuju pada upaya pembinaan mengenai (*Nation Building*) yang selalu wajib dilakukan sebagai perwujudan target berbangsa serta bernegara yang sudah ditetapkan lebih dahulu (Wakhid, 2017) (Mehraj & Shamim, 2018).

Pada definisi-definisi itu dapat dijadikan acuan, sehingga administrasi pembangunan merupakan semua usaha masyarakat dalam melakukan perbaikan pada kehidupan sebuah negara melalui beragam nilai hidup berbangsa itu sebagai upaya perwujudan tujuan yang sudah ditetapkan.

Irving Swerdlow dan Saul M. Katz (Frederickson, 2004) (Chhotray & Stoker, 2014), mengemukakan tentang karakter-karakter administrasi pembangunan, yaitu:

1. Terdapat sebuah acuan yang mendorong pembangunan. Administrasi untuk mengubah pada kondisi yang lebih optimal. Kondisi yang semakin baik untuk negara-negara yang sedang dalam tahap perkembangan dikatakan menjadi upaya yang mengarah pada modernitas, membangun negara,

serta membangun sosial perekonomian. Pada administrasi pembangunan, terdapat hal-hal yang menjabarkan tentang hubungan administrasi bersama nilai- nilai yang membangun pada bagian pemerintahan, perekonomian, sosial dan kebudayaan, serta sejenisnya.

2. Terdapat peranan pihak yang melakukan administrasi (administrator) menjadi elemen dalam pembangunan. Peranan dan kegunaan pemerintahan kian berkaitan pada rencana serta penerapan pembangunannya. Pihak yang melakukan administrasi bisa membuat sebuah manajemen serta mempraktekkan administrasi dalam pembinaan keterlibatan untuk pembangunan.
3. Perkembangan bisa pada studi ataupun penerapan rencana yang membangun berorientasi yang makin banyak untuk memperhatikan kepada nilai penerapan strategi. Sebuah rencana yang memiliki orientasi terhadap penerapannya sering memberikan perhatian kepada nilai-nilai administrasi pada nilai pembangunan.
4. Administrasi pembangunan tetap disesuaikan dengan nilai-nilai administrasi negara. Namun, administrasi pembangunan mempunyai karakter yang kian maju jika dibandingkan dengan administrasi negara (Wakhid, 2017).

Bintoro Tjokroamidjojo menyampaikan mengenai administrasi pembangunan yang memiliki dua fungsi yakni (Tjokroamidjojo, 1995):

1. Menyusun kebijaksanaan serta menyempurnakan administrasi dalam suatu negara (*the development of administration*), melingkupi unit pengorganisasian, lembaga, pegawai, tata laksana, serta fasilitas-fasilitas administrasi dalam mendorong pembuatan kebijaksanaan serta kegiatan-kegiatan yang membangun, dan melaksanakannya dengan efisien.

2. Administrasi dalam mekanisme pembangunan (*the administration of development process*) (Hendrayady et al., 2022) (Noviyanti, 2015).

Pada konsep tersebut, Sondang P. Siagian melakukan perumusan mengenai karakter administrasi pembangunan antara lain (Siagian, 2001):

1. Banyak memperhatikan lingkungan masyarakat yang memiliki perbedaan, utamanya pada lingkungan masyarakat pada negara-negara yang sedang dalam tahap perkembangan.
2. Sangat berperan serta memiliki kepentingan pada target untuk pembangunan, bisa pada saat merumuskan kebijakan ataupun sewaktu melaksanakan dengan efisien. Administrasi juga terlibat dalam memberikan pengaruh pada target-target yang membangun rakyat serta mendorong terwujudnya target sosial, perekonomian, dan sebagainya yang disusun kebijakannya pada mekanisme pemerintahan.
3. Memiliki orientasi terhadap upaya-upaya yang merubah pada arah kondisi yang kian optimal bagi rakyat untuk kedepannya ataupun berfokus pada masa mendatang.
4. Banyak memiliki orientasi terhadap terlaksananya fungsi-fungsi dari pembangunan oleh pemerintahan. Administrasi pembangunan banyak memiliki sifat yang menjadi sebagai development agent, yakni menyusun kebijakan yang membangun serta melaksanakannya dengan optimal.
5. Menghubungkan dirinya pada substansi-substansi dalam merumuskan kebijakan serta melaksanakan target-target yang membangun pada beragam jurusan yakni perekonomian, sosial, kebudayaan, dan sebagainya.
6. Administrator dalam aparatur pemerintah juga dapat menjadi faktor penggerak perubahan.

7. Banyak melakukan pendekatan-pendekatan terhadap lingkungan, memiliki orientasi terhadap program, serta memiliki sifat yang memecahkan permasalahan. Tiga elemen itu dikatakan menjadi *mission driven* (Lim, 2015).

Tujuan dan Fungsi Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan memiliki 2 kegunaan yakni *the development of administration* serta *the administration of development*. *The development of administration* melingkupi upaya untuk menyempurnakan sebuah komunitas, membina kelembagaan yang dibutuhkan, serta mengurus fasilitas-fasilitas administrasi yang lain, sedang *the administration of development* meliputi permasalahan dalam merumuskan kebijakan serta aktivitas membangun pada beragam jurusan dan melaksanakannya dengan efisien.

Administrasi pembangunan bisa dikelompokkan jadi dua kegunaan, antara lain (Mustanir, 2022) (Noviyanti, 2015):

1. Formula-formula kebijakan negara ataupun pemerintahan bukan hanya dilaksanakan pada mekanisme administrasi, namun dilaksanakan pula pada suatu tingkatan pada mekanisme pemerintahan. Kebijakan serta kegiatan disusun pada sebuah rencana pembangunan. Proses serta metode pengerjaan pada mekanisme penelitian, penyusunan, serta mengambil ketetapan tentang kebijakan serta kegiatan untuk membangun bisa diusahakan agar menjadi lebih sempurna.
2. Penerapan pada kebijakan serta kegiatan itu dilaksanakan dengan efisien. Dalam melaksanakannya, pihak yang melakukan administrasi perlu menyusun bahan-bahan dengan sebaik-baiknya.

Kegunaan-kegunaan pada administrasi pembangunan dengan rinci, yakni:

1. Perencanaan
2. Pengerahan sumber daya
3. Pengerahan partisipasi masyarakat
4. Penganggaran
5. Pelaksanaan pembangunan
6. Koordinasi
7. Pemantauan dan evaluasi
8. Pengawasan
9. Peran informasi

Suminta mengemukakan pendapatnya mengenai faktor-faktor penyebab yang memberikan pengaruh pada administrasi pembangunan pada masing-masing negara antara lain:

1. Faktor politik sangat berkaitan pada kestabilan pada kepemerintahan. Kestabilan di bagian pemerintahan adalah sebelum terjadinya situasi yang harus dibuat sebelum kegiatan membangun itu dijalankan.
2. Faktor perekonomian adalah sebuah segi untuk membangun serta mempengaruhi yang paling menonjol dibandingkan nilai-nilai lainnya. Secara umum, negara yang masih dalam tahap perkembangan memposisikan hal-hal yang membangun menjadi prioritas utamanya.
3. Faktor sosial budaya, seperti dasar sosial budaya, memotivasi, serta pola kehidupan, kepedulian terhadap perubahan, pola pikir, metode kehidupan serta sejenisnya yang berkaitan pada permasalahan sosial.
4. Faktor perkembangan IPTEK serta lingkungan fisik. Mekanisme yang membangun memerlukan IPTEK, SDM, pelaksanaan pembangunan atau merumuskan kebijakan, SDA (*resources development*), memanfaatkan serta memelihara kawasan permukiman, serta lowongan pekerjaan atau peluang pekerjaan. Negara kita juga sangat kreatif dalam

pembangunan, namun tak didorong oleh teknologi-teknologi yang memadai.

5. Faktor institusi ataupun lembaga. Memperhatikan administrasi pembangunan pada nilai-nilai institusi merupakan cara membina lembaga agar bisa mendorong mekanisme dalam pembangunan (Saksono et al., 2022).

Pada faktor-faktor itu, aspek yang menjadi penyebab negara-negara yang sedang dalam tahap perkembangan melakukan administrasi pembangunan yang dihasilkan dari pemikiran Barat yaitu faktor perekonomian. Hal tersebut dikarenakan majunya bagian perekonomian dipandang menjadi sebuah hasil yang memuaskan dalam proses pembangunan. Tak menjadi suatu keheranan apabila di jaman orde baru, target dalam membangun negara ini cuma tertuju kepada faktor perekonomian dan tidak peduli kepada aspek-aspek lainnya. Pandangan tersebut yang menyebabkan ketergantungan perekonomian negara-negara yang sedang dalam tahap perkembangan kepada negara-negara yang sudah maju. Hal tersebut sebab negara-negara yang sedang dalam tahap perkembangan memiliki pandangan yaitu negara-negara yang maju bisa membuat teori yang baik dalam mewujudkan target yang membangun, yakni mendapat keuntungan yang sangat banyak.

Hal tersebut menjadi penyebab negara-negara yang sedang dalam tahap perkembangan mengacu kepada pandangan-pandangan negara yang maju (terkhusus negara-negara Barat, utamanya USA) dalam menjalankan teori pembangunan dalam negaranya. Persoalan tersebut merupakan saat yang tepat bagi negara maju untuk memanfaatkannya sehingga negara-negara maju dapat mengeruk habis sumber daya yang ada di negara berkembang dengan menjanjikan bantuan (Mustanir, Razak, Ikbal, et al., 2022).

Karakteristik Administrasi yang ditemukan dengan luas pada negara-negara yang sedang dalam tahap perkembangan. Heady (1995) menjabarkan 5 karakter administrasi yang menjadi indikasi dan sering ditemui

pada negara-negara berkembang (Mustanir, Razak, Koisin, et al., 2022), yakni:

1. Pola dasar (*basic pattern*) administrasi publik atau administrasi negara memiliki sifat yang menjiplak (*imitative*) dari aslinya (*indigenous*). Kingsley mengemukakan pendapatnya yaitu pada negara yang pernah dijajah, mengelompokkan penjawatan, bertindak birokrasi, serta menampilkan keikutsertaan karakter yang menjajah serta lanjutan pada administrasi yang kolonialisme. Jenis administrasi yang kolonialisme tersebut diwariskan pada administrasi dalam negara-negara yang baru saja lepas dari jajahan dan pada detik ini tetap dijadikan sebagai karakter dari birokrasi pada negara-negara berkembang.
2. Birokrasi pada negara-negara berkembang sangat kurang (*deficient*) SDM yang mampu melakukan penyelenggaraan kegiatan pembangunan. Kelemahan tersebut tidak pada jumlahnya, namun kualitasnya. Sedangkan birokrasi pada negara-negara berkembang mempekerjakan banyak individu melebihi dari yang dibutuhkan (*over staffed*). Secara umum, kondisi tersebut menjadi cermin pada situasi ataupun kualitas pendidikan pada sebuah negara. Pada fakta-fakta yang ada, kondisi itu ada pada negara kita di masa sekarang. (Kartasasmita, 1995).
3. Birokrasi banyak memiliki orientasi kepada beberapa hal lainnya dibanding ke arah
    a. Terhadap sesuatu yang sungguh-sungguh bisa memberikan hasil (*production*)
    b. *Directed*. Bermakna, birokrasi banyak berupaya mencapai targetnya sendiri daripada mencapai target-target program. Pada hal ini yang dapat menyebabkan nepotisme, menyalahgunakan kekuasaan, pejabat menjadi koruptor, serta beragam masalah dalam birokrasi lainnya, yang bisa menjadi penyebab aparatur yang birokratik pada negara-negara berkembang secara umum

kurang berkredibilitas, serta dipandang tak tahu tata krama yang baik.

4. Sangat senjangnya perilaku (kondisi) dengan faktanya (*discrepency between form and reality*).
5. Birokrasi pada negara-negara berkembang selalu berotonom, maknanya terlepas pada mekanisme pemerintahan serta tak lagi diawasi rakyat. Karakter tersebut hal hal yang diwarisi administrasi yang bersifat kolonialisme dan melakukan pemerintahan dengan terkhusus ataupun bersifat feodal pada masa kolonialisme yang selalu ada serta bersambung sesudah lepas dari jajahan. Dalam negara-negara berkembang, individu yang tinggi levelnya ataupun elit biasanya melakukan perkumpulan pada birokratik, hingga sekelompok pada luaran tersebut tak dengan mudah bisa menyaingi birokrasi pada wawasan tentang pemerintah serta berakibat dalam pengawasan jadi kurang efisien (Rafyansyah et al., 2022).

Terwujudnya hal-hal yang membangun dalam sebuah negara tak cuma dipertanggung jawabkan oleh pihak-pihak yang melakukan administrasi pembangunan, namun juga menjadi tuntutan pekerjaan seluruh unsur-unsur rakyat serta pemerintah (Mustanir, Ibrahim, et al., 2022).

Maka dari itu, administrasi pembangunan tercipta dari suatu kebutuhan negara yang masih dalam proses perkembangan dalam melakukan pembangunan serta melakukan perbaikan pada hidupnya. Di sisi lain, administrasi pembangunan tercipta pula dari pedulinya negara-negara dibumi yang pertama serta kedua (disertai beragam kebutuhan-kebutuhannya) dalam melakukan pembantuan kepada negara-negara berkembang untuk melaksanakan administrasi publik agar menjadi semakin optimal. Hal ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

1. When, kapan dimulainya perumusan administrasi pembangunan?

2. Who, siapa saja pihak-pihak yang terlibat pada administrasi pembangunan?
3. Where, dimana tempat terdapatnya administrasi pembangunan?
4. Why, mengapa kita membutuhkan administrasi pembangunan dalam sebuah negara berkembang?

Daftar Pustaka

Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). Admnistrasi Pembangunan Teori dan Praktik. In *Pustaka Setia*. Pustaka Setia.

Chhotray, V., & Stoker, G. (2014). Governance Theory and Practice. In *Human Rights and Ethics*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6433-3.ch006

Frederickson, H. G. (2004). Whatever Happened to Public Administration? Governance, Governance Everywhere. In *Centre For Public Services Organisations Seminar*. Institute of Governance Public Policy and Social Research.

Hendrayady, A., Arman, Djati, S. N., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin, Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Razak, M. R. R. (2022). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. CV.EUREKA MEDIA AKSARA. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf

Lim, T. (2015). *Buku Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Universitas Sriwijaya.

Mehraj, T., & Shamim, A. A. (2018). *Concept of Governance: An Overview*. 1–7.

Mustanir, A. (2022). *Pelayanan Publik* (A. Mustanir, M. Ibrahim, A. Sadapotto, Adnan, & I. Irmawati (eds.)). Basya Media Utama & Penerbit Qiara Media.

Mustanir, A., Ibrahim, M., Sofyan, S., & Sadapotto, A. (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan* (A. Mustanir, M. Ibrahim, I. Irmawati, Adnan, & A. Sadapotto (eds.)). Basya Media Utama & Penerbit Qiara Media.

Mustanir, A., Razak, M. R. R., Ikbal, M., Arif, M., Yuniarsih, R., Wicaksono, I., Wicaksono, F., Syamsuadi, A., Jabbar, A., Erfina, Hilman, Y. A., Sompa, A. T., Luthfi, M., & Nursetiawan, I. (2022). *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (A. Mustanir (ed.)). CV.EUREKA MEDIA AKSARA.

Mustanir, A., Razak, M. R. R., Koisin, E., Erfina, E., Fitrianto, M. R., Lestari, A., Rizkia, N. D., Wicaksono, A. S., S, M., Prastya, I. Y., Syamsuadi, A., Waliah, S., Pakpahan, R. R., Kusnadi, I. H., Rahman, M., Mouw, E., & Baihaqi, M. R. (2022). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik* (A. Hendrayady (ed.)). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Noviyanti. (2015). *Pengantar Ilmu Administrasi negara* (p. 126). UNESA.

Rafyansyah, Fad;i, Z., Almahdali, H., Tampubolon, M., Kusnadi, I. H., Irawan, B., Ismaya, Mustanir, A., Afdhal, Sari, A. R., Sakir, A. R., & Nainggolan, A. A. (2022). *Pengantar Ilmu Politik* (D. P. Sari (ed.); Vol. 1, Issue Oktober). GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

Saksono, H., Hutasoit, W. L., Jabbar, A., Curtinawati, R. F., Iskandar, A., Uang, Y., Mouw, E., Kusnadi, I. H., Mustanir, A., Razak, M. R. R., & Kraugustteeliana. (2022). *Governansi Digital* (A. Hendrayady (ed.)). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Siagian, S. P. (2001). *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Rineka Cipta.

Tjokroamidjojo, B. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES.

Utomo, T. W. W. (2008). *Administrasi Pembangunan (Ringkasan Materi dan Transparansi)*. LAN Jawa Barat.

Wakhid, A. A. (2017). Administrasi dan Pembangunan Nasional. In *Book* (Vol. 1, Issue 1). Harakindo Publishing.

Profil Penulis



Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si

Lahir di Rappang (Kab. Sidenreng Rappang, SulSel) 06 Januari 1974. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan TK Aisyiyah Palu Tahun 1980, SD Negeri 6 Rappang dan SD Negeri 3 PaluTahun 1986, SMP Negeri 3 Toli-ToliTahun 1989, SMA Negeri 1 Toli-Toli dan SMA Negeri 8 Makassar Tahun 1992, S1 Fisip UNHAS Tahun 1997 Prodi Ilmu Politik. S2 UNHAS Tahun 2003 Prodi Administrasi Pembangunan. Sekarang sedang menyelesaikan Disertasi S3 di Prodi Administrasi Publik UNM Makassar.

Pengalaman kerja – Pernah menjadi Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti Palu. Sekarang Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sebelumnya juga pernah bekerja di Konsultan baik sebagai Team Leader maupun Tenaga Ahli dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia.

Pengalaman penelitian – Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, PP Muhammadiyah juga internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi, lebih dari 27 Buku Ajar/Referensi/Monograph/Chapter serta memiliki lebih dari 50-an Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Di bidang Abdimas juga beberapa kali memperoleh Hibah dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat – Dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Kemendikbud Ristek/

Kemenristekdikti dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Penulis juga adalah seorang Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus Q1, Reviewer beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, Editorial Board & Editor in Chief di beberapa jurnal internasional & nasional. Penulis juga tercatat sebagai ilmuan dan masuk dalam Rangking Scientists Top 5000 Di Indonesia Versi Ad Scientific Index 2022 Version 1 Agustus 2022 tepatnya urutan 845.

Saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Komisariat Daerah (Komda) Kabupaten Sidrap, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) serta Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Sidrap 2022-2027.

Selain menjadi Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2016-2019, dan sekarang sebagai Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2019-2023.

Email Penulis: ahmadmustanir74@gmail.com

5

ASPEK YANG MEMPENGARUHI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Hardianti, SAP., M.AP.
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Pendahuluan

Administrasi pembangunan juga erat kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan fisik. Penyelenggaraan pembangunan perlu menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan fisik. Penyelenggaraan pembangunan juga perlu memperhatikan pembangunan sumber daya alam, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan mengubah potensi sumber dan kondisi lingkungan.

Pembinaan dan pengembangan aspek ketatanegaraan yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan meliputi pembangunan politik, ekonomi, sosial, lembaga pendidikan dan lain-lain. Proses pembaharuan dan pembangunan juga merupakan proses membangun lembaga-lembaga dalam masyarakat baru dan bahkan mungkin menghilangkan lembaga-lembaga masyarakat lama. Pengembangan kelembagaan merupakan bagian dari proses pembangunan sosial yang lebih luas. Dalam proses ini, tidak hanya institusi yang akan dibangun atau dihilangkan, tetapi juga sering terjadi perubahan pada elemen-elemen tersebut.

Administrasi pembangunan adalah suatu proses pengendalian usaha (penyelenggaraan) oleh negara/pemerintah untuk mewujudkan kemajuan terencana menuju suatu kondisi yang dianggap lebih baik dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dalam prakteknya, administrasi pembangunan di setiap negara tidak selalu sama karena terdapat adalah berbagai aspek yang mempengaruhi terselenggaranya pembangunan. Aspek-aspek tersebut meliputi: Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pengembangan IPTEK, dan Kelembagaan.

Aspek Politik

Demokrasi memiliki makna positif yang mengandung makna baik. Seorang pemimpin atau pemerintahan yang tidak menghargai demokrasi dengan sendirinya akan berkonotasi negatif atau kurang baik (Hudi, 2020). Kata demokrasi mempunyai banyak makna, tetapi satu makna yang tentu bisa kita sepakati yaitu bahwa demokrasi bisa digunakan buat menampilkan kekuasaan yang sebetulnya terdapat di tangan rakyat. (Sembiring, Sihombing dan Suriadi, 2018). Demokrasi politik menolak sistem pemusatan kekuasaan dalam satu kelompok. Terlebih sistem satu tangan ataupun otoriter. Negara Indonesia telah mempunyai sistem pemerintahan yang baik dalam trias politika yang memiliki nilai check and balances. Demokrasi politik mensyaratkan pemerataan kekuasaan politik, ialah kekuasaan wajib terletak di tangan rakyat.

Sebagian aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan penyelenggaraan pembangunan merupakan: Filsafat hidup bangsa ataupun filsafat politik warga sesuatu negeri. Perihal ini pula terpaut dengan silih ketergantungan antara sistem politik yang dianut dengan penyelenggaraan pembangunan. Komitmen elit kekuasaan ataupun elit pemerintah terhadap proses pembangunan serta kesediaan mereka guna menerima pendekatan yang tulus terhadap upaya yang sama-sama terpaut antara bermacam aspek kehidupan warga. Permasalahan yang berkaitan dengan stabilitas politik

(Pratiwi, 2021). Pembangunan di bidang politik ditunjukan guna membagikan hawa politik yang lebih menunjang upaya pembangunan. Ikatan antara proses politik serta proses administrasi serta antara politik dan birokrasi. Ikatan kebijakan luar negeri maupun pertumbuhan politik luar negara kerapkali jadi aspek politik yang mempunyai pengaruh berarti dalam penyelenggaraan pembangunan.

Ideologi politik sangat diperlukan karena merupakan dasar pembentukan negara, untuk pembentukan unit politik bangsa dan upaya pembangunan bangsa. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa ada hubungan antara pola kekuasaan yang berlaku di suatu negara yang tercermin dalam sistem politiknya, dan pelaksanaan tugas pembangunan negara tersebut. Sekadar gambaran berikut pendapat Esman yang membagi pola kekuasaan suatu negara menjadi lima macam, yaitu:

1. Oligarki konservatif
2. Sistem kepartaian yang kompetitif dan berorientasi pada kepentingan kelompok
3. Sistem partai massa yang dominan
4. Kelompok militer pembangunan otoriter
5. Pemerintahan komunis totaliter

Dengan memberikan lima jenis tersebut, dampak terhadap berbagai variabel dalam pengembangan masyarakat dapat diperkirakan. Misalnya, tipe 2 memberikan peluang yang tinggi untuk artikulasi kepentingan dan aktivitas masyarakat dalam partisipasi politik rakyat, tetapi rendah dalam kemungkinan mengembangkan prioritas yang serius dalam kebijakan sosial dan ekonomi.

Aspek politik yang perlu mendapat perhatian adalah seberapa besar sistem dan praktik pemerintahan memberikan peluang bagi proses administrasi untuk dapat memberikan kontribusi dalam proses politik. Aspek kebijakan luar negeri dan ekonomi politik suatu negara juga mempengaruhi seberapa terbuka atau tidak

terbukanya dan arah hubungan negara tersebut dengan negara lain. Administrasi dapat berorientasi ke dalam atau ke luar, misalnya dalam bidang perdagangan luar negeri, penanaman modal, hubungan ekonomi dan lain-lain.

Aspek Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bagian dari proses pembangunan sosial, politik, psikologis, budaya, administrasi dan ekonomi yang disebut pembangunan atau modernisasi. Agar kebijakan dan program pembangunan ekonomi dapat dirumuskan (dengan alat analisis ekonomi dan berdasarkan analisis ekonomi yang tepat), diperlukan administrasi pembangunan yang mampu mewujudkan tujuan dan kebijakan tersebut menjadi kenyataan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang sehat akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kondisi, pembinaan, dan pengembangan kemampuan administrasi.

Pembangunan ekonomi suatu negara pada umumnya bertujuan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi yang ditandai dengan tingkat kesempatan kerja penuh, yang berarti berkurangnya kapasitas pengangguran faktor-faktor produksi dalam perekonomian. Namun terkadang penggunaan faktor produksi dalam perekonomian berpotensi menimbulkan masalah ekonomi lainnya yaitu inflasi. Negara yang membuka keran perdagangan dengan negara lain juga kerap menghadapi masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran di mana lebih banyak uang yang mengalir keluar daripada masuk. Selama empat dekade terakhir, kebijakan moneter menjadi sorotan di kalangan pembuat kebijakan politik dan ekonomi.

Aspek ekonomi penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah stabilitas ekonomi yang dinamis. Hal ini juga perlu diperhitungkan dalam administrasi pembangunan. Penyelenggaraan yang menunjang pembangunan juga berarti upaya yang dapat menciptakan dan memelihara keadaan perekonomian

yang relatif stabil untuk memungkinkan terselenggaranya administrasi pembangunan dalam rangka mewujudkan program-program pembangunan selanjutnya. Dalam menjalankan perannya sebagai penggerak pembangunan, pemerintah dapat melakukan intervensi langsung dalam berbagai kegiatan ekonomi. Kecenderungan ini adalah bahwa pemerintah mengelola, membina, dan memiliki secara langsung berbagai kegiatan ekonomi bisnis. Hal ini dimaksudkan agar dapat merintis kegiatan ekonomi di masyarakat. Antara lain dengan menggunakan peran perusahaan negara,

Aspek penting lain dari hubungan antara ekonomi dan administrasi pembangunan adalah peningkatan pemahaman dan pengetahuan birokrasi pemerintah dalam sikap dan pengambilan keputusan terhadap hubungan ekonomi yang mendasar dan penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Aspek Sosial Budaya

Kebudayaan tidak dapat eksis tanpa masyarakat (manusia) dan tidak ada satu pun kelompok manusia, betapa terisolasi dan sederhananya kehidupan mereka tanpa kebudayaan. Semua kelompok masyarakat (manusia) pasti memiliki kebudayaan karena manusia adalah subyek kebudayaan (Sumarto, 2019). Mempelajari unsur-unsur yang terkandung dalam suatu kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia, kebudayaan yang terdapat pada semua bangsa di dunia mulai dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan sampai dengan sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Kebudayaan akan lebih dipahami apabila menjadi suatu perbuatan dan karya, bukan sekedar pengertian tetapi manfaat yang lebih besar bagi manusia.

Berbagai aspek sosial budaya perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan. Seperti halnya aspek kehidupan lainnya, proses pembangunan terjadi karena perkembangan yang saling mendukung dari berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat atau

bangsa. Bahkan proses pembangunan yang sebenarnya harus terjadi perubahan sosial budaya. Sehingga pembangunan menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju dengan sendirinya tergantung pada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya apa yang dipahami sebagai upaya pemerintah belaka. Perkembangan bergantung pada proses emansipasi diri dan bahwa partisipasi kreatif dalam proses perkembangan menjadi mungkin karena proses pematangan. Secara sederhana, aspek sosial budaya mencakup tiga hal, yaitu; Sikap, Nilai, dan Budaya.

Perkembangan bergantung pada proses emansipasi diri. Dan partisipasi kreatif dalam proses pengembangan itu menjadi mungkin karena proses pematangan. Aspek sosial budaya yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Sekat-sekat budaya apakah yang sesuai dengan landasan budaya tertentu suatu masyarakat yang menjadi penghambat suatu proses pembangunan atau usaha pembaharuan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi para pengelola yang memiliki kepentingan untuk melakukan perubahan menuju modernitas.
2. Motivasi apa yang perlu pembaharuan atau pengembangan yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan.
3. Bagaimana sikap kelompok dalam masyarakat terhadap upaya pembangunan.
4. Berbagai persoalan sosial budaya yang menonjol dan memerlukan perhatian penyelenggaraan pembangunan.

Sebagai pembatas budaya, dapat dikatakan bahwa ada tradisi tertentu, termasuk tradisi keagamaan (bukan berarti agama). Ini juga termasuk karakteristik, nilai-nilai kemanusiaan bahkan sikap hidup masyarakat yang tradisional dan tidak mendukung pembangunan. Tradisi keagamaan secara singkat dijelaskan, bahwa pertama hal ini tidak berkaitan dengan ajaran agama melainkan tradisi kehidupan kelompok manusia yang menganut

suatu agama. Karena seringkali dengan memahami atau menonjolkan prinsip-prinsip keagamaan tertentu seseorang dapat mengubah tradisi keagamaan menjadi sesuatu yang memang penting untuk inovasi dan modernisasi.

Aspek Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan teknologi telah mempengaruhi kehidupan ini dan tidak dapat dihindari, karena ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak manfaat dan mempermudah pekerjaan, proses kemajuan teknologi menghasilkan modernitas yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, perluasan atau perluasan kebudayaan, melalui kemajuan teknologi komunikasi. yang semakin canggih dan murah, perkembangan teknologi komunikasi dapat terjadi hubungan antara negara maju dan negara terbelakang yang teknik produksinya masih rendah sehingga tidak dapat dihindari(Mulyani dan Haliza, 2021). Perkembangan teknologi di suatu negara akan berkembang dengan mantap dan pesat, jika didukung oleh penguasaan dan penghayatan yang kuat terhadap khasanah ilmu-ilmu dasar. Negara harus lebih menekankan pada upaya pengembangan basis pengetahuan yang memadai dan konsisten, sehingga pertumbuhan teknologi berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat selalu didorong.

Salah satu hal yang penting dalam kerangka hubungan pembangunan iptek dan penyelenggaraan pembangunan adalah bagaimana iptek dapat menjadi sumber daya penting dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan juga perlu memperhatikan pembangunan sumber daya alam (resources development), pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan mengubah potensi sumber dan kondisi lingkungan. Keberlanjutan dan upaya pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan serta

pemanfaatannya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Masalah lingkungan utama bagi negara-negara berkembang baru justru adalah ketiadaan pembangunan, tekanan penduduk dan kesempatan kerja, serta potensi berbagai sumber pembangunan untuk dieksploitasi..

Pemerintah Indonesia merespon revolusi industri 4.0 dengan baik melalui beberapa kebijakan yang difokuskan untuk meningkatkan daya saing bangsa di tengah persaingan global (Mumtaha dan Khoiri, 2019). Dengan meningkatkan peran iptek, Indonesia akan memacu produktivitas dan secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Setidaknya, terdapat delapan strategi peningkatan peran iptek dan inovasi bagi pembangunan, pertumbuhan dan produktivitas nasional serta menjadikan Indonesia sebagai salah satu Pusat Pengembangan dan inovasi iptek di Kawasan Asia dan Dunia, antara lain:

1. Pembentukan Sistem dan Inovasi Iptek Nasional, serta inisiatif Dana Inovasi;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pembibitan SDM
3. Pengembangan teknologi berbasis potensi daerah dan budaya;
4. Pengembangan penelitian sosial-humaniora untuk mendukung inovasi dan produktivitas dalam masyarakat;
5. Optimalisasi investasi asing langsung (FDI) dan rantai nilai global (GVC) sebagai cara transfer teknologi;
6. Tiga pelembagaan spiral;
7. Perkembangan infrastruktur pendukung penelitian dan pengembangan (R&D) yang bernilai strategis;
8. Penciptaan ekosistem yang kondusif bagi teknopreneur dan startup yang sedang berkembang.

Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan antara lain pembangunan lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga sosial, pendidikan dan lain-lain. Proses pembaharuan dan pembangunan juga merupakan proses membangun pranata-pranata dalam masyarakat baru dan bahkan mungkin menghilangkan pranata-pranata sosial yang lama. Pengembangan kelembagaan merupakan bagian dari proses pembangunan sosial yang lebih luas(Sanjaya, Rusli dan Widianingsih, 2022). Proses ini tidak hanya akan membangun atau menghapuskan suatu kelembagaan, tetapi jika sering terjadi perubahan unsur-unsur kelembagaan, misalnya dalam bidang kelembagaan keluarga besar menjadi keluarga inti. Ekonomi uang sebagai institusi juga telah berkembang, sehingga ekonomi ganda menjadi sesuatu dari masa lalu.

Perhatian administrasi pembangunan terhadap aspek kelembagaan ini adalah dalam membina kelembagaan baru agar dapat lebih mendukung proses pembaharuan dan pembangunan. Dalam proses pembangunan sebagai proses perubahan sosial secara menyeluruh, dirasakan sangat penting peran organisasi tertentu yang mampu memperkenalkan, memelihara, bahkan mempertahankan pembaharuan sosial dan fisik. (Prianto dan Sulhan, 2020). Dengan itu berarti kemampuan organisasi untuk memperoleh dukungan dan hubungan dengan lingkungannya untuk penyebarluasan pembaharuan tersebut ke lingkungan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, muncul pemikiran para ahli untuk mengembangkan dan membangun lembaga tersebut. Pengembangan lembaga ini dimaksudkan sebagai perencanaan, pengaturan lembaga organisasi baru atau pembaharuan, yang meliputi perubahan nilai, fungsi, fisik dan teknologi sosial. Demikian juga untuk membina dan mengembangkan hubungan diperlukan dari lingkungan. Pengembangan lembaga ini digunakan sebagai alat untuk mendorong perubahan menuju kemajuan yang lebih diinginkan.

Metodologi yang dikembangkan untuk pengembangan kelembagaan dilakukan melalui pengembangan dan berfungsinya variabel-variabel kelembagaan. Variabel tersebut adalah kepemimpinan, doktrin, program, sumber daya dan struktur internal (Putra, Hakim dan Darmanto, 2022). Perkembangan variabel tersebut diterapkan dalam kerangka hubungan lembaga dengan lingkungannya.

Daftar Pustaka

Hudi, M. (2020) 'Peran Politik dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia', Jurnal Politik dan Sosial Madani, 12(03), hlm. 232–248. Tersedia di: https://doi.org/10.52166/madani.v12i03.2172.

Mulyani, F. dan Haliza, N. (2021) 'Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam Pendidikan', Jurnal Pendidikan dan Penyuluhan (JPDK), 3(1), hlm. 101–109. Tersedia di: https://doi.org/10.31004/jpdk.v3i1.1432.

Mumtaha, HA dan Khoiri, HA (2019) 'Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Terhadap Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce)', JURNAL PILAR TECHNOLOGY: Jurnal Ilmiah Ilmu Teknik. LPPM Universitas Merdeka Madiun. Tersedia di: https://doi.org/10.33319/piltek.v4i2.39.

Pratiwi, A. (2021) 'Kebijakan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Politik dalam Pembangunan di Indonesia', Abiwara: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, hlm. 1–14. Tersedia di: https://doi.org/10.31334/abiwara.v3i1.1847.

Prianto, A. dan Sulhan, M. (2020) 'Evaluasi kebijakan pembangunan industri di Jawa Timur dengan wawasan sumber daya manusia dalam pembangunan berkelanjutan', Publikasi: Jurnal Administrasi Publik. Universitas Merdeka Malang. Tersedia di: https://doi.org/10.26905/pjiap.v5i1.3647.

Putra, A., Hakim, H. and Darmanto, D. (2022) 'Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pengembangan Zona Integritas (ZI) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene', JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia. Universitas Terbuka, hlm. 62–74. Tersedia di: https://doi.org/10.33830/jiapi.v3i1.86.

Sanjaya, MJ, Rusli, B. and Widianingsih, I. (2022) 'Jaringan Kebijakan Dalam Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) di Kabupaten Bandung', JANE – Jurnal Administrasi Negara. Universitas Padjajaran, hal. 210. Tersedia di: https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.28693.

Sembiring, J., Sihombing, M. dan Suriadi, A. (2018) 'Analisis Perencanaan Pengembangan Lahan untuk Pembuangan Akhir Sampah', Jurnal Administrasi Publik: Jurnal Administrasi Publik. Universitas Medan Area, hal. 39. Tersedia di: https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1577.

Sumarto, S. (2019) 'Budaya, Pengertian dan Penerapannya', Jurnal Literasiologi, 1(2), hlm. 16. Tersedia di: https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49.

Profil Penulis



Hardianti, SAP., M.AP.

Ketertarikan penulis pada ilmu administrasi public terutama dalam bidang kebijakan publik dimulai pada tahun 2011. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk mengambil jurusan adminitrasi Publik pada jenjang S1 tahun 2012 dan lulus pada tahun 2016, tahun berikutnya penulis melanjutkan studi pada jenjang S2 dengan mengambil jurusan yang sama Administrasi Publik dengan konsentrasi pada kebijakan publik.

Penulis memiliki ketertarikan pada bidang penelitian dan publikasi, karena dengan terlibat pada projek penelitian, maka secara tidak langsung ikut andil dalam menuntaskan sebuah pemasalahan, dan hasil penelitian itu menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam membuat regulasi. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen yang profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang keahliannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan dibiayai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Email Penulis: hardianti_4312 2110@yahoo.co.id

6

PERMASALAHAN DALAM PEMBANGUNAN

Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Konsep Dasar Pembangunan

Konsep dasar pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan oleh setiap orang atau kelompok yang mengharapkan perubahan ke arah lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan, dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan *(continuity)* dan perubahan *(change)*, tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

Pembangunan menurut pendapat beberapa ahli dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pontoh dan Kustiwan, “pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.”
2. Kartz, “Pembangunan merupakan perubahan dari masyarakat terhadap suatu keadaan kehidupan yang kurang bernilai kepada keadaan yang lebih bernilai.”
3. Tjokrowinoto, “pembangunan merupakan :

a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

b. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan terlembaga.

c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai *(value free).*

d. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep transedental sebagai metadiciplinary phenomenon, bahkan memperoleh bentuk sebagai *ideologi, the ideology of developement.*

e. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai *(value loaded)* menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat.

f. Pembangunan menjadi *culture specific*, *situation specific, dan time specific*. Berdasarkan berbagai definisi pembangunan yang bervariasi di atas, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa pembangunan adalah kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik-nonfisik, materialspiritual, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat"

Pembangunan yang dilaksanakan harus diusahakan dan direncanakan secara sadar, artinya baik pemerintah maupun pemerintah daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (S.P. Siagian 2005). Pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan yang terencana menuju masyarakat modern (S.P. Siagian: 2012).

Dari definisi ini terlihat bahwa tidak ada negara yang dapat mencapai tujuan nasionalnya tanpa berbagai kegiatan pembangunan. Terlihat pula bahwa proses

pembangunan harus tetap dilanjutkan, karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak pernah dicapai secara mutlak. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan oleh negara untuk terus menerus menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (masyarakat) atau negara selalu berusaha untuk mengembangkan kelangsungan hidupnya untuk masa kini dan masa depan. Dan pembangunan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. proses kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Setiap negara selalu berusaha untuk apa yang disebut pembangunan.

Pembangunan adalah suatu upaya perubahan, berdasarkan pilihan posisi tertentu, yang tidak lepas dari pengalaman (sejarah), realitas situasi dan kepentingan para pihak yang mengambil keputusan pembangunan. Pembangunan memiliki arti ganda. Pertama, bahwa pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan yang berfokus pada masalah kuantitatif produksi dan penggunaan sumber daya. Kedua, pembangunan yang lebih berorientasi pada perubahan dan distribusi barang serta peningkatan hubungan sosial. Makna kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial, yang menitikberatkan pada pemerataan perubahan struktur masyarakat, yang diukur dengan pengurangan diskriminasi dan eksploitasi serta peningkatan pemerataan kesempatan dan pemerataan manfaat pembangunan di seluruh bagian masyarakat (Sudharto P. Hadi, 2000).

Menurut Adelman dalam *Fallacies in Development Theory and their Implications for Policy*, setidaknya ada tiga faktor utama yang mendorong perubahan teori dan paradigma pembangunan, yaitu :

1. Perubahan ideologi. Setiap generasi pemikir ekonomi mempunyai basis ideologi sendiri-sendiri sehingga bila terjadi perubahan basis ideologi, maka otomatis akan membawa perubahan pada kerangka teori dan kebijakan tersebut.

2. Revolusi dan inovasi teknologi yang merupakan perubahan aktivitas ekonomi karena revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan implikasi luas serta pengaruh pada perkembangan teori dan paradigma pembangunan.
3. Perubahan lingkungan internasional sebagai dampak globalisasi ekonomi yang berlangsung sangat intensif.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terjadi melalui pencarian perbaikan secara sadar dan terencana. Salah satu keberhasilan pembangunan sebuah pemerintahan dapat dinilai dari seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran. Terciptanya lapangan pekerjaan yang baru dan semakin bertambahnya lapangan pekerjaan akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja yang ada, sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indradewa dan Natha 2015).

Permasalahan dalam Pembangunan Nasional

Permasalahan pembangunan nasional merupakan *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi *riil* saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dalam upaya kemajuan pembangunan di Indonesia, masalah maupun hambatan merupakan hal yang lazim ditemukan. Masalah pembangunan di Indonesia dapat dikatakan masih berkutat pada pengelolaan sumber daya alam maupun manusia hingga kualitas pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tak dapat dimungkiri bahwa pembangunan ekonomi akan berdampak pada

kemakmuran masyarakat di suatu negara. Meski demikian, faktor kemakmuran tersebut diiringi standar kehidupan antara masyarakat menengah ke bawah dengan masyarakat menengah ke atas.

Menurut Abdul Rachim dalam buku Ekonomi Pembangunan, pembangunan ekonomi berdampak pada faktor produksi, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Berbagai faktor tersebut digabungkan untuk menghasilkan barang sebagai wujud dari fungsi produksi. Rachim menambahkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk akan menimbulkan tekanan yang besar terhadap ketersediaan alam yang ada. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas.

Kondisi demikian juga ditemukan di Indonesia. Sebab, masalah pembangunan ekonomi di Indonesia masih menjadi kendala serius, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Sebagai negara berkembang dengan 34 provinsi, pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan memiliki masalahnya masing-masing. Menurut buku Ekonomi Pembangunan oleh Bonaraja Purba, dkk., dan berbagai sumber, empat masalah tersebut diantaranya :

1. Ketimpangan Pembangunan

Fenomena ini adalah hal yang umum terjadi dalam pembangunan ekonomi, termasuk Indonesia. Ketimpangan dalam pembangunan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap daerah. Kondisi demikian secara tak langsung memunculkan kecemburuan atau ketidakpuasan masyarakat yang dikhawatirkan berlanjut pada aspek politik dan ketenteraman masyarakat itu sendiri.

Menurut Purba, dkk., ketimpangan wilayah merupakan konsekuensi logis dari pembangunan. Ketimpangan akan berubah seiring tingkat pembangunan yang dilakukan. Itulah sebabnya, pola pembangunan dan tingkat ketimpangan di berbagai negara berbeda satu sama lain.

Menurut Nadiroh (2009) Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing – masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan ketimpangan hasil pembangunan. Ketimpangan tersebut mencakup beberapa hal yaitu sebagai berikut:

a. Ketidakmerataan Pendapatan Nasional

   Menurut kriteria Bank Dunia, porsi pendapatan nasional dinikmati oleh tiga golongan masyarakat yaitu sebagai berikut.

   1) Golongan berpendapatan tinggi: 20% dari jumlah penduduk.
   2) Golongan berpendapatan menengah: 40% dari jumlah penduduk.
   3) Golongan berpendapatan rendah: 40% dari jumlah penduduk.

b. Ketidakmerataan Pendapatan Spasial

   Ketidakmerataan spasial terjadi antara penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dengan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Di Indonesia pembagian pendapatan relatif lebih merata di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan.

c. Ketidakmerataan Pendapatan Regional

   Ketidakmerataan pendapatan antarwilayah khususnya terjadi antara wilayah Jawa dengan luar Pulau Jawa. Secara umum, distribusi pendapatan di kalangan lapisan-lapisan masyarakat di luar Pulau Jawa lebih baik daripada di Pulau Jawa.

d. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial terjadi antara orang-orang desa dengan orang-orang kota dan juga kesenjangan antardaerah. Indeks mutu hidup orang-orang kota jauh lebih baik daripada penduduk yang tinggal di desa. Selain itu, kualitas hidup penduduk di kawasan timur Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan saudara-saudara mereka di kawasan barat dan tengah.

2. Kemiskinan

Masalah pembangunan di Indonesia yang satu ini masih menjadi sorotan yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Menurut Purba, dkk., kesenjangan ekonomi dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan angka kemiskinan, merupakan masalah yang kerap ditemukan pada negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan di Indonesia merupakan kesenjangan kronis sejak tahun 1960-an yang diperparah dengan adanya krisis sejak tahun 1997. Kebijakan reguler sektoral dan regional sejak tahun 1970-an hingga saat ini ternyata belum menurunkan jumlah penduduk miskin. Kondisi kemiskinan mengakibatkan daya saing nasional Indonesia melemah terhadap dunia internasional. Daya saing Indonesia yang melemah mengakibatkan turunnya citra bangsa. Oleh karena itu, masalah kemiskinan harus segera dituntaskan dan perlu mendapat perhatian serius semua pihak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan yang sama sebesar 9,54 persen. Jika dibandingkan dengan penelitian serupa yang dirilis BPS pada September 2021, maka jumlah penduduk miskin dan rasio kemiskinan pada Maret lalu mengalami penurunan. Untuk diketahui, jumlah

penduduk miskin per September tahun lalu sebesar 26,5 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan 9,71 persen.

Adapun terjadinya kemiskinan diantaranya disebabkan oleh keterbelakangan manusia dan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam sangat tergantung kemampuan produktif manusia. Jika penduduknya banyak yang miskin dan berpendidikan rendah maka akan mengakibatkan langkanya keterampilan teknik, pengetahuan, dan aktivitas kewiraswataan yang secara otomatis akan menyebabkan sumber daya alam yang tersedia justru terbengkalai, tidak berkembang, atau bahkan salah guna. Sumber daya alam ini akan memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kurangnya sumber daya alam akan menyebabkan kemiskinan karena sumber daya alam adalah sumber utama kebutuhan hidup manusia. Kemiskinan sumber daya alam merupakan sebab dan sekaligus akibat kemiskinan manusia (Jhingan, 2016:34).

Selanjutnya, penyebab lain dari kemiskinan adalah kurangnya sumber daya manusia. Jika manusia tidak memiliki keterampilan maka ia tidak akan memiliki pendapatan yang menyebabkan daya belinya berkurang sehingga masuk ke dalam lingkar kemiskinan. Ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah bahkan negara. Sumber daya manusia akan memengaruhi IPM dan dapat memengaruhi tingkat pengangguran.

3. Dilema antara pertumbuhan ekonomi dengan impor

Kegiatan ekspor dan impor mempunyai peran penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pada saat sebuah negara mempunyai keunggulan sebuah produk yang tidak bisa dihasilkan oleh negara lain dan negara tersebut membutuhkan produk, maka negara tersebut dapat mengekspornya. *Net export* akan mampu mendatangkan devisa bagi negara untuk menambah cadangan devisa dalam negeri yang nantinya akan digunakan sebagai pembayaran utang luar negeri

yang jumlahnya sangat besar dan juga devisa yang didapat dari hasil ekspor akan dimanfaatkan untuk mengimpor bahan baku dan barang modal yang belum bisa dihasilkan di dalam negeri dan diharapkan mampu memajukan pertumbuhan industri dalam negeri (Saputra, 2016).

Sektor industri di Indonesia masih bergantung pada produk luar negeri karena negara kita belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Selain itu, tingkat output di sektor pertanian dan peternakan masih rendah, sedangkan pertumbuhan penduduk kian meningkat.

4. Tingginya Angka Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap negara. Jika berbicara tentang masalah pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi, karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Lapangan kerja yang tersedia tak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan struktur penduduk yang berkaitan erat dengan aspek demografi, serta tingkat partisipasi penduduk dalam pasar kerja yang berkaitan erat dengan aspek sosial ekonomi.

Menurut Kwik Kian Gie, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Ketua Bappenas) mengemukakan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah adalah terus membesarnya jumlah pengangguran.

Menurut Sadono Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.

Penganguran adalah keadaan dimana orang ingin bekerja namun tidak mendapat pekerjaan. Di Indonesia angka pengganggguran makin meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka pengangguran Indonesia 8,42 juta orang pada periode Agustus 2022, naik dari sebelumnya 8,40 juta orang pada Februari 2022. BPS mencatat penduduk usia kerja kini berjumlah 209,4 juta orang, naik 2,71 juta orang. Dari jumlah tersebut, yang terserap menjadi angkatan kerja adalah 143,72 juta orang atau naik 3,57 juta orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 65,70 juta orang atau turun 0,86 juta orang.

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)

Arah pembangunan global saat ini merupakan pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* yang memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan, generasi yang akan datang. Budimanta (2005) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Pada bulan September 2015, Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia, telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi agenda global 2030, (Sitorus 2017).

Pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumberdaya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Tujuan tersebut bisa dicapai melalui empat elemen tujuan pembangunan berkelanjutan: (1) Pertumbuhan dan keadilan ekonomi; (2) Pembangunan sosial; (3) Konservasi

sumberdaya alam (perlindungan lingkungan); (4) Pemerintahan yang baik (good governance). Keempat elemen tersebut saling mendukung satu dengan lainnya, menciptakan tujuan pembangunan yang berkaitan dan berkelanjutan.

Sustainable Development Goals secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim. SDGs menegaskan pentingnya upaya mengakhiri kemiskinan agar dilakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial (seperti pendidikan, kesehatan, proteksi sosial, kesempatan kerja), dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan proteksi lingkungan.

SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target, yang meliputi aneka isu pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Kemiskinan *(Poverty)* – Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di setiap tempat.
2. Pangan *(Food)* – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan *(Health)*– Menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan / kesejahteraan bagi semua pada semua usia.
4. Pendidikan *(Education)* –Menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
5. Perempuan *(Women)* – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan gadis.
6. Air *(Water)*– Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua.
7. Energi *(Energy)* – Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau (terbeli), andal, berkelanjutan, dan modern, bagi semua.

8. Ekonomi *(Economy)* – Meningkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif; partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, jenis pekerjaan yang layak bag semua.
9. Infrastruktur *(Infrastructure)* – Membangun infrastuktur (prasarana) yang awet/ kuat, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung inovasi.
10. Ketidaksetaraan *(Inequality)* – Mengurangi ketidaksetaraan *(inequality)* dalam dan antar negara.
11. Pemukiman *(Habitation)* – Membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, awet/ kuat, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi *(Consumption)* – Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Iklim *(Climate)* – Mengambil langkah-langkah tindakan yang segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem Kelautan *(Marine Ecosystem)*– Melindungi dan menggunakan lautan, laut, dan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Ekosistem *(Ecosystem)* – Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan dan membalik degradasi (kerusakan) tanah, dan kehilangan biodiversitas (keragaman hayati).
16. Kelembagaan *(Institutions)* – Menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun lembaga yang efektif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan inklusif, pada semua level.
17. Keberlanjutan *(Sustainability*)– Memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi (menghidupkan kembali) kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Aditya Saputra. 2016. Pengaruh Proses dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan MNC Play Media, Jurnal Manajemen, Volume 12, Nomor 2.

Adelman, Irma, 1999. *"Fallacies In Development Theory And Their Implications For Policy," CUDARE Working Papers 25005, University of California, Berkeley, Department of Agricultural and Resource Economics.*

Badan Pusat Statistik. (2022). Tingkat Pengangguran di Indonesia. BPS. Jakarta.

Budimanta, A. 2005. Memberlanjutkan Pembangunan di Perkotaan melalui Pembangunan Berkelanjutan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21. Yogyakarta: Fakultas Arsitektur Universitas Gajah Mada.

Indradewa, I Gusti Agung dan Ketut Suardhika Natha. 2015. Pengaruh Inflasi, PDRB Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. Jurnal EP Unud, Vol. 4 (8): 923-950

Nadiroh, Fuktiatun. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah. (Online), (http://fuktia-alkarazkani. blogspot.com/2012/04/ketimpangan-pembangunan-antar-wilayah.html, diakses tanggal 28 maret 2015)

Sadono, Sukirno. 1994. Pengantar Ekonomi Makro. PT. Raja Grasindo Perseda. Jakarta.

Siagian, Sondang P 2012. Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strategi). Jakarta, Bumi Aksara.

Sondang P.Siagian, 2005. Filsafat Administrasi, Jakarta: CV. Gunung Agung.

Sustainable Development Goals (SDGs). Target tahun 2030. 2017*[Internet]. Available from: https:// www.sdg2030indonesia.org/*

Sudharto P. Hadi. 2005. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Sosial: Kuantitatif, Kualitatif dan Kaji Tindak. Undip, Semarang.

Profil Penulis



Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si

Lahir pada tanggal 18 Agustus 1991 di Pangkajene, Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan. Menempuh dan menyelesaikan SD Negeri 4 Pangsid Tahun 2003, MTs Negeri Pangsid Tahun 2006, SMA Negeri 1 Pangsid Tahun 2009, S1 STISIP Muhammadiyah Rappang Tahun 2014 Prodi Ilmu Pemerintahan. S2 UNHAS Tahun 2016 Prodi Administrasi Pembangunan. Sekarang sedang menyelesaikan Disertasi S3 di Prodi Administrasi Publik UNHAS Makassar.

Pengalaman Kerja – Pernah sebagai Jurnalis Mitra TV Ajatappareng, Konsultan *Smart Community*, Direktur FORMASI Institute, Direktur CV Indovisi Mitra Mandiri, Founder Jasa Layanan Sampah "Pappulung Aroppoe" dan saat ini sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Tahun 2019 – 2023 di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Pengalaman Organisasi – Pernah sebagai Kallolona Sidenreng Rappang Tahun 2008, Ketua BEM STISIP Muhammadiyah Rappang Tahun 2010 - 2011, Koorda BEM PTM Sulselbar, 2011 – 2012, Presidium Nasional BEM PTM Indonesia Timur Tahun 2012 - 2013, Ketua PC. IMM Sidrap Tahun 2013 - 2014, Sekretaris DPD IMM Sulawesi Selatan tahun 2014 - 2016, Ketua HIPMI PT Sidrap Tahun 2014 - 2017, Ketua Relawan Muda Sulsel (RMS) 2017 – 2020, Ketua DPW Pemuda LIRA Sulawesi Selatan Tahun 2014 – 2017, Ketua DPD KNPI Sidrap Tahun 2017 - 2020, , Ketua DPC Pemuda Tani HKTI Sidrap Tahun 2021 – 2026. Sekarang juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM), Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI), Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Sidrap.

Pengalaman Penelitian – Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari KemendikbudRistek/Kemenristekdikti, dan internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan kolaboratif di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding Nasional bereputasi, serta memperoleh beberapa HAKI.

Pengalaman dalam program-program Pemberdayaan Masyarakat diantaranya sebagai narasumber/pemateri di berbagai kegiatan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Selain itu, aktif juga dalam membentuk dan mendampingi beberapa desa binaan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Email Penulis: jbr.nyonk1@gmail.com

7

PERKEMBANGAN TEORI PEMBANGUNAN & ISU SENTRAL PEMBANGUNAN

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Pendahuluan

Hak atas pembangunan merupakan salah satu hak asasi yang fundamental yang berakar pada piagam PBB, deklarasi umum Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, dan Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan Budaya, (Firdaus et al., 2013).

Deklarasi Hak Atas Pembangunan (diterima Majelis umum PBB lewat resolusi No. 41/128, 4 desember 1986) membuat hak ini menjadi eksplisit. Deklarasi ini didasarkan pada hak setiap individu dan setiap manusia untuk berpartisipasi, berkontribusi dan memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, dan bahwa hak pembangunan tidak dapat dipindahtangankan. Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 menegaskan kembali keberadaan hak atas pembangunan konsensual ini, (Firdaus et al., 2013).

Hak atas pembangunan ditegaskan kembali dalam Deklarasi Copenhagen 1995, yang menekankan hubungan antara hak asasi manusia dan pembangunan. Melalui konsensus baru, Deklarasi Copenhagen menyatakan bahwa masyarakat harus menjadi pusat perhatian untuk pembangunan berkelanjutan, memerangi kemiskinan, mempromosikan pekerjaan

penuh dan produktif, dan menciptakan masyarakat yang stabil di mana setiap orang dapat berkontribusi, (Firdaus et al., 2013).

Sebagai konsekuensi dari hak yang tak bisa dicabut (*an inalienable right*), pembangunan harus dilaksanakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pembangunan harus menjamin terwujudnya unsur-unsur hak asasi manusia yang sejati seperti hak atas pangan, kesehatan, partisipasi politik dan lainnya. Hak atas pembangunan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati hasil-hasil pembangunan dalam segala aspek yang memenuhi nilai-nilai penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia, serta didukung baik oleh dukungan sipil maupun politik dan hak budaya, (Firdaus et al., 2013).

Pengertian Pembangunan

Secara sederhana, pembangunan sering dimaknai sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Sebagai sebuah proses, pembangunan dilaksanakan tidak secara instan. Ada proses yang berlaku mulai tahap formulasi sampai pada tahap evaluasi sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang direncanakan, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan mengevaluasi kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pembangunan mula-rnula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut setiap tahunnya, (Budiman, 2000).

Menurut *Lewwellen, Larrin, dan Kiely* dalam (Bahua, 2018) menerangkan bahwa teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi meliputi teori-teori makro mengenai perkembangan ekonomi dan perubahan masyarakat dan teori-teori mikro

mengenai mutu-mutu individu yang mendukung proses perubahan. Sedangkan, paradigma ketergantungan merangkum teori-teori keterbelakangan (*Under-Development*), ketergantungan (*Dependent Development*), dan sistem dunia (*World System Theory*). Arti dari pembangunan bisa jadi merupakan hal yang sangat menarik untuk diperdebatkan. Barangkali tidak ada satu bidang ilmu yang paling akurat untuk memaknai kata pembangunan.

Siagian dalam (Bahua, 2018) menjelaskan bahwa, pembangunan adalah seperangkat prakarsa pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sadar oleh bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembangunan nasional (*Nation Building*).

Menurut *Alexander* dalam (Anggara & Sumantri, 2016), pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. *Portes* dalam (Anggara & Sumantri, 2016) mendefinisikan sebagai perubahan ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adapun *Ginanjar Kartasasmita* dalam (Anggara & Sumantri, 2016) memberikan pengertian, sederhananya, pembangunan adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui usaha yang terencana.

Menurut *Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah* dalam (Anggara & Sumantri, 2016) pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya secara sadar dan terencana.

Liberalisme

Liberalisme menyerukan bahwa perlu adanya kebebasan dalam bertindak dan berfikir dengan rasionalitas. Oleh sebab itu, liberalisme berakar kuat dengan individualisme, kesetaraan dan kebebasan seperti yang diungkapkan oleh *Mises* dalam (Yamin & Haryanto, 2017)

bahwa secara definisi liberalisme merupakan kebebasan yang merata dan kesempatan yang setara untuk setiap individu tanpa pengaturan, kontrol, dan regulasi dari negara terhadap urusan manusia terhadap kesejahteraan material. Berdasarkan keadaan tersebut, kaum liberalisme selanjutnya membuat perlawanan terhadap feodalisme dengan dasar-dasar yang diperjuangkan berupa:

1. **Kepemilikan Pribadi (*Private Property*)**: Liberalisme sangat mengagungkan kepemilikan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa tiap-tiap individu memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan melalui kepemilikan pribadi. Selain itu dengan adanya kepemilikan pribadi, kaum liberalisme memiliki anggapan bahwa produktivitas akan semakin tinggi dikarenakan keinginan tiap-tiap individu untuk memenuhi kepuasan materilnya.
2. **Kebebasan Individu (*Personal Liberty*)**: Kebebasan individu sangat dibutuhkan untuk terlaksananya demokrasi dan kapitalisme yang menjadi anak dari pandangan liberalisme. Kebebasan disini diartikan sebagai kesempatan untuk setiap individu menentukan yang terbaik bagi dirinya. Dalam sudut pandang ekonomi, dengan adanya kebebasan individu memungkinkan pekerja bebas bisa lebih banyak menghasilkan kekayaan untuk banyak orang bila dibandingkan dengan yang dihasilkan budak oleh tuan mereka. Jika perbudakan ataupun belenggu inividualisme masih banyak diterapkan maka terdapat kecenderungan rendahnya produktivitas sehingga kemajuan peradaban akan lambat.
3. **Inisiatif Pribadi (*Private Enterprise*)**: Melalui inisiatif pribadi, setiap individu mendapat kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri berdasarkan hasil kerjanya.

Liberalisme melihat bahwa setiap individu memiliki hak-hak pribadi yang harus dijunjung tinggi. Walaupun demikian perlu disadari hak-hak yang melekat pada setiap individu tersebut berpotensi terjadi gesekan

sehingga liberalisme mensyaratkan beberapa hal yang perlu dipahami. Seorang pemikir liberal Filipina menilai bahwa terdapat 6 prinsip dasar liberalisme, Teehankee dalam (Yamin & Haryanto, 2017) yaitu:

1. ***Individualisme***: Penganut liberalisme sangat menekankan kebebasan individu dan hak-hak individu, bahkan mereka beranggapan bahwa individualisme lebih penting dari kolektivisme.
2. ***Rasionalisme***: Kaum liberal percaya bahwa dunia dapat dipahami dengan logis karena memiliki struktur yang rasional.
3. ***Kebebasan***: Liberalisme beranggapan bahwa individu memiliki kebebasan untuk memutuskan karena diasumsikan setiap individu mampu untuk berpikir dan bertindak sesuai mata hati.
4. ***Tanggung Jawab***: Kebebasan tanpa tanggung jawab adalah keliaran.
5. ***Keadilan***: keadilan dalam sudut pandang liberalisme adalah pemberian kesempatan kepada setiap individu untuk bersaing dan menggapai hak-haknya.
6. ***Toleransi***: sikap untuk menghormati pandangan orang lain, karena tanpa toleransi kebebasan tidak dapat ditegakkan.

Pembangunan Liberal

Negara perlu turun tangan berperan sebagai setting moral dan legal institusional pengatur terjaminnya kontrak dihormati oleh semua pihak, *Handoko* dalam (Yamin & Haryanto, 2017). Kebebasan ekonomi mungkin terjadi bila tidak ada intervensi pemerintah dan terbukanya mekanisme pasar. Dengan adanya mekanisme pasar maka memberikan kesempatan berputarnya ekonomi melalui adanya permintaan dan *supply* sehingga proses konsumsi dan produksi barang terjadi secara natural berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. *Smith* menekankan beberapa hal penting dibidang ekonomi di

dalam iklim liberal, sehingga kapitalisme menyandarkan diri pada:

1. **Hak milik swasta (*Private Property*).** Hal ini merupakan elemen pokok dari kapitalisme, sehingga setiap individu berhak untuk memiliki barang-barang ekonomi dan sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadinya. Hal ini tentunya dilakukan dengan cara-cara yang legal dimana pemerintah memiliki peran sebagai regulator untuk memastikan perjanjian yang dilakukan disepakati bersama.
2. **Prinsip dibina tangan yang tak terlihat (*Invisible Hand*).** Perkembangan kapitalisme dan pertukaran barang dan jasa yang terjadi berdasarkan penawaran dan permintaan. Kebutuhan dan keinginan masyarakaat tersebutlah yang selanjutnya membina pasar untuk memproduksi ataupun menentukan harga dari suatu barang. Setiap individu didalam mayarakat yang kapitalistik dimotivasi oleh kekuatan ekonomi sehingga ia bertindak seefisien mungkin untuk mendapatkan kepuasan terbesar.
3. **Individualisme ekonomi (*Laissez-Faire*).** Perdagangan dan kemajuan ekonomi dilimpahkan kepada keputusan-keputusan individu mengenai permintaan dan penawaran, sehingga peran pemerintah sangat minim dalam sistem perekonomian kapitalisme. Kemajuan dan kesejahteraan ekonomi sangat bergantung pada keputusan- keputusan individu tersebut.
4. ***Persaingan pasar secara bebas (free market competition).*** Prinsip mekanisme pasar menyebabkan para aktor di dalam perekonomian bersaing secara bebas untuk memperoleh konsumen, buruh untuk memperoleh pekerjaan, para majikan memperoleh buruh dan akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi lainnya. Bentuk yang paling sempurna didalam pasar bebas adalah bila pembeli dan penjual dalam jumlah yang cukup banyak sehingga tidak terdapat satu pihak yang dapat mempengaruhi harga serta kebebasaan bagi pembeli

dan penjual tidak dibatasi oleh batasan-batasan ekonomi atas permintaan dan penawaran.

Point penting yang ditekankan oleh *Smith* dalam (Yamin & Haryanto, 2017) pada konsep ekonomi liberalnya ialah:

1. Kebebasan dalam bidang ekonomi sehingga perlu pembatasan peran pemerintah pada bidang ekonomi.
2. Berlakunya sistem pasar atau kompetisi bebas dan pasar persaingan sempurna.
3. Adanya *full employment* sehingga ekonomi akan selalu berjalan lancar dan melakukan kesesuaian diri jika tanpa intervensi pemerintah.
4. Dengan memenuhi kepentingan individu maka akan memenuhi kepentingan masyarakat (*Harmony of Interest*).
5. Hukum pasar "*permintaan akan turun bila penawaran naik*".
6. Hukum ekonomi berlaku universal khususnya pada kegiatan ekonomi.

Teori Modernisasi dalam Pembangunan

Teori pembangunan modern yang populer dan banyak mendapat komentar para ahli adalah teori yang disampaikan oleh *W.W. Rostow*. Melalui bukunya yaitu *The Stages of Economy Growth, A non-Communist Manifesto*, *Rostow* turut mengadaptasi pemikiran yang sedang berkembang saat itu bahwa pembangunan merupakan proses panjang yang berjalan secara linear. Perkembangan tersebut dimulai dari masyarakat yang terbelakang menuju masyarakat modern dengan berbagai karakteristik masyarakat modern. Untuk mencapai tahapan menjadi masyarakat modern, *Rostow* mengungkapkan bahwa masyarakat tradisional perlu melalui berbagai tahapan pembangunan. Ia menggambarkan berbagai tahapan pembangunan yang oleh *Todaro* dalam (Yamin & Haryanto, 2017). Tahapan tersebut diklasifikasikan menjadi 5 tahapan pembangunan, yaitu:

1. **Masyarakat tradisional (*The traditional society*).**

   Masyarakat tradisional memiliki ciri yang khas yaitu fungsi produksi yang masih terbatas. Hal ini disebabkan karena proses produksi yang dilakukan oleh tahapan masyarakat tradisional yang masih primitif dengan cara hidup yang masih mengedepankan nilai-nilai yang kurang rasional. Komoditas produksi mayoritas berasal dari sektor pertanian dengan produktivitas yang cenderung masih rendah. Struktur sosial yang berkembang di masyarakat masih dipengaruhi oleh budaya agraris yang bersifat hirarkis dengan kedudukan sosial yang masih mengedepankan faktor keturunan.

   Didalam bidang politik, kekuasaan masih dipegang oleh kepemilikan tanah yang berada di daerah. Sedangkan kebijakan pusat sering kali masih dipengaruhi oleh pandangan para pemilik tanah. Hal ini terjadi walaupun terkadang, secara pemerintahan sudah sentralistik.

2. **Prasyarat untuk tinggal landas (*The pre-conditions for take-off*)**

   Untuk mencapai pertumbuhan dalam pembangunan, perlu masa transisi yang merupakan dasar masyarakat mempersiapkan dirinya sebagai usaha untuk mencapai pertumbuhan atas usahanya secara mandiri (*Selfsustained Growth*). Masa transisi untuk mencapai pertumbuhan dalam pembangunan itulah oleh *Rostow* dikategorikan dalam tahapan prasyarat untuk tinggal landas.

   Dalam bidang politik, perlu adanya pemimpin yang mempu memimpin masyarakat yang mengalami transisi. Oleh sebab itu, perlu adanya kepemimpinan yang nasionalis reaktif dimana negara dan masyarakat bereaksi secara positif terhadap adanya tekanan-tekanan negara maju.

3. Tinggal Landas (*Take-off*)

Pada awal tahap tinggal landas, penurunan drastis terjadi oleh sebuah negara yaitu melalui adanya revolusi politik, kemajuan teknologi dan inovasi yang cepat, dan terbukanya pasar-pasar baru. Perubahan yang drastis dari tiga hal tersebut akan mendorong adanya percepatan peningkatan investasi dimana akan meningkatkan pula laju pertumbuhan pendapatan nasional yang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk sehingga pendapatan perkapita negara tersebut turut mengalami peningkatan.

Negara akan mengalami tahap tinggal landas dimana *Rostow* dalam (Yamin & Haryanto, 2017) mencirikan sebagai berikut:

a. Adanya peningkatan investasi produktif 5 % atau kurang menjadi 10 % dari Produk Nasional Bersih (Net National Product = NNP).

b. Berkembangnya beberapa sektor industri yang memimpin perkembangan sebuah negara dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi.

c. Terciptanya kerangka dasar di bidang politik, sosial dan kelembagaan yang menjadi pemicu perkembangan sektor modern dan ekternalitas ekonomi yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi terus berlanjut.

4. Menuju kedewasaan (*The drive to maturity*)

Di tahap ini, masyarakat mulai menerima teknologi sebagai hal yang wajar dan mulai memanfaatkannya secara efektif dalam kegiatan produksinya. Dengan adanya penerimaan masyarakat tersebut, secara perlahan penerapan teknologi akan dimaksimalkan di sektor-sektor industri lain sehingga akan mengakibatkan munculnya leading sector baru. Hal ini dicontohkan oleh *Rostow* melalui fakta yang terjadi di Inggris dimana industri tekstil yang menjadi leading sector di tahap lepas landas, perlahan digantikan oleh sektor industri besi, batu bara, dan peralatan teknik

berat. Kemunculan *leading sector* baru dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang ada, sumber daya alam, tahapan lepas landas yang dilakukan dan arah kebijakan pemerintah.

Karakteristik yang muncul pada tahapan menuju kedewasaan dicirikan dengan adanya keahlian tenaga kerja yang mengalami perubahan, adanya perubahan dalam sifat kepemimpinan dalam perusahaan yang ada dengan adanya peranan manajer profesional yang menggantikan peran pengusaha pemilik, serta munculnya kritik terhadap industrialisasi akibat adanya dampak yang muncul melalui proses industrialisasi, sebagaimana yang dikonkretisasi secara serius oleh negara-negara demokrasi ultramodern, contohya di Eropa Barat dan Amerika, (Agus Hendrayady et al., 2022).

5. Masa konsumsi tinggi (*The age of high mass-consumption*)

Tahapan terakhir dari teori pembangunan ekonomi *Rostow* ini, menitik beratkan pada adanya perhatian masyarakat terhadap masalah-masalah yang timbul. Biasanya masalah- masalah yang menjadi titik fokus adalah permasalahan mengenai konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahapan ini negara memiliki tujuan untuk memperluas pengaruh ke luar negeri, menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dengan sistem pajak progresif, meningkatkan konsumsi masyarakat diluar kebutuhan pokok meliputi kebutuhan konsumsi tahan lama dan barang mewah.

Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di sebuah negara, terutama disebabkan oleh faktor-faktor yang berada didalam negara tersebut. Teori ini menekankan pada faktor sumber daya manusia dan nilai-nilai budaya yang ada disebuah negara yang mempengaruhi pembangunan negara. Sehingga, teori modernisasi cenderung menganalisis aspek individu dan kultural yang ada di sebuah negara. Teori ini

mengasumsikan *Hatu* dalam (Yamin & Haryanto, 2017) bahwa:

a. Perubahan masyarakat yang terjadi bersifat *unilinier*. Proses perubahan itu terjadi dimana masyarakat yang kurang maju memiliki kecenderungan mengikuti langkah-langkah yang diambil oleh masyarakat yang sudah maju.
b. Arah perubahan bergerak kearah modernitas dimana titik akhir arah perubahan tersebut divisualisasikan seperti halnya negara barat yang industrialis, kapitalis dan demokratis dan hal tersebut merupakan *role model* dan menjadi tujuan akhir perkembangan bagi negara- negara yang belum maju.
c. Perubahan terjadi tanpa adanya gangguan dan dilakukan secara bertahap.
d. Tidak ada tahapan yang dilompati untuk mencapai tujuan akhir dari pembangunan.
e. Berfokus pada penyebab internal.
f. Perubahan bersifat progesif dan meyakini bahwa dengan adanya modernitas akan menciptakan perbaikan kehidupan sosial secara *universal* dan akan ada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dengan adanya perubahan yang terjadi oleh karena adanya modernisasi, berbagai sektor kehidupan turut mendapatkan dampak yang nyata. *Laurer* dalam (Yamin & Haryanto, 2017) menyatakan bahwa aspek-aspek kehidupan yang terkena dampak modernisasi antara lain:

a. Demografi penduduk: Sebagai contoh, dengan adanya kemajuan teknologi dan pengetahuan dibidang kesehatan, maka akan terjadi penurunan angka mortality penduduk sehingga akan terjadi peningkatan jumlah penduduk. Adanya industrialisasi khususnya di kota-kota besar mengakibatkan meningkatnya arus urbanisasi.

b. ***Perubahan sistem stratifikasi sosial:*** Industrialisasi menuntut keterampilan tanaga kerja yang spesifik sehingga di dalam tataran sosial masyarakat akan terbentuk pembagian kerja yang kompleks dan spesialisasi keahlian. Selain itu, status sosial yang dahulu didasari dari faktor keturunan, di era modern akan bergeser kepada status sosial yang didasari oleh aspek prestasi yang mampu diraih oleh tiap-tiap individu. Dalam bidang politik akan terjadi pergeseran dalam distribusi kekuasaan.

c. ***Sistem pemerintahan:*** Modernisasi berdampak pada meluasnya demokrasi dalam politik dimana tingkat partisipasi politik masyarakat lebih luas.

d. ***Pendidikan:*** Secara kuantitatif, dengan adanya modernitas, semakin memperbanyak jumlah lembaga pendidikan dan jumlah individu yang mengenyam pendidikan. Selain itu secara kualitatif, pendidikan diarahkan kepada peningkatan kualitas dan spesifikasi pendidikan. Hal ini semua untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang akan diserap oleh dunia industri.

e. ***Keluarga:*** Terjadi perubahan didalam cara hidup berkeluarga dikarenakan adanya pengaruh modernitas terhadap cara hidup keluarga yang dahulunya tradisional.

f. ***Pranata sosial:*** Pranata sosial yang didasari oleh kesolidaritasan sosial perlahan bergeser menjadi orientasi individual dan efisiensi.

Sedangkan menurut *Rostow* dalam (Yamin & Haryanto, 2017) perubahan yang terjadi yang disebabkan oleh pembangunan antara lain:

a. Perubahan arah organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang semula berorientasi lokal menjadi berorientasi keluar.

b. Perubahan persepsi masyarakat terhadap jumlah anak dalam rumah tangga, yaitu dari keinginan memiliki anak menjadi keluarga kecil.

c. Perubahan kegiatan investasi masyarakat dari investasi non produktif (mengumpulkan emas, membeli rumah, dll) menjadi investasi produktif.

d. sikap dan kebiasaan yang terjadi tidak merangsang pembangunan ekonomi (misalnya menghargai waktu, menghargai kinerja individu, dll).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Di dalam RPJPN Indonesia Tahun 2005-2025, terdapat visi pembangunan jangka Panjang Indonesia yaitu: Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa.

Di dalam RPJPN, terutama di bagian arah pembangunan jangka Panjang, arah pembangunan, terdapat delapan arah pembangunan yang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan pembangunan ekonomi merupakan aspek terpenting dari pembangunan nasional jangka Panjang Indonesia, *PPN/Bappenas* dalam (Basmar et al., 2021), yaitu:

Aspek pertama yaitu perekonomian dikembangkan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat dan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta sosial sehingga kesempatan yang sama dalam kegiatan bisnis dijamin untuk masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan secara proporsional dinamika globalisasi dan kepentingan strategis nasional dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

Aspek yang kedua yaitu sangat erat kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memastikan terciptanya lingkungan bisnis yang berbasis persaingan yang sehat di semua segmen perekonomian.

Aspek ketiga yaitu Daya saing ekonomi internasional harus terus dikembangkan dan ditingkatkan dengan bertumpu pada pertumbuhan produktivitas dan inovasi, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguasaan dan penerapan teknologi, serta stabilitas ekonomi, pendampingan, dan harus dikelola secara berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur fisik dan ekonomi.

Aspek keempat yaitu fondasi ekonomi mikro melalui pola kebijakan yang tidak mendistorsi mekanisme pasar seperti antara lain Menyediakan infrastruktur fisik, ekonomi, dan teknologi yang memenuhi kebutuhan dan kemampuan setiap keluarga industry.

Aspek kelima yaitu Pengembangan UKM dan koperasi bertujuan untuk menjadi pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif dengan meningkatkan kewirausahaan dan produktivitas. Koperasi diharapkan dapat terus menciptakan komunitas anggota koperasi dan berkembang menjadi organisasi yang efektif sehingga baik produsen maupun konsumen menjadi pelaku ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Aspek keenam yakni Memfokuskan upaya untuk menekan biaya ekonomi yang tinggi guna menciptakan lapangan kerja formal sebanyak mungkin tanpa merugikan sektor informal. Selain itu, memudahkan karyawan untuk beralih dari pekerjaan yang kurang produktif ke pekerjaan yang lebih produktif.

Aspek ketujuh yaitu Meningkatkan kemampuan pembiayaan kegiatan ekonomi dan membuatnya lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dan sektor keuangan. Peningkatan kapasitas ini dilakukan dengan memperkuat kondisi internal industri jasa keuangan, memperkuat sistem regulasi yang secara efektif mengantisipasi

perkembangan pasar keuangan domestik dan internasional, serta memperkuat sistem pengawasan perbankan yang efektif dan mandiri.

Aspek terakhir (Kedelapan) adalah Mengembangkan kerangka stabilitas sistem keuangan dan mengelola krisis untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan meminimalkan terjadinya krisis. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, menetapkan kewenangan instansi/lembaga untuk bertindak sebagai penentu status lembaga keuangan. Tujuan utama pembiayaan pemerintah adalah untuk menciptakan pinjaman pembangunan yang dapat mengamankan kapasitas untuk membantu meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing ekonomi dalam penyediaan layanan dasar, infrastruktur, fasilitas fisik dan ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), maka untuk mengeksekusi pembangunan nasional pemerintah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan pasal 2 PP 18/2020 tersebut, mengandung arti bahwa pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan mengacu pada kerangka ekonomi makro yang termasuk di dalamnya adalah kebijakan fiskal yang menjadi pedoman pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Melihat lebih dalam di dalam RPJMN, khususnya dalam pembangunan ekonomi nasional, dapat diketahui bahwa terdapat poin yang penting untuk diperhatikan yaitu salah satu dari 7 Agenda Pembangunan Indonesia yang terkait dengan pembangunan ekonomi nasional adalah memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata, *PPN/Bappenas* dalam (Basmar et al., 2021).

Dalam mengimplementasikan peningkatan inovasi dan kualitas investasi tersebut, maka pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui dua aspek. Aspek yang pertama adalah pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Sedangkan aspek yang kedua adalah akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Aspek yang tidak kalah pentingnya adalah Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan. Hal ini disebabkan oleh pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup saat ini dan di masa yang akan datang, *PPN/Bappenas* dalam (Basmar et al., 2021).

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi

pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi dan penciptaan nilai ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi dasar bagi sinergi dan integrasi kebijakan lintas sektoral yang meliputi bidang pangan dan pertanian, perkapalan, perikanan dan kelautan, manufaktur, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua prioritas ini akan didukung oleh data yang lebih baik untuk menginformasikan pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan dan dengan peningkatan kualitas kebijakan, *PPN/Bappenas* dalam (Basmar et al., 2021).

Dalam lima tahun mendatang yaitu tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Sebagai contoh misalnya arah pembangunan ekonomi wilayah Sulawesi. Kebijakan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 antara lain diarahkan untuk memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. Transformasi ekonomi wilayah Sulawesi bertujuan agar industri hilir pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan dapat memberikan nilai tambah dengan mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi.

Sebagai ilustrasi lain di wilayah Jawa-Bali menjadi pusat industri dan jasa nasional, sebagai lumbung pangan nasional dan menjadi salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia. Dalam lima tahun mendatang, pembangunan wilayah Jawa yang relatif maju dan berkembang diarahkan untuk memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dengan bertumpu pada industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0, serta pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan MICE.

Pembangunan wilayah Jawa akan bertumpu pada peran swasta yang semakin besar dengan dukungan fasilitasi pemerintah secara terpilih untuk menjamin tercpitanya iklim investasi yang terbuka dan efisien. Dalam upaya mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan akan dilakukan secara bertahap didukung dengan pengembangan wilayah metropolitan dan kota baru di luar Pulau Jawa. Secara bersamaan, pembangunan ekonomi di Pulau Jawa-Bali akan diarahkan pada kegiatan berbasis jasa dan industri teknologi tinggi dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk memastikan pembangunan yang berkeberlanjutan, *Triyono, Hardiyati and Pradana* dalam (Basmar et al., 2021).

Daftar Pustaka

Agus Hendrayady, Arman, Satmoko, N. D., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin, Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Rahmat, M. R. (2022). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik* (Agus Hendrayady (ed.); Pertama). Eureka Media Aksara.

Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). Admnistrasi Pembangunan Teori dan Praktik. In B. A. Saebani (Ed.), *Pustaka Setia* (Pertama).

Bahua, M. I. (2018). *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat* (Pertama). Ideas Publishing.

Basmar, E., Sartika, S. H., Suleman, A. R., Faried, A. I., Damanik, D., Amruddin, A., Purba, B., Wisnujati, N. S., & Nugraha, N. A. (2021). Ekonomi Pembangunan: Strategi dan Kebijakan. In J. Simarmata (Ed.), *Yayasan Kita Menulis* (Pertama).

Budiman, A. (2000). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. In W. S. Brata (Ed.), *Gramedia Pustaka Utama* (Keempat). Gramedia Pustaka Utama.

Firdaus, M. S., Nuraini, A., Dewi, K. N., Aswidah, R., Amisani, S., Dahana, E., & Widianti, J. N. (2013). *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia; Sebuah Panduan* (Kedua). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Yamin, M., & Haryanto, A. (2017). Teori Pembangunan Internasional. In *Pustaka Ilmu* (Pertama).

Profil Penulis



Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Penulis lahir di salati, 19 September 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Ilmu Pemerintahan.

Penulis saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2022-sekarang. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi "Air Mata Anonim" dan "Realitas Dunia Birahi" serta Buku Metode Penelitian. Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter dan penelitian sosial yang sifatnya mandiri maupun tergabung dalam penelitian yang dikerjasamakan.

Email Penulis: putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id

8

PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI BAGI PEMBANGUNAN

Dr. Ade Iskandar, SIP., M.Si
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya

Pelaksanaan Administrasi Negara di Negara-negara yang sedang berkembang memiliki perbedaan dengan di Negara maju. Banyak keterbatasan yang dimiliki negara-negara yang sedang berkembang, sehingga memerlukan administrasi khusus yang berbeda dengan administrasi Negara di Negara maju. Administrasi yang dimaksud adalah Administrasi Pembangunan.

Dinamika masyarakat dan perubahan lingkungan yang sangat cepat serta menyeluruh menuntut adanya pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Kondisi dan lingkungan negera yang sedang berkembang berbeda dengan kondisi dan lingkungan di Negara maju. Keterbatasan sumber daya manusia, penguasaan teknologi serta keterbatasan lainnya memerlukan manajemen pembangunan yang dilakukan dengan tepat.

Pada umumnya pembangunan di negara sedang berkembang lebih memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi dibandingkan dengan bidang yang lainnya. Perhatian terhadap pembangunan bidang eknomi saja tidak dapat menjamin suatu proses pembangunan berjalan stabil dan kontinu. Untuk itu pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan semua bidang pembangunan meskipun pembangunan ekonomi memiliki daya dongkrak yang sangat besar terhadap

bidang yang lainnya. Sehingga hal yang wajar apabila pembangunan bidang ekonomi menjadi prioritas dibandingkan dengan pembangunan di bidang lainnya.

Administrasi pembangunan merupakan administrasi yang khas untuk implementasi kebijakan, program dan rencana pembangunan dalam kondisi masyarakat yang berada pada masa peralihan dengan kecenderungan perubahan yang tinggi. Dinamika masyarakat yang terjadi di Negara yang sedang berkembang menuntut adanya pemenuan aneka macam kebutuhan yang lebih banyak berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Tuntutan ini akan mendesak kepada elit politik untuk menetapkan kebijakan pembangunan yang lebih pro rakyat dan mampu mempercepat meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun tuntutan tersebut kurang diimbangi dengan adanya peningkatan kapasitas baik kapasitas masyarakat maupun kapasitas organisasi pemerintahannya.

Upaya yang harus dilakukan salah satunya adalah penyempurnaan administrasi negara menuju administrasi Negara yang lebih adaptif dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Tjokroamidjojo telah lama mengemukakan bahwa : "Sasaran-sasaran usaha penyempurnaan administrasi Negara ditujukan kepada penyempurnaan bidang organisasi, kepegawaian, tata kerja, pembinaan kelembagaan ekonomi, peningkatan sarana dan fasilitas administrasi, pengembangan bidang administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penelitian serta pengembangan ilmu dan system administrasi Negara, serta usaha lebih bersihnya pelaksanaan pemerintahan". (Tjokroamidjojo, 1990).

Untuk menjalankan sistem pemerintahan negara, perlu dilakukan penataan administrasi dan organisasi pemerintahan. Reformasi birokrasi sejalan dengan upaya melakukan modernisasi administrasi pemerintahan. Dari pengalaman beberapa negara, maka kunci keberhasilan pembangunan bangsa adalah bagaimana merevitalisasi administrasi pemerintahan. Beberapa isu yang menjadi agenda reformasi birokrasi

antara lain penataan organisasi (restrukturisasi, downsizing dan rightsizing), manajemen kepegawaian, rekayasa proses administrasi pemerintahan serta hubungan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Administrasi dan Organisasi Pemerintahan

Dalam pelaksanaana reformasi birokrasi dilaksanakan pada aparatur pemerintah melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi. Grand Design Reformasi Birokrasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Program-program reformasi birokrasi tersebut ada yang berhubungan secara langsung dan ada yang tidak secara langsung dengan pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi.

Permasalahan utama yang berkaitan dengan reformasi salah satunya adalah organisasi pemerintahan yang belum tepat fungsi dan tepat ukurannya (right sizing) dan juga administrasi pemerintahan. Untuk itu penataan telah dilakukan salah satunya dengan penataan administrasi dan organisasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang tersebut adalah : "Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penataan organisasi kementerian diatur dengan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selanjutnya organisasi Kementerian Negara diatur oleh Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun

2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Sedangkan untuk penataan organisasi pemerintahan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penataan organisasi tidak hanya terbatas pada organisasi kementerian dan pemerintah daerah namun dibentuk beberapa lembaga yang independent maupun lembaga yang berada di bawah kementerian lainnya. Penataan juga dilakukan terhadap Badan-badan Usaha Milik Negara maupun Badan-badan Usaha Milik Daerah.

Penataan organisasi Badan Usaha Milik Negara mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sedangkan untuk Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

John dan Steward mengemukakan bahwa:

For years there has been almost continual institutional change in local government and in the other public organisations that constitute community governance, covering both their external structure of functional and geographical boundaries and their internal structures for governing the authorities.(Jones and Stewart, 2012)

Pendapat diatas memperkuat bahwa dalam penyempurnaan administrasi bagi pembangunan melalui penataan organisasi yang dilakukan secara terus menerus akan membentuk tata kelola masyarakat yang lebih baik. Penataan organisasi diatas dilakukan seiring dengan penataan kebijakannya. Penataan Peraturan perundang-undangan dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas maupun multitafsir.

Sistem Kepegawaian

Penyempurnaan administrasi di bidang kepegawaian dilakukan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi dan pembangunan yang dilakukan, memperkuat komitmen tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. Selain itu untuk membangun kultur baru dalam birokrasi perlu dilakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia agar tercipta sumber daya manusia yang handal dan profesional. Oleh karena itu untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai diperlukan penataan dan sistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian, pelaksanaan pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan.

Penataan sistem kepegawaian diawali dengan penataan Aparatur Sipil Negara dan perlu diikuti pula dengan penataan kepegawaian di organisasi bisnis milik pemerintah yaitu BUMN dan BUMD. Penataan dilakukan salah staunya dengan ditetapkan nya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kebijakan ini menciptakan kepastian hukum dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Penataan Aparatur Sipil Negara dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, sistem kepegawaian yang proporsional, netral, akuntabel dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya .

Untuk melakukan menciptakan Aparatur Sipil Negara sebagaimana di sebutkan di atas perlu diberlakukan sistem kepegawaian dengan merit system. Untuk melaksanakan sistem kepegawaian dengan sistem merit ini diperlukan penataan dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam kebijakan kepegawaian yang perlu penataan namun juga dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Manajemen ASN sebagaimana diatur dalam kebijakan tersebut di atas didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakakng politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan dan kondisi kecacatan.

Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara saat ini sedang dilakukan pembahasan oleh DPR sehingga kedepan akan banyak perubahan yang dilakukan dalam rangka pembangunan sumber daya aparatur Negara. Sebagai implementasi sistem merit, ditetapkan pula turunan dari Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Untuk mempersiapkan agar sistem merit dapat terlaksana maka harus ada persiapan untuk sumber daya manusia baik sumber daya manusia yang telah menjadi Aparatur Sipil Negara maupun calon Aparatur Sipil Negara yang harus memiliki skill dan kompetensi sebagaimana diharapkan. Penataan perlu dilakukan pada organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan dan latihan bagi aparatur sipil Negara serta lembaga pendidikan dengan menyiapkan para lulusannya memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan.

Pembinaan Kelembagaan Ekonomi

Pembinaan kelembagaan ekonomi dalam rangka penyempurnaan administrasi bagi pembangunan telah banyak dilakukan. Pembinaan kelembagaan ekonomi milik pemerintah berupa BUMN dan BUMD. Selain itu pembinaan kelembagaan ekonomi lainnya seperti lembaga keuangan, Koperasi, lembaga keuangan mikro, pembinaan ekonomi kreatif, dan lain-lain.

Kebijakan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh kementerian terkait, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku Pemilik BUMD, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Demikian juga pembinaan kelembagaan ekonomi lainnya seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang menaunginya.

Tujuan dari pembinaan kelembagaan ekonomi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan kemampuan kelembagaan ekonomi ini akan mampu menopang kebutuhan dari investasi yang dilakukan dengan harapan mampu mengembangkan sumber-sumber perekonomian masyarakat. Demikian juga pembinaan koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat. Pembinaan koperasi di daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan urusan perkoperasian.

Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan administrasi perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang ini memberikan kejelasan hukum dan arah tindak dalam proses perumusan perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Adapun perencanaan pembangunan pascareformasi adalah Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan

perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenanganya mencakup:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
3. Rencana Pembangunan Tahunan

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam aspek perencanaan tercermin dalam hubungan antar berbagai dokumen perencanaan antara pusat dan daerah. Perubahan paradigm perencanaan pembangunan dari top-down menjadi bottom-up telah menjamin adanya peningkatan partisipasi masyarakat. Kebijakan pembangunan telah memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pengawasan pembangunannya. Proses perencanaan dilaksanakan secara musyawarah. Robert Howse dalam (Nanz and Steffek, 2004) mengemukakan bahwa : "……*that democratic legitimation can be generated by means of deliberation between a variety of social actors (e.g. government officials from different national communities, scientific experts, NGOs, etc.).*

Pendapat tersebut mengemukakan bahwa legitimasi demokratis dapat dihasilkan melalui musyawarah antara berbagai aktor sosial (misalnya pejabat pemerintah dari komunitas nasional yang berbeda, pakar ilmiah, LSM, dll.). Artinya proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan dilakukan dengan muasyawarah akan mampu memberikan legitimasi yang kuat dalam penyusunan rencana pembangunan.

Penelitian Serta Pengembangan Ilmu

Peningkatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan untuk penyempurnaan administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi. Hasil dari penelitian dapat menjadi sumber informasi sebagai bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

Sistem informasi manajemen pembangunan memerlukan adanya hasil penelitian. Hasil penelitian salah satunya digunakan unutk perumusan kebijakan. Dengan penelitian mampu menyajikan data- dan informasi yang dibutuhkan sehingga kebijakan pembangunan dapat dilakukan secara rasional dan komprehensif.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
7. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Daftar Pustaka

Jones, G. and Stewart, J. (2012) 'Local government: The past, the present and the future', *Public Policy and Administration*, 27(4), pp. 346–367. Available at: https://doi.org/10.1177/0952076712439979.

Nanz, P. and Steffek, J. (2004) 'Global Governance , Participation and the', *Government and Opposition*, 39, pp. 314–335.

Tjokroamidjojo, B. (1990) *Pengantar Administrasi Pembangunan*. 13th edn. Jakarta: LP3ES.

Profil Penulis



Dr. Ade Iskandar, SIP., M.Si

Lahir di Tasikmalaya, 13 Maret 1969. Penulis merupakan Sarjana lulusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya (STISIP Tasikmalaya), Magister Ilmu Administrasi lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yayasan Pembinan Perguruan Tinggi Tasikmalaya (STIA YPPT Tasikmalaya) dan pada Tahun 2014 berhasil menyelesaikan Program Doktor Bidang Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran Bandung.

Pengalaman pekerjaan sebagai Dosen Tetap Sekolah Tinggi Imu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya (STISIP Tasikmalaya) sampai dengan tahun 2017 dan saat ini menjadi Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Tasikmalaya (STIA YPPT Tasikmalaya).

Penulis memiliki kompetensi bidang penelitian kuantitatif dan telah memperoleh gelar non akademik CIQnR (*Certified International Quantitative Research*). Selain itu penulis memiliki kepakaran sesuai disiplin ilmunya di bidang pemerintahan, kebijakan dan manajemen publik. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif menulis di beberapa Jurnal Ilmiah terindeks bahkan salah satu tulisannya telah diterbitkan di Jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus.

Email Penulis: ade.isk.tasik@gmail.com

9

STRATEGI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI

Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang, S.E., M.S.E.
Pusat Riset Kebijakan Publik
Badan Riset dan Inovasi dan Nasional (BRIN)

Pendahuluan

Administrasi publik kini telah sama "tuanya" dengan peradaban dunia. Keduanya telah ada berdampingan, memberikan kontribusi untuk perkembangan dan kemunduran satu sama lain. Administrasi publik sangat melibatkan pembangunan sejak awal, untuk hampir semua proyek di sektor publik secara besar-besaran yang dilaksanakan oleh negara, kota dan kerajaan. Konsep pemerintahan dan administrasi publik telah menjadi subyek diskusi selama beberapa milenium dan tata kelola komparatif dan komponen administrasi pembangunan telah membentuk fondasi awal masyarakat modern administrasi. Filsuf dan pakar pemerintahan dan administrasi menulis tentang sifat negara dan telah "menasihati" para penguasa tentang perilaku urusan publik yang tepat dan efisien sementara sistem administrasi dari kerajaan, negara, kota di dunia kuno (Farazmand, 2001).

Administrasi pembangunan selalu menjadi bidang praktik yang berkembang pesat dalam sejarah administrasi publik. Administrasi pembangunan muncul pada tahun 1950-an oleh Egbert de Vries dan William J. Siffin. Mereka menggunakan terminologi itu untuk mengkonseptualisasikan sifat penelitian dan pelatihan di bidang administrasi yang dimaksudkan untuk Academy of

Rural Development yang kemudian didirikan di Comilla di Pakistan Timur (sekarang Bangladesh) dan untuk akademi di Peshawar di Pakistan Barat. Tujuan dari istilah tersebut adalah untuk membedakan fokus administrasi pada dukungan dan manajemen pembangunan. Dari administrasi hukum dan ketertiban. Fungsi administrasi pembangunan adalah untuk memastikan bahwa sesuai dengan tepat lingkungan dan dukungan administrasi yang efektif disediakan untuk pengiriman modal, bahan, dan layanan jika diperlukan dalam proses produktif baik di publik, swasta, atau campuran ekonomi.

Administrasi pembangunan adalah istilah yang mengandung makna pertanyaan: "Bagaimana ide dan mekanismenya administrasi publik digunakan sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi?". Secara empiris, masalah seperti itu menampilkan banyak, terkadang semua, dari sifat-sifat ini: Kausal karakteristik kondisi keadaan awal tidak dipahami dengan jelas. Sifat dan efek intervensi tidak dipahami dengan baik. Dan ada yang kurang terhadap persetujuan dalam penilaian: (1) apa yang salah?, dan (2) apa yang lebih baik? apa yang merupakan solusi yang tepat?. Argumen pada titik ini menyatakan bahwa fokus informasi untuk mendorong strategi pembangunan administrasi khususnya di tengah kondisi ketidakpastian.

Di era digital, di dunia yang terus berubah, populasi global terus meningkat, polusi mencapai proporsi yang mengkhawatirkan, sumber daya alam habis, kesulitan sosial yang parah muncul, perubahan struktural menekan, pilihan dibuat, dan model kerja baru muncul. Pemerintah pusat dan daerah berupaya mereposisi diri untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pemerintah terus mencari solusi baru untuk mengatasi masalah sosial, politik, dan ekonomi. Metode yang digunakan oleh administrasi pembangunan juga perlu diperbarui. Di seluruh dunia, organisasi sektor publik semakin merekrut dan mempertahankan karyawan yang berbeda dari generasi sebelumnya, sebagian karena semakin banyak peluang untuk inovasi muncul.

Salah satu konsep yang sering disebut dalam lingkungan yang menantang ini adalah "Negara Cerdas (*Smart State*)" atau "Pemerintahan Cerdas (*Smart Government*)". Ini adalah istilah yang biasa digunakan untuk kebijakan dan praktik yang bertujuan membuat negara dan kota lebih efisien, lebih maju secara teknologi, lebih ramah lingkungan, lebih inklusif secara sosial, dan lebih demokratis. Konsep-konsep ini meliputi inovasi teknis, ekonomi, dan sosial. Tujuan *smart state* adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan membuatnya dapat diakses kapan saja, di mana saja. Ini juga bertujuan mencari cara untuk mengurangi beban administrasi warga negara dan bisnis serta membuat akses ke layanan lebih transparan. Tujuan akhir dari *smart state* adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara dan bisnis. Layanan yang diberikan oleh sektor publik mempengaruhi seluruh perekonomian, khususnya sektor-sektor utama, dan menentukan kualitas hidup warga negara secara umum (Demir, 2022).

Konsep inovasi adalah meningkatkan efisiensi sektor publik, menurunkan biaya layanan yang disediakan dalam konteks ini dan mengurangi/menyederhanakan prosedur administrasi, menyediakan layanan publik yang baru dan lebih berkualitas, dan meningkatkan transparansi, sehingga meningkatkan tingkat kepuasan dan kualitas. Kehidupan pengguna layanan publik. Kenyataannya, terjadi dilema yakni bahwa layanan yang diharapkan masyarakat dari sektor publik secara bertahap meningkat meskipun penurunan anggaran publik. Oleh karena itu, saat ini sektor publik perlu lebih kreatif untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan sumber daya yang lebih sedikit. Pendekatan baru juga harus bertujuan untuk memanfaatkan teknologi untuk menciptakan kontrak sosial dan model ekonomi baru dengan cara yang lebih berpusat pada manusia (*human-centered*).

Saat ini, dengan persoalan kehidupan manusia yang semakin kompleks, "menjadi cerdas" dapat dipahami sebagai mengelola tantangan sosial melalui inovasi teknologi. Fenomena seperti *internet of things* (IoT),

artificial intelligence (AI), *machine learning*, *neural network*, dan *big data* memainkan peran penting dalam mempelajari dunia fisik saat ini. Data yang dikumpulkan dari dunia fisik dapat dianalisis dalam simulasi dunia maya, kemudian hasilnya dapat tercermin di dunia fisik untuk solusi yang lebih baik, membuat kehidupan masyarakat lebih aman, lebih mudah, lebih adil, dan lebih berkelanjutan. Keadaan cerdas juga berarti bahwa keputusan dibuat berdasarkan analisis data. Dengan menggunakan data, tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Penggunaan data menawarkan manfaat yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada sektor publik.

Inovasi Administrasi Pembangunan

Kita hidup di dunia yang terus berubah. Proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pertumbuhan populasi, perubahan iklim, pergerakan migrasi, kendala keuangan publik, permintaan akan layanan publik yang lebih baik dan pembayaran sosial yang lebih banyak, dan transformasi teknologi, untuk menyebutkan beberapa saja. Memahami bahwa tidak ada solusi yang mudah untuk menyelesaikan masalah, pemerintah pusat, daerah, dan daerah di banyak negara telah melakukan reformasi struktural. Saat ini, peningkatan teknologi berlangsung jauh lebih cepat daripada di masa lalu. Masyarakat menuntut layanan publik yang lebih digital, personal, dan ramah pengguna. Mengikuti laju administrasi publik ini menimbulkan tantangan serius: pemerintah saat ini harus jauh lebih cerdas, berorientasi pada inovasi, dan terbuka terhadap ide-ide baru.

Area inovasi sektor publik dapat dibagi menjadi enam kelompok (Demir, 2022), yakni: (1) yang terkait dengan *e-government* (pengurangan beban administrasi, pengenalan teknologi informasi komunikasi (TIK), "elektronikisasi" layanan publik untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan, modernisasi administrasi publik, dll.); (2) penyederhanaan administrasi (mengurangi legislasi, restrukturisasi program dan proses sektor

publik); (3) pengadaan barang dan jasa (tender) publik (modernisasi proses pengadaan publik, tender publik "hijau", *e-procurement*, dll.); (4) menyebarkan budaya inovatif; (5) peningkatan kinerja sektor publik; dan (6) Meningkatkan kerjasama antar aktor yang berbeda dan partisipasi dalam proses pelayanan publik.

Lebih lanjut terdapat empat pendekatan untuk mendorong inovasi menonjol dalam studi kasus di negara-negara OECD, seperti: (a) program penghargaan dan pengakuan yang mempromosikan gagasan di semua tingkat pemerintahan (misalnya, Penghargaan Keunggulan Manajemen Sektor Publik dilakukan di Australia); (b) jaringan berorientasi inovasi (misalnya, Jaringan Badan Perubahan Negara di Finlandia); (c) program mobilitas untuk menyatukan karyawan melintasi batas organisasi (mis., Interchange Canada atau Twinning in Europe);dan (d) pendekatan holistik untuk staf manajerial (mis., Cara Baru untuk Bekerja—Belgia), menciptakan kerangka kerja yang mendukung inovasi.

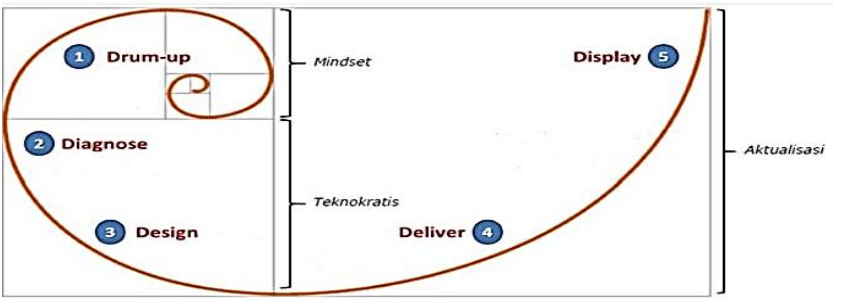
Seperti yang diramalkan para ahli, revolusi industri keempat akan menjadi era yang dapat menentukan hidup matinya suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah/negara. Herawati et al. (2021) meneliti lebih jauh ekologi administrasi pembangunan di Indonesia dalam menghadapinya. Tantangan era revolusi industri 4.0 adalah tentang: (1) perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat yang semakin kritis mendorong reformasi administrasi pembangunan di semua tata kelola organisasi publik; (2) perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat yang semakin kritis mendorong reformasi administrasi pembangunan di seluruh tata kelola organisasi publik; (3) sebagai pengaruh revolusi industri 4.0, tuntutan pelayanan publik yang berkualitas di masyarakat meningkat pesat, namun kapasitas organisasi publik masih terbatas; dan (4) pendidikan bidang administrasi pembangunan, baik pengembangan kurikulum, maupun metode pembelajarannya, pada umumnya masih konvensional dalam penelitiannya. Secara ringkas, hasil kajian tentang kondisi strategis mengenai administrasi pembangunan merupakan pilar

pembangunan administrasi publik yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan publik, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bahkan desa.

Laboratorium Inovasi (Labinov) merupakan salah satu terobosan contoh terobosan dalam pembaharuan administrasi pembangunan yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Labinov juga turut dalam mendorong reformasi birokrasi dan pelayanan publik di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan pesan Presiden RI, Joko Widodo, yang meminta seluruh elemen pemerintah untuk bekerja tidak menggunakan cara-cara biasa namun menggagas terobosan baru untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Labinov adalah pendampingan yang diberikan oleh LAN kepada instansi mitra untuk menghasilkan inovasi secara *Co-Creation*. Dalam rentang waktu 2015 sampai dengan 2019, Laboratorium inovasi sudah dilaksanakan di 84 daerah di seluruh Indonesia dan telah berhasil menghasilkan 9.191 ide inovasi. Pada tahun 2020 ini tercatat total ide inovasi yang dihasilkan dari Program Laboratorium Inovasi Prioritas Nasional adalah 265 Ide Inovasi, dengan lokus Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Model Laboratorium Inovasi yang dikembangkan oleh LAN memiliki lima tahapan atau yang dikenal dengan istilah 5D. Tahap pertama adalah *Drum Up* yang digunakan untuk membangkitkan semangat untuk ber-inovasi. Tahap kedua adalah *Diagnose* sebagai kegiatan mengidentifikasi potensi dan kemudian memunculkan ide inovasi. Tahap selanjutnya adalah *Design* yang akan mengupas tentang bagaimana mendesain sebuah inovasi sampai dengan rencana aksi yang akan dilakukan. Masuk tahap keempat ada *Delivery* yang diisi dengan pemantauan rencana aksi inovasi yang dilakukan. Tahap kelima adalah *Display* untuk memamerkan hasil inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, biasanya dikemas dalam sebuah acara bertajuk Gelar Karya Inovasi (Utomo, 2016). Laboratorium Inovasi (Labinov) LAN menerima penghargaan sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan

Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).



Gambar 1. Mendorong Inovasi Administrasi Pembangunan Dengan Teknik 5-D yang dikembangkan oleh LAN RI (Utomo, 2016)

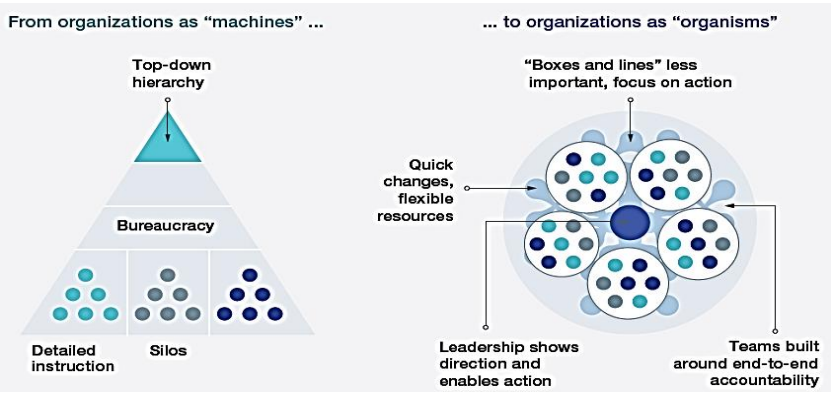
Modernisasi Administrator Pembangunan

Organisasi sektor publikyang ingin relevan dengan perubahan cepat sekarang ini harus bisa membangun struktur dan tata kelola kelembagaan yang memfasilitasi pembentukan ekosistem inovasi administrasi pembangunan (Nurharyoko et al., 2020). Aparatur sipil negara (ASN) adalah tulang punggung dalam menjalankan tujuan akhir dari strategi pembangunan administrasi, yakni pemerintahan yang baik dan pembangunan serta pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu sudah sepatutnya perlu ada peningkatan kapasitas, standar dan kemampuan profesional dengan menganut *citizen-centricity* dan budaya inovasi. Modernisasi pegawai negeri sebagai pelayan publik (*civil servant*) sejatinya perlu dilakukan pada lima area utama, yakni (ASEAN Secretariat, 2021): (i) **kapabilitas dan kapasitas (*capability and capacity*)**, yaitu manajemen sumber daya manusia dan talenta, kapasitas yang tidak memadai dan kemampuan, kendala sumber daya, dan penggunaan sumber daya manusia dan fiskal secara efisien; (ii) **keterlibatan warga (*citizen engagement*)**, yaitu transparansi dan keterbukaan, layanan pemerintah yang berpusat pada warga dan inklusivitas; (iii) **penyampaian**

layanan digital (*digital service delivery*), yakni penyediaan layanan digital kepada publik, digitalisasi, dan pemerintahan digital; (iv) **efektivitas dan kolaborasi (*effectiveness and collaboration*)**, yakni birokrasi yang efektif, koordinasi lintas lembaga, dan kerjasama, serta pemerintahan bersama; dan (v**) kepemimpinan (*leadership*)**, yakni kepemimpinan, kepemimpinan transformatif, dan kepemimpinan layanan sipil dan pengembangan.

Perbaikan pelayanan publik dalam kerangka reformasi birokrasi di Indonesia telah diawali dari sistem pengadaan (rekrutmen) ASN yang baik. Penerapan *Computer Assisted Test* (CAT) tahun 2013, rekrutmen calon ASN semakin berkeadilan, transparan, dan mampu menjaring ASN dengan kualitas dasar yang lebih baik, lebih sesuai kebutuhan organisasi. CAT terpilih sebagai Top 10 (sepuluh) Global Public Sector Performance oleh World Bank tahun 2018. Hal ini menjadi prestasi yang sangat menggembirakan dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi mulai dari aspek hulu/input rekrutmen SDM aparatur yang berkualitas sebagai aktor utama dalam mendorong inovasi administrasi pembangunan.

Organisasi tradisional yang dominan dirancang terutama untuk stabilitas memiliki kecenderungan hirarki yang statis, silo, dan terstruktur. Kerangka seperti ini strukturnya kuat, tetapi seringkali kaku dan bergerak lambat. Sebaliknya, organisasi yang gesit (*agile*) dirancang untuk stabilitas dan dinamisme adalah berupa jaringan tim dengan budaya *people-centered* dan menciptakan nilai bersama bagi semua kepentingan. Dengan budaya organisasi demikian, maka pembelajaran dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Model organisasi demikian memiliki kemampuan untuk mengkonfigurasi ulang strategi, struktur, proses, orang, dan teknologi secara cepat dan efisien. Organisasi tradisional adalah bagaikan mesin, sedangkan organisasi yang gesit adalah bagaikan organisme yang hidup (gambar 2). *Agile organization* mampu menambah kecepatan dan daya saing, serta adaptif dalam kondisi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambigu (VUCA) (Aghina et al., 2018).



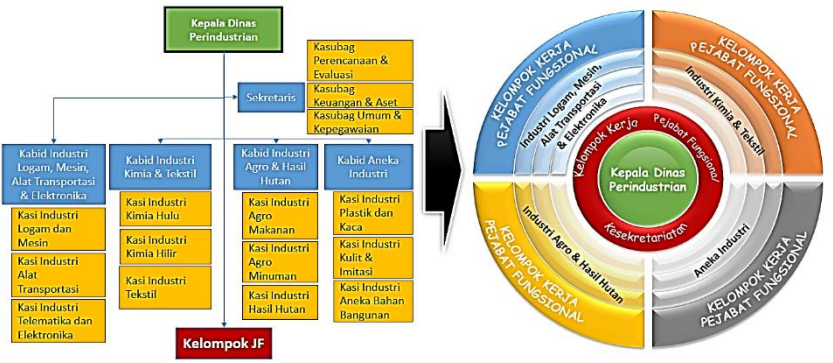
Gambar 2. Model *agile organization* oleh Aghina et al. (2018)

Peran birokrasi terhadap industri di Indonesia belum signifikan efektif mendorong pertumbuhan industri dan ekspor. Berbeda halnya seperti yang telah dilakukan di Jepang, Korea, Singapura, dan Cina Taipei. Pengalaman negara lain dalam upayanya menerapkan kebijakan dan transformasi struktural di dalam birokrasi menjadi suatu pembelajaran yang perlu dilakukan. Relasi yang baik antara industri dengan pemerintah juga dipengaruhi oleh institusi birokrasi professional, yang selanjutnya mampu mendorong bersama-sama memajukan sektor industri. Namun, birokrasi yang tidak baik turut mempengaruhi minat investasi dan pengembangan industri dimana dalam banyak kasus birokrasi kerap menyulitkan pengembangan peluang bisnis baru.

Untuk itu reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas Presiden Joko Widodo pada periode kedua kepemimpinannya. Reformasi birokrasi dan reformasi struktural menjadi sangat penting, agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin gesit. Pola pikir dan *mindset* birokrasi dituntut untuk berubah dengan kecepatan melayani sebagai kunci bagi reformasi birokrasi. Presiden juga akan serius menyederhanakan birokrasi dengan meminta eselonisasi cukup dua level saja, yakni eselon I (jabatan pimpinan tinggi-JPT Utama dan Madya) dan II (JPT pratama), sedangkan eselon III (jabatan administrator) dan IV-V (jabatan pengawas) diganti dengan jabatan fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi. Semangat birokrasi yang gesit

(*agile bureaucracy*) dengan ramping struktur dan kaya fungsi menjadi paradigma perubahan dan nilai-nilai baru dalam tata kelola pemerintahan. JF sebagai *backbone* dan motor birokrasi dituntut untuk cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang memasuki era revolusi industri keempat (Kurniawan & Simandjorang, 2020).

Model birokrasi Indonesia memiliki kecenderungan hirarki statis, silo, dan terstruktur bagaikan mesin, seringkali kaku dan bergerak lambat dalam merespon perubahan (*weberian bureaucracy*). Sebaliknya, birokrasi yang gesit (*agile bureaucracy*) dirancang dinamis seperti jaringan organisme yang hidup, maka pengambilan keputusan dan pelayanan dilakukan dengan cepat (*living bureaucracy* dan *holacracy*). Yang perlu diperbanyak adalah gugus tugas atau kelompok kerja yang diisi oleh para pejabat fungsional sesuai dengan bidang tugas dan rumpun keahlian, keterampilan dan kompetensinya masing-masing sehingga jelas ke depannya adalah pengarusutamaan (*mainstreaming*) JF di organisasi yang mengurusi bidang perindustrian (gambar 3).



Gambar 3. *Agile Bureucracy* sektor perindustrian (Kurniawan & Simandjorang, 2020)

Kepemimpinan di eselon III dan IV-V kini tidak lagi dipegang oleh pejabat administrator dan pengawas. Namun sudah bergeser tampuknya pada seorang pejabat fungsional di masing-masing kelompok kerja yang berperan sebagai "koordinator" yang dipilih secara demokrasi dengan musyawarah mufakat dalam unit kerja tersebut. Bukanlah menjadi suatu jabatan baru,

sebagaimana yang diperkenalkan oleh Kementerian PANRB dalam merespon instruksi Presiden Jokowi dalam perampingan birokrasi ini, yakni jabatan koordinator dan sub-koordinator yang seolah-olah hanya berganti kulit sebagai pengganti dari jabatan administrator dan pengawas. Selanjutnya turut menjadi perhatian adalah kepemimpinan transformatif di level pejabat pimpinan tinggi (PPT), khususnya PPT pratama sebagai sentral dalam mengorganisasikan kelompok kerja JF. Dan kedepannya sebagaimana dalam Peraturan MenPANRB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, maka pemerintah perlu memfasilitasi peningkatan kompetensi manajerial bagi pejabat fungsional, agar mampu mengkoordinasikan tim dengan optimal, sekaligus melengkapi kompetensi teknis dan sosio-kultural.

Birokrasi bukanlah lahan subur untuk inovasi. Meskipun inovasi sulit dipaksakan, namun proses inovasi dapat dikelola. Namun demikian, solusi yang lebih membumi adalah investasi dalam pengembangan karir dan kompetensi para birokrat baik di level manajerial dan staf adalah langkah kunci untuk memfasilitasi inovasi administrasi pembangunan (Radonić & Milosavljević, 2019). Pengembangan pelayanan publik yang terpadu dengan status yang berbeda dapat menjadi tulang punggung untuk stabilisasi aparatur negara dan membuat para "abdi negara" tersebut kurang terpolitisasi. Hal ini juga akan memungkinkan untuk pengembangan kontinuitas dalam pelayanan publik, yang dapat diidentifikasi menjadi budaya administratif dan standar perilaku yang terpadu dalam mendorong modernisasi administrator pembangunan (Randma-Liiv & Drechsler, 2017).

Penutup

Kita semua mengetahui bahwa inovasi dalam administrasi pembangunan adalah "harga mati". Pemerintah harus terus mencari solusi baru untuk memecahkan masalah sosial, politik, dan ekonomi. Metode manajemen dalam administrasi publik juga harus diperbarui. Karena

organisasi sektor publik di mana-mana semakin menekankan perekrutan dan retensi untuk menggantikan generasi yang lebih tua, peluang untuk inovasi semakin meningkat. Dalam proses inovasi administrasi publik, metode dan alat inovatif dieksplorasi untuk menghasilkan nilai publik melalui cara yang lebih efisien dan partisipatif daripada cara tradisional. Tantangan terbesar untuk mempromosikan inovasi publik adalah merumuskan dan mengadopsi strategi bersama yang tidak hanya mengarah pada proyek inovatif yang lebih banyak dan lebih baik, tetapi juga bahwa inovasi adalah bagian dari mentalitas para pelayan dan budaya organisasi entitas publik.

Organisasi publik saat ini sedang mengalami transformasi internal yang mendalam yang dipercepat oleh pandemi covid-19 dan meningkatnya volume permintaan layanan publik dari warga. Situasi baru yang kita alami di seluruh dunia ini telah menyoroti lebih dari sebelumnya kebutuhan akan perbaikan nyata dalam administrasi elektronik dan sistem pemrosesan administrasi publik, selain banyak manfaat yang datang dengan memanfaatkan potensi inovatif dari institusi. Administrasi publik yang dijalankan pemerintah telah menginvestasikan lebih banyak sumber daya mereka dalam teknologi dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan investasi ini dapat disebabkan, di antara banyak faktor lainnya, oleh ledakan pekerjaan jarak jauh dan daring (*online*) sebagai akibat dari pandemi, karena banyak administrasi melihat interaksi tatap muka berkurang secara drastis, yang merupakan tantangan besar yang telah diselesaikan beberapa orang. Lebih baik dari yang lain dan itu telah menunjukkan pentingnya inovasi di sektor publik. Apa yang membuat satu reformasi atau layanan baru adalah sebuah inovasi, dan yang lainnya tidak? Seringkali tampaknya ada konotasi normatif yang terlibat di dalamnya membedakan inovasi dari perubahan. Karena inovasi itu baik, reformasi yang berhasil harus demikian pula inovatif.

Daftar Pustaka

Aghina, W. et al. (2018). *The five trademarks of agile organizations, in Agile Compendium*. New York: McKinsey&Company.

ASEAN Secretariat. (2021). *Civil Service Modernisation in ASEAN: Towards A Future-Ready Civil Service*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Demir, F. (2022). *Innovation in the Public Sector: Smarter States, Services and Citizens*. Cham, Switzerland: Springer.

Farazmand, A. (2001). *Handbook of Comparative and Development Public Administration, 2nd edition, revised and expanded*. New York: Marcel Dekker, Inc.

Herawati, A.R., et al. (2021). *The Challenges of Industrial Revolution 4.0: An Evidence from Public Administration Ecology in Indonesia*. Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Singapore, March 7-11, 2021. IEOM Society International, 4896-4904.

Kurniawan, A., & Simandjorang, B.M.T.V. (2020). *Utilisasi Jabatan Fungsional Dalam Implementasi Making Indonesia 4.0*. Jurnal Kelitbangan Iptekino-sosekbud dan Pembangunan, Vol. 03 No. 03, 57-76.

Nurharyoko, G.O., et al. (2020). *Inovasi Birokrasi: Membuat Kerja Birokrat Lebih Bermakna*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

Radonić, M., & Milosavljević, M. (2019). *Human Resource Practices, Failure Management Approaches and Innovations in Serbian Public Administration*. Transylvanian Review Of Administrative Sciences, 15(SI), 77-93.

Randma-Liiv, T., & Drechsler, W. (2017), *Three decades, four phases: Public administration development in Central and Eastern Europe, 1989-2017*. International Journal of Public Sector Management, Vol. 30 No. 6-7, 595-605.

Utomo, T.W.W. (2016*). Innovating Indonesia's Public Sector with SECI Model: NIPA's Experience in Managing Innovation Laboratory*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.

Profil Penulis



Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang, S.E., M.S.E.

Penulis lahir di Jakarta, 2 Januari 1990, merupakan Peneliti di Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, sejak Januari 2021. Penulis juga pernah bekerja di Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Jakarta tahun 2018-2021 pada Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dan Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara. Ia pernah bekerja di Kementerian PPN/ Bappenas tahun 2014–2017 sebagai Tenaga Ahli pada Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional dan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, di Jakarta, serta membantu Bappenas sebagai Technical Analyst for International Development Cooperation dari United Nations Development Programme (UNDP).

Penulis lulus Sarjana Ekonomi dari Universitas Sumatra Utara tahun 2011, dan Magister Sains Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 2013. Sejumlah tulisan telah diterbitkan oleh media cetak dan online nasional seperti Kompas, Tempo, Republika, Kontan, Solopos, Tribun, Analisa, Detik.com, dan artikel jurnal, prosiding hingga buku terkait dengan isu kebijakan publik, lingkungan hidup, ekonomi, dan reformasi birokrasi. Penulis aktif dalam gerakan konservasi alam di kawasan Danau Toba. Puncaknya sebagai salah satu saksi kunci dalam pengadilan pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan PT Gorga Duma Sari (GDS) di kawasan lindung Tele, Samosir tahun 2012-2014 yang menjadi pemberitaan nasional dan menjadi pionir kasus yang dilakukan secara *second line enforcement* oleh pemerintah pusat.

Email Penulis: vincent.simandjorang@gmail.com

10

PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Dr. Drs. Wisber Wiryanto, M.M.
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pendahuluan

Perencanaan dan administrasi pembangunan merupakan konsep-konsep yang berasal dari Barat kemudian dikembangkan sebagai instrumen pembangunan untuk diterapkan di negara berkembang (dunia ketiga). Di Indonesia, terdapat permasalahan perencanaan dan administrasi pembangunan yang seringkali tidak sinkron; tidak berjalannya mekanisme administrasi pembangunan dan fungsi-fungsinya serta permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tulisan ini disusun untuk membahas alternatif solusinya, melalui: (1) penerapan mekanisme administrasi pembangunan yang meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan; dan/atau (2) penerapan administrasi pembangunan perspektif Islam dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional secara efisien dan efektif.

Perencanaan Pembangunan

Sejak tahun 1965 ada kecenderungan tulisan dan pembahasan perencanaan pembangunan. Arthur Lewis pada tahun 1965 menulis buku *Development Planning";* dan Albert Waterston menulis buku*"Development Planning. Lesson of Experience"* (Tjokroamidjojo, 1983: 29). Hal ini menunjukkan, perencanaan pembangunan berasal dari Barat kemudian dikembangkan sebagai instrumen

pembangunan untuk diterapkan di negara berkembang (dunia ketiga).

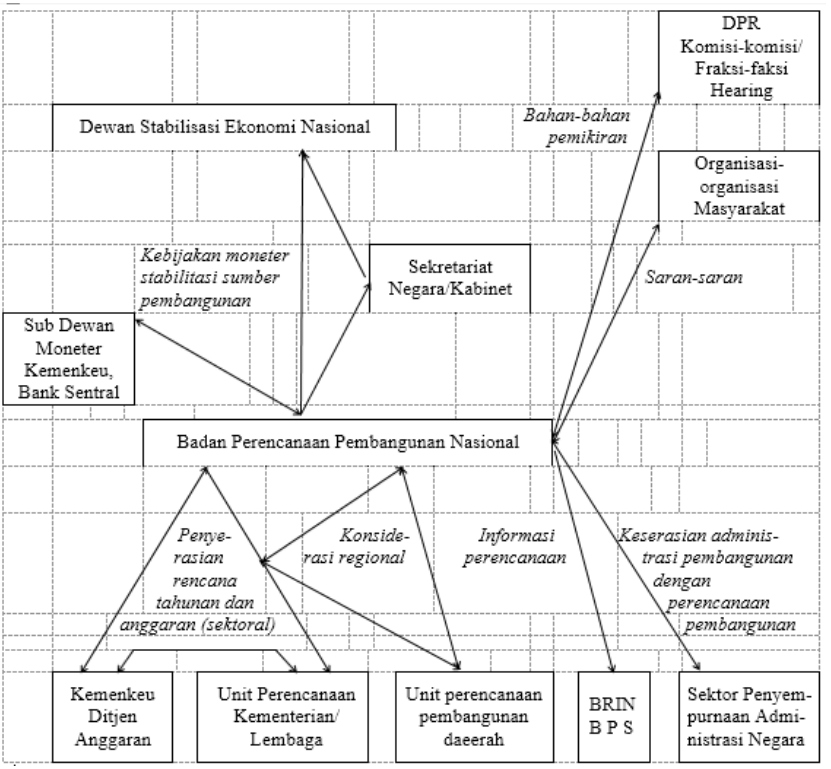
Arti dan makna perencanaan pembangunan dapat dijelaskan dengan menjawab pertanyaan apa hakikat, bagaimana cara penerapannya dan untuk apa nilai guna perencanaan pembangunan? Pertama, perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber pembangunan untuk mencapai tujuan sosial ekonomi secara efisien dan efektif (Tjokroamidjojo, 1983: 12). Dalam perencanaan pembangunan orang bekerja dengan sasaran pembangunan yang lebih banyak daripada tersedianya faktor produksi sehingga menimbulkan kebutuhan untuk memilih sasaran dalam skala prioritas (Salim, 1984: 14). Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi pembangunan. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dalam mengembangkan potensi yang ada (Sasmita, 1997: 48).

Kedua, perencanaan pembangunan merupakan cara yang diterapkan pemerintahan suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan melalui rencana. Perencanaan pembangunan dapat diterapkan dengan cara melalui proses pentahapan: (1) Penyusunan rencana yang terdiri dari unsur-unsur: (a) tinjauan keadaan; (b) perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana *(forecasting)*; (c) penetapan tujuan rencana; (d) identifikasi kebijaksanaan dan kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana; (e) tahap persetujuan rencana dari putusan di bidang teknis hingga proses politik; (2) Penyusunan program rencana, tahap ini perlu dibantu dengan suatu *flow chart, operation plan* atau *network plan;* (3) Pelaksanaan rencana. Kebijaksanaan perlu diikuti implikasi pelaksanaanya, bahkan memerlukan penyesuaian-penyesuaian; (4) Pengawasan rencana mengusahakan supaya pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencananya. Untuk ini diperlukan sistem monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan *feedback;* (5) Evaluasi

membantu kegiatan pengawasan yang hasilnya untuk perbaikan perencanaan (Tjokroamidjojo, 1983: 57-60).

Ketiga, perencanaan pembangunan mempunyai nilai guna untuk mencapai tujuan dengan lebih baik. Alasannya: (1) adanya suatu pengarahan kegiatan yang ditujukan kepada tujuan pembangunan; (2) adanya suatu perkiraan *forecasting* terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui; (3) adanya kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik; (4) adanya skala prioritas dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran dan kegiatan; dan (5) adanya suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/evaluasi (Tjokroamidjojo, 1983: 9).

Pada umumnya di negara berkembang mempunyai dewan atau komisi yang menjadi badan pengesahan rencana pembangunan yang bersifat politis. Di Indonesia fungsi ini dilakukan oleh Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional dan Kabinet Pemerintahan pada umumnya. Seringkali dibentuk Dewan Moneter yang keanggotaannya terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Sentral dan lain-lain. Ada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai perumus rencana pembangunan, alokasi kebutuhan dana pembangunan dari segi pertimbangan nasional. Perencanaan anggaran berperan dominan, dilakukan oleh Ditjen Anggaran. Pada Kementerian/ Lembaga dan Daerah perlu dibentuk unit perencanaan yang merumuskan dan menyerasikan rencana sektoral dan regional. Berbagai lembaga sangat berfungsi membantu proses perencanaan, seperti Lembaga Penelitian (BRIN dahulu LIPI) dan Lembaga Statistik (BPS). Sumber informasinya diperlukan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



Gambar 1:
Model Kelembagaan Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Sumber: Diolah dan diperbaharui oleh penulis dari sumber Tjokroamidjojo (1972 &1983).

Selanjutnya, lembaga atau sektor penyempurnaan administrasi negara (LAN) sebagai lembaga *think-tank* memberi masukan pemikiran keserasian administrasi pembangunan dengan perencanaan pembangunan. lembaga non pemerintahan sering mempunyai fungsi penting dalam perencanaan pembangunan. Bahkan Perguruan Tinggi (hasil-hasil penelitian), berbagai kelompok kepentingan berfungsi memberikan informasi dan dialog untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pelibatan organisasi masyarakat dalam membangun menunjang pembangunan berencana. Model perencanaan pembangunan di Indonesia (lihat gambar 1).

Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berasal dari disiplin ilmu administrasi negara yang berkembang pada akhir abad ke-19 dan dipelopori oleh penulis administrasi pemerintahan di Amerika Serikat, antara lain Woodrow Wilson, Frank J. Godnow dan Leonard D. White. Hal ini menunjukkan, bahwa administrasi pembangunan berasal dari Barat kemudian dikembangkan oleh mereka sebagai instrumen pembangunan untuk diterapkan di negara berkembang (dunia ketiga).

Arti dan makna administrasi pembangunan dapat dijelaskan dengan menjawab pertanyaan apa hakikat, bagaimana cara penerapannya dan untuk apa nilai guna administrasi pembangunan? Pertama, administrasi pembangunan adalah administrasi yang berorientasi terhadap pembangunan (Handayaningrat, 1982: 6). Pengertian ini menekankan tujuan administrasi pembangunan. Senada dengan pengertian ini, administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program atau proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan (Riggs, 1994: 75). Pengertian lainnya lebih menekankan administrasi pembangunan dan fungsi-fungsinya. Administrasi pembangunan berarti kemampuan administrasi untuk mendesain suatu rencana pembangunan yang efektif bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan (Tjokroamidjojo, 1978: 34). Dalam hal ini, administrasi pembangunan mencakup rencana dan pelaksanaan pembangunan. Sama halnya, administrasi pembangunan adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan berencana dalam berbagai aspek kehidupan melalui perumusan rencana, pelaksanaan (implementasi) dan evaluasi dalam rangka *nation-building* (Siagian, 1976: 111). Definisi yang lebih lengkap lagi, bahwa administrasi pembangunan mencakup rencana, pelaksanaan dan evaluasi untuk tujuan pembangunan nasional. Di Indonesia, administrasi pembangunan meliputi perencanaan pembangunan, pelaksanaan (proyek) pembangunan, pemantauan dan evaluasi (kinerja), serta

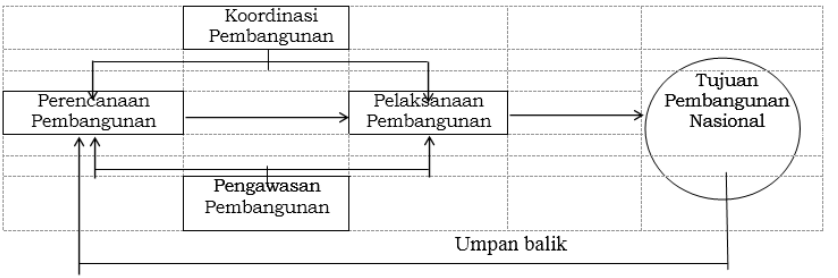
pengawasan pembangunan (Kartasasmita, 1997: 105-146). Jadi, administrasi pembangunan pada hakikatnya adalah kemampuan administrasi yang mencakup perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, koordinasi dan pengawasan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara lebih baik, efisien dan efektif.

Kedua, administrasi pembangunan merupakan salah satu cara yang diterapkan oleh pemerintahan suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan melalui usaha pengendalian termasuk analisa kebijakan. Penerapan administrasi pembangunan dapat dilakukan dengan cara melakukan langkah-langkah pokok analisa kebijakan: (1) pengkajian persoalan untuk menemukan permasalahan dan merumuskannya dalam hubungan sebab akibat; (2) Penentuan tujuan yang ingin dicapai atau dihindari secara jelas, realistis dan terukur; (3) perumusan alternatif adalah alat atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan; (4) penyusunan model untuk mempermudah deskripsi persoalan, prediksi akibat-akibat dalam perumusan dan penentuan alternatif; (5) penentuan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai berbagai alternatif menyangkut ekonomi, politik, administratif dan nilai-nilai abstrak yang fundamental. Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki Pancasila dan UUD 1945; (6) penilaian alternatif berdasarkan kriteria di atas untuk mendapatkan gambaran tingkat efektivitas dan feasibilitas tiap alternatif dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien; dan (7) perumusan rekomendasi yang memberikan gambaran sejumlah pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu (Tjokroamidjojo & Mustopadidjaja, 1988: 100-102).

Ketiga, administrasi pembangunan memiliki nilai guna sebagai pengendalian usaha oleh pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendorong atau mendukung perubahan suatu masyarakat kepada keadaan yang lebih baik di kemudian hari. Tujuan umumnya adalah pembinaan bangsa *(nation building)* dan

perkembangan sosial ekonomi. Perkembangan kemajuan sering disebut sebagai modernisasi (Tjokroamidjojo, 1983: 15). Sejumlah buku dan bahasan administrasi pembangunan dihasilkan oleh pakar Ilmu Administrasi Negara. Diantara mereka tercatat pernah menjadi pimpinan LAN: (1) Awaloeddin Djamin, menulis "Masalah Organisasi dalam Administrasi Pembangunan"; (2) Sondang P. Siagian, menulis "Administrasi Pembangunan"; (3) Bintoro Tjokroamidjojo, menulis "Pengantar Administrasi Pembangunan"; (4) J.B. Kristiadi, menulis "Administrasi/Manajemen Pembangunan"; dan (5) Moestopadidjaja A.R., menulis "Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Penerapan" (ditulis bersama Bintoro Tjokroamidjojo). Hal ini menunjukkan peran LAN memberi masukan administrasi pembangunan.

Mekanisme fungsi-fungsi Administrasi Pembangunan:



Gambar: 2
Model Mekanisme Administrasi Pembangunan untuk Tujuan Pembangunan Nasional
Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber: Handayaningrat (1982); Kartasasmita (1997); Riggs, (1994); Siagian (1976) dan Tjokroamidjojo (1978).

Berdasarkan uraian hakikat perencanaan dan administrasi pembangunan tersebut maka dapat digambarkan model mekanisme administrasi pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan pembangunan. Perencanaan pembangunan setelah disahkan kemudian memasuki tahapan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini dapat terjadi permasalahan bahwa pelaksanaan

pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan dan permasalahan lain-lain. Tidak berfungsinya koordinasi pembangunan dan/atau pengawasan pembangunan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, permasalahan itu dijadikan sebagai umpan balik memperbaiki perencanaan pembangunan berikutnya. Jadi, fungsi koordinasi pembangunan dan fungsi pengawasan pembangunan sangat penting diterapkan pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan agar tujuan pembangunan nasional tercapai secara lebih baik, efisien dan efektif.

Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Di Indonesia

Pengalaman perencanaan dan administrasi pembangunan di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai pegangan berupa rencana pembangunan, dari tahun 1947 hingga sekarang. Tapi sejak dulu hingga kini dengan nyata pula tampak adanya perbedaan antara rencana dan realisasi (Sjahrir, 1987: 174). Permasalahan lainnya, tidak berjalannya mekanisme administrasi pembangunan dan fungsi-fungsinya; dan terjadinya masalah lingkungan yang melanda dunia yaitu pandemi *Covid-19* sepanjang tahun 2020-2021. Tulisan ini difokuskan membahas permasalahan perencanaan dan administrasi pembangunan dan mekanisme fungsi-fungsinya.

Tabel 1: Perencanaan dan Administrasi Pembangunan di Indonesia 1945-2024

No.	Tahun	Presiden/ Wakil	Rencana Pembangunan Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	1945-1956	Soekarno/ Hatta	-
	1956-1967	Soekarno/-	Repelita (1956-1960)
II.	1967-1973	Soeharto/-	Repelita I (1969/70-1973/74)
	1973-1978	Soeharto/ Hamengku Buwono IX	Repelita II (1974/75-1978/79)
	1978-1983	Soeharto/ Adam Malik	Repelita III (1979/80-1983/84)
	1983-1988	Soeharto/ Umar Wirahadikusumah	Repelita IV (1984/85-1988/89)
	1988-1993	Soeharto/ Sudharmono	Repelita V (1989/90-1993/94)
	1993-1998	Soeharto/ Tri Sutrisno	Repelita VI (1994/95-1998/99 tak selesai)
	1998-1998	Soeharto/ B. J. Habibie	
III.	1998-1999	B. J. Habibie/-	-
IV.	1999-2001	Abdurachman Wachid/ Megawati Soekarnoputri	-
V.	2001-2004	Megawati Soekarnoputri/ Hamzah Haz	-
VI.	2004-2009	Susilo Bambang Yudoyono/ Jusuf Kalla	RPJMN I (2004-2009)
	2009-2014	Susilo Bambang Yudoyono/ Budiono	RPJMN II (2009-2014)
VII.	2014-2019	Joko Widodo/ Jusuf Kalla	RPJMN III (2014-2019)
	2019-2024	Joko Widodo/ Ma'ruf Amin	RPJMN IV (2019-2024)

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber: Keputusan Preesiden tentang Repelita dan Peraturan Presiden tentang RPJMN.

Data perencanaan dan administrasi pembangunan di Indonesia 1945-2024, memuat: data: (1) Tahun Penyelenggaraan Pemerintahan periode tertentu (kolom 2); Nama Presiden/Wakil Presiden yang menyelenggarakan pemerintahan periode tertentu (kolom 3); dan perkembangan rencana pembangunan lima tahunan (kolom 4). Data yang disajikan menunjukkan: (1) tidak ada dokumen rencana pembangunan lima tahunan (Repelita) dalam kurun waktu 1945-1956; (2)

penyelenggaraan Repelita VI (1994/95-1998/99) yang tidak selesai akibat masalah korupsi, kolusi dan nepotisme; serta terjadi resesi global; (3) terjadi kekosongan perencanaan pembangunan lima tahunan dalam kurun waktu 1998-2004. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan perencanaan dan administrasi pembangunan. Berdasarkan permasalahan itu, pemerintah memandang *urgent* untuk menyusun kembali rencana pembangunan lima tahunan ke dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (lima tahunan): RPJMN I (2004-2009); RPJMN II (2009-2014); RPJMN III (2014-2019); RPJMN IV (2019-2024) yang sedang berjalan saat ini. Oleh karena itu, diperlukan mengantisipasi adanya permasalahan perencanaan dan administrasi pembangunan. Selanjutnya, permasalahan tersebut perlu dicarikan alternatif solusinya agar pencapaian tujuan pembangunan nasional dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Solusi yang Ditawarkan

Alternatif solusi yang ditawarkan yaitu menjalankan mekanisme administrasi pembangunan dan/atau menerapkan administrasi pembangunan dalam perspektif Islam. Pertama, menjalankan mekanisme administrasi pembangunan dan fungsi-fungsinya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan pembangunan. Dalam hal ini permasalahan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan. Tidak berfungsinya koordinasi pembangunan dan pengawasan pembangunan sejak tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berakibat tujuan pembangunan nasional tidak tercapai. Oleh karena itu, fungsi koordinasi pembangunan dan fungsi pengawasan pembangunan sangat penting diterapkan baik pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan agar tujuan pembangunan nasional tercapai secara lebih baik, efisien dan efektif. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan pembangunan

Kedua, menerapkan administrasi pembangunan dalam perspektif Islam: Indonesia dibandingkan negara-negara lain memiliki keunggulan demografi karena jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar di seluruh dunia. Pemeluk agama Islam di Indonesia pada tahun 2010 tercatat sebanyak 207,2 juta jiwa atau mencapai 87,18 persen (BPS, 2011). Indonesia menjadi negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia (Karnadi, 2022). Potensi ini harus dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ada 3 (tiga) alasan bagi penerapannya di Indonesia, antara lain: (1) adanya perintisan administrasi Islam oleh tokoh-tokoh ilmuwan zaman keemasan Islam yang mempunyai relevansi dengan konsep dan kategori-kategori administrasi negara masa kini. Kita dapat mempelajari pendapat sarjana-sarjana Islam tentang administrasi negara dari Imam al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan lain-lain (Sherwani, 1964). Imam al-Ghazali berpendapat tentang pendapatan dan pengeluaran yang halal dan haram, dan sinergi elemen pemerintahan meliputi penguasa, hakim, ulama dan rakyat melalui penegakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Wiryanto, 2021). Ibnu Khaldun berpendapat tentang perencanaan dan pengawasan, kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan kode etik serta kepemimpinan (Wiryanto, 2020: 21). Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat tentang pengarahan *(commanding);* pengkoordinasian *(coordinating);* pemeriksaan *(auditing)* atau pengawasan *(controlling);* dan pelaporan *(reporting);* serta pemberian penghargaan dan sanksi (Wiryanto, 2021: 28). Tokoh-tokoh itu mempunyai pemikiran bersumber dari al-Qur'an, Hadits dan khasanah Islam mengenai administrasi negara. Adanya penerapan standar halal haram, penegakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam pekerjaan bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan individu yang seimbang kesejahteraan jasmani dan rohani.

Kemudian, (2) adanya penelitian administrasi Islam di Indonesia. Penelitian ini sudah lama dilakukan dan belum dilakukan secara berkesinambungan saban tahun. Penelitian ini menyajikan potret kementerian agama, pendidikan Islam, hukum Islam, penyelenggaraan naik haji dan majelis ulama, sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1980-an (Noer, 1978 & 1983). Kemudian, penelitian "Sistem Otoritas dan Administrasi Islam" yang menyajikan potret tentang pejabat agama masa kesultanan dan kolonial di Palembang sebelum Indonesia merdeka (Rahiem, 1998). Berikutnya, penelitian "Administrasi Islam di Indonesia", fokus bahasan seperti sebelumnya tapi menyajikan potret tahun 2000-2010-an (Wiryanto, 1998: 482). Kemudian, penelitian ini direvisi melalui pemutakhiran data untuk mengidentifikasi perkembangan terkini dan ditemukan administrasi Islam berperan dalam pembangunan di Indonesia (Wiryanto, 2020: 33). Penelitian ini menggambarkan penyelenggaraan administrasi Islam di Indonesia selama ini namun masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, perlu penelitian aspek-aspek yang belum diteliti dan dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat Indonesia; dan (3) adanya Islamisasi Ilmu Administrasi Negara. Sekularisasi ilmu administrasi negara yang dipengaruhi teori Barat telah mengosongkan ilmu dari wahyu mengakibatkan kebingungan, penyalahgunaan otoritas, korupsi, tragedi dan kehancuran (Wiryanto, 2016: 173). Sebagai solusinya maka perlu dilakukan Islamisasi pengetahuan melalui langkah-langkah penulisan buku ajar administrasi negara perspektif Islam untuk perguruan tinggi di Indonesia (Wiryanto, 2017: 84). Dengan kata lain, diperlukan pengembangan teori administrasi negara non Barat melalui Islamisasi administrasi negara (Wiryanto, 2018a: 219). Kecuali itu, perlu menengok ke negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam untuk memperoleh masukan *best practiced* penerapan administrasi Islam terkini.

Ketiga alasan tersebut mengindikasikan urgensinya penerapan administrasi pembangunan perspektif Islam di Indonesia. Kegagalan peniruan penerapan model

pembangunan Barat di dunia muslim, mendorong kita semua untuk mencari alternatif yang lebih sesuai, termasuk juga masalah administrasi pembangunan (Al-Buraey, 1986: 13). Administrasi pembangunan perspektif Barat tak sepenuhnya bisa diterapkan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Melalui penerapan administrasi pembangunan dalam perspektif Islam maka penerapan administrasi pembangunan menjadi lebih sesuai dengan lingkungan demografi dan pengalaman Indonesia sehingga tujuan pembangunan nasional dapat mencapai kesejahteraan masyarakat dan individu yang seimbang antara jasmani dan rohani.

Penutup

Perencanaan dan administrasi pembangunan merupakan konsep yang berasal dari Barat kemudian dikembangkan sebagai instrumen pembangunan untuk diterapkan di Indonesia. Perencanaan dan administrasi pembangunan seringkali tidak sinkron antara rencana dan realisasinya; tidak berjalannya mekanisme administrasi pembangunan dan fungsi-fungsinya. Alternatif solusi yang ditawarkan: (1) penerapan mekanisme administrasi pembangunan yang meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan; dan/atau (2) penerapan administrasi pembangunan perspektif Islam dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional secara efisien dan efektif.

Daftar Pustaka

Al-Buraey, M. A. (1986). Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan. Jakarta: Rajawali.

BPS-Badan Pusat Statistik. (2011). Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agamna dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia. Jakarta: BPS.

Djamin, A. (1975). Peranan Administrasi dalam Pembangunan. Kertas Kerja pada Seminar di Menado.

Handayaningrat, S. (1982). Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Gunung Agung.

Karnadi, A. (2022). 8 Negara dengan Jumlah Populasi Muslim Terbanyak (2021). Jakarta: DataIndonesia.id. https://dataindonesia.id/ragam/detail/8-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-ada-indonesia

Kartasasmita, G. (1997). Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Kristiadi, J.B. (1994). Administrasi/ Manajemen Pembangunan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Noer, D. (1978) Administration of Islam in Indonesia, Ithaca, Newyork: Cornell Modern Indonesia Project, Southern Asia Program, Cornell University.

Noer, D. (1983). Administrasi Islam di Indonesia. Jakarta: CV Rajawali.

Riggs, F.W. (1994). Administrasi Pembangunan: batas-batas strategi pembangunan kebijakan dan pembaharuan administrasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Salim, E. (1984). Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan. Jakarta:Inti Idayu Press.

Sherwani, H. K. (1964). Mempelajari Pendapat Sarjana-sarjana Islam tentang Administrasi. (Terj. M. Arief Lubis). Jakarta: Tintamas.

Siagian, S. P. (1976). Administrasi Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung/

Siagian, S. P. (2001). Kerangka Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tjokroamidjojo, B. (1978). Administrasi Pembangunanangunan. Jakarta: LP3ES.

Tjokroamidjojo, B. (1983). Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.

Tjokroamidjojo, B & Mustopadidjaja A.R. (1988). Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Penerapan. Jakarta: LP3ES.

Wempy Banga. (2018). Kajian Administrasi Publik Kontemporer: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Wiryanto, W. (2016). The Need of Public Administration: An Islamic Perspective for Higher Education in Indonesia. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam, 9*(2), 172-197. *http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TAWAZUN/article/view/1237/1157*

Wiryanto, W. (2017). The Need of Public Administration: An Islamic Perspective for Higher Education in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Administrative Science (ICAS 2017) volume 43,* 82-85*, https://www.atlantis-press.com/proceedings/icas-17/25886454*

Wiryanto, W. (2018a). Developing theories of non Western Public Administration throught the Islamization of Public Administration. *Proceedings of the 2018 Annual Conference of Asian Association for Public Administration,* 210-224. https://www.atlantis-press.com/proceedings/aapa-18/25896115

Wiryanto, W. (2018b). Administrasi Islam di Indonesia. *Proceedings: Internal Conference on "Islam Nusantara, National Integrity,and World Peace"*, 481-490. http://conference.unisma.ac.id/index.php/glu2018/icinniwp2018/paper/viewFile/9/48

Wiryanto, W. (2020a). Administrasi Islam di Indonesia: Administration of Islam in Indonesia. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, *6*(2), 21–34. https://doi.org/10.33084/restorica.v6i2.1650

Wiryanto, W. (2020b). Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Ilmu Administrasi Negara. *Al Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, 4*(2), 1-21. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/alidarah/article/view/7776

Wiryanto, W. (2021). Pemikiran Imam al-Ghazali dalam Ilmu Administrasi Negara. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 11*(1). 1-25.

Profil Penulis



Dr. Drs. Wisber Wiryanto, M.M.

Lahir di Jakarta, 23 Juni 1963. Pendidikan S1 Fakultas Sosial Politik Jurusan Administrasi Negara, Universitas Islam Syekh Yusuf Jakarta (1984-1989); S2 Magister Manajemen SDM, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta (2000-2002); dan S3 Doktor Pendidikan Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor (2013-2016). Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil Lembaga Administrasi Negara (1986-2021), sebagai peneliti bidang Administrasi Negara (1994-2021). Kemudian dipindahtugaskan pada Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai pelaksana riset bidang Kebijakan Publik (2022-sekarang). Jabatan fungsional dimulai dari asisten peneliti muda hingga peneliti ahli madya (1996-sekarang). Mengikuti konferensi internasional luar negeri: Brunei Darussalam (2006); Kuala Lumpur dan Johor Bahru (2019). Hasil penelitian bersama dan individu mencapai 50 karya tulis ilmiah terindeks *google scholar* yang telah digunakan sebagai referensi. Penghargaan pemerintah: Satya Lencana Karya Satya 10 tahun (1998); Satya Lencana Karya Satya 20 tahun (2006); Satya Lencana Karya Satya 30 tahun (2016); dan Piagam Penghargaan Pengabdian 35 tahun (2021). Status perkawinan: menikah dengan seorang istri dan dikarunia anak 3 orang laki-laki. Anak sulung dan kedua tamat pendidikan sarjana; sedangkan yang bungsu pernah kuliah di Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi (2017-2019) namun tak tamat karena wafat. Tulisan ini disajikan untuk mengenang almarhum yang pada akhir hayatnya masih tercatat sebagai mahasiswa program studi S1 Administrasi Publik.

Email Penulis: wisberwiryanto@yahoo.com

11

PERANAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN BERENCANA

Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si
Universitas Subang

Fungsi Pemerintahan

Sebuah negara tidak akan berjalan dan berlangsung tanpa adanya pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan adalah kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam rangka mencapai tujuan negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. *Muhtar Haboddin (2015: 68)* mengemukakan bahwa Anthony Giddens membagi fungsi pemerintahan sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana perwakilan untuk kepentingan-kepentingan yang beragam.
2. Menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.
3. Menciptakan perlindungan ruang publik yang terbuka di mana debat bebas mengenai isu-isu kebijakan bisa terus dilanjutkan.
4. Menyediakan beberapa hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara, terutama dalam bentuk keamanan dan kesejahteraan kolektif.
5. Mengatur pasar menurut kepentingan publik dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam.

6. Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan melalui penetapan kebijakan.
7. Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui peran utamanya dalam sistem pendidikan.
8. Menopang sistem hukum yang efektif.
9. Memainkan peran ekonomis secara langsung, sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro maupun mkro ekonomi, serta penyediaan infrastruktur.
10. Membudayakan masyarakat.
11. Mendorong aliansi regional dan transnasional serta meraih sasaran global.

Bila dicermati fungsi-fungsi pemerintahan menurut Anthony Giddens tersebut sangat jelas telah menunjukkan kompleks dan luasnya ruang lingkup fungsi pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan negara tersebut mencakup hal-hal penting sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana perwakilan untuk kepentingan-kepentingan yang beragam.
2. Menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.
3. Menciptakan perlindungan ruang publik yang terbuka di mana debat bebas mengenai isu-isu kebijakan bisa terus dilanjutkan.
4. Menyediakan beberapa hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara, terutama dalam bentuk keamanan dan kesejahteraan kolektif.
5. Mengatur pasar menurut kepentingan publik dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam.
6. Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan melalui penetapan kebijakan.
7. Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui peran utamanya dalam sistem pendidikan.

8. Menopang sistem hukum yang efektif.
9. Memainkan peran ekonomis secara langsung, sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro maupun mikro ekonomi, serta penyediaan infrastruktur.
10. Membudayakan masyarakat.
11. Mendorong aliansi regional dan transnasional serta meraih sasaran global.

Jadi fungsi-fungsi pemerintahan menurut Anthony Giddens tersebut menunjukkan luasnya ruang lingkup fungsi pemerintahan. Dapat dikemukakan bahwa fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan negara adalah

1. Menciptakan ruang aman bagi masyarakat untuk dapat mengemukakan pendapatnya tentang suatu kebijakan dengan bebas dan dapat menjamin perlindungan dan keamanan masyarakat dalam mengemukakan pendapat.
2. Menciptakan sistem hukum yang adil dan tidak memihak atau tidak membedakan siapapun berdasarkan latar belakang.
3. Menjamin dan meningkatkan pendidikan untuk semua kalangan dalam rangka mendukung perkembangan sumber daya manusia.
4. Memainkan peran secara ekonomi.
5. Memenuhi kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang.

Jadi fungsi-fungsi pemerintahan menurut Anthony Giddens diatas menunjukkan begitu luasnya ruang lingkup fungsi pemerintahan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan negara yakni peran pemerintah dalam pelayanan publik yang sangat besar. Dalam hal ini keterlibatan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan masyarakat berkembang seiring dengan munculnya paham atau pandangan tentang filsafat Negara. Hal ini diungkapkan oleh Prawirohardjo (1993:52), yang menyebutkan bahwa: Semenjak dilaksanakannya cita-cita negara kesejahteraan, maka

pemerintah semakin intensif melakukan campur tangan terhadap interaksi kekuatan-kekuatan kemasyarakatan dengan tujuan agar setiap warga dapat terjamin kepastian hidup minimalnya. Oleh karena itu, secara berangsur-berangsur, fungsi awal dari pemerintahan yang bersifat represif (polisi dan peradilan) kemudian bertambah dengan fungsi lainnya yang bersifat melayan.. Lebih lanjut Rasyid (1997) mengemukakan bahwa pelayanan pada hakekatnya adalah "salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintahan, disamping fungsi pemberdayaan dan pembangunan.

Bila diamati dengan mendalam bahwa keberhasilan seseorang dalam menjalankan misi pemerintahan dapat dilihat dari kemampuannya mengemban tiga fungsi tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan hal itu, maka pemerintah dapat dikatakan merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan tugas negara "Pemerintah pemerintah merupakan segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi. Fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah modern saat ini terkait erat dengan tujuan dibentuknya pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Rasyid (1997) bahwa: Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai kemajuan bersama.

Tugas negara atau pemerintah tercermin dalam struktur serta proses pelaksanaan kegiatan yang tekanannya pada kegiatan organisasi yaitu untuk mencapai tujuan dan dikerjakan oleh beberapa orang dengan pembagian tugas tertentu. Tugas mengorganisasi pekerjaan ini dilakukan dalam birokrasi. Menurut Parson (dalam Supriatna, 1996) megnatakan bahwa "birokrasi adalah instrumen yang terbaik untuk dapat mencapai tujuan negara kesejahteraan yaitu dengan memberikan pelayanan

sebaik-baiknya kepada masyarakat". Pertanyaan-pertanyaan etis kemudian muncul sehubungan dengan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk memperoleh pelayanan yang paling sederhana saja, masyarakat selalu dihadapkan pada berbagai kesulitan yang sengaja dibuat-buat.

Dalam hal ini pandangan tentang pelayanan publik yang tidak memuaskan ini dapat dilihat hampir disemua instansi pemerintah. Dalam kaitan ini Kumorotomo (1996:46) mengatakan: Rutinitas tugas-tugas pelayanan yang berlebihan kepada pertanggungjawaban formal telah mengakibatkan adanya prosedur yang kaku dan lamban. Para pegawai tidak lagi merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja tetapi justru lebih sering menolak adanya perubahan. Etos kerja yang cenderung mempertahankan "status quo" ini telah menimbulkan persepsi masyarakat bahwa berhubungan dengan birokrasi berarti berhadapan dengan berbagai prosedur yang berbelit, makan waktu dan menyebalkan. Yang lebih parah prosedur yang berbelit itu acap kali ditunggangi oleh kepentingan pribadi dijadikan komoditas Selanjutnya bilaa dicermati, adanya kelambanan pelayanan birokrasi tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara pelayanan ditingkat bawah, Ada faktor lain yang juga mempengaruhi belum baiknya kualitas pelayanan antara lain yakni prinsip dari organisasi pemerintah yang berorientasi kepada pelaksanaan dan pertanggungjawaban formal saja, tanpa mempertimbangkan aspek kualitas. Gaya manajemen yang berorientasi kepada pelaksanaan dan pertanggung-jawaban formal menimbulkan rasa takut akan melakukan kekeliruan dalam melaksanakan tugas sehingga berpengaruh terhadap kreativitas pegawai, karena terkadang keadaan yang ada dilapangan berbeda dengan peraturan yang dibuat.

Birokrasi pemerintah pada tingkat tertentu harus menjadikan semangat melayani kepentingan masyarakat sebagai dasar dari motivasi mereka bekerja di bidang pemerintahan, serta memiliki komitmen pengabdian dan pelayanan untuk memberikan yang terbaik kepada

masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, terkait dengan upaya melindungi dan pemenuhan kebutuhan hidup atas produk-produk tertentu. Menurut Ndraha (1997) produk-produk yang dibutuhkan masyarakat adalah "berkisar pada barang (barang modal dan barang pakai) sampai pada jasa (jasa pasar dan jasa publik) dan layanan. Hal ini sejalan dengan konsep Ilmu Pemerintahan Modern (dalam Kybernan No.3, 1998) yang menyatakan bahwa: Ilmu pemerintahan modern adalah ilmu yang mempelajari bagaimana struktur puncak unit kerja publik/pemerintahan (eksekutif) bekerja dalam rangka memenuhi (memproduksi, mentransfer, mendistribusikan) sebagai shareholder dan consumer, akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan. Berbeda dengan jasa publik yang dapat dijualbeli dan diprivatisasikan, maka layanan civil dimonopoli oleh pemerintahan. Lebih lanjut dalam Kybernan (1998) dikemukakan bahwa: Layanan civil tidak dijual beli, dimonopoli oleh badan-badan publik (pemerintah, Negara) dan tidak boleh diprivatisasikan (diswastakan), sedangkan layanan publik dapat dijual-beli dibawah control legislative. Setiap badan publik berfungsi memproduksi dan mendistribusikan layanan civil pada saat diperlukan. Dengan demikian penyediaan dan penanganan jasa publik dapat diprivatisasikan, tetapi layanan civil tidak, produksi dan distribusinya dimonopoli pemerintah. Justru karena itu pula, consumerisme terhadap pengeloaan layanan civil semakin ketat. Peranan semua pihak komunitas publik dapat dilakukan untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan dengan sejak perencanaan sampai pada pengawasannya. Penyediaan jasa publik dan layanan civil menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu urusan atau tuntutan warga masyarakat sedini mungkin secara manusia. Lembaga-lembaga civil societies, sovereign (legislative) dan consumerism berwenang mengontrol (mengoreksi, mereformasi) pemerintah.

Orientasi Pemerintahan dalam Administrasi

Pembangunan (*The Administration of Development)*

Administrasi pembangunan mencangkup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan – keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).Jadi administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional, yang berarti menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya, serta peranan pemerintah yang cukup dominan. Dunia usaha memainkan peranan yang besar terutama di bidang ekonomi. Para teoritis dan cendikiawan ditantang untuk memberikan sumbangsihnya, khususnya dalam penguasaan dan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pembentuk opini turut berperan dalam memberdayakan masyarakat, antara lain melalui peningkatan kemampuan melaksanakan pengawasan sosial, bahkan rakyat jelata juga dilibatkan.

Pembangunan merupakan urusan semua pihak dalam suatu masyarakat bangsa. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, tidak ada warga masyarakat bangsa yang hanya berperan sebagai penonton, semua harus berperan sebagai pemain. Ciri – Ciri Administrasi Pembangunan yakni; 1.Adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan; 2.Adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan;

3.Perkembangan, baik dalam ilmu maupun pelaksanaan perencana pembangunan terdapat orientasi yang semakin besar memberikan perhatian terhadap aspek pelaksanaan rencana; dan 4.Administrasi pembangunan masih berdasarkan pada prinsip – prinsip administrasi negara.

Ada berbagai aspek yang saling mempengaruhi dalam Administrasi Pembangunan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aspek Politik

   Pendekatan administrsi pembangunan terkait erat, saling berhubungan dan saling mempengaruhi keadaan dan proses perkembangan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Hubungan itu dapat saling bertentangan, hubungan yang netral ataupun hubungan yang saling mendukung. Berbagai aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan adalah filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu negara tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan interdepensi antara sistem politik yang dianut dengan administrasi pembangunan.

2. Aspek Ekonomi

   Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari proses perkembangan sosial, politik, psikologi, kebudayaan, administrasi dan ekonomi yang disebut pembangunan atau modernisasi. Negara-negara yang baru berkembang pada umumnya memberikan prioritas yang tinggi terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena perbedaan yang menyolok dalam tingkat pertumbuhan antar negara adalah bidang ekonomi materiil

3. Asepek Sosial Budaya

   Berbagai aspek sosial budaya perlu mendapatkan perhatian dalam administrasi pembangunan. Seperti juga aspek kehidupan yang lain, proses pembangunan terjadi karena saling menunjangnya pembinaan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat atau bangsa. Bahkan proses pembangunan yang

sebenarnya haruslah merupakan perubahan sosial-budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya.

4. Aspek Institusional

   Aspek institusionil berkaitan erat dengan aspek-aspek yang diuraikan di atas. Karena pembinaan dan pengembangan aspek institusionil yang perlu diperhatikan dalam administrasi pembangunan meliputi pembinaan institusi politik, institusi ekonomi, institusi sosial, pendidikan dan lain-lain. Proses pembaharuan dan pembangunan juga merupakan suatu proses pembinaan institusi di dalam masyarakat yang baru dan bahkan mungkin penghapusan institusi masyarakat yang lama.

Orientasi Pemerintahan Dalam Pembangunan

Administrasi (*The Development ofAdministration*)

Pembangunan Administrasi merupakan suatu upaya untuk memperbaiki, membangun, meningkatkan kinerja administrasi negara berkembang ke arah yang lebih baik dan diinginkan. Menurut Chandler dan Plano dalam buku mereka yang diberi judul The Public Administration Dictionary, menjelaskan bahwa Pembangunan Administrasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan, memperbaiki teknik, proses, dan sistem untuk menaikan atau meningkatkan kapasitas administrasi suatu negara berkembang. Pembangunan Administrasi telah berusaha untuk mengimplementasikan birokrasi rasional berdasarkan pada kenetralan, dan kecakapan pelayanan sipil pada negara berkembang. Ini dapat berjalan di beberapa tempat, namun tidak di beberapa tempat lain.

Sebuah konsep administrasi selalu diharapkan mampu menjadikan kinerja pembangunan menjadi semakin baik, namun sedikit yang memikirkan bahwa sebuah konsep pembangunan juga harus mampu berpengaruh pada perkembangan administrasi. Pada masa lalu dikenal

dikotomi madministrasi – manajemen, namun seiring perjalannan waktu, dikotomi tersebut tidak lagi dibenarkan. Seorang administrator juga harus mampu dan berkecimpung pada proses manajemen, bukan hanya menjadi aktor pelaksana saja. Karena kegagalan pembangunan terjadi salah satunya ialah perbedaan faham antara sang pengkonsep dan sang eksekutor. Maka daripada itu seorang eksekutor (dalam hal ini administrator) harus bekerja mulai dari planning ditulis.

Pembangunan administrasi harus mampu menyentuh tatanan administrasi itu sendiri. Jika tidak maka ibarat orang yang ingin memperbaiki orang lain tapi dia sendiri tidak menginginkan menjadi baik, jika seperti ini yang terjadi maka proses pembangunan akan sangat mustahi untuk di-gol-kan. Karena awal dari pembangunan negara adalah membangun administrasi terlebih dahulu.

Ada beberapa unsur-unsur dalam birokrasi pembangunan administrasi di antaranya, yakni 1.Birokrasi harus dapat membangun partisipasi rakyat; 2.Birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya; 3.Peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari memberi menjadi memberdayakan; dan 4.Mengembangkan keterbukaan dan kebertanggungjawaban.

Namun sebuah Administrasi Pembangunan harus disesuaikan dengan keadaan yang terjadi dimasing-masing negara. Negara yang mampu menerapkan sistem pembangunannya sesuai dengan keadaan negara tersebut maka akan berpeluang besar untuk maju dari pada negara yang asal dalam menerapkan sebuah konsep pembangunan. Segi-segi pembangunnan yang begitu kompleks harus mampu diseimbangkan.

Peran Pemerintah Dalam Pembangunan

Berencana/Berkelanjutan

Secara umum istilah Pembangunan Nasional sangat dikenal yakni suatu usaha perubahandan pembangunan dari keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentupada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik (lebih diinginkan). Peranan serta fungsi pokok pemerintah dalam pembangunan berencana, adalah sebagai stabilisator dan pengawas terhadap pembangunan sehingga berguna untuk kesejahteraan (sosial-ekonomi) masyarakat.c.Peranan serta fungsi pemerintah dalam pembangunan nasionaldi Indonesia, telah dijelaskan dalam UUD 1945,"...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesiayang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untukmemajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa danikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai sebuah konsep, istilah pembangunan berkelanjutan ini berkembang dalam masyarakat modern (developed countries) maupun lembaga-lembaga internasional. Namun dalam proses perjalanan peradaban pemikiran manusia, konsep tersebut juga diyakini dipraktekkan oleh negara-negara sedang berkembang melalui kearfian lokalnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) ini merupakan kesepakatan negara-negara di dunia setelah konferensi Stockholm Negara-negara dunia yang tergabung dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berusaha semaksimal mungkin menyelaraskan visi pembangunan negara mereka dengan rancangan pembangunan SDGs. Sebagai sebuah prinsip kesadaran internasional, SDGs merupakan tindak lanjut dari prinsip Millennium Development Goals (MDGs). Ada kekhawatiran orientasi pembangunan MDGs, di satu sisi sekadar mengejar kepentingan ekonomis, dan di sisi lain cenderung

mengabaikan nilai-nilai emansipatif, universalitas, dan ekosistem lingkungan. Sebagai akibatnya, kita menyaksikan pembangunan pada era MDGs berjalan tidak sehat, sehingga menyisakan banyak krisis sosial mulai dari eksploitasi alam, kemiskinan, dan ketimpangan sosial yang cukup melebar.

Pembangunan nasional secara berencana dapat dilihat dalam tingkat tindakan yang dilaksanakan dalam proses politik dan proses administrasi. Tingkat-tingkat kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus sebagai suatu proses, diantaranya sebagai berikut : 1) Keinginan dasar dalam masyarakat yang menuntut pemuasan.Sumber keinginan ini adalah kebutuhan dasar yang dirasakandan kebutuhan dasar yang diperlukan karena kondisi objektif.Ada pula yang berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapatkeinginan untuk meningkatkan kualitas hidupnya; 2) Perumusan konsultasi pada keinginan dasar masyarakat mengenai kepuasan dilakukan dalam proses politik dan dituangkan dalam bentuk keputusan politik mengenai kehendak negara; 3)Perumusan dasar hukum bagi pelaksanaan keputusan politikterdahulu. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan lanjutan tetap dilaksanakanberdasarkan kerangka hukum yang ada; 4) Perumusan kebijaksanaan dan program pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan didalam keputusan politik; dan sebagainya.

Administrasi Pembangunan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh suatu negara/ pemerintah dalam rangka untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan pada aspek-aspek kehidupan berbangsa. Ecara umum ada dua fungsi administrasi pembangunan, yaitu Pembangunan Administrasi dan Administrasi di bidang Pembangunan. Kedua fungsi ini saling berhubungan dan saling melengkapi dalam proses pembuatan kebijakan. Administrasi bagi pembangunan memiliki arti bahwa kegiatan administrasi dilakukan dari dan untuk pembangunan. Dalam pelaksanaannya umumnya menggunakan pendekatan manajemen karena akan

berhubungan dengan manajemen pembangunan, yang mencakup; Perencanaan Pembangunan, Pengerahan Sumber Daya, dan Penganggaran. Berkaitan dengan pembaharuan administrasi sebagai tindak lanjut dari pembangunan administrasi, yakni adanya perubahan birokrasi dengan unsur: Birokrasi harus bisa mendorong partisipasi masyarakat; Birokrasi seharusnya tidak berpihak kepada yang kuat, namun lebih berorientasi kepada yang kurang berdaya; dan Birokrasi berperan dalam mengarahkan dan memberdayakan masyarakat. Administrasi Pembangunan yang sedang dikembangkan berasal dari disiplin ilmu sebelumnya, yaitu dari Administrasi Negara. Pada abad ke-19, ini bisa disebut sebagai awal pengembangan administrasi publik, yang pertama kali dikembangkan oleh penulis dan praktisi administrasi publik di Amerika Serikat, yang meliputi:Frank J. Goodnov, Leonard D. White, Alexis de Tocqueville dan Woodrow Wilson, bahkan yang ditulis sebelumnya, dianggap sebagai awal pengembangan administrasi publik. Pengembangan administrasi publik lebih relevan untuk negara maju.

Fungsi Administrasi Pembangunan yakni untuk administrasi ini sendiri dapat dibagi menjadi beberapa fungsi di dalamnya, yaitu:

1. Menyusun rencana dan program kerja departemen administrasi pembangunan.
2. Persiapan bimbingan teknis tentang pelaksanaan program pembangunan, memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
3. Pengumpulan bahan dan studi hukum dan peraturan yang terkait dengan bidang kegiatan masing-masing.
4. Penentuan kebijakan perencanaan teknis operasional, koordinasi persiapan program pembangunan, bantuan dalam pengadaan barang dan jasa, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

5. Implementasi kebijakan merumuskan koordinasi teknis persiapan program pembangunan, memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
6. Implementasi bimbingan administratif tentang koordinasi teknis persiapan program pembangunan, memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
7. Persiapan bahan untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan pertemuan. Eksekusi anggaran dan implementasi pengembangan oleh organisasi perangkat keras regional.
8. Coaching, kepemimpinan dan mengarahkan bawahan ke tugas.
9. Persiapan proposal dan pertimbangan atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang harus diambil dalam bidang pekerjaan mereka.
10. Pengantar layanan administrasi dan bagian dokumentasi.
11. Penyelesaian tugas resmi lainnya yang ditetapkan oleh otoritas.
12. Melaporkan hasil menyelesaikan tugas kepada atasan.

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembagalembaga dan pranata-pranata sosial, politik dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan.

Dalam telaahan administrasi pembangunan dibedakan adanya dua pengertian yaitu administrasi pembangunan (The Administration of Development) dan pembangunan administrasi (The Administration of Development**)**. Administrasi bagi pembangunan, dalam konteks ini digunakan pendekatan manajemen. Maka dapat dikatakan bahwa masalah administrasi bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan. Sedangkan untuk menerangkan pembangunan administrasi akan digunakan pendekatan organisasi. Untuk analisis manajemen pembangunan dikenal beberapa fungsi yang cukup nyata (distinct), yakni: perencanaan, pengerahan (mobilisasi) sumber daya, pengarahan (menggerakkan) partisispasi langsung oleh pemerintah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan. Pendekatan terhadap fungsi-fungsi tersebut dilengkapi dengan peran informasi yang amat penting sebagai instrumen atau perangkat bagi manajemen.

Heady (1995) menunjukkan ada lima ciri administrasi yang indikasinya ditemukan secara umum di bayak negara berkembang. Pertama, pola dasar (basic pattern) administrasi publik bersifat jiplakan (imitative) daripada asli (indigenous). Kedua, birokrasi dinegara berkembang kekurangan (deficient) sumber daya manusia terampil yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pembangunan. Ketiga, birokrasi lebih berorientasi pada hal-hal lain daripada mengarah pada yang benar-benar menghasilkan (production directed). Keempat, ada kesenjangan yang lebar apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan (discrepancy between form and reality). Kelima, birokrasi di negara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat.

Analisis Heady ini dapat ditambahkan dua karakteristik lagi hasil dari pengamatan Wallis (1989). Pertama, di banyak negara berkembang birokrasi sangat lamban dan makin bertambah birokratik. Kedua, unsur-unsur nonbirokratik sangat berpengaruh terhadap birokrasi. Misalnya hubungan keluarga, hubungan-hubungan

primordial lain seperti suku dan agama, dan keterkaitan politik (political connections) mempengaruhi birokrasi. Keadaan-keadaan seperti inilah yang mendorong pentingnya pembangunan atau pembaharuan administrasi.

Dalam kerangka pembaharuan administrasi sebagai lanjutan dari pembangunan administrasi, yang pertama perlu menjadi perhatian adalah perubahan sikap birokrasi yang cukup mendasar sifatnya. Didalamnya terkandung berbagai unsur. Pertama, birokrasi harus dapat membangun partisipasi rakyat. Kedua, birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya.

Ketiga, peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari memberi menjadi memberdayakan. Keempat, mengembangkan keterbukaan dan kebertanggungjawaban. Pembaharuan memerlukan semangat yang tidak mudah patah. Semangat dan tekad diperlukan untuk mengatasi inersia birokrasi dan tantangan yang datang dari kalangan mereka yang akan dirugikan karena perubahan. Oleh karena itu, pembaharuan harus dilakukan secara sistematis dan terarah, didukung oleh political will yang kuat, konsisten, dan konsekuen. Tidak selalu harus segera menghasilkan perubahan besar, tetapi dapat secara bertahap, namun konsisten.

Tantangan Administrasi Pembangunan dan Reformasi Administrasi

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dikemukakan bahwa administrasi pembangunan (the administration of development) merupakan seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya, sedangkan pembangunan administrasi (the of development administration) merupakan suatu upaya

untuk memperbaiki, membangun, meningkatkan kinerja administrasi negara berkembang ke arah yang lebih baik dan diinginkan.

Umumnya kegiatan pembangunan menyangkut mobilisasi sumber daya manusia, uang, fasilitas dan tindakan pemerintah, serta mengalokasikannya dalam kombinasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan teknis dan mencapai sasaran-sasaran tertentu dalam pembangunan. Jadi administrasi pembangunan (the administration of development) dan pembangunan administrasi (the development of administration) merupakan ruang lingkup yang saling berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan suatu kibijakan dan tidak dapat dipisahkan antar satu sam lainnya. Seperti yang diakui oleh Kristiadi (1994) bahwa administrasi pembangunan sebenarnya merupakan salah satu paradigma admnistrasi negara yaitu paradigma yang berkembang setelah ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada sekitar tahun 1970. Mengacu dari kerangka perkembangan administrasi pembangunan seperti tersebut di atas, Kristiadi memberi pengertian tentang Administrasi Pembangunan adalah ”Administrasi Negara yang mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian”. Oleh karena itu administrasi pembangunan juga merupakan pendukung perencanaan dan implementasinya.

Masalah yang serius dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah lemahnya kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari latar belakang ini, maka administrasi pembangunan yang berkembang di negara-negara sedang berkembang memiliki perbedaan ruang lingkup dan karakteristik dengan negara-negara yang telah maju. Dasar inilah Bintoro Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi:

Pertama, penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi: upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut *the development of*

administration (pembangunan administrasi), yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *"Administrative Reform" (reformasi admnistrasi)*.

Kedua, perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-programa pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut *the administration of development (Administrasi untuk pembangunan)*. Administrasi untuk pembangunan (the development of administration) dapat dibagi atas dua; yaitu; (a) Perumusan kebijaksanaan pembangunan, (b) pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara efektif.

Ketiga, pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yang lebih penting adalah membangun partisipasi masyarakat.

Seperti yang diuraikan di atas bahwa administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang cocok diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang, namun Bintoro Tjokroamidjojo membedakan bahwa administrasi pembangunan lebih banyak memberika perhatian terhadap lingkungan yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat yang baru berkembang. Sedangkan administrasi pembangunan berperan aktif dan berkempentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, sedangkan dalam ilmu administrasi negara bersifat netral terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan berorientasi pada upaya yang mendorong perubahan-perubahan kearah ke keadaan yang lebih baik dan berorientasi mada depan, sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif/tertib, efisien pada masing-masing unit pemerintahan.

Administrasi pembangunan berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yaitu kemampuan merumuskan kebijakan pembangunan sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada tugas-tugas rutin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Administrasi pembangunan mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan

pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang, Ilmu administrasi negara lebih memperhatikan pada kerapihan/ketertiban aparatur administrasinya sendiri. Administrator pada administrasi pembangunan merupakan penggerakan perubahan (change agent), sedangkan administrator pada administrasi pembangunan berorientasi pada lingkungan, kegiatan dan pemecahan masalah sedangkan pada administrasi negara lebih bersifat legalitas.

Reformasi administrasi atau pembaharuan administrasi dilakukan karena ketidakmampuan administratif untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya. Studi yang dilakukan Heady (1995), menemukan lima ciri yang umum administrasi publik di negara-negara berkembang, yaitu: (1) pola dasar (basic pattern) administrasi publik bersifat jiplakan (imitative) daripada asli (indigenous), (2) birokrasi di negara berkembang kekurangan (difficient) sumber daya manusia terampil untuk menyelenggarakan pembangunan. Kekurangan ini bukan dalam arti jumlah tetapi kualitas. Yang justru kurang adalah administrator yang relatif dengan kapasitas manajemen, keterampilan-keterampilan pembangunan (development skills) dan penguasaan tesis yang kurang memadai, (3) birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya dibanding dengan pencapaian sasaran program. Dari sifat seperti ini lahir Nepotisme, korupsi dan penyalagunaan wewenang, (4) adanya kesenjangan yang lebar antara apa yang hendak ditampilkan dengan kenyataan. Fenomena ini oleh Rigss disebut formalisme, yaitu gejala yang lebih berpegang pada wujud-wujud dan ekspresi formal dibanding dengan sesungguhnya, dan (5) Birokrasi di negara berkembang acapakali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat.

Dari fenomena dan wajah administrasi publik ini, maka reformasi atau pembaharuan administrasi publik menjadi suatu tuntutan dan keharusan. Berdasarkan kasus administrasi negara di Indonesia oleh Bintoro (1999) mengajukan pada: (a) reformasi kearah sistem politik yang demokratis, partisipatif dan egalitarian, (b) reformasi ABRI (TNI) sebagai birokrasi pemerintahan, (c) reformasi sistem

pemerintahan yang sentralistik kearah desentralisasi, dan (d) reformasi terhadap upaya penciptaan clean goverment. Pada bukunya yang lain, Bintoro Tjokroamidjojo (1998), mengatakan bahwa pembangunan administrasi publik atau reformasi birokrasi pemerintah diarahkan pada program-program sebagai berikut: (1) deregulasi dan debirokratisasi ekonomi serta dekonsetrasi dan desentralisasi pemerintah, (2) meningkatkan efisiensi birokrasi (termasuk mengurangi pungutan-pungutan tak resmi), (3) mutu, orientasi, pelayanan dan pemberdayaan birokrasi, (4) sistem karier dan efektivitas birokrasi, (5) kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian.

Menurut Riggs (1996), pembaharuan administrasi merupakan suatu pola yang menunjukkan peningkatan efektivitas pemanfaatannya sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Birokrasi itu sendiri menurut pandangan Riggs, merupakan sebuah organisasi yang konkrit, terdiri dari peran-peran yang bersifat hirarkis dan saling berkaitan, yang bertindak secara formal sebagai alat (agent) untuk suatu kesatuan (entity) atau sistem sosial yang lebih besar. Dengan demikian menurut pandangan ini, tujuan dari birokrasi ditetapkan oleh kekuasaan di luar kewenangan birokrasi itu sendiri. Atas dasar ini, maka kebertanggungjawaban (accountability) dari birokrasi dalam menjalankan tugasnya sangat esensial sifatnya. Oleh karena itu, pembaharuan administrasi akan berkaitan erat dengan peningkatan kebertanggungjawaban dalam proses pengambilan keputusan atau dalam hal bagaimana sumber daya instrumental dimobilisasi untuk mencapai tujuan.

Riggs melihat pembaharuan administrasi dari dua sisi, yaitu perubahan struktural dan kinerja (performance). Secara struktural Riggs menggunakan diferensiasi struktural sebagai salah satu ukuran. Pandangan ini didasarkan atas kecenderungan peran-peran yang makin terspesialisasi (role spesealization) dan pembagian pekerjaan yang makin tajam dalam masyarakat modern. Sedangkan mengenai kinerja, Riggs menekankan sebagai

ukuran bukan hanya kinerja seseorang atau suatu unit, tetapi bagaimana peran dan pengaruhnya kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Ia menekankan pentingnya kerjasama dan teamwork dalam mencapai tujuan. Sementara Wallis dalam Ginanjar (1997) mengartikan pembaharuan admnistratif sebagai dalam dimensi; (a) perubahan harus merupakan perbaikan dari keadaan sebelumnya, (b) perbaikan diperoleh dengan upaya yang sengaja dan bukan terjadi secara kebetulan atau tanpa usaha, dan (c) perbaikan yang terjadi bersifat jangka panjang dan tidak sementara, untuk kemudian kembali lagi ke keadaan semula. Sementara Esman (1995), menunjukkan bahwa memperbaiki kinerja birokrasi harus meliputi ketanggapan (responsiveness) terhadap pengawasan politik, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan efektivitas dalam pemberian pelayanan. Untuk itu upaya perbaikan administrasi meliputi peningkatan keterampilan, penguasaan teknologi informasi dan manajemen finansial, pengaturan atau pengelompokkan kembali realignment fungsi-fungsi, sistem insentif, memanusiakan manajemen (humanising management) dan mendorong partisipasi yang seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan serta cara rekruitmen yang harus lebih bersifat representatif.

Prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) ini merupakan kesepakatan negara-negara di dunia setelah konferensi Stockholm Negara-negara dunia yang tergabung dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berusaha semaksimal mungkin menyelaraskan visi pembangunan negara mereka dengan rancangan pembangunan SDGs. Sebagai sebuah prinsip kesadaran internasional, SDGs merupakan tindak lanjut dari prinsip Millennium Development Goals (MDGs). Ada kekhawatiran orientasi pembangunan MDGs, di satu sisi sekadar mengejar kepentingan ekonomis, dan di sisi lain cenderung mengabaikan nilai-nilai emansipatif, universalitas, dan ekosistem lingkungan. Sebagai akibatnya, kita menyaksikan pembangunan pada era MDGs berjalan tidak sehat, sehingga menyisakan banyak krisis sosial mulai dari eksploitasi alam, kemiskinan, dan ketimpangan sosial yang cukup melebar.

Bagi pemerintahan Jokowi- Ma'aruf Amin, paradigma penerapan prinsip Pembangunan Berkelanjutan ini tertuang dalam misi ke-empat saat menjadi calon presiden dan wakil presiden Jokowi - Ma'aruf Amin, yaitu mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selanjutnya, misi tersebut diuraikan ke dalam program kerjanya, yaitu: 1. Penggembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi; 2. Mitigasi Perubahan Iklim; dan 3. Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup; 4 Visi dan Misi tentang pembangunan berkelanjutan pemerintahan Jokowi - Ma'aruf Amin ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan pegiat lingkungan dan kehutanan di Indonesia. Bagi yang kontra, visi misi Pemerintahan Jokowi-Ma'aruf Amin tentang prinsip pembangunan berkelanjutan ini agak kabur dibandingkan dengan visi misi pemerintahan Jokowi sebelumnya bersama dengan Jusuf Kalla. Walaupun dalam visi dan misinya tidak disebutkan tentang prinsip pembangunan berkelanjutan, namun dengan tegas dan jelas menyebutkan berbagai angka target terkait pengelolaan hutan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Afifuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta.

Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1984.

Fatkhurrohman, *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*, Pusat Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2004.

Fatkhurrohman, *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*, Pusat Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2004.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT.Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2005.

artaasmita, Ginanjar.perkembangan pemikiran dan praktek administrasi pembangunan.1997.PT. Pustaka LP3ES Indonesia,

Lawrence M. Friedman, 1969, *On Legal Development, Rutgers Law Review*,(dialihbahasakan oleh : Rachmadi Djoko Soemadio).

Poltak Sinambela dkk, *Reformasi Pelayanan Publik, (Teori, Kebijakan dan Implementasi),* PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Prajudi Admosudirdjo; *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta,2003.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta LP3ES. : Salomo, Roy V, 2011, Slide Kuliah KTIA: Administrasi Pembangunan.

Profil Penulis



Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si

Penulis merupakan Dosen Bidang ilmu Administrasi Publik dan Kebijakan Publik Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatiha untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang Pengajaran, Penelitian Dan Pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Strategi, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesiaa, Ekonomi Kreatif, dan lain-lain. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada Workshop/Seminar/Lokakarya tertentu.

Email Penulis: iwanhenri01@gmail.com

12

PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Dr. Ani Heryani, S.Sos., M.Si
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya

Kebutuhan akan Administrasi Pembangunan

Sistem Administrasi Negara di negara-negara yang sedang berkembang harus berbeda dengan di Negara-negara yang sudah maju. Sehingga diperlukan adanya administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi. Kebijakan, program maupun proses yang dilakukan birokrasi di negara-negara yang sedang membangun berbeda dengan di negara-negara maju. Kebijakan, perencanaan dan model pembangunan memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan negara maju. Ketersediaan sumber daya yang serba terbatas namun memiliki tujuan dan sasaran yang tinggi, sistem politik yang masih tradisional ditunjang dengan faktor sosiologis yang kurang mendukung memerlukan keterampilan dan keahlian yang luar biasa untuk dapat mengelola pembangunan di negara-negara yang sedang membangun. Untuk itu kehadiran Administrasi Pembangunan sangatlah penting.

Grank Ohemeng menyebutkan bahwa: "*Those aspects of and changes in public administration necessary to carry out policies, projects, and programs that will improve social and economic conditions, and the study of such administration. The bureaucratic process that facilitates or stimulates the achievement of socioeconomic progress through utilization*

of the talents and expertise of the bureaucrats. It involves the mobilization of bureaucratic elite skills for speeding up the development process".(Ohemeng, 2020)

Pendapat diatas memperkuat bahwa diperlukan adanya perubahan-perubahan dalam administrasi publik bagi negara-negara yang sedang membangun untuk melaksanakan kebijakan, proyek, dan program yang akan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi melalui pendayagunaan bakat dan keahlian para birokrat sebagai implementor dan memerlukan keterampilan untuk mempercepat proses pembangunan.

Desakan kebutuhan yang sangat luas dan kompleks dari publik terhadap pemerintah di Negara-negara yang sedang membangun telah melahirkan bentuk transisi dimana administrasi publiknya harus mampu beradaptasi dalam situasi yang tidak seimbang, dimana terdapat sistem politik yang masih tradisional, tuntutan yang mendesak dan sangat kompleks namun sumber daya terbatas, kapasitas yang rendah terutama faktor modal pembangunan yang terbatas pula.

Menurut Schaffer dalam (Ohemeng, 2020) menyebutkan bahwa : *"Development administration is a distinctive form of administration for development programs, policies, and plans in those conditions (traditional, transitional or newly independent, and less-developed political system) in which there are unusually extensive needs (which could coincide with urgently expressed demands of political elites, modernizing ideologies, and exercises in mobilization), precisely where there are peculiarly few resources and exceptionally severe obstacles to meeting the needs. To him, the distinction of development administration is exactly in the inconvenient combination: extensive needs, low capacities, severe obstacles*.

Pendapat ini memperkuat pentingnya administrasi pembangunan bagi negera-negara sedang berkembang untuk mampu menyelenggarakan amdinistrasi publiknya di tengah-tengah kondisi yang terbatas. Untuk itu dalam implementasinya administrasi pembangunan harus adaptif terhadap situasi yang ada, mampu melakukan

inovasi, penataan di berbagai bidang pembangunan baik bidang politik maupun ekonomi serta mampu mengoperasionalkan dan menterjemahkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan.

Perencanaan Pembangunan

Perencanana pembangunan di Negara-negara sedang berkembang perlu memiliki perhatian yang luar biasa karena tantangan dan hambatan yang dihadapinya. Umumnya di Negara-negara yang sedang berkembang fungsi pengaturan terhadap semua aspek pembangunan dilakukan oleh pemerintah karena tatanan sector public yang belum siap. Misalnya dalam penetapan harga saja pemerintah masih ikut campur tangan dalam hal penetapan harga eceran tertinggi artinya peran pemerintah masih kuat.

Di negara-negara yang sedang berkembang beberapa sektor publik yang memiliki dampak kepada sebagian besar masyarakat masih diatur oleh pemerintah. Lewis menjelaskan bahwa: "*Public and private sectors are also interrelated in that the total size of the public sector programme must depend on what the private economy can bear. Most public sector programmes are too large. Typically a new Government comes into office having promised everybody schools, hospitals, water supplies, electricity, roads, houses, jobs and all the other good things of life".*(W. Arthur Lewis, 1979).

Kebutuhan sektor-sektor yang menjadi kebutuhan pokok dan layanan umum sebagian besar masih dilakukan oleh pemerintah. Pemenuhan kebutuhan akan layanan sektor pendidikan, sektor kesehatan, kebutuhan dasar seperti air bersih, sarana transportasi massal masih dilakukan oleh pemerintah. Mengingat kebutuhan yang tinggi dan sumber daya yang terbatas, maka pemerintah harus memiliki kemampuan dalam merumuskan kebijakan terutama kebijakan perencanaan pembangunan.

Perencanaan seringkali dipandang sebagai siklus dan bersifat universal serta mampu memberikan solusi yang secara bertahap memerlukan penyempurnaan melalui

serangkaian tindakan kreatif dari pelaksananya. Selaras dengan pendapat Sieh sebagai berikut: "*In this conception, design (and by implication planning) is seen as a cyclical, interactive and 'universal' process in which solutions are gradually refined through a series of creative leaps. Hence, a problem is identified and an image of a likely solution is generated. This solution is then presented or articulated in a form which can be readily understood (i.e. through a plan); subsequently it is tested against the original problem or set of objectives, before being rejected or re-imaged to further refine the solution. This cyclical process of imaging, presenting, testing and re-imaging relies on the adequate flow of information as a means both to inspire the creative process and to test ideas. In the case of planning, this might include information about the site and context, planning policy, councillor predilections, developer and designer objectives, community aspirations and so on. The process refines the proposal continuously and moves towards a final acceptable solution" (Louie Sieh, 2004).*

Dalam tahapan perencanaan ini masalah idealnya diidentifikasi dengan memperhatikan berbagai faktor agar dapat disusun solusi yang akan dilakukan. Solusi disajikan dalam suatu rencana yang kongkrit dan jelas. Namun dalam realitanya solusi yang telah direncanakan seringkali banyak faktor yang mempengaruhinya. Kebutuhan informasi yang aktual, keahlian perencana dan preferensi pengambil keputusan serta aspirasi dan respon masyarakat turut menentukan rencana yang disusun dan solusi yang disajikan.

Mengingat banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan sehingga untuk tersajinya suatu rencana pembangunan yang ideal, seorang ahli mengkhawatirkan bahwa tidak cukup waktu untuk menyusun suatu rencana
pembangunan dan mewujudkannya lebih berkualitas.

The concern is typically expressed in three ways:

1. *First, that there is not enough time in the planning process to consider, influence and deliver better quality development.*

2. *Second, that a national obsession (in England) with speed of delivery distorts local practice and priorities and undermines a concern for quality.*
3. *Third, that in a context where performance measurement in the public sector is becoming ever more important, how will services and aspects of services that do not lend themselves to measurement fare?*

The three are of course interrelated, and relate to the role and ability of planners to deliver a better quality service and influence the delivery of better quality development.(Louie Sieh, 2004)

Permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang sangat kompleks dan memerlukan keahlian yang memadai dari para perencana agar dapat disusun suatu rencana pembangunan dan mewujudkanya secara lebih berkualitas. Namun kendala seringkali terjadi dari waktu yang disediakan untuk merumuskan rencana pembangunan, berbagai macam pertimbangan ketersediaan sumber daya, penetapan prioritas bidang pembangunan, pengukuran keberhasilan pembangunan dan aneka macam permasalahan lainnya termasuk skill dari perencana dan pelaksana kebijakan.

Untuk mengatasi hal tersebut daiats diperlukan upaya agar perumusan rencana pembangunan lebih berkualitas. Sieh lebih lanjut mengemukakan: *"The nature of the design process as it interfaces with planning is therefore one that requires:*

1. *A dialogue between stakeholders;*
2. *An understanding of context;*
3. *A trial and refinement process;*
4. *An acceptance that in order to deliver the optimum solution (or as close as it is possible to get given time, resource and other constraints), sub-optimum solutions will sometimes be rejected.*(Louie Sieh, 2004)

Dialog dengan pemangku kepentingan, pemahaman tentang konteks rencana yang akan disusun, proses perencanaan, penetapan skala prioritas, penyimpangan yang mungkin terjadi serta dampak yang perlu

diramalkan. Perlunya perhatian pula dari para perencana untuk mengesampingkan isu-isu lain akan membawa tekanan untuk ditanggung pada bagian-bagian dari proses perencanaan yang tampaknya memakan waktu lebih lama seperti negosiasi atau partisipasi publik, dan karena akan memiliki potensi untuk mendistorsi proses untuk merugikan faktor-faktor tersebut.

Mengingat banyaknya factor yang berpengaruh dan adanya dampak dari perencanaan yang seringkali tidak terprediksi pada saat penyusunan rencana, maka memelrukan adaptais dari pelaksana. Sieh lebih lanjut mengemukakan: "*With minor adaptations, these provide a useful summary of the purpose of planning:*

1. *Planning is concerned with relationships between society and space*
2. *Planning is holistic and integrative*
3. *Planning attempts to manage processes of change through deliberate and positive actions*
4. *Planning requires appropriate administrative and legal frameworks for implementing action*
5. *Planning involves the allocation of limited resources*
6. *Planning requires the study, understanding and application of a diverse set of multidisciplinary knowledge* (Louie Sieh, 2004).

Proses adaptasi ini bermanfaat untuk pencapaian tujuan perencanaan. Adaptasi perlu dilakukan karena perencanaan berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan ruang. Masyarakat harus terlibat dalam prose perencanaan sehingga dikembangkan perencanaan partisipatif. Peran, aspirasi dan kekuasaan politisi, profesional, pemilik tanah dan pengembang, organisasi dan kelompok masyarakat, dan masyarakat kepentingan lainnya, sangat penting dalam perencanaan.

Perencanaan harus mampu mengembangkan dan mempertimbangkan untuk pengambilan keputusan terkait dengan kondisi aktual obyek perencanaan. Keahlian perencana dibutuhkan untuk mensintesis, mengenali isu-isu inti, masalah yang kompleks, dan mampu merumuskan tindakan yang akan dilakukan

secara efektif dan memberikan solusi yang tepat. Selain itu perencanaan yang dilakukan mampu mengelola prose perubahan, menciptakan dan mengkoordinasikan tindakan dan mengambil tindakan preskriptif dan kreatif, karena perenvanaan harus mampu memberikan keseimbangan kekuatan dalam masyarakat, organisasi bisnis, pemerintah dan stakeholders lainnya.

Perencanaan harus mampu melibatkan alokasi sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan menghasilkan perubahan dalam distribusi biaya dan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan bagi individu dan kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Disamping itu perencanaan membutuhkan studi, pemahaman dan penerapan beragam pengetahuan multidisiplin, pemikiran konseptual dan analisis, formulasim, evaluasi dan implementasi.

Kebijakan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) memiliki periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) memiliki periode 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan yang merupakan Rencana Operasional Tahunan.

Bagi Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur aspek kegiatan pemerintahan di tingkat daerah termasuk perencanaan dan penganggaran. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan dengan tujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing Daerah. PembangunanDaerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah dan sekaligus sebagai bagian

integral dari pembangunan nasional. Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahunan) dan perencanaan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah serta antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Rencana-rencana pembangunan tersebut dihasilkan melalui sebuah sistem yang disebut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bermakna satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Hubungan antara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dengan Sistem Administrasi Keuangan Negara (SAKN) dimana SPPN merupakan tahap awal dari siklus APBN yang terkandung makna/hakikat pembangunan yang akan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehendaknya, kemudian berlanjut dengan fungsi–fungsi manajemen lainnya yang berdasarkan SAKN diatur dengan berbagai ketentuan, diantaranya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Disamping Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di dalam lingkup perencanaan terdapat pula perencanaan keruangan atau tata ruang (*Spatial Planning*) yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perencanaan spasial lebih menekankan pada pembangunan fisik meskipun juga mempertimbangkan aspek pembangunan lainnya secara garis besar. Secara lebih rinci mengenai kaitan antara perencanaan ruang dengan SPPN yang dituangkan dalam dokumen–dokumen perencanaan sesuai dengan Undang – undang. Hubungan antara perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan akan menuntun pada terwujudnya perencanaan dan tujuan dari proses perencanaan.

Dokumen perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut : RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pernerintahan Negara Indonesia yang tercanturn dalam Pembukaan UUD 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, mernuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selain itu Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta. Memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Di tingkat daerah terdapat RPJP Daerah mernuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional, RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong.

Dari berbagai dokumen perencanan yang disusun dan menjadi kebijakan pemerintah dalam perencanan pembangunan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan memiliki tujuan sebagaimana dikemukakan Sieh :

1. *Ensuring rational and consistent decisions;*
2. *Achieving greater certainty;*
3. *Securing public involvement in shaping local planning policies;*
4. *Facilitating quicker planning decisions;*
5. *Reducing the number of misconceived planning applications and appeals.* (Louie Sieh, 2004)

Pendapat diatas menjelaskan bahwa perencanaan harus memastikan keputusan yang rasional dan konsisten, mampu mencapai kepastian yang lebih besar, menjamin keterlibatan publik dalam membentuk kebijakan perencanaan daerah, memfasilitasi keputusan perencanaan yang lebih cepat dan mengurangi perencanaan yang salah persepsi.

Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki Negara-neraga yang sedang berkembang, maka kebijakan administrasi pembangunan terlebih dahulu harus memberikan ruang bagi tersusunnya perencanaan yang ideal. Carmona dalam Sieh mengemukakan beberapa point penting yang harus diperhatikan:

1. *Efficient in decision-making*
2. *Equitable in processes and outcomes*
3. *Capable of providing co-ordinated policy responses to complex problems*
4. *Sensitive to change, not least to market and social contexts*
5. *Capable of delivering predictable high-quality outcomes*
6. *Ethical and accountable*
7. *Visionary*
8. *Effective at delivering change.* (Louie Sieh, 2004)

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan administrasi pembangunan perlu efisien dalam pengambilan keputusan, adil dalam proses dan hasil, mampu memberikan respons kebijakan yang terkoordinasi terhadap masalah yang kompleks, sSensitif terhadap perubahan, paling tidak terhadap konteks pasar dan social, mampu memberikan hasil berkualitas tinggi yang dapat diprediksi, etis dan akuntabel, visioner, dan efektif dalam memberikan perubahan.

Kebijakan administrasi pembangunan adalah layanan public dengan konsekuensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang luas, mampu merekonsiliasi kepentingan yang sering bertentangan, dan untuk memastikan bahwa keputusan dibuat untuk kepentingan publik yang lebih luas.

Permasalahan yang kompleks di Negara-negara yang sedang berkembang menuntur administrasi pembangunan yang mampu mmeberikan respon yang terkoordinir dengan baik, mampu mencerminkan kompleksitas iklim pembangunan yang kontemporer, dan terintegrasi dari seluruh lembaga publik dan kepentingan swasta. Mampu mengakomodir semua kepentingan pemangku kepentingan dan membangun kolaborasi dan memediasi kepentingan yang beragam dengan berbagai pihak melalui proses proaktif, berorientasi pada tindakan yang bertujuan untuk memanfaatkan keterampilan dan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan.

Bagi pemerintah daerah di Negara-negara sedang berkembang memiliki strategi pembangunan yang berdea-beda karena harus mampu meraih peluang yang berbeda pula. Grindle mengemukakan faktor-faktor yang mendoring dan menghambat praktik tata kelola yang lebih baik dalam konteks Negara berkembang yaitu:

1. *Political competition.*
2. *State entrepreneurship*
3. *Public sector modernization*
4. *Civil society activism*

5. *Learning about local realities*

(Merilee S. Grindle, 2009)

Di Negara-negara berkembang memiliki kecenderungan banyaknya parta-parti peserta pemilu dan minat politik yang cenderung beragam. Dinamika kompetisi partai memerlukan model pendekatan tersendiri bagi pemerintah. Suasana demokratisasi dan persaingan di antara partai-partai politik akan meningkatkan tekanan terhadap birokrasi. Keadaan seperti ini di perkuat dengan kekurangsiapan publik dalam memobilisasi isu politik. Posisi otoritas publik yang mengembangkan gagasan, memobilisasi koalisi, dan membuat pilihan strategis untuk ikut terlibat dalam formulasi kebijakan pembangunan seringkali mengalami kendala kapasitas. Sikap apatis sebagian masyarakat menambah kendala terbentuknya kebijakan pembangunan yang ideal.

Kebijakan peningkatan kapasitas sector publik sangat dibutuhkan untuk memperoleh inovasi dalamkebijakan pembangunan. Pembangunan kapasitas, rekayasa ulang organisasi, dan restrukturisasi layanan publik dapat menjadi prioritas untuk memperbaiki kondisi yang terjadi akibat keterbatasan kapasitas penyelenggara.

Untuk memperoleh kebijakan pembangunan yang mampu merespon tuntutan publik dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksananaannya.

Daftar Pustaka

Louie Sieh, M.C. and (2004) *Measuring quality in Planning*, *Nursing times*. New York: Spon Press Taylor & Francis Group.

Merilee S. Grindle (2009) *Going Local Decentralization, Democration, and the Promise of Good Governance*. Third. New Jersey: Princeton University Press Princeton And Oxford.

Ohemeng, F. (2020) 'Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance', *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* [Preprint], (October). Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5.

W. Arthur Lewis (1979) *Development Planning The Essentials of Economic Policy*. 7th edn, *Routledge Taylor & Francis Group*. 7th edn. London: George Allen & Unwin Ltd. Available at: https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf.

Profil Penulis



Dr. Ani Heryani, S.Sos., M.Si

Lahir di Tasikmalaya, 21 September 1970. Penulis merupakan Sarjana lulusan Ilmu Administrasi Negara STIA Tasikmalaya Tahun 1994, Magister Ilmu Sosial BKU Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2003, dan pada Tahun 2009 berhasil menyelesaikan Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung.

Pengalaman pekerjaan sebagai Dosen Tetap Sekolah Tinggi Imu Administrasi YPPT Tasikmalaya sejak tahun 1994, pernah menjadi Dosen Tidak Tetap di STISIP Tasikmalaya, di STISIP Bina Putera Banjar, Universitas Subang dan Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon.

Aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan antara lain Dewan Pakar KPPI, Presidium KAHMI Kabupaten Tasikmalaya, Dewan Penasihat TULIP (Teras Untuk Literasi Perempuan). Aktif pula sebagia narasumber di berbagai Seminar, bimbingan teknis maupun diklat.

Penghargaan yang pernah di raih antara lain Gender Champion Kota Tasikmalaya Tahun 2018.

Penulis memiliki kompetensi bidang penelitian kuantitatif dan telah memperoleh gelar non akademik CIQaR (*Certified International Qualitative Research*) dan CPHCM (*Certified Profesional Human Capital Management)*. Selain itu penulis memiliki kepakaran sesuai disiplin ilmunya di bidang sosial politik, kebijakan dan manajemen publik. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif menulis di beberapa Jurnal Ilmiah terindeks dan telah menerbitkan tulisannya di Jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus.

Email Penulis: aniheryani248@gmail.com

13

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Siti Waliah, S.IP., M.Si
Universitas Sjakhyakirti Palembang

Pendahuluan

Pada abad ke-18 terjadi revolusi industri di Inggris, sebagai suatu proses transformasi dalam kehidupan di masyarakat, dimana teknik-teknik produksi tradisional diganti dengan alat-alat mesin modern. Keadaan ini kita kenal dengan istilah modernisasi. Dimana didalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan, karena disaat itu terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern. (*Riyadi Dedy Supriadi Bratakusumah, 2005:5).* Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.

Pembangunan nasional negara Republik Indonesia, dilaksanakan disemua aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dimana Pembangunan Nasional tersebut diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam setiap bidang kehidupan dan penghidupan rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana di rumuskan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Adapun tujuan pembangunan nasional diartikan sebagai usaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan

makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan pancasila dalam wadah Negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Hal ini sesuai dengan hakikatnya pembangunan itu sendiri, yaitu membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat *(Afiffuddin : 42*). Ada 3 (tiga) komponen dasar atau nilai inti untuk memahami inti hakikat pembangunan menurut Gulet dkk dan todaro (*Ngusmanto, 2015:27*), yaitu: (1). Kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang umum terdiri dari: Makanan, air, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, pendidikan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan pekerjaan. (2). Jati diri menjadi manusia seutuhnya. Bermakna adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu. (3). Kebebasan dari sikap menghamba: kemapuan untuk memilih. Dalam hal ini bermakna kemampuan untuk berdiri tegak, tidak diperbudak dalam pemenuhan aspek –aspek pemenuhan kebutuhan yang berlebihan yang bisa mengarah kepada tindakan negatif. Ketiga hal inilah yang merupakan tujuan pokok yang ingin dicapai setiap orang dam masyarakat melalui pembangunan. Untuk itu munculah model pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dimana konsep pembangunan ini merupakan konsep yang mengintegrasikan ekologi, ekonomi, dan sosial yang disebut pembangunan berkelanjuta atau sustainable development.Konsep pembangunan berkelanjutan ini diselengarakan oleh UNICHE tahun 1972, dimana model ini muncul untuk mengatasi kelemahan model-model pembangunan sebelumnya, antara lain :

1. Munculnya kerakusan manusia untuk mengejar materi
2. Munculnya berbagai perilaku yang tidak manusia seperti tidak menghargai martabat manusia

3. Terjadinya kesenjangan yang makin lebar antara si kaya dan si miskin
4. Terjadi kesenjangan antara negara kaya dengan negara berkembang
5. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kemiskinan penduduk ditemukan dimana-mana
6. Penganguran tinggi
7. Munculnya kerusakan sumber daya alam yang masif dan mengalami kerusakan yang bersifat ekologis
8. Penyusutan sumber daya alam yang luar biasa
9. Timbulnya ketergantungan yang semakin menjadi-jadi dari masyarakat negara sedang berkembang ke masyarakat maju
10. Hilangnya beberapa nilai budaya yang adi luhung dan kearifan lokal sebagai akibat globalisasi
11. Makin lebarnya atau senjangnya anatar kemanjuan fisik dengan non fisik (mental). Kemajuan fisik maju pesat, sedangkan kemajuan nonfisik tidak tampak dan malah bertambah memprihatinkan serta masalah lainnya.

Selain dari kesadaran akan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, karena pada kehidupan sekarang manusia telah menghadapi krisis energy, pangan dan lingkungan. (*Ngusmanto, 2015: 28-29).*

Melihat krisis tersebut dimana adanya keterbatasan akan sumber daya sedangkan pembangunan semakin pesat baik di tingkat nasional maupun ditingkat daerah, untuk itu dibutuhkannya perencanaan pembangunan yang matang, agar arah pembangunan bisa terfokus, memiliki prioritas dan mengurangi kesalahan atau kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Sehingga pembangunan yang diartikan sebagai perubahan dalam dalam mewujudkan suatu kondisi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang lebih baik waktu ke waktu, mencakup keseluruhan segi kehidupan disegala bidang dapat terwujud.

Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan salah satu kata yang tidak asing ditelinga kita. Sebenarnya apa yang menjadi alasan perlunya kita melakukan perencanaan. Menurut Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana, 2015: 16, bahwa ada dua alasan dasar perlunya perencanaan :

1. Untuk mencapai Protective benefits yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.
2. Untuk mencapai positive benefits dalam bentuk meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi.

Apabila kita melihat alasan perlunya perencanaan, maka perencanaan menjadi sesuatu yang mutlak / harus dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apapun tujuannya. Apa pun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkuta besar ataupun kecil, begitu juga dengan negara. Negara sebagai organisasi yang legal formal, dimana para birokrat dan elit politik yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Adapun beberapa pengertian perencanaan menurut para ahli :

1. G.R.Terry (dalam Sukarna, 2011:10), Perencanaan diartikan sebagai pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta perbuatan dan pengunaan pemikiran-pemikiran / asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan datang dengan cara menggambarkan dan merumuskan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Billy E.Goatz, (dalam Sukarna, 2011:10) Perencanaan adalah pemilihan yang fundamental, permasalahan perencanaan timbul ketika terdapat alternatif-alternatif.
3. Harold Koontz dan O'Donnell (dalam Sukarna, 2011:10), perencanaan ialah fungsi dari manajemen dalam pemilihan alternatif-alternatif , tujuan-tujuan,

kebijakan-kebijakan, prosedural-prosedural dan program

Menurut *Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana, (2015: 17)*, dimana "perencanaan merupakan fungsi yang paling dasar dari fungsi-fungsi manajemen lainnya". Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan, tergantung dan berinteraksi. Hal senada juga diungkapakan oleh para ahli manajemen dimana mereka mengartikan perencanaan sebagai fungsi organik yang pertama dan diikuti oleh fungsi-fungsi manajemen lainnya *(Afiffudin, 2010:46)*. Beberapa ide pokok yang ada dalam kegiatan perencanaan, seperti:

1. Perencanaan pada hakikatnya merupakan kegiatan berfikir karena dalam proses perencanaan selalu didahului oleh konseptualisasi usaha sebelum bertindak
2. Perencanaan pada dasarnya merupakan kegiatan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilaksanakan di masa depan
3. Perencanaan bearti meletakkan dasar-dasar rasionalitas untuk berbagai usaha di masa mendatang dengan maksud dan tujuan mempengaruhi dan mengendalikan arah perubahan yang diduga akan terjadi.
4. Perencanaan juga merupakan proses pemilihan dan usaha menguhungkan fakta untuk dijadikan bahan dalam membuat berbagai anggapan masa depan dengan membuat program kerja dan kegiatan operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan
5. Perencanaan dapat dikatakan sebagai usaha persiapan yang sistematik tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
6. Perencanaan juga bearti mengalokasikan yang sistematik dan rasional dari berbagai sarana dan prasarana kerja yang sifatnya terbatas untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Pada dasarnya perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah proses pemgambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan dan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu ;

1. Tujuan akhir yang igin dicapai.
2. sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan akhir.
3. Jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut;
4. Masalah-masalah yang dihadapi;
5. Modal atau sumber daya yang akan digunanakan, serta pengalokasiannya;
6. Kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk merealisasikannya
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya; dan
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan.

Perencanaan yang efektif adalah proses pemikiran yang matang dan bermuarakepada keputusan yang berdasarkan fakta dan bukan kepada emosi atau keinginan belaka. Yang tidak kurang pentingnya untuk mendapatkan perhatian ialah bahwa perencanaan merupakan proses yang berlanjutan karena di samping ditujukan ke masa depan, juga harus merupakan perwujudan dari kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan dan pengalaman di masa lalu dengan kenyataan yang dihadapi sekarang yang kesemuanya dipergunakan untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam menghadapi masa depan dengan situasi yang tidak selalu dapat diperhitungkan secara tepat.

Adapun proses dari perencanaan, menurut A.M.Williams (dalam Afiffudin, 2010:95), meliputi:

1. Menentukan atau menetapkan dengan jelas maksud dan tujuan.

2. Menentukan alternatif.
3. Mengatur sumber-sumber yang diperlukan.
4. Menentukan organisasi, metode dan prosedur.
5. Menentukan atau menetapkan rencana itu sendiri.

Menetapkan atau menentukan dengan jelas maksud dan tujuan, berarti menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dilakukan. Maksud dan tujuan itu adalah sasaran yang ingin dicapai, dan dengan menentukan kebijaksanaan terhadap apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikan tujuan tersebut.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam Perencanaan Pembangunan:

1. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi serta kompleksitas permasalahan pembangunan nasional tersebut di atas, maka SPPN dituntut untuk mampu:
2. Mengalokasikan sumberdaya pembangunan kedalam kegiatan-kegiatan melalui kelembagaan-kelembagaan dalam konteks untuk mencapai masa depan yang diinginkan;
3. Fleksible dengan horizon perencanaan yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang;
4. Memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan ke seluruh lapisan masyarakat.

Setiap negara pasti mengalami tantangan dimasa depan, untuk itu setiap negara harus dapat meningkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan nasional yang telah ditentukan.umumnya pencapaian tujuan tersebut merupakan proses yang antara lain, bearti bahwa: (1). Tujuan tersebut ideal. (2) cakupannya adalah seluruh segi kehidupan semua warga negara, (30. Waktu pencapaiannya tidak bisa ditentukan dan biasanya hanya dikatakan “satu kali kelak”. (4). Menyatakan secara kualitatif dan (5). Bentuknya masih abstrak. (Sondang P.Siagian, 2014: 41). Dikarenakan memikili ciri-ciri seperti diatas maka dalam pencapaiannya harus

dilakukan secara bertahap. Artinya tujuan akhir tersebut dijabarkan menjadi tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek.

1. Pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam artian jangka panjang, sedang dan jangka pendek

Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan sangat dibutuhkan dan harus dilakukan sebelumnya, hal ini dikarenakan kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Untuk itu dibutuhkannya perencanaan dan strategi pembangunan dalam menentukan prioritas program kerja / kegiatan operasional yang akan dikerjakan terlebih dahulu dan seterusnya akan dilajutkan pada program kerja / kegiatan operasional selanjutnya, sebagai kegiatan perubahan kearah yang lebih baik dan dilakukan secara berkelanjutan. Fleksible dengan horizon perencanaan yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang;

Merencanakan bearti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimana depan. Perencanaan merupakan suatu keputusan untuk waktu yang akan datang, mengenai apa yang dilakukan? Bilamana akan dilakukan? dan siapa yang akan melakukan? .

Menurut T.Hani Handoko *(dalam Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana, 2015: 15*) dimana kegiatan perencanaan ini pada dasarnya melalui empat tahap, sebagai berikut :

a. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
b. Merumuskan keadaan saat ini
c. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
d. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Setelah perencanaan disusun dengan baik, langkah berikutnya adalah Pengerahan sumber daya untuk pembangunan, sumber daya tersebut bisa berupa ;

a. Dana
   Sebagaimana sudah diutarakan sebelumnya perlu ada dana untuk pembangunan. Dana tersebut dikumpulkan dalam bentuk: Tabungan Pemerintah, Tabungan Masyarakat dan Investasi dalam Negeri /asing.
b. Sumber Daya Manusia

   Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yangnberkualitas, yakni tenaga yang; Kreatif, Produktif, Memiliki disiplin dan etos kerja, Mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang (enterprising)

c. Sumber Daya Alam
d. Teknologi
e. Organisiasi atau kelembagaan

   Pembangunan sebagai kegiatan yang kompleks meliputi berbagai disiplin, sektor, kepentingan, dan kegiatan yang memerlukan lembaga-lembaga yang mampu menampung, menyalurkan, dan mengatasi, serta mensinergikan berbagai aspek tersebut. Lembaga-lembaga itu meliputi : Birokrasi, Pasar (dunia usaha), Partai politik, Lembaga hukum

Fungsi/Manfaat Perencanaan yaitu sebagai penuntun arah, minimalisasi Ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber daya, dan penetapan Standar dalam Pengawasan Kualitas. Adapun syarat perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

a. Tujuan akhir yang dikehendaki.
b. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

c. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

d. Masalah-masalah yang dihadapi.

e. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

f. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

g. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

h. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

2. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan

Perencanaan pembangunan menurut Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2005:7. Dapat diartikan sebagai sesuatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai beban untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan aktivitas kemasyarakat, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Pembangunan mengandung makna pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Ide pertumbuhan mendapat penekanan dan sorotan dalam pembangunan, karena secara filsafat dapat dikatakan bahwa suatu organisme-suatu negara dapat dikatakan sebagai organisme (Pamuji dalam Afiffudin, 2010 :45). Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang berhenti tumbuh sesungguhnya sudah mulai dengan awal dari akhir hidupnya. Dalam hal ini negara dipandang sebagai suatu organisme, jadi pertumbuhan itu dikatakan sebagai bagian pengertian pembangunan. Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus

berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan

Pembangunan mengandung makna perubahan, ialah mewujudkan suatu kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari sekarang. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Dalam hal ini maka pertumbuhan yang dimaksud sebagai peningkatan kemampuan seatu negara, bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan eksistensinya. Sedangkan Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipasi dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dalam jangka waktu kejangka watu selanjutnya untuk lebih baik.

3. Perencanaan Pembangunan partisipatif

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu perencanaan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu. dengan memanfaatkan atau memberdayagunakan berbagai sumber daya ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada azas proritas. (Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2005:7).

Berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan dalam hal ini penyelenggaraan otonomi daerah dengan azas desentralisasi. Azas desentralisasi memberikan implikasi terhadap manajemen pemerintahan daerah, dengan desentralisasi diharapkan akan mampu menghasilkan pemerintah daerah otonom yang efisien, efetif, akuntabel, transparansi dan responsif secara berkesinambungan. Arah inilah pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh daerah bisa terlaksana. (Mardiasmo, 2004:10). Secara teoritis

desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah, dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Secara empiris, desentralisasi terbukti berhubungan positif dengan kualitas pemerintahan. Semakin tinggi derajat desentralisasi yang ada disuatu negara, semakin baik pula partisipasi masyarakatnya, orientasi pemerintah, pembangunan sosial, dan manajemen ekonomi mikro (makro). (Mardiasmo, 2004:6).

Kurang lebih 23 tahun yang lalu, dimana sejak diresmikannya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan keuangan antara pusat dan daerah, dimana kedua UU tersebut membawa angin segar dan perubahan yang mendasar pada pola hubungan pemerintah dan keuangan antara pusat dan daerah (Mardiasmo, 2004:5). Dulu sebelum adanya kedua UU tersebut, dimana pemerintah daerah yang sentralisasi dan hirarkhis. Sesungguhnya Top down Planning tersebut kurang memberi ruang bagi kreatif, inisiatif dan kebebasan berfikir mayarakat dan birokrasi lokal, dimana hanya mengandalkan petunjuk dan arahan dari pusat. Hal ini menjadi bermasalah adalah jika program pembangunan yang menuntut kreatifitas, inisiatif dan kemampuan pengambilan keputusan pejabat di daerah. Pergeseran sistem setralisasi ke sistem desentralisasi sebagai wujud Reformasi sejak tahun 1998. Diungkapkan oleh Abdul kholiq Azhari dan Abdul Haris Suryo Negoro, 2019:15, dimana implikasi amandemen pasal 18 UUD 1945 adalah terjadinya pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralistik ke arah sistem yang cenderung desentralistik.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah organisasi/institusi perencana harus berkoordinasi dengan suatu instansi tersendiri. Instansi perencana adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab melakukan perencanaan pembangunan daerah (Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2005:12). Pada pelaksanaan otonomi daerah ini dimana penyusunan perencanaan pembangunan yang berdasarkan diskresi lokal. Daerah dituntut mampu menyusun perencanaan pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan ketersediaan sumber-sumber dan kepentingan lokal. Sudah saatnya top down planning bergeser kepada bottom up planning dengan memberikan seluas-luasnya kepada stake-holder untuk menyusun perencanaan yang partisipatif. Berbicara mengenai partisipasi dimana UNDP dalam Mardiasmo, 2004:24. mengartikan participation adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan ber-asosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Hal senada juga diungkapkan (Mardiasmo, 2004:55), partisipasi adalah bentuk pengikutsertakan komponen-komponen masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Menurut Soekarno dalam Ngusmanto. (2015:132), bahwa partisipasi merupakan suatu aktivitas untuk mengambil bagian atau peran dalam kegiatan bersama. sebagai proses pemberdayaan kekuatan rakyat dalam pembangunan dan salah satu sendi untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara dalam sudut pandangan partisipasi dan kesadaran. Pembangunan yang didasarkan partisipasi masyarakat ini sesuai dengan negara kita yang demokrasi. Dimana menurut Mardiasmo, 2004:65, Pembangunan yang demokrasi adalah pembangunan nasional yang berdasarkan aspirasi masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan nasional di

era reformasi perlu memberikan dukungan luas bagi terbukanya peluang untuk mewujudkan :

a. Peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi yang lebih demokratis melalui penerapan nyata kebersamaan yang saling menguntungkan sebagai perwujudan proses dari, oleh dan untuk rakyat.

b. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pemantapan otonomi daerah yang dfiselenggarakan secara nyata dan dinamis.

c. Pemantapan perubahan struktur dengan penajaman pada modernisasi yang dilandasi nilai-nilai akhlak mulia

d. Keterpaduan dan terikatan antar manusia, antar daerah, antar sektor kegiatan ekonomi, serta antar daerah, antar sektor ekonomi, serta antara kegiatan makro dan mikro nasional.

Peningkatan partisipasi ini, sebagai adaptasi dari perkembangan teknologi semakin maju, menjadikan kebutuhan /keinginan masyarakat dan bisnis semakin kompleks, dan staf pemerintah semakin berpendidikan tinggi. Dimana arah pengambilan keputusan bergeser ketangan masyarakat, asosiasi, pelanggan dan lembaga swadaya masyarakt melalui mekasime bottom up planning. Sehingga sudah menjadi kebutuhan kedepan untuk menyusun Bottom up planning yang memberikan akses lebih luas kepada stake- holder daerah untuk berfikir lebih kreatif, inovatif sesuai dengan kondisi lokal yang bersifat spesifik. Agar penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif masih dalam kuridor Negara kesatuan republik Indonesia yang berdemensi kepentingan dan kebutuhan daerah, kiranya perlu disusun Pedoman Sistem dan prosedur dari perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Menjadi issue penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan adalah membangun

mekanisme perencanaaan yang mampu mengemban visi dan misinya menuju pencapaian kesejahteraan. Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dalam mempertahankan legitimasi, disamping juga untuk mendorong kemajuan bagi masyarakat melalui kegiatan perencanaan partisipatif. Dalam hal ini pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan harus memperhatikan, yaitu tingkat sensitivitas Pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat serta menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan bukan hanya sebagai objek dari pembangunan. Keberhasilan pembangunan ditentukan adanya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat, tanpa keterlibatan masyarakat hasil pembangunan menjadi tidak akan berhasil dengan baik, sebaliknya tanpa peran pemerintah pembangunan akan berjalan tidak terarah dan kemungkinan akan menimbulkan permasalahan baru.

Sehingga kedudukan perencanaan pembangunan daerah menjadi faktor utama dan sangat menentukan dalam mensinergikan antara kepentingan publik dengan kebutuhan masyarakat,sesuai dengan dukungan sumberdaya lokal yang bersipat spesifik sesuai dengan kearifan lokal, akan dapat mewujudkan tujuan pembangunan mencapai kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan optimal. Hal ini dikarernakan pemerintah dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat sejalan dengan kebutuhan rakyat dan keinginan pemerintah.

Prinsif pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat sehingga kedua pihak dapat bekerja secara optimal, berdasarkan peran dan wewenang masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi dan

kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah, sejalan dengan dinamika masyarakat serta perkembangan daerah dan nasional.

Pelaksanaan Pembangunan

Apabila perencanaan telah dilaksanakan secara tepat, permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaaannya? Hal ini di ungkapkan oleh Mardiasmo,(2004:239). Pentingnya perencanaan yang baik dimana dalam penetapan kebutuhan program apabila telah sesuai kebutuhan dan dapat memecahkan masalah serta menjawab tuntutan yang ada yang sifatnya menyeluruh, sehingga program-program tersebut akan di implementasikan, yang pastinya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai target group dari program-program tersebut. (Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2005:99).

Sebagai wujud implementasi pembangunan, dimana tidak ada satu pun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan. Berdasarkan cakupannya adalah segala segi kehidupan. Pelaksanaan pembangunan tidak bisa berhasil apabila hanya dilakukan oleh pemerintah saja, walapun kemampuan pemerintah memiliki kemampuan yang baik. Begitu juga pembangunan tidak dapat terlaksanakan dengan baik apabila hanya dilaksanakan oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Contoh lainnya lagi misalkan pelaksanaan pembangunan politik tidak dapat diserahkan hanya kepada pakar-pakar politik. Begitu juga pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak dapat di serahkan kepada insan bisnis saja dan lain-lainnya. Hal ini mengartikan bahwa keberhasilan kegiatan pelaksanaan pembangunan akan lebih terjamin, apabila seluruh warga masayarakat membuat komitmen untuk turut berperan sebagai pelaku pembangunan dengan para anggota elite masyarakat sebagai panutan, pengarah, pembimbing, dan *motivator*. Dalam literatur tentang administrasi pembangunan, para warga masyarakat yang diharapkan ikut berperan dalam pembangunan disebut sebagai *development clientele*. (Sondang P.Siagian, 2014:53).

Aktor– aktor Pembangunan harus dapat bersinergi dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Adapun aktor-aktor pembangunan, yaitu:

No	Aktor	Keterangan
1.	Individu	Tergantung pendapatan dan status sosial, dapat berpengaruh pada pembangunan atau tidak sama sekali
2.	Rumah Tangga	Berperan sebagai unit yang menyakinkan unit yang menyakinkan bahwa semua anggota rumah tangga sudah terpenuhi kebutuhannya.
3.	Komunitas	Sekelompok orang yang memiliki kesamaan kepentingan, menyakinkan seluruh anggotanya terpenenuhi kebutuhannya.
4.	Pemerintah	Berperan dalam menyusun arah pembangunan
5.	LSM	Mampu memperkuat komunitas untu mengisi pembangunan
6.	Swasta	Perwakilan dari pasar, dapat berupa perusahaan kecil sampai perusahaan yang mendunia
7.	Komunitas	Sekelompok orang yang memiliki kesamaan kepentingan, menyakinkan keseluruhan anggotanya terpenuhi kebutuhannya

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dalam semua segi kehidupan dan penghidupan bangsa menuntut komitmen seluruh komponen masyarakat. Idealnya berdasarkan strategi dan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, semua warga masyarakat turut menjadi “pemain” dan tidak ada yang sekedar menjadi “penonton”.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah biasanya dituangkan dalam mekanisme proyek-proyek pembangunan. Proyek-proyek pembangunan harus memuat dengan jelas tujuannya (*objective*), sasaran yang akan dicapai (*target*), cara mengukur keberhasilannya (*perfomance eveluation*), jangka waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, cara melaksanakan, kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan, biaya serta tenaga yang diperlukan, dan badan yang melaksanakannya. Apabila proyek itu merupakan bagian dari kegiatan yang lebih besar,

biasanya disebut program, harus jelas keterkaitan proyek dan tujuan sasaran program, serta dengan proyek-proyek lain yang berada dalam program yang sama. Pada pelaksanaannya, proyek dapat dilakukan sendiri oleh badan pemerintah, baik oleh pemilik proyek maupun badan pemerintah lain, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam hal ada otonom atau desentralisasi. Untuk itu perlu ada mobilisasi tenaga serta kesiapan lembaga pemerintah yang akan melaksanakannya.

Adapun 3 (tiga) alasan mendasar di setiap pembangunan memerlukan prioritas menurut Ngusmanto, 2015:108, yaitu:

1. Keterbatasan kemampuan manusia untuk melaksanakan pembangunan
2. Keterbatasan sumberdaya, khususnya biaya (anggaran) yang tersedia yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Keterbatsan waktu

Apabila perencanaan telah memproritaskan proyek-proyek yang akan dilaksanakan, pastinya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dimana manajemen pemerintah dapat menjamin bahwa proyek-proyek pembangunan yang secara fisik dapat dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran pemerintah, dan berjalan seperti yang dikehendaki dan mencapai sasaran seperti yang direncanakan, dengan cara yang se-efisien mungkin. (Afiffudin, 2010:101). Pada pelaksanaan program yang telah direncanakan dengan baik terkadang juga tidak dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif, hal ini diungkapkan oleh Sondang P Siagian, (2014:159). Hal ini terjadi karena berbagai faktor, seperti: terlalu idealitik, standar hasil dan kinerja terlalu tinggi dan timbulnya situasi penghalang yang tidak cukup diperhitungkan sebelumnya. Oleh karena itu perlunya ditentukan instrumen pengukur efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja. Instrumen tersebut perlu diketahui, dipahami dan diterima oleh pelaksana sehingga mereka bisa turut melakukan pemantauan (self-monitoring). Hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan para pelaksana pembangunan.

Daftar Pustaka

1. Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta : Bandung
2. Azhari, Abdul Kholiq dan Abdul Haris Suryo Nugoro, 2019. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Intrans Publishing : Malang
3. Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Mitra Wacana Media: Jakarta
4. Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah,. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. SUN: Jakarta
5. Siagian Sondang P.. 2014. Administrasi Pembangunan, PT. Bumi Aksara : Jakarta
6. Mardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Andi : Yogyakarta
7. Raharjo, Muhamad Mui'z. 2021, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*, Gava Media : Yogyakarta
8. Sadyohutomo Mulyano. 2009, *Manajeman Kota dan Wilayah.* PT. Bumi Aksara : Jakarta
9. Feriyanto, Andri dan Endang Shyta Triana, 2015, Pengantar Manajemen,. Media Tera : Yogyakarta.

Profil Penulis



Siti Waliah, S.IP., M.Si

Penulis dilahirkan pada 2 Agustus 1978, di Plaju salah satu kecamatan di Kota Palembang. Sebuah kota yang dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya. Penulis tinggal di kota Palembang bersama suami dan ketiga putra dan putrinya. Penulis menamatkan studi Strata satu ditahun 2002, Program studi Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang, lalu Menamatkan studi strata dua dengan mengambil prodi yang sama yaitu Administasi Publik pada Program Pasca Sarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang ditahun 2008. Penulis merupakan seorang dosen pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti Palembang. Karier sebagai seorang dosen ini penulis jalani sejak diterima menjadi salah satu Dosen PNS dpk LLDikti Wilayah II, sejak tahun 2005 sampai sekarang, Menjadi seorang dosen yang dipekerjakan pada prodi di perguruan tinggi swasta memberikan warna tersendiri didalam hidup saya, yang membuat saya terus termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri.

Email Penulis: siti_waliah@unisti.ac.id

14

PERKEMBANGAN PRAKTEK ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Mochamad Rizki Fitrianto, S.AP., M.AP.
Universitas Diponegoro

Perkembangan Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan hadir dari adanya pertemuan para ahli administrasi pembangunan yang tergabung di dalam perhimpunan sarjana administrasi negara Amerika Serikat (CAG-Comparative Administrative Group),

Administrasi pembangunan merupakan sebuah kajian yang berfokus kepada bagaimana pelaksanaan tugas pembangunan yaitu terkait dengan keahlian dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perbedaannya dengan ilmu administrasi negara adalah ilmu administrasi negara merupakan kajian yang memfokuskan diri pada tugas dan wewenang dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Administrasi pembangunan menekankan kajian ilmu kepada cara ideal dalam perumusan kebijaksanaan suatu negara sedangkan terkait dengan bagaimana mencapai tujuan dari pembangunan dalam konteks negara di titik beratkan pada Ilmu administrasi negara yang lebih mengutamakan bagaimana cara me*mana*ge pelayanan dan birokrasi. Posisi administrator dalam administrasi pembangunan memiliki posisi yang krusial dan strategis yaitu dimana administrator berperan sebagai agen

perubahan atau *agent of change*. Posisi administrator pada tataran administrasi pembangunan memfokuskan diri terhadap bagaimana menemukan alternatif solusi terkait tantangan dan permasalahan yang terjadi, di lain sisi pada tataran administrasi negara, administrator memfokuskan diri pada aspek legal.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, administrasi pembangunan merupakan kajian ilmu yang sesuai diterapkan dalam negara-negara berkembang. Yang membedakan antara administrasi pembangunan dengan administrasi negara adalah administrasi pembangunan berorientasi terhadap bagaimana mencapai tujuan pembangunan suatu negara dan bagaimana mendorong atau mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik sedangkan di dalam ilmu administrasi negara lebih memfokuskan terhadap bagaimana cara mengatur jalannya sebuah negara yang baik dalam konteks pemerintahan, birokrasi, lembaga dll.

Administrasi Pembangunan menjadi suatu kajian setidaknya sejak masa berakhirnya perang dunia kedua dimana banyak negara yang mengalami dampak yang luar biasa baik dari segi ekonomi, sosial, pemerintahan dll, sehingga banyak negara berusaha "membangun kembali" negara mereka. Setelah berakhirnya perang dunia kedua muncul beberapa dinamika baik dari negara yang menang dalam perang dunia kedua, negara yang kalah pada perang dunia kedua, maupun negara yang tidak secara langsung terlibat dalam perang dunia kedua namun terdampak dari adanya perang dunia kedua seperti negara bekas jajahan atau negara baru yang merdeka setelah adanya perang dunia kedua.

Administrasi Pembangunan di setiap Negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor politik yang berkaitan dengan stabilitas dan dinamika politik sutau negara, stabilitas dan dinamika politik menjadi penentu arah administrasi pembangunan sebuah negara akan dibawa kemana. Kemudian faktor ekonomi yang menjadi faktor kunci administrasi pembangunan suatu negara. Selanjutnya faktor sosial dan budaya. Faktor ini berkenaan dengan kultur dan nilai nilai serta

norma yang melekat dalam suatu masyarakat, SDM, cara pandang hidup dll. Selanjutnya yaitu faktor IPTEK dimana diperlukan untuk mengelola sumber daya yang ada baik SDA maupun SDM secara optimal guna membangun sebuah negara.

Dari beberapa faktor diatas yang hampir selalu menjadi tolok ukur keberhasilan administrasi pembangunan adalah kemajuan ekonomi, dan hal tersebut merupakan pemikiran negara barat yang kemudian diadaptasi oleh negara berkembang sebagai suatu *role model*. Pemahaman tersebut secara tidak langsung menyebabkan pergeseran konsep administrasi pembangunan dalam bidang ekonomi di negara berkembang yang mengadaptasi konsep ekonomi di negara maju karena anggapan bahwa negara maju telah berhasil menghasilkan sebuah konsep yang sempurna sehingga mampu mancapai tujuan dari pembangunan.

Hal tersebut hampir banyak terjadi di negara berkembang yang dimana dari ditinjau dari sisi sejarah masih memiliki keterkaitan, banyak negara yang saat ini dikategorikan sebagai negara berkembang merupakan negara bekas jajahan maupun negara yang baru memerdekakan diri setelah berakhirnya perang dunia ke II, sehingga negara berkembang tadi melihat negara yang yang mampu membangun negaranya pasca perang dunia ke II sebagai negara yang maju dan ideal untuk di jadikan contoh. Hal tersebut tidak sepenuhnya tepat dimana keberhasilan negara membangun negaranya tidak serta merta hanya mengandalkan konsep pembangunan dari negara lain akan tetapi juga harus menyesuaikan dengan kondisi di negara tersebut baik dari sisi politik, sosial, maupun budaya. Ini yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan di negara berkembang dimana masih ada negara berkembang yang belum mampu memformulasikan bentuk pembangunan apa yang sesuai untuk negaranya.

Dalam memahami konsep administrasi pembangunan di negara berkembang setidaknya terdapat beberapa ciri yang bisa dijumpai adalah konsep administrasi publik atau administrasi negara yang bersifat mengadaptasi. Di

negara bekas jajahan atau kolonial pada masa perang dunia ke II, pengorganisasian organisasi, birokrasi, dan kelembagaannya memiliki banyak kemiripan dengan konsep pada masa penjajahnya, dan hanya melanjutkan konsep administrasi penjajahan sebelumnya. Sehingga negara berkembang tadi hanya mewarisi serta melanjutkan konsep administrasi penjajahan saja tanpa ada suatu kebaharuan atau penyesuaian sesuai kerakteristik dan nilai-nilai yang ingin dibangun dalam negara berkembang tersebut. Selanjutnya adalah rendahnya kualitas SDM yang memiliki kapabilitas dalam melaksanakan pembangunan. Dalam beberapa kasus di negara berkembang kualitas dan kuantitas SDM seringkali tidak imbang dimana jumlah SDM sangat banyak namun kulitas SDM atau SDM yang memiliki kapabilitas sangat sedikit. Selanjutnya adalah kredibilitas birokrat yang rendah. Selanjutnya, birokrasi pada beberapa kasus dinegara berkembang bersifat absolut yang dimana menyebabkan rendahnya akan pengawasan kinerja dan kaburnya akan capaian target dari birokrasi itu sendiri, selain itu kemungkinan dari pihak lain yang ingin terlibat dalam pembangunan sangat terbatas, dan secara tidak langsung menghambat roda pembangunan yang idealnya harus melibatkan seluruh elemen yang ada di dalam sebuah negara.

Dari pemaparan di atas akan dibahas perkembangan praktek administrasi pembangunan di negara berkembang, dua negara berkembang yang akan dibahas yaitu Malaysia dan Indonesia. Walaupun secara bentuk negara dan pemerintahan sedikit memiliki perbedaan, namun ada hal yang membuat penulis tertarik mengambil contoh kedua negara tersebut yang dimana kedua negara tersebut pasca perang dunia ke II dan membentuk negara sendiri memiliki dinamika politik dan arah pembangunan yang menarik untuk dikaji selain alasan lain dimana kedua negara tersebut memiliki struktur dan pola sosial yang hampir sama selain kedekatan secara historis. Dalam memahami perbandingan perkembangan Administrasi pembangunan kedua negara berkembang tersebut akan ditinjau dari segi Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Ekonomi.

Perkembangan Administrasi Pembangunan di Malaysia

Malaysia memiliki luas wilayah mencapai 330.434 km/persegi dengan ibu kota berada di Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahan dari Negara Malaysia adalah Kerajaan/kesultanan yang dimana Kepala Negara di sebut dengan sebutan "Yang Dipertuan Agong" dan Kepala Pemerintahannya disebut dengan "Perdana Menteri". Malaysia merupakan negara federal/bagian, setidaknya terdapat 13 negara bagian. Konstitusi Malaysia harus dimuat terlebih dahulu sebelum konstitusi dari masing-masing negara bagian. Malaysia memiliki dasar konstitusi yang disebut dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, yaitu merupakan dokumen undang-undang tertulis yang telah disusun dan disepakati berdasar dua dokumen yang telah ada lebih dulu yaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 serta Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah undang-undang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber semua undang-undang yang ada. Dalam merencanakan pembangunan, Malaysia memiliki lembaga yang bernama Economic Planning Unit (EPU) yang berwenang dalam menyusun perencanaan pembangunan, EPU berada dibawah Perdana Menteri.

Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki demokrasi dan monarki konstitusional yang dimana Malaysia menganut paham sistem pemerintahan kerajaan yang tetap berdasarkan konstitusi yang dimana berarti juga Malaysia tidak menerapkan sistem pemerintahan mornarki absolut atau kerajaan tanpa adanya konstitusi. Secara sederhana Malaysia dalam konteks sistem pemerintahan menggunakan sistem kerajaan yang berazaskan demokrasi yang berparlemen, demokrasi yang dimaksudkan adalah kekuasaan memerintah yaitu kerajaan yang dipilih atau diberi amanat oleh rakyat, untuk rakyat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan demokrasi berparlemen adalah adanya sebuah perwakilan sebagai sarana bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat atau suara melalui wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Undang-Undang Dasar Malaysia menganut paham sistem federal yang di dalamnya ada

pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian yang ada di dalam dalam Undang-Undang Dasar Federal. Salah satu hal unik yang ada di Malysia adalah undang-undang dasar menganut sistem federal yang berjalan dengan kekuasaan yang ada di pemerintah pusat.

Ditinjau dari perkembangan sejarah, Malaysia merupakan negara bekas koloni Inggris, pada masa kolonial penjajah Inggris mendatangkan tenaga tenaga kerja dari China dan India untuk kepentingan pembangunan ekonomi kolonial dalam menambah kapasitas produksi dan pemasukan ekonomi di sektor pertambangan, perdagangan dan pertanian, sehingga hingga saat ini kedua rumpun bangsa tersebut merupakan rumpun bangsa terbanyak yang dijumpai atau tersebar di Malaysia selain rumpun bangsa Melayu.

Pada abad ke-19 tepatnya setelah kedatangan penjajah Inggris yaitu pada tahun 1800-1940, terjadi perubahan atau penataan baik dari cara politik, ekonomi, pemerintahan serta administrasi maupun birokrasi khususnya dalam konteks negara.Sehingga sejak datangnya Inggris mulai ada adaptasi atau perubahan terhadap sistem sosial dan eknomi yang ada di Tanah Melayu. Kondisi tersebut masih digunakan sampai masa kemerdekaan Malaysia hingga sistem birokrasi yang baru diadopsi yang kemudian dikenal sebagai sistem pemisahan kekuasaan.

Dalam sistem pemisahan kekuasaan yang diadopsi, badan yang berwenang atau bertugas membuat undang-undang (parlemen) hanya sebatas melaksanakan tugas merancang undang-undang saja. Dalam menjalankan atau menegakkan jalannya peraturan atau undang-undang dijalankan oleh pengadilan sekaligus sebagai yuridiksi di dalam jalannya pembangunan ataupun pemerintahan. Sedangkan dalam bidang birokrasi tidak dapat melakukan intervensi dalam proses yuridikatif dan legislatif. Konsep pemisahan kekuasaan di Malaysia saat ini dapat terbagi menjadi tiga bentuk pemerintahan, yaitu:

1. Badan Birokrasi (Eksekutif) menjalankan urusan birokrasi negara
2. Badan Perundangan (Legislatif) membentuk hukum
3. Badan Kehakiman (yudikatif) menjalankan proses peradilan atau keadilan.

Sebagai negara bekas jajahan Inggris, Malaysia mengadopsi sistem hukum Inggris yaitu *common law system* . Sistem tersebut berjalan beriringan dengan sistem hukum Islam/Syariah serta hukum adat yang ada akibat keadaan sosio-kultural Malaysia yang heterogen. Dalam perkembanganya, Malaysia telah mengalami reformasi, refromasi tersebut merupakan bentuk usaha yang dilakukan agar pemerintahan dalam kaitannya dengan administrasi pembangunan yang ada mampu berkembang menyesuaikan dinamika yang ada dan tidak terpaku hanya pada sistem yang ditinggalkan oleh sistem yang ada sebelumnya atau peninggalan Inggris. Reformasi birokrasi di Malaysia menekankan perubahan birokrasi dan juga berusaha merampingkan dan mngadaptasi sistem pemerintahan berdasarkan nilai yang ada/telah ada khususnya berdasarkan hukum syariat Islam meskipun masih menggunakan konsep pembangunan peninggalan Kolonial/Inggris, sebagai contohnya adalah adanya pembagian kekuasaan negara menjadi 3 (*Trias Politica*) yang merupakan buah pemikiran Barat dalam kaitanya dengan administrasi pembangunan

Terkait dengan administrasi pembangunan dalam konteks ekonomi, Malaysia memiliki lembaga yang berwenang dalam hal kaitanya dengan ekonomi seperti MIDA, MIDA merupakan perpanjangan tangan kerajaan dalam mengatur pembangunan sektor perindustrian di Malaysia yang dimana fokus utamanya adalah membangun regulasi dan kebijakan terkait dengan pembangunan dunia industri mulai hulu ke hilir, perizinan usaha, tarif bea barang impor, dan mengkoordinasikan pembangunan dunia industri di Malaysia.

Dalam pembangunan ekonomi, Malaysia pernah menerapkan rencana pembangunan reguler yang disebut Economic Development Plan atau First Malayan Plan antara tahun 1956 dan 1960. Selain itu, ada lagi

kebijakan pertanahan yang disebut FELDA pada tahun 1956 dengan maksud mengatasi kekurangan lahan serta membantu meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani. Di saat program tersebut berjalan, pemerintah Malaysia menambahkan lagi program pro rakyat yaitu RPE2 yang diterbitkan pada tahun 1961. Kemudian Malaysia membuat sistem ekonomi yang disebut NEP (New Economic Policy), sering disebut dengan New Economic Policy dalam bahasa Malaysia. Lahirnya kebijakan ini diikuti oleh kebijakan lain seperti Pembangunan Dasar Nasional (DPN), Industri Dasar Negara, Pertanian Dasar Negara dan Persyarikatan Malaysia.

Ekonomi Malaysia pada awalnya hampir difokuskan pada produksi bahan baku utama, seperti produksi karet dan timah, yang dimana saat itu yang menjadi pasar utama adalah Inggris hingga akhir 1967. Namun, selama tiga dekade berikutnya, dengan bantuan kebijakan ekonomi yang tepat dan adanya pola manajemen industri yang baru. Pada tahun 1990-an menjadi tonggak awal dimulainya industrialisasi Malaysia dengan tujuan menjadikan Malaysia sebagai negara industri. Gagasan dan inisiatif program tersebut diinisiasi oleh Dr. Mahathir bin Muhammad.yang menjabat Perdana Menteri saat itu Alasan Malaysia memilih industri otomotif sebagai pijakan pertama Malaysia menuju negara maju adalah karena secara ekonomi tidak terlepas dari perkembangan dunia yang selama ini mengakibatkan tingginya permintaan masyarakat akan jasa transportasi, selain itu hasil dari Malaysia mampu menjual otomotif produk baik di dalam negeri. dan internasional, mempengaruhi pengoperasian industri dalam negeri Malaysia.

Secara umum, Malaysia menampilkan dirinya sebagai negara berkembang yang siap memasuki arena diplomasi *soft power international*. Ketiga program orisinal ini merupakan cara halus pemerintah Malaysia mencari pengakuan yang bertujuan untuk citra diri dan prestise bangsa.

Pada tahun 1971, Malaysia meluncurkan kebijakan ekonomi baru yang sering disebut sebagai Basis Ekonomi Baru. Program ini bekerja di bidang sosial ekonomi, yang tujuan akhirnya adalah untuk mempromosikan Malaysia dan integrasi nasionalnya berdasarkan potensi negara. Tujuan pertama dari program ini adalah untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan meningkatkan jumlah pekerjaan dan meningkatkan pendapatan seluruh rakyat Malaysia. Kedua, mengurangi dan menghilangkan ketimpangan ekonomi dengan mempercepat persiapan masyarakat Malaysia. Untuk mendukung program DEB kedua, pemerintah mengembangkan beberapa kebijakan antara lain:

1. Memasukkan berbagai suku bangsa di Malaysia ke dalam sektor primer dengan tujuan menciptakan struktur tenaga kerja yang seimbang.
2. Mendorong terbentuknya masyarakat industri dan perdagangan di antara etnis Melayu dan Bumiputera sehingga mereka dapat menguasai sekurang-kurangnya 30 persen dari semua jenis kegiatan ekonomi.
3. Memberi rakyat Malaysia investasi yang lebih besar di sektor manufaktur, dengan fokus khusus pada Bumiputera, yang terus tertinggal dari kelompok etnis lain.

Perkembangan Administrasi Pembangunan Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang berbentuk Republik. Indonesia terdiri atas beberapa wilayah baik pulau maupun provinsi, jumlah provinsi yang ada saat ini berjumlah 38 provinsi, jumlah tersebut merupakan tambahan setelah adanya penambahan provinsi baru pada 2022 ini, penambahan provinsi baru tersebut 3 diantaranya adalah hasil pemekaran wilayah di Papua, penambahan 3 provinsi itu berdasarkan kepada Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berisi tentang daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua yang telah

disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan RUU tersebut diputuskan melalui Rapat Paripurna (DPR) RI. Setiap provinsi dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur sebagai perpanjangan tangan atau bentuk dekonsentrasi kewenangan pemerintah pusat di daerah. Di setiap provinsi terdiri dari kabupaten dan kota yang dipimpin oleh Bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Dalam memahami perkembangan administrasi pembangunan di Indonesia maka perlu dipahami terlebih dahulu terkait perkembangan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Sisitem pemerintahan atau administrasi Negara di Indonesia berlandaskan kepada UUD dan konstitusi. Saat masa awal kemerdekaan Indonesia yang digunakan sebagai konstitusi negara adalah UUD 1945. Seiring perkembanganya telah terjadi dinamika dan perubahan, yaitu mulai dari UUD 1945, konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), hingga UUDS (sementara) 1950, hingga pada akhirnya tepatnya tahun 1959 sistem pemerintahan kembali ke UUD 1945 yang masih digunakan sampai saat ini.

Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda mengadopsi sistem hukum *Civil Law System,* salah satu sistem hukum peninggalan Belanda yang masih ada di Indonesia saat ini adalah KUHP. KUHP atau dikenal juga Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat peraturan terkait perbuatan pidana yang berlaku di Indonesia. KUHP yang saat ini ada diberlakukan adalah peraturan yang mengadopsi sistem hukum peninggalan kolonial Belanda yang dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Peraturan tersebut di sahkan pada tahun 1915 dan mulai berlaku mulai 1 Januari 1918. Pasca kemerdekaan Indonesia, KUHP diberlakukan dengan melakukan penyesuaian kondisi sehingga ada pasal-pasal yang disesuaikan. Pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang berisi tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang tersebutlah yang kemudian sampai saat ini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasar UUD 1945, kedaulatan berada ditangan rakyat, sedangkan untuk fungsi-fungsi negara dijalankan oleh lembaga-lembaga negara sesuai dengan ketetatapan MPR RI No.6/MPR/1970, jo Tap MPR No.3/MPR/1978 yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi Negara. Dalam konteks administrasi pembangunan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan kepada GBHN (Garis Besar Haluan Negara). GBHN ditetapkan oleh MPR. Namun dengan diamandemennya UUD 1945 yang menyebabkan adanya perubahan peran MPR serta presiden maka secara tidak langsung menyebabkan sudah tidak berlakunya GBHN, sebagai pengganti GBHN muncullah UU No. 25/2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian diturunkan menjadi RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Masa berlaku RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijelaskan atau diturunkan ke dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), dengan masa berlaku 5 tahun, RPJM adalah seperangkat rencana pembangunan yang memuat apa yang menjadi visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan tetap berpedoman dan mengacu kepada RPJP. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan di tataran daerah sebagai perpanjangan dari RPJP dan RPJM pemerintah pusat maka pemerintah daerah berwenang menyusun RPJP dan RPJM sendiri yang kemudian dikenal dengan RPJPD dan RPJMD, dengan tetap mengacu kepada RPJP Nasional.

Di Indonesia dalam konteks pembagian urusan pemerintahan terdapat pemisahan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sesuai dengan kewenangannya kecuali urusan pemerintahanan yang oleh undang-undang menjadi urusan pemerintah. Pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi dalam mengatur serta mengurus daerahnya berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan. Untuk urusan Pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, moneter dan fiskal, serta Agama.

Dalam pembangunan perekonomian, Indonesia telah mengalami dinamika pada masa penajajahan hingga saat ini, Pada masa penjajahan Belanda, perekonomian Indonesia diwarnai oleh strategi yang menimbulkan dualisme dalam kegiatan ekonomi, yaitu dualisme antara sektor ekspor (enclave) dan sektor tradisional (hinterland). Sektor ekspor dapat dilihat dengan banyak dibukanya perkebunan di pedesaan. Pendirian perkebunan di pedesaan hanya didasarkan pada lokasi yang menguntungkan (tanah yang subur, iklim yang cocok) dan bukan pada penciptaan lapangan kerja baru untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Antara tahun 1949 dan 1956, struktur ekonomi Indonesia terus menjadi warisan zaman kolonial. Sektor formal/modern, seperti pertambangan, distribusi, transportasi, perbankan, dan pertanian komersial, yang menghasilkan proporsi output nasional yang lebih besar daripada sektor informal/tradisional, didominasi oleh perusahaan asing yang diadaptasi terutama untuk ekspor komoditas primer (Tambunan , 1996).

Berbagai divergensi terjadi selama Orde Lama ketika ekonomi terkendali yang semula ramah Bung Hatta berubah menjadi ekonomi komando negara (state-wide). Antara tahun 1959 dan 1966 ekonomi melemah dengan cepat dan inflasi meningkat yang diakibatkan adanya pengutamaan kepentingan politik dibanding dengan pembangunan. Indonesia pernah terdampak OILBOOM (1973 – 1982) Oil boom I terjadi ketika harga minyak di pasar dunia melonjak dari 1,67 USD per barel (1970 menjadi 11,70 USD per barel (1973/74)) akibat krisis minyak. Boikot negara-negara OPEC (Timur Tengah) yang berkonflik dengan Israel. Ledakan minyak di Indonesia berarti defisit APBN (dalam rupiah) ditutupi oleh surplus penerimaan (dalam valuta asing). Konsekuensinya, jumlah uang beredar meningkat, percepatan inflasi dan laju inflasi domestik lebih tinggi dari inflasi dunia (negara

mitra dagang) karena besarnya monetisasi pendapatan pemerintah dalam mata uang asing, sehingga titik balik perekonomian Indonesia adalah mata uang. krisis yang sangat mempengaruhi sektor lain seperti pemerintahan, birokrasi, urusan sosial, dll.

Daftar Pustaka

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23767/6.%20BAB%20II.pdf

Mardiana Nordin&Hasnah Hussin, *Pengajian Malaysia,* (Malaysia :Herald Printers Sdn.Bhd Selangor, 2014), h.142-143.

Tamburan, Tulus T,H., Dr., Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.

Profil Penulis



Mochamad Rizki Fitrianto, S.AP., M.AP.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu administrasi dimulai pada tahun 2011 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya dengan memilih Jurusan S1 Administrasi Publik dan berhasil lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2017 kemudian Penulis melanjutkan studi S2 di jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya, penulis menyelesaikan studi S2 di jurusasn Administrasi Publik pada tahun 2020.

Penulis memiliki ketertarikan terhadap Administrasi Publik dan Kebijakan Publik. Dan untuk mewujudkan karir pada bidang Administrasi Publik penulis menjalani karir yang berkenaan dengan bidang tersebut, diantaranya sebagai pengajar Universitas Diponegoro, Universitas Terbuka dan Pendamping Progam Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri. Penulis memiliki harapan harapan melalui buku ini agar dapat memberikan kontribusi positif bagi bidang Administrasi Publik. Penulispun tidak lupa mengucap rasa syukur atas terselesaikannya buku ini dan dukungan dari orang tua dan keluarga.

Email Penulis: rizkimochamad99@gmail.com

15

PEMBANGUNAN NASIONAL YANG MULTI DIMENSIONAL

Firdaus
Universitas Sjakhyakirti

Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejehteraan manusia atau masyarakat suatu bangsa. Pembangunan sering pula dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari satu situasi nasional yang satu ke suatu situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi (kanz, 1991 dalam Morljarto) dengan kata lain pembangunan menyangkut proses perbaikan (Seers, 1970 dalam Moeljarto).

Batasan pembangunan yang tampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut dalam realitanya menimbulkan interpretasi-interpretasi yang sering kali secara diametrik bertentangan satu sama lain, sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pembangunan pada hakekatnya merupakan *self projected reality*. Sumber perbedaan pendapatan itu pun beraneka ragam, mulai dari perbedaan dalam perspektif epistimologik – ontologik pada tingkat filsafati, sampai pada perbedaan penilaian atas pembangunan sebagaimana yang diwujudkan oleh umpan balik pembangunan itu sendiri pada tingkat empirik

Rentang perbedaan membentang mulai dari perbedaan persepsi tentang hakekat nilai pembangunan yang harus

dicapai, perbedaan tentang hakekat proses pembanguan itu sendiri, perbedaan pendapat tentang pemahaman dan jalur pembangunan, perbedaan persepsi tentang dimensi hubungan antar bangsa didalam proses pembangunan, perbedaan pendapat tentang keseimbangan antar manusia dengan lingkungan hidupnya, perbedaan pandangan tentang pemilikan, perbedaan pandangan dalam strategi pembanguna

Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan nasional adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia

Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi dan seimbang. Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung perkantoran, sebagainya. pengairan, sarana dan prasarana transportasi dan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, dan kesehatan.

Pembangunan nasioanal ialah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan suatu proses pembangunan keseluruhan suatu sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional bisa diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan nasional untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yakni aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh sebab itu, sesungguhnya pembangunan nasional adalah pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila

Pembangunan Nasional yang Multi Dimensional

Pembangunan nasional yang multi dimensional merupakan pembangunan yang meliputi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai bangsa, dengan demikian pembangunan nasional yang multi dimensional menjadi fokus bagi suatu negara dalam mencapai tujuan negara, dikarenakan pembangunan multi dimensional diharapkan dapat memberikan perubahan kearah yang lebih oleh suatu bangsa dilakukan secara terencana di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, tujuan nasional di tuangkan dalam pembukaan UUD 45, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan yang multi dimensional dilakukan didalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sebagai bangsa, meliputi:

1. Pembangunan Sumber Daya manusia.

   Secara konvensional pembangunan sumber daya manusia diartikan sebagai investasi *human capital* yang harus dilakukan sejalan dengan investasi *physical capital*. Cakupan pembangunan sumber daya manusia ini meliputi pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas dan

pengembangan entrepreneurial yang kesemuanya bermuara kepada peningkatan produktivitas manusia, karena indicator kinerja pembangunan sumber daya manusia mencakup indicator-indikator pendidikan, kesehatan, gizi dan sebagainya.

Sumber daya manusia merupakan posisi sentral dalam mewujudkan kinerja pembangunan, hal ini sudah tidak terbantahkan. Apabila ada perbedaan wawasan, perbedaan itu terletak pada kualitas normatif sumber daya manusia.

Selanjutnya pengembangan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan *human centered development* menjangkau dimensi yang luas dari pada sekedar membentuk manusia professional dan terampil, sesuai dengan kebutuhan sistem untuk memberikan kontribusinya di dalam proses pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia di dalam pengertian ini menekankan pentingnya "pemampuan" (*empowerment*) manusia. Proses ini menumbuhkan *conscientization* manusia, kesadaran akan kehadiran (self bood) nya yang memgkinkan mereka secara kritis melihat situasi sosial yang melingkupi eksistensinya.

Pengembangan sumber daya manusia harus mampu membentuk manusia yang mempunyai kemampuan kritis untuk melihat kendala-kendala sosial, ekonomi, politik, kultural dan sebagainya dari sistem yang ada dan mencari alternatif-alternatif pemecahan. Pembangunan sumber daya manusia di Indonesia terutama sekali dicapai melalui pendidikan formal, hal ini bertumpu pada pasal 31 UUD 45 yang memberi hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Karakteristik pendidkan di Indonesia adalah:

a. Lebih menitik beratkan pada "*universal education*" dari pada *vocational education*
b. Lebih menekankan kuantitas dari pada kualitas
c. Tidak ada "*streaming"* dalam seleksi siswa penddidikan menengah.

d. Terdapat mismatch antara supply output pendidikan dengan demand tenaga kerja

e. Rendahnya kualitas pendidikan science dan matematika.

f. Methodik didaktik yang digunakan tidak kondusif bagi proses empowerment, pembentukan kesadaran baru tentang self dan sense of dignity (Moejarto Tjoktowinoto, 32, 1996)

2. Pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara, harus dilakukan secara terencana, terprogram dan secara sistimatik dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejateraan masyarakat.

Suryana (2000) pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk dalam suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, dimana pembangunan ekonomi ini sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus dan berlangsung dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Arsyad (1999) pembangunan ekonomi pada umumnya adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi tidak begitu saja dapat dilaksanakan, akan tetapi diperlukan beberapa syarat-syarat yang mendukung. Syarat utama dalam pembangunan adalah adanya pemerintahan dan rakyat. Pembangunan tergantung pada pemerintah dan rakyat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah satu yang menjalankan. Sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Rakyat yang berdaulat, maka sudah sewajarnya rakyat pulalah yang menikmati hasil-hasil pembangunan. Model pembangunan yang seimbang atau ideal adalah model pembangunan dengan melibatkan dan didukung

penuh rakyat. Dukungan ini dalam bentuk partisipasi. Jika pembangunan hanya dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengandalkan sepenuhnya Pemerintah, maka dapat dipastikan pembangunan tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan, oleh karena itu peran serta masyarakat menjadi sangat penting. Penduduk merupakan aset dalam pembangunan, mengingat penduduk sebagai suatu agent of development, sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan berhasil tidaknya pembangunan ditentukan oleh sikap penduduk selama proses pembangunan berlangsung.

a. Modernisasi Pembangunan Perkembangan ekonomi yang ditandai dengan munculnya modernisasi dan kemajuan yang sangat pesat di segala bidang, pada awalnya ditemui pada kawasan negara Eropa dan Amerika. Namun pada saat ini mulai terjadi pergeseran ke 14| Pembangunan Ekonomi Asia, yaitu dimulai dari Jepang, Korea dan Cina. Negara-negara tersebut terkenal memiliki informasi dan teknologi yang cukup tinggi. Pada umumnya sebagian besar negara di Asia dan Amerika Latin, masih berkutat dengan dengan kemiskinan dan ketidakmampuan mereka untuk menjalankan pembangunan. Masalah globalisasi, hak asasi manusia, hak paten dan lingkungan merupakan isu-isu yang sangat luas dikenal di negara maju, sebaliknya menjadi sangat asing untuk negara-negara sedang berkembang. Kemajuan ekonomi dalam ekonomi global telah mempertajam ketimpangan internasional diberbagai bidang, seperti bidang sosial, budaya dan politik. Pada akhirnya ketimpangan ini semakin melebarkan jurang perbedaaan antara negara kaya dengan negara miskin. Di kawasan Asia sendiri, jurang perbedaaan ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita yang sangat jauh berbeda.

b. Pendekatan Sosial Budaya dalam Pembangunan Ekonomi Faktor sosial budaya masyarakat dalam proses pembangunan adalah sangat penting. Kebiasaan atau adat istiadat yang ada di dalam masyarakat pada umumnya sudah terjadi ratusan tahun dan turun temurun, oleh karena itu sangat sulit untuk mengadakan perubahan begitu saja. Nilai-nilai yang terkandung dan diyakini betul sebagai suatu kebenaran, sangatlah sulit untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat modern. Menurut Hagen (dalam Kompas, 2000),

Faktor kekuatan yang paling penting untuk menggerakan masyarakat negara sedang berkembang dari kemandekan ekonomi atau stagnasi ekonomi ke arah proses pembangunan adalah perubahan pada nilai sosial budayanya. Hagen telah mencoba untuk menyusun teori umum mengenai pembangunan yang didasarkan pada serangkaian faktor sosiologis, antropologis dan psikologis. Dari hasil penelitian tersebut, Hagen membuat suatu model, bahwa kemajaun ekonomi dan pembangunan ekonomi dijadikan fungsi dari (tergantung dari) perubahan pada kombinasi bidang sosiologis, antropologi dan psikologi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Hagen, sebab utama bagi perubahan masyarakat terlihat secara internal pada faktor-faktor Pembangunan Ekonomi yang melekat pada tata susunan masyarakat dan dalam tubuh masyarakat itu sendiri bukan pada sejumlah faktor eksternal. Perkembangan ekonomi terjadi ditandai dengan akumulasi modal dan kemajaun teknologi hanya bila ada perubahan nilainilai budaya dan perilaku warga masyarakat. Dalam pendekatan sosial budaya juga juga ditonjolkan segi kelembagaan dan peranan lembaga-lembaga pergaulan hidup (social institutional), termasuk kebiasaan hidup dalam masyarakat (social habits). Faktor budaya yang melekat pada segi kelembagaan sangat berpengaruh terhadap sikap

dan perilaku masyarakat dalam melakukan produksi, distribusi, konsumsi, tabungan dan investasi.

c. Pembangunan Ekonomi dan Demokrasi.

Proses demokratisasi yang terjadi di dunia ini, pada umumnya melanda negara-negara yang sedang mengalami transisi Pemerintahan yang bersifat diktator, otoriter dan koruptor yang pada umumnya menggunakan sistem pemerintahan yang sentralistik pada semua bidang terutama pada bidang-bidang yang dianggap sangat vital. Masa transisi merupakan masa yang paling berat, sebab nilai-nilai atau konsep demokratisasi sendiri belum dipahami sepenuhnya oleh, masyarakat sehingga banyak negara-negara sedang berkembang yang mengalami kegagalan. Menurut Francis Fukuyama (dalam Kompas, 2000), umat manusia sekarang sedang memasuki periode akhir dari sejarah. Menurutnya masyarakat manusia bergerak dari periode hanya satu orang yang berkuasa (monarki) menuju kepada beberapa orang yang berkuasa (oligarki) dan berakhir pada semua orang berkuasa (demokrasi).

3. Pembangunan Administrasi Pemerintahan dan Ketahanan Nasional.

Pemikiran tentang nilai-nilai pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat dan Negara selalu mengalami perkembangan dan modifukasi-modifikasi tertentu dari waktu- kewaktu. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak merupakan sau-satunya *the state of national being* yang ingin dicapai. Nilai-nilai pembangunan baru muncul menggeser atau menjadi komplemen nilai-nilai seperti " martabat diri" (*self esteem*), kebebasan (*liberation*), kewasdayaan (self reliant) dan pemberdayaan (empowerment) tampil menggeser atau melengkapi nilai-nilai pembangunan yang konvensional. Seberapa

jauh suatu nilai-nilai pembangunan menduduki posisi sentral pembangunan dalam suatu negara ditentukan oleh berbagai factor, seperti geo-politik politik, sumber yang tersedia (resource-endowment), kondisi geografis, pengalaman historis suatu bangsa, baik pengalaman kemebhasilan maupun pengalaman kegagalan dan sebagainya.

Konfigurasi spesifik Indonesia seperti geo-politik, pluralisasi, kondisi geografis dan pengalaman historis dalam proses *nation building* pada masa lalu, daerahisme, fragmentarisme, disintegrasi, dan stagnasi ekonomi agaknya menjadi pemicu lahirnya nilai pembangunan, yaitu ketahanan nasional atau *national resilience*.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar Tujuan Nasionalnya.

"…..Berhasilnya Pembangunan Nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan lebih mendorong lagi Pembanguan nasional.

…. Wawasan dalam mencapai Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara"

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan , bahwa konsep Ketahanan Nasional pada hakekatnya merupakan suatu *composite values* yang mengitegrasukan nilai ketidak rentanan (invulnerability) terhadap berbagai gejolak baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar, kemampuan untuk survive, tumbuh dan berkembang (*persistent*), bekelanjutan (*sustainability*), keeaspadaan (*self reliant*) di dalam berbagai dimensi kehidupan bangsa

yang mencakup ideology, politik, ekonomi, social budaya, serta pertahanan dan keamanan

Untuk dapat memahami peranan pemerintahan dalam mewujutkan ketahanan nasional, maka perlu pengkajian kembanli (review) State of the art Administrasi Pemerintahan Indonesia.

Profil Administrasi Pemerintahan di suatu negara tidaklah statis. Di dalam kerangka kandasan konstitusional suatu negara sekalipun, hal itu dapat mengalami modifikasi-modifikasi sebagai hasil interpretasi dan reinterpretasi, membawa sesuatu yang normative menjadi *contextual.* Konfigurasi kultural, politik-ekonomi dan sosio-politik dapat ikut membentuk profil birokrasi di suatu negara.

Suatu *counter argument* yang sering kali dikemukakan pemerintah adalah bahwa reformasi politik dan reformasi administrasi pemerintahan menuju system yang lebih demokratis telah dilakukan. Akan tetapi masalahnya disini *political efficacy* dan *administrative afficacy*, seberapa jauh reformasi politik dan reformasi administrasi secara efektif melaksanakan fungsi-fungsi yang diamanatkan oleh Negara dan UUD kita

Selanjutnya Ketahanan Nasional suatu bangsa dan negara terkait dengan kemampuan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan, ancaman dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar, maka kualitas ketahanan nasional harus diinterpretasikan secara contextual.

Sosok Administrasi Pemerintahan yang mendukung ketahanan nasional secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Administrasi Pemerintahan yang dapat menumbuhkan interaksi organic antara subsistem-subsisten social, dan bukan saja interaksi mekanik yang dibentuk melalui juklak. Dalam hal ini setiap suubsistem akan mempunyai persepsi tentang peranan fungsional organic yang dituntut oleh nusa dan bangsa sebagai suatu

system. Fungsi Administrasi Pemerintahan lebih bersifar *facilitating* dan *empowering* dari *governing* atau *patronizing* melalui berbagai rekayasa. Fungsi sebagai "pembina" yang sekarang dilakukan lebih cendrerung meng-cripple-kan infrasrtuktur dari pada *capacity building*

b. Administrasi Pemerintahan yang mempunyai kemampuan entrepreneurial. Dengan demikian terbukanya interaksi antar bangsa disuatu pihak semakin terbuka peluang-peluang dan moment-moment yang dapat ditangkap untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa.

c. Administrasi Pemerintahan mempunyai wawasan system dan wawasan futuristic. Administrasi Pemerintahan yang dapat melihat keterkaitan antar system (sektoral, regional dan sebagainya) dan memobilisasikannya sehingga dapat menimbulkan efek synergestik.

d. Administrasi Pemerintahan yang *sensitive* terhadap variasi local, dan *responsive* serta adaptif terhadap variasi tadi hal ini menuntut *decentralizaed decision making mechanism* dan makin meningkatkan perananan *regional planning.*

e. Administrasi Pemerintahan yang berfungsi katalitik (catalytic) lebih menekankan pada *participatory policy formulation* dari pada *service delivery* (Osbon dan Gaebler, 1999)

f. Administrasi Pemerintahan yang mementingkan keweswadayaan melalui *resource based management.*

4. Pembangunan di bidang Hukum

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan pembangunan itu dilakukan dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur dapat dibantu oleh peraturan perundangundangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi kedua-duanya. Perubahan yang teratur

melalui prosedur hukum, baik ia berwujud peraturan perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan pembangunan itu dilakukan dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur dapat dibantu oleh peraturan perundangundangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi kedua-duanya. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud peraturan perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan emata-mata. Tahapan pembangunan hukum diarahkan untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia (Kusumaatmadja, 1986:3) Kebijakan pembangunan hukum nasional sebagai suatu sistem diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Salah satu upaya pembenahan sistem dan politik hukum adalah melalui penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi peraturan perundang-undangan. Selain itu diprioritaskan pula untuk menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional (BPHN, 2016:34-58) Hal itu menunjukan bahwa peranan hukum demikian penting dalam menentukan hubungan yang jelas antara pemerintah dengan masyarakat yang dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teraktualisasinya fungsi hukum akan memastikan tegaknya wibawa hukum yang akan memperkokoh peranannya dalam pembangunan untuk menjamin agenda pembangunan nasional berjalan secara tertib, terarah dan konsekuen.

Pembangunan hukum pada dasarnya adalah sebuah mekanisme manajemen dalam suatu sistem hukum nasional. Oleh karena itu model pembangunan hukum di pusat dan daerah seyogyanya diletakkan dalam kerangka manajemen pembangunan hukum (development law management), yang memenuhi unsur manajemen pada umumnya, yaitu unsur perencanaan (legal planning), pengorganisasian (legal organizing), pembentukan (legal creating), pelaksanaan (legal implement,ing), pengawasan (legal controlling), dan peninjauan (legal reviewing)

Negara hukum yang demokratis dan berkeadilan merupakan pilihan rakyat Indonesia dalam menatap masa depan, dengan demikian penyelenggaraan negara oleh penguasa hanya mendapatkan kekuasannya dari rakyat dan semua kebijakannya harus ditujukan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Platform negara hukum pada prinsipnya menentukan bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintah melalui aparatur pemerintah, dilaksanakan berdasarkan wewenang yang diatur peraturan perundang-undangan. Perubahan UUD 1945 menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan untuk menuju negara demokratis dilakukan melaui tahapan-tahapan tertentu. Kebebasan dan persamaan adalah asasasas bentuk pemerintah demokrasi dan berkeadilan. Kebebasan mencakup kebebasan menyatakan pemikiran dan pendapat (kebebasan menyampaikan kritik dalam bentuk yang tidak mengurangi kebebasan orang lain), kebebasan berkelompok dengan orang-orang sepaham), dan kebebasan warga negara mengatur hidupnya sesuai dengan keyakinannya. Persamaan mencakup persamaan di muka hukum dan mengurangi perbedaan sosial, ekonomi dan politik yang selalu ada dalam masyarakat.

Dengan adanya aturan-aturan hukum yang menghormati nilai-nilai hak asasi manusia, maka ciri negara demokratis yang berkeadilan dengan kerja keras dan kerjasama antara pemerintah dengan

rakyatnya serta melibatkan seluruh elemen bangsa, mudah-mudahan mampu pula meningkatkan kesejahteran masyarakatnya. Membangun sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan tidak akan terlepas dari upaya pengembalian kepercayaan masyarakat kepada hukum dan lembaga-lembaga hukum yang ada. Upaya tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua elemen bangsa dari penyelenggara negara, lembaga pembentuk peraturan, para penegak hukum, praktisi hukum dan seluruh masyarakat berdasarkan suatu pola perencanaan pembangunan sistem hukum nasional yang berencana, terpadu dan sistematis serta didasarkan pada cita hukum tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual.

Empat kaidah penuntun yang harus dipedomani sebagai kaidah dalam politik atau pembangunan hukum, yaitu:

Pertama, hukum nasional harus menjaga keutuhan idiologi maupun wilayah negara. Harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa dan negara;

Kedua, hukum nasional harus dibangun secara demokratis dalam arti harus mengundang partisipasi masyarakat luas melalui mekanisme dan prosedur yang transparan dan akuntabel serta dapat dibatalkan oleh lembaga yudisial;

Ketiga, hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam arti mampu memberikan perlindungan khusus kepada golongan yang lemah;

Keempat, hukum nasional harus menjamin kebebasan beragama dengan penuh toleransi antar pemelukpemeluknya. Negara boleh mengatur kehidupan beragama sebatas menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa mengganggu atau diganggu oleh orang lain.

Atas dasar kaidah-kaidah penuntun tersebut, sebenarnya kita telah mempunyai pedoman yang kokoh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik dan hukum yang dipertentangkan ditengah-tengah masyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul kita tinggal mengukur setiap produk hukum atau peraturan perundangundangan dengan kaidah penuntun yang disebutkan diatas guna mengetahui apakah benar produk hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan sistim hukum yang kita bangun

5. Pembangunan di Bidang Politik

Pembangunan politik dapat dilihat sebagai implikasi politik dari pembangunan yang sasarannya antara lain mengembangkan kapasitas- kapasitas sistem politik sehingga mampu memelihara dirinya. Selanjutnya modernisasi bisa diartikan sebagai proses perubahan untuk menciptakankondisi-kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat hidup sesuai dengandinamika perkembangan zaman. Karena itu modernisasi mengandung kondisi berupa sistem sosial yang bisa secara terus-menerus berinovasi tanpa mengalami disintegrasi, struktur sosial yang terdiferensiasi dan luwes, serta kerangka sosial yang menyediakan keterampilan dan pengetahuan yangdiperlukan bagi kehidupan dalam dunia yang secara teknologi sudah maju(After dalam Ramlan Surbakti, 1992). Dengan demikian dapat dipahami bahwa perubahan politik meliputi semua ciri pembangunan dan modernisasi politik yang objeknya antara lain mencakup perubahan sistem nilai politik, struktur kekuasaan dan strategi kebijaksanaan umum.

Konsep pembangunan politik mempunyai konotasi secara geografis, derivatif, teleologis, dan fungsional (Huntington dan Dominguez dalam Afan Gaffar, 1989). Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan

konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik dan sebagainya. Itulah sebabnya pembangunan politik cenderung ditujukan untuk negara-negara sedang berkembang atas dasar pandangan bahwa di negara-negara sedang berkembang belum terjadi rasionalisasi, integrasi dan demokratisasi

Pembangunan politik dalam arti derivatif dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya. Karena itu pembangunan politik berkaitan erat dengan bidang-bidang pembangunan lain seperti ekonomi, sosial, budaya dan keamanan

Pembangunan politik dalam arti teleologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Juga tujuan pembangunansuatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional. (Huntington dalam Ramlan Surbakti, 1992). Dari lima tujuan pembangunan yang disebutkan Hungtintondi atas, di Indonesia dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas), yaitu mewujudkan kehidupan demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak-hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera.

Sedangkan pembangunan politik dalam makna fungsional diartikan sebagai suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu negara misalnya Indonesia inginmengembangkan sistem politik

demokrasi konstutisional. Dalam rangka ini maka MPR dalam era reformasi melakukan amandemen UUD 1945, yangcenderung lebih memperkuat kedaulatan rakyat atau lebih demokratis. Hal ini dapat dilihat pada pasal 6A, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilihdalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Selain itu pemerintah era reformasi melakukan pada penataan struktur politik maupun infra struktur politik baik supra struktur politik maupun infra struktur politik. Misalnya pada supra struktur politik, dihapusnya DPA, sebagai lembaga tinggi negara dan dibentuknya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di sampingMahkamah Agung dalam tataran kekuasaan yudikatif. Sedangkan pada tataran kekuasaan legislatif dibentuk pula Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di samping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersama-sama menjadi anggota MPR. Demikian pula halnya pada infra struktur politik, dikembangkan sistem multi partai

Penutup

Pembangunan nasional multidimensional merupakan pembangunan yg strategis dalam upaya pemerataan pembangunan diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga mampu menciptakan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Pembangunan nasional yang multi dimensional tentunya menjadi focus negara dalam melaksakan pemerataan pembangunan disegala bidang yang dilakukan secara terencana dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 45 pada alinea ke II.

Daftar Pustaka

Budiman, Arief. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Osbon dan Gaebler, 1999, Mewitausahakan Biroktasi, CV Teruna Grafika.

Siagian, Sondang P, 2019, *Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi dan strateginya),* PT Bumi Aksara, Jakarta

Tjokrowinoto, Moeljarto, 1999, *Pembangunan Dilema dan Tantangan,*Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Cetakan ke-2

Tjokrowinoto, Moeljarto, 1995, *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, arah dan Strategi*, PT Tiara Wacana Yogyakarta, Anggota Ikapi Cetakan ke-3

http://pustaka ut.ac.id >pdtnk> Ipem4542.M, diakses 3 November 2022

http;//eprints.umn.ac.id>buku pemb ekonomi, diakses 4 November 2022

http://repository ut.ac.id>ipem4434.M1, diakses 8 November 2022

http://shellong..blogspot.co.id/2012/01pembangunan-nasional, diakses 8 November 2022

http://sitimapmap.blogspot.co.id/2015/09/makalah-pemnagunan-nasional 2.html, diakses 9 November 2022

http://staffnew.uny.ac.id>upload?pendidikan, diakses tgl 12 November 2022.

Profil Penulis



Firdaus

Penulis lahir di Makassar 10 desember 1962, sebagai dosen dengan jabatan Lektor Kepala pada program magister administrasi program pascasarjanan dan pada fakultas ilmu administrasi universitas sjakhyakirti Palembang. Sejak tahun 1988 sampai sekarang dan menjadi dosen tetap pada program magister administrasi public program pascasarjanan universitas sjakhyakirti Palembang sampai saat ini.

Bidang keahlian penulis adalah bidang kajian administrasi public yang telah digeluti dari sejak S1, S2, S3. Pada program studi administrasi public. Penulis aktif dalam publikasi ilmiah, baik nasional dan internasional, serta aktif menulis buku-buku, baik baik buku ajar maupun buku referensi, serta buku chapter.

Email Penulis: drs_firdaus@unisti.ac.id

16

AKTOR PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

Dr. Muliani S., S.I.P., M.Si.
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Pendahuluan

Dalam semangat reformasi politik di Indonesia, muncul istilah baru yang disebut good governance. Secara sederhana, governance diartikan sebagai pemerintahan, sedangkan good artinya baik. Menambahkan kata sifat good governance dapat diartikan sebagai good governance atau pemerintahan positif atau good governance. Seiring berjalannya waktu, good governance semakin populer untuk membersihkan karakteristik bad governance dari banyak kegiatan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Bank Dunia (World Bank), UNDP, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan kemudian banyak pakar di negara berkembang mencoba menerapkan gagasan pengelolaan tersebut berdasarkan kondisi lokal, dengan mengutamakan elemen-elemen lokal.

Meskipun istilah ini menjadi lebih populer, ia memiliki arti atau definisi yang berbeda-beda. Setidaknya ada empat konsep yang menjadi pokok kajiannya, yaitu: pertama, berfungsinya lembaga pemerintahan, seperti pemerintahan nasional, perusahaan atau organisasi sosial, yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah baik. Istilah ini mengacu pada arti asal kata to rule, yang berarti mengarahkan atau mengendalikan bahkan

mempengaruhi urusan publik dalam suatu negara.(Andriyadi, 2019)

Menurut Roderick Arthur William Rhodes, governance mengacu pada perubahan pemerintahan yang memiliki arti lebih luas, termasuk proses baru pemerintahan, aturan bersyarat yang berubah, atau metode baru mengatur rakyat (a new method of governance society) (Rhodes),1996. Governance secara umum dapat di pahami bentuk peralihan dalam "penyelenggaraan kebijakan publik" yang tidak hanya pada berpusat pada pemerintah, namun melibatkan aktor lain untuk turut berpartisipasi baik dari masyarakat, swasta, dan lainnya. (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020)

Good governance juga diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, pihak swasta (sektor swasta/dunia usaha) dan masyarakat. Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik di sektor publik didefinisikan sebagai suatu proses tata pemerintahan yang baik, di mana para pemangku kepentingan terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik dan dalam pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan sumber daya manusia dan peruntukannya untuk kepentingan masyarakat dengan menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, kewajaran, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Teori atau perspektif manajemen sebagai perspektif dasar administrasi dan manajemen publik sebenarnya merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan interaksi sektor negara/pemerintah dan sektor sipil. Pemahaman ini mengasumsikan bahwa banyak aktor yang terlibat, dimana tidak ada satu pun yang sangat dominan dalam menentukan pergerakan aktor lainnya. Pesan pertama dari terminologi administratif melemahkan pemahaman formal tentang fungsi lembaga-lembaga negara. Pemerintah mengakui bahwa masyarakat memiliki banyak pusat pengambilan keputusan yang beroperasi pada tingkat yang berbeda. Dengan demikian, telah terjadi perubahan peran pemerintah dari government ke governance (Sutiyoso, 2017).

Aktor-Aktor Pembangunan dalam Governance

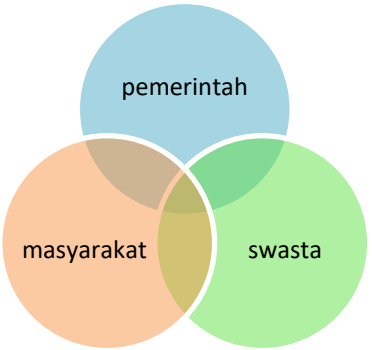
Aktor adalah individu atau kelompok yang memiliki jaringan dalam pembangunan. Pelaku pembangunan adalah mereka yang berperan sentral dalam menentukan proses pembangunan, yang dapat mencakup individu, kelompok, atau negara yang memiliki naluri politik dan kepentingan pembangunan. Kepentingan mengacu pada nilai dan keyakinan setiap peserta dalam pembangunan politik. Naluri dan kepentingan pelaku kebijakan pembangunan diwujudkan melalui metode atau strategi tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan. (Sembiring, 2022).

Pemerintah sebagai aktor utama dalam pembangunan memiliki kewenangan dan kekuasaan yang besar dalam mempengaruhi bawahannya. Menurut Pierre dan Peters, ada lima model pemerintahan dalam pemerintahan, yaitu: pertama, model statis, yang menekankan pemerintah sebagai aktor utama dalam pemerintahan. Pemerintah berhak memutuskan apakah rakyat bisa ikut campur dengan pemerintah atau tidak. Kedua, model demokrasi liberal dimana pemerintah menerima pemerintah sebagai aktor utama. Namun, model ini membebaskan partai politik lain (misalnya yang lain) untuk bersaing memperebutkan pengaruh di pemerintahan. Selain itu, dewan memiliki hak untuk memutuskan dan memilih aktor yang termasuk dalam dewan. Ketiga, model state-centric, di mana negara melembagakan hubungannya dengan sektor swasta dan masyarakat melalui berbagai bentuk kemitraan. Misalnya, kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan. Keempat, sekolah manajemen Belanda, di mana model ini didasarkan pada jaringan sosial administratif. Dalam model ini, posisi masyarakat lebih kuat karena memiliki peluang yang sangat baik untuk melewati negara dan kebijakannya. Kelima, model governance without governance, dimana pemerintah telah kehilangan kemampuannya untuk memerintah, sehingga lebih menekankan bahwa aktor swasta dan publik memiliki peran yang harus dimainkan. (Sembiring and Subekti, 2021).

Dalam pelaksanaan pembangunan tuntutan penerapan prinsip-prinsip good governance hendaknya terus diupayakan melalui peningkatan dan kepedulian semua aktor. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat arah baru administrasi publik dalam dekade terakhir ini cenderung mengarah pada konsep good governance dalam pengelolaan berbagai kepentingan dan urusan publik dengan berbagai keputusan publik yang melibatkan lebih berbagai aktor, kontributor eksternal atau pemerintah. Perubahan penting dalam perkembangan administrasi publik adalah kebutuhan untuk mendefinisikan kembali model hubungan pemerintahan; masyarakat dan sektor swasta.(Sutiyoso, 2017).

Membangun governance tidak hanya melibatkan pemerintah atau birokrat saja tetapi juga melibatkan pihak-pihak luar Upaya penerapan good governance hanya dapat terwujud bila peran ketiga pilar tersebut, yakni. Pemerintah, swasta dan masyarakat berjalan secara seimbang. Ketiganya memiliki funsi masing-masing. Pemerintah (DPR, Presidan dan Mahkamah Agung) memiliki peran dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum serta menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas. Peran pemerintah dalam pembangunan berubah menjadi motor penggerak dalam menciptakan lingkungan yang memfasilitasi partisipasi pihak lain dalam upaya tersebut. Sektor swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki peran dalam menciptakan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai dan prinsip good governance. Penekanan pada kesetaraaan ini tentunya akan memberikan ruang kepada semua stakeholder diluar pemerintah untuk berperan secara optimal. Tentunya sinergitas diantara ketiganya akan berpengaruh terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Aktor-aktor Governance.



Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan diantaranya adalah sebagai regulator. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Selain itu, Pemerintah juga berperan sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta sebagai fasilitator pembangunan.

Aktor lain dalam Governance adalah masyarakat. Sektor swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki peran dalam menciptakan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Tiga unsur yang harus dilibatkan Partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting karena a). Partisipasi masyarakat merupakan sarana untuk memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpanya program dan proyek pembangunan akan gagal. b). masyarakat lebih mempercayai proyek atau program pembangunan ketika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena merasa lebih baik dalam proyek yang dilaksanakan dan merasa tanggung jawab sendiri dalam proyek tersebut, c). Dianggap sebagai hak demokrasi ketika masyarakat terlibat dalam pembangunan masyarakatnya dan menjalankan perannya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip

pemerintahan yang baik. (*Conyers* 1994). Conyers, W John, 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penerjemah Ahmad Fawaid. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Partisipasi masyarakat kelompok sasaran dalam program pembangunan dapat meliputi keaktifan dalam memberikan masukan-masukan terkait dengan program pembangunan yang sedang dilaksanakan. Selain itu, masyarakat diharapkan ikut aktif dalam forum-forum yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam membahas kegiatan program pengembangan tersebut. Masyarakat juga berpartisipasi dalam pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam pengelolaan pembangunan.

Demikian halnya sektor swasta, kemitraan antara sektor dan *public-private partnership (PPP)* swasta merupakan pendekatan penting dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pembangunan. Hal ini karena masalah dan tantangan pembangunan menjadi terlalu kompleks dan saling terkait; Selain itu, hanya ada sedikit sumber daya keuangan dan administrasi untuk menangani masalah ini sehingga sektor publik dan swasta dapat secara efektif merespons sebagai entitas yang terpisah untuk semua tantangan sosial-ekonomi ini. Tentu saja, PPP tidak menyembuhkan semua gangguan perkembangan. Di negara berkembang, kemitraan publik-swasta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan sumber daya pembangunan yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Ini dianggap sebagai cara terbaik untuk menangani hubungan dan interaksi yang kompleks dalam masyarakat internet modern internet (Harsastro, 2002).

Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan

Secara teori, kolaborasi sebagai jaringan organisasi pemerintah dan non-pemerintah adalah babak baru dalam pengembangan administrasi publik, yang mengarah ke model pemerintahan yang baik. (Jaja Raharja *et al.*, 2019). Perubahan paradigma administrasi

publik tersebut dari government ke governance dimana urusan pemerintahan sebelumnya hanya menjadi domain pemerintah saja menjadi dikelola bersama dengan aktor-aktor lain seperti swasta dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut dalam konsep governance saling bersinergi dalam mewujudkan pembangunan dan pemerintahan yang baik. Tentunya dengan adanya kolaborasi tersebut akan mampu memecahkan masalah masalah pembangunan yang dimungkinkan tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi saja tetapi membutuhkan dukungan dari berbagai element di masyarakat.

Collaborative governance yang selama ini digunakan sebagai strategi governance membutuhkan perhatian terhadap sumber daya untuk memperkuat ketertiban umum. Pembagian di atas tentu menjadi kekuatan tersendiri. Selain itu, pengetahuan harus dibagikan. Efek dari aksi bersama lebih terasa ketika kebutuhan sumber daya terpenuhi. Tidak ada keraguan bahwa kerja sama lebih baik daripada kegiatan paruh waktu. Kolaborasi ini memiliki kekuatannya sendiri. Forum kolaborasi adalah milik bersama semua peserta. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membagikan sumber daya Anda sendiri. Hasil dari kolaborasi yang baik tentunya akan meningkatkan reputasi mereka yang terlibat dalam kolaborasi, demikian pula hasil yang buruk dalam kolaborasi tentunya juga akan mengurangi reputasinya. Hal ini berarti bahwa adanya kolaborasi akan menghadirkan warna yang lebih baik. Berbagai sumber daya di persatukan menjadi salah satu penunjangnya (Sembiring, 2022).

Selain itu, komitmen dalam kolaborasi adalah bagian yang sangat penting dari proses kolaborasi. Komitmen erat kaitannya dengan motivasi asli para aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Setiap aktor harus memiliki komitmen dan keinginan yang kuat untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Tingkat komitmen terhadap kolaborasi adalah variabel utama yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan kolaborasi. Selain itu, komitmen ini bergantung pada kesadaran bersama, yang merupakan cara terbaik untuk

menghormatinya, dan perspektif serta kepentingan aktor lain dapat memengaruhi komitmen. di antara aktor-aktor yang memberdayakan (Umar, Burhanuddin and Nasrulhaq, 2019).

Kerjasama antara pemerintah dan warga dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, cara konsultatif kebijakan pemerintah melibatkan warga negara dalam penciptaan ide dan penyertaan mereka dalam proses konsultasi, sedangkan keputusan akhir dibuat oleh pemerintah. Kedua, kemitraan di mana pemerintah dan warga menjadi mitra setara, di mana mereka berkumpul untuk membahas masalah, mencari solusi alternatif, dan mendiskusikan keputusan mereka..(Yasintha, 2020). Untuk berhasil dalam pengambilan keputusan, pemerintah harus mengubah persepsi mereka tentang warga negara sebagai lebih dari pembayar pajak, tetapi konsumen. Di sektor swasta, pelanggan adalah hal pertama yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah harus melihat warganya sebagai orang yang akan meminta pertanggungjawaban mereka, yang akan membawa mereka lebih banyak suara dalam pemilihan. Open data juga diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas. Pemerintah harus mulai mengomunikasikan rencana strategis mereka kepada publik. Tidak ada alasan mengapa publik tidak boleh tahu apa yang dilakukan pemerintah atau mengapa mereka melakukan sesuatu. Tetapi masyarakat yang terbuka tidak akan berjalan dengan baik tanpa partisipasi aktif warga dalam prosesnya.(Yasintha, 2020).

Apabila masyarakat benar-benar diberi hak dan kesempatan untuk berperan serta secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, maka diharapkan pembangunan dapat terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga tujuan pembangunan dapat terwujud. Misalnya, peningkatan kualitas atau penggunaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana. Partisipasi masyarakat tersebut menciptakan semangat kemandirian dan kerjasama antar masyarakat. Masyarakat sendiri berusaha meningkatkan

partisipasinya, swasembada, yang pada akhirnya mengurangi beban kebutuhan sumber daya negara.

Ketiga aktor good governance tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi sesuai dengan kapasitasnya. Dikatakan good governance, karena tidak ada satu pihak yang memiliki kendali penuh atas segalanya, sehingga tercipta keseimbangan antara tiga prinsip dasar berikut ini yaitu akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Prinsip-prinsip ini harus diubah menjadi hubungan antara negara, masyarakat sipil dan ekonomi pasar (Wicaksana, 2016).

Pada dasarnya prinsip-prinsip Governance tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya artinya terdapat prinsip governance yang berkaitan erat dan ada pula prinsip itu juga merupakan prinsip yang merupakan prasyarat untuk pengoperasian prinsip-prinsip lainnya. Pada kenyataannya, sulit untuk menerapkan semua prinsip sekaligus. Oleh karena itu, perlu diprioritaskan penerapan prinsip atau karakteristik good governance, agar good governance dapat diterapkan di wilayah pembangunan yang berbeda. (CUI-ITB, 200)(Puspasari, 2019).

Prinsip Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah kegiatan atau pelayanan birokrasi publik yang dilakukan oleh negara sesuai dengan norma dan nilai yang dianut masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut dapat memuaskan kebutuhan nyata masyarakat. Jadi akuntabilitas ini adalah salah satu dasar dalam proses pemerintahan dan bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik bergantung pada bagaimana pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik melaksanakan tanggungjawab baik secara konstitusional maupun secara hukum.

Prinsip lain dari governance dalam hubungan antara negara, masyarakat sipil dan swasta adalah transparansi. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan semua orang dapat mengakses semua informasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam hal pembangunan.. Prinsip transparansi

menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi dan menjamin kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai. Bentuk transparansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, kejelasan informasi pelaksanaan pembangunan, dan keterbukaan pemerintah untuk memeriksa pelaksanaan pembangunan.

Daftar Pustaka

Andriyadi, F. (2019) 'Good Governance Government and Government', *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), pp. 85–100. Available at: https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/2108.

Harsastro, P. (2002) 'Desentralisasi Dan Kerjasama Pemerintah - SwastA Oleh : Priyatno Harsastro', *Ilmu Pemerintahan Fisip Undip Semarang*, pp. 1–6.

Jaja Raharja, un *et al.* (2019) 'Analisis Jaringan Kolaborasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Hiv/Aids: Studi Di Kabupaten Subang Jawa Barat (Analysis of Collaborative Network in Hiv/Aids Prevention and Control: Study in Subang Regency-West Java)', *Jurnal Kependudukan Indonesia* |, 14(Juni), pp. 29–48.

Puspasari, A. (2019) 'Prinsip Prinsip Good Governance Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara procedures of governance that is not properly managed and regulated . Consequently arise', *Persfektif*, 17(2), pp. 195–201.

Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, A. R. (2020) *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.

Sembiring, R. A. (2022) 'Analisis Aktor Pembangunan dalam Smart Environment Kota Kediri Tahun 2021', *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), pp. 88–108. doi: 10.23887/jiis.v8i1.44272.

Sembiring, R. A. and Subekti, T. (2021) 'Analisis Aktor dalam Tata Kelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Batu untuk Kualitas Internasional', *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(1), p. 31. doi: 10.23887/jiis.v7i1.30416.

Sutiyoso, B. U. (2017) 'Analisis Kebijakan Prinsip Governance dan Aktor Melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Perencanaan Kota', *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), p. 45. doi: 10.20961/sp.v12i1.11740.

Umar, A., Burhanuddin, B. and Nasrulhaq, N. (2019) 'Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan', *Matra Pembaruan*, 3(1), pp. 57–66. doi: 10.21787/mp.3.1.2019.57-66.

Wicaksana, A. (2016) 'Aktualisasi Pelayanan Publik Dalam Good Governance Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (Dpmptspnaker) Kabupaten Kuantan Singingi', *Https://Medium.Com/*. Available at: https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf.

Yasintha, P. N. (2020) 'Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), p. 1. doi: 10.38043/jids.v4i1.2219.

Profil Penulis



Dr. Muliani S., S.I.P., M.Si.

Lahir di Bulukumba 01 Juni 1976 pengampuh matakuliah analisis kebijakan Publik dan implementasi kebijakan publik pada program Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Yang bersangkutan menamatkan S-1 pada jurusan politik pemerintahan FISIPOL Universitas Hasanuddin pada tahun 1999, kemudian mendapatkan gelar Magister dibidang administrasi pembangunan di Universitas Hasanuddin pada tahun 2004. Gelar Doktor dalam bidang Administrasi Publik di raih pada tahun 2015 di Universitas Hasanuddin. Pada program S-1 ia mengampu mata kuliah pengantar Ilmu Pemerintahan, Pemerintahan Nasional dan teori Perbandingan Pemerintahan serta Ekologi Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sejumlah penelitian yang pernah penulis publish ke jurnal nasional maupun internasional, antara lain: Role of supply chain in cocoa blue print model performance in national development program (Int. J Sup. Chain. Mgt Vol. 8, No. 6, December 2019), Millennial Generation And Digitization: Implementation Of Higher Education Functions (International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 04, April 2020), Implementation of health insurance policy for poor community services in enrekang regency, South Sulawesi, (jurnal international of advanced science tahun 2020), Digitalization Era: Website Based E-Government (Article in IOP Conference Series Earth and Environmental Science · March 2021). School Drug Education and Leadership Agility: Narcotics Crime Study in Children *Asian Journal of University Education (AJUE) Volume 17, Number 4, October 2021.*

Email Penulis: mulisamiri77@gmail.com

17

ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Sisca Nopralia, S.Pd., M.Si
Universitas Sjakhyakirti

Pendahuluan

Pembangunan identik dengan istilah perkembangan, menurut KBBI pembangunan adalah sebuah proses, cara, perbuatan membangun. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha aktif yang dilakukan oleh pemerintah atau negara untuk meningkatkan pendpatan perkapita.

Menurt Deddy T.Tikson (2005) pembangunan nasional diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi pada semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (komunitas/grup). Makna penting dari pembangunan adalah adaya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi.

Dalam pembangunan tertentu tak terlepas dari hal yang berkaitan dengan pembiayaan dan administrasi yang merupakan bagian penting dari setiap penyelenggaran pembangunan. Pembiayaan diperlukan untuk memastikan tersedianya dana yang cukup untuk melakukan penyelenggaraan pembangunan dari awal hingga akhir. Sementara administrasi sendiri diperlukan sebagai pegawasan yang memastikan

pembiayaan pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh penyelenggara dan semua yang terlibat dalam pembangunan tersebut.

Jadi dapat dikatakan Administrasi pembiayaan pembangunan berperan sebagai pengawasan dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dalam proses yang berlaku mulai tahap formulasi sampai tahap evaluasi. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang direncanakan serta memberikan manfaat.

Administrasi Pembangunan

Menurut Mustopadidjaja (1976), administrasi pembangunan adalah "ilmu dan seni" tentang pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif. Sementara Menurut J.B. Kristadi (1998), administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan, pembaharuan, dan penyesuaian serta pendukung suatu perencanaan.

Kemudian pendapat lainnya, Sondang P. Siagian (1982: 4) mengatakan administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Sondang P. Siagian (2007), administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Dari pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh proses yang akan dilakukan oleh administrator dalam upaya untuk mendorong dan untuk memberikan suatu pengawasan terhadap masyarakat ke arah modernisasi dan kebaikan yang multi-dimensional secara terpadu dan administratif.

Adminstrasi pembangunan salah salah satu cirinya adalah ditandai dengan adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Peranan dan fungsi pemerintah sangat erat kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Administrator juga dapat menciptakan suatu sistem dan praktik admnistrasi yang membina partisipasi dalam pembangunan.

Pembiayaan Pembangunan

Pengertian pembiayaan pembangunan dalam arti sempit merupakan usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk pembangunan melalui APBN/APBD dengan cara menutup defisit anggaran. Implikasi dari pengertian tersebut adalah bahwa pemerintah melakukan usaha untuk menutup defisit anggaran untuk membiayai pembangunan dari sumber utang dan non-utang. Pembiayaan utang dilakukan dengan menerbitkan surat berharga negara (SBN) baik yang konvensional berupa Surat Utang Negara (SUN) berbentuk obligasi, ataupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pinjaman yang berupa program ataupun proyek dalam maupun luar negeri. Artian luas adalah usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan (revenue), utang (debt), dan kekayaan (equity) yang bersifat konvensional atau non konvensional.

Sementara menurut seorang ahli David N. Hyman (1993) mengatakan definisi pembiayaan pembangunan adalah sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari upaya-upaya pemerintah dalam rangka membiayai berbagai pengeluaran pemerintah sesuai

fungsi yang diembannya terkait penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, dimana dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah terjadi melalui proses politik dengan berbagai prosedur dan aturan yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan pilihan masyarakat. Jadi, dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penyedia infrastruktur publik.

Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Bappenas Indonesia. Secara garis besar sumber pembiayaan pembangunan dikelompokkan menjadi sumber pajak dan non pajak. Sumber pembiayaan lain yang dapat dijadikan alternatif berasal dari investasi asing baik yang berupa penanaman modal asing langsung maupun arus masuk modal swasta lainnya, perdagangan internasional yang bisa diarahkan sebagai motor dari pembangunan, hutang dan bantuan luar negeri.

Administrasi Pembiayaan Pembangunan

Administrasi dan pembiayaan tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan. Dimana kedua hal tersebut merupakan bagian penting dari setiap penyelenggaraan pembangunan. Pembiayaan yang sehat, merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah pembangunan sehingga diperlukan sistem, alat dan prosedur yang dapat memberikan informasi yang lengkap kepada manajemen. Sebagai alat penunjang dalam mengusahakan pembiayaan yang sehat, maka penyelenggara administrasi yang tertib, lengkap, efisien, dan *up to date* merupakan suatu tuntutan.

Menurut Badrudin, dkk (2004:62), administrasi pembiayaan pembangunan adalah pengelolaan biaya yang berhubungan dengan pembangunan mulai tingkat perencanaan sampai pengukuran biaya yang efisien. Adapun pendapat lain menurut Masyhud (2005:187) administrasi pembiayaan pembangunan memiliki dua pengertian sempit dan secara luas. Secara sempit, administrasi pembiayaan pembangunan adalah tata

pembukuan yang berfungsi untuk mewujudkan kegiatan keluar masuknya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha.

Pengertian secara luas, administrasi pembiayaan pembangunan adalah kebijakan dalam pengadaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan kerja yang berupa perencanaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban suatu lembaga terhadap penyandang dana, baik individu maupun lembaga.

Administrasi keuangan atau pembiayaan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi managemen keuangan, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran, serta pertanggungjawaban.

Pada hakikatnya administrasi pembiayaan berkaitan erat dengan manajemen pembangunan. Oleh karena itu, sebagian orang berpendapat bahwa pengelolaan atau manajemen itu sama dengan administrasi sehingga istilah manajer dan administrator itu sama.

Feedback dari proses administrasi ini adalah *output* berupa sistem informasi yang memberikan manfaat dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan yang sehat. Administrasi pembiayaan pembangunan merupakan hal yang penting dalam segala aspek pembiayaan kegiatan, karena dapat meminimalisasi salah pengertian dan sekaligus memisahkan administrasi pembiayaan dari aspek marketing, aspek produksi atau operasional dan aspek finansial.

Salah satu alat penting dalam rangka pembiayaan pembangunaan yang berada ditangan pemerintahan adalah anggaran belanja negara. Budget bahkan tidak hanya menjadi alat kebijaksanaan ekonomi pemerintah, tetapi pada umumnya karena harus mendapatkan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat, maka ia menjadi suatu kebijaksanaan negara. Dengan demikian budget mempunyai kekuatan legal yangcukup tinggi serta menjadi alat pelaksanaan kegiatan serta pengawasan yang sehat di dalam suatu negara demokrasi.

Anggran belanja mempunyai dua segi, yaitu segi penerimaan dan segi pengeluaran. Pelaksanaan kebijaksanaan dari kedua segi tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap berbagai bidang ekonomi sosial di sektor pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu anggaran belanja menjadi sangat penting sebagai suatu program aksi pemerintah.

Pada prinsipnya pembiayaan dari sesuatu kegiatan usaha misalnya dapat diusahakan dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, tetapi kemungkinan memerlukan pembiayaan luar negeri.

Dasar Hukum Adminstrasi Pembangunan

Menurut Syarifudin (2005:89), dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan atau sering disebut dengan administrasi pembiayaan pembangunan terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Keuangan Negara

   Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

   a. UUD 1945 khususnya pasal 23
   b. UUPPI (ICW) Stbl 1925 No.448 jo. No. 9 tahun 1969
   c. RAB (Peraturan administrasi) Stbl 1993 No. 381
   d. UU tentang APBN setiap tahun
   e. Keppres dan Inpres, antara lain Keppres No.16 tahun 1994 tentang pelaksanaan pembangunan
   f. Keputusan atau edaran BPK
   g. Keputusan atau edaran Menteri Keuangan
   h. SKB beberapa Menteri tentang Pembangunan

2. Dasar Hukum Keuangan Daerah

   Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

a. UUD 1945 khususnya pasal 18
b. UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan
c. UU yang mengatut perimbangan keuangan
d. PP No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pegawasan Keuangan Daerah
e. PP No. 65 Tata Cara Penyusunan APBD, Tata Cara Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan APBD
f. Permendagri, Kepmendagri, dan edaran Mendagri yang menyangkut Keuangan Daerah

Fungsi Administrasi Pembiayaan

Administrasi merupakan salah satu fungsi manajemen dalam sistem manajemen. Oleh karena itu, administrasi pembiayaan dapat memberikan umpan balik (*feedback)* kepada manajemen. Administrasi pembiayaan juga merupakan alat untuk menata sistem administrasi, sistem laporan, sistem evaluasi kolektibilitas pembiayaan sehingga mampu menunjang *portofolio* pembiayaan yang sehat. Adminsitrasi pembiayaan berfungsi sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi
2. Alat komunikasi
3. Sebagai instrumen pengawasan pembiayaan
4. Sumber materi pembuat laporan
5. Alat untuk penentuan kualitas pembiayaan
6. Alat bukti dan antisipasi

Sementara dalam sumber lainnya mengatakan bahwa sistem keuangan dan administrasi negara modern, anggaran dan perencanaan dan pembiayaan pembangunan mempunyai fungsi dan peran penting, antara lain:

1. Sebagai peralatan kebijaksanaan yang multifungsional, yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai cita-cita dan berbagai tujuan negara dan bangsa yang bersangkutan
2. Merupakan realisasi konkrit dari politik pembangunan yang akan menentukan kualitas hidup kehidupan bangsa ini sekarang dan masa yang akan datang
3. Sebagai alat untuk mencegah keuangan dan kekayaan negara disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sah

Prinsip Administrasi Pembiayaan

Menurut Husnurdin (2005:187), prinsip-prinsip administrasi keuangan atau administrasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Hemat, tidak mewah, efisien sesuai dengan rencana program atau kegiatan
2. Tearah dan terkendali sesuai dengan rencana program dan kegiatan
3. Terbuka dan transparansi dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan pertanggungjawabkan disertai dengan bukti penggunaannya
4. Menggunkan kemampuan atau produksi dalam negeri

Sumber Pembiayaan Pembangunan

Sumber pembiayaan pembangunan pada umumnya dapat dibagi atas (Tjokroamidjojo, 1986: 100) :

1. Sumber-sumber penerimaan dalam negeri khususnya yang tersedia sebagai tabungan pemerintah. Tabungan masyarakat, antara lain dapat dipupuk melalui perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ataupun bentuk penanaman modal. Perhitungan dalam rencana mengenai tabungan masyarakat ini dilakukan berdasar perkiraan atas perkembangan kegiatan ekonomi, peningkatan pendapatan

masyarakat, desain-desain tabungan dalam masyarakat, pengembangan pelembagaan keuangan termasuk non bank, kebijaksanaan moneter, perkreditan khususnya tingkat bunga dan kebijaksanaan di bidang penanaman modal.

2. Sumber dana dari luar negeri, Dapat tersalur ke dalam anggaran negara atau pun tidak, langsung kepada sektor perkreditan atau kepada sektor penanaman modal. Perkiraan tentang sumber dana luar negeri lain mulai banyak direncanakan sebagai bagian yang integral dari keseluruhan investasi pada umumnya, dilihat secara komplementer kebutuhan pembiayaan pembangunan sebagai resource gap.

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah, adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

   a. Bagian Daerah atau Bagi Hasil

      Bagian daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil bagi atas penerimaan pajak dan bumi bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB), dan sumber daya alam.

   b. Dana Alokasi Umum

      Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000, dana

alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisai

c. Dana alokasi khusus

   Dana alokasi khusus (DAK) adalah alokasi dana dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, yaitu kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan seperti dana alokasi umum dan kebutuhan yang merupakan komitemen atas dasar prioritas nasional

d. Pinjaman daerah, Pinjaman daerah didefinisikan sebagai semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim dalam perdagangan.

e. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, Pendapatan daerah lain-lain yang sah dapat berupa hasil penjualan asset tetap daerah, penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan DPR, jasa giro, dll.

Pada dasarnya sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh dari sumber pembiayaan konvensional dan non-konvensional. sumber pembiayaan konvensional berasal dari pendapatan daerah/kota (pajak, retribusi, hibah dll), sedangkan sumber pembiayaan non-konvensional berasal dari kerjasama pihak pemerintah dengan stakeholder lain yang terkait baik swasta maupun masyarakat seperti joint venture, konsesi, konsolidasi lahan dll. Instrument pembiayaan non-konvensional inilah yang biasanya menjadi sumber pembiayaan alternatif apabila pemerintah mengalami kendala pendanaan dalam melakukan suatu pembangunan.

Adapun sumber pembiayaan pembangunan yang utama adalah berasal dari pajak tapi pajak bukan satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan, ada sumber lainnya dan ada beberapa sumber juga yang dapat dijadikan sumber alternatif. Empat sumber konvensional untuk pembiayaan pembangunan adalah :

1. Sumber-sumber Domestik

   Penciptaan sumber-sumber domestik untuk menabung dan menanamkan modal secara produktif merupakan landasan utama pembangunan yang berkelanjutan. Berapapun besarnya tingkat tabungan domestik, yang terpenting adalah jaminan terhadap pengalokasian tabungan tersebut secara efisien dan dibutuhkan dalam arti sosial, politik dan pembangunan. Di samping itu, tingkat tabungan domestik yang sangat rendah juga merupakan salah satu kelemahan struktural utama yang perlu dipecahkan di sebagian besar negara berkembang; namun demikian, tabungan domestik tidak akan mencukupi atau investasi nasional tidak akan berkualitas tinggi tanpa adanya disiplin ekonomi makro.

2. Investasi Asing

   Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu negara dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan aliran modal lainnya, misalnya portofolio investasi ataupun utang luar negeri. Salah satu sebabnya adalah dikarenakan PMA tidak begitu mudah terkena gejolak fluktuasi mata uang (seperti halnya investasi portofolio) ataupun beban bunga yang berat (misalnya utang luar negeri). Salah satu contoh adalah krisis ekonomi yang terjadi di Asia pada tahun 1997. PMA yang dianggap sebagai salah satu pemicu terjadinya krisis ekonomi di Asia, melainkan faktor pemicunya adalah investasi portofolio. Selain itu kita bisa melihat begitu beratnya beban pembayaran bunga yang

diderita masyarakat Indonesia akibat utang luar negeri.

3. Perdagangan Internasional

   Perdagangan internasional sendiri diharapkan dapat menjadi mesin dari pertumbuhan ekonomi. Masalah perdagangan internasional, yang berlandaskan atas kebijaksanaan pembangunan ekonomi maupun kebijaksanaan perdagangan luar negeri banyak menyangkut ekspor sebagai pembatas pertumbuhan ekonomi. Potensi ekspor Indonesia sendiri dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia dan tantangan pada daya saing nasional.

Proses Penyusunan Anggaran

Anggaran merupakan implementasi dari rencana dari rencana strategi yang telah ditetapkan. Pada proses inilah administrasi pembiyaan mulai digunakan. Penyusunan anggaran adalah Proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter, untuk kurun waktu tertentu. Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode satu tahun. Dengan Karakteristik Anggaran sebagai berikut :

1. Anggaran mengestimasi tingkat laba potensial dari suatu unit usaha.
2. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan, walaupun satuan keuangan tersebut dibantu dengan data non keuangan (misal jumlah unit yang dijual atau diproduksi)
3. Anggaran umumnya meliputi periode satu tahun
4. Anggaran merupakan komitmen manajemen
5. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari penyusun anggaran
6. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah jika terjadi kondisi khusus secara periodik, dilakukan

analisis selisih antara anggaran dengan sesungguhnya dan dijelaskan

Kegunaan Anggaran Pembiayaan

Kegunaan anggaran pembiayaan dalam pembangunan adalah sebaagi berikut:

1. Memperjelas rencana strategi
2. Membantu koordinasikan kegiatan beberapa bagian dari suatu organisasi
3. Melimpahkan tanggung jawab kepada manajer
4. Memperoleh kesepakatan bahwa anggaran merupakan dasar penilaian kinerja manajer

Isi Anggaran dan Proses Pembiayaan Pembangunan

Isi anggaran pembiayaan pembangunan diantaranya sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan
2. Anggaran Biaya produksi dan Biaya penjualan
3. Anggaran biaya pemasaran
4. Anggaran Biaya Administrasi dan Umum
5. Anggaran litbang
6. Anggaran lainnya : anggaran modal, anggaran neraca, anggaran aliran kas

Sementara untuk proses penyusunan anggaran pembiayaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Menerbitkan pedoman penyusunan anggaran oleh staf anggaran yang disetujui manajer puncak
2. Membuat proposal anggaran permulaan oleh masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban
3. Negosiasi, yaitu mendiskusikan anggaran yang diusulkan Slack, yaitu perbedaan Karena menurunkan tingkat penjualan atau menaikkan biaya

4. Review dan persetujuan oleh CEO/ Dewan direktur
5. Revisi anggaran, baik secara sistematis maupun kondisi khusus.

Daftar Pustaka

Adisasmita,R . (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Deradjat Mahadi Sasoko, M.m, Drs. (2021). *Bahan Ajar: Administrasi Pembangunan*.

Muallim. (2020). jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim.vol.2. *Implementasi Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan di Koperasi Syariah.*

Sahya Anggara, M.Si,Dr, Li Sumantri, M.Ag (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia. Cet.1

Saibani, A. (2015). *Pedoman Umum Penyelenggaran Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka

Website. https://www.bpkp.go.id/Pembiayaan-pembangunan-indonesia.

Profil Penulis



Sisca Nopralia, S.Pd., M.Si

Penulis lahir di Campang Tiga, 13 November 1992. Saat ini penulis berkarir sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Administrasi universitas Sjakhyakirti Palembang sejak tahun 2015 dan sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan II. Penulis menempuhkan Pendidikan SDN 3 Campang Tiga tahun 2003, SMP Negeri 1 Cempaka tahun 2006, SMA Negeri 1 Campang Tiga tahun 2009, kemudian melanjutkan Jenjang S1 Universitas PGRI Palembang dengan Bidang Pendidikan Matematika lulus tahun 2013, dan S2 Universitas Sjakhyakirti Palembang dengan bidang Pendidikan Administrasi Publik lulus pada tahun 2015.

Pengalaman kerja penulis sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Ilmu Administrasi, Kepala Administrasi Di lembaga Kursus Hasanah, dan Sebagai *Accounting* di Klinik Platinum Trust.

Email Penulis: Sisca_nopralia@unisti.ac.id

18

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Afriyanni, SSTP., M.Sc
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan jawaban dari pembangunan *trickle down effect* yang dinilai gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan idealnya merupakan proses pemberdayaan yang mendorong kemandirian masyarakat melalui transformasi sosial, budaya, ekonomi dan politik (Hasan & Azis, 2018). Makna lain pemberdayaan yaitu pembangunan yang berpusat pada rakyat atau pembangunan yang bersifat bottom up (Hamid, 2018). Zubaedi, (2013) menambahkan pemberdayaan hendaknya menggunakan pendekatan lokalitas yang menyatu dengan budaya lokal karena inti dari pemberdayaan masyarakat menurut (Hasan & Azis, 2018) adalah adanya partisipasi masyarakat dan mobilisasi. (Andreas & Savitri, 2016) menemukan bahwa sistem nilai dan kelembagaan lokal menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Senada dengan pendapat tersebut, (Chambers, 1983) dalam Habib (2021), mendefenisikan pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan ekonomi yang menggabungkan norma sosial yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment* and *sustainable*. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, pemberdayaan merupakan suatu proses pembangunan yang bersifat komprehensif dengan karakteristik: (1) berbasis lokal; (2)

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3) berbasis kemitraan; (4) secara holistik; dan (5) berkelanjutan

(Hamid, 2018) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan internal dimana pemberdayaan dilakukan dengan cara mendorong masyarakat yang *powerless* (internal) agar berdaya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki sedangkan pendekatan eksternal yaitu menciptakan kondisi yang kondusif baik secara sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan politis sehingga memiliki daya atau kekuatan untuk mandiri dan mengakses sumberdaya yang tersedia menuju kemandirian.

Senada dengan pendapat tersebut, (Suparjan & Suyatno, 2003), mendefinisikan pemberdayaan menjadi dua, yaitu*:*

1. *To give ability or enable to*, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan dan
2. *To give power or authority to*, yang berarti memberi kekuasaan, agar masyarakat memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan, dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Maryani & Nainggolan (2019) menyebutkan bahwa inti pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang keberlanjutan, terencana, bertahap,
2. Pemberdayaan berupaya memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat kearah yang lebih baik. Mardikanto (2015) menambahkan perbaikan yang dilakukan meliputi kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, kehidupan dan masyarakat.
3. Pemberdayaan merupakan proses penggalian dan pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

4. Pemberdayaan merupakan proses memandirikan masyarakat, dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan akhir dari pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pengoptimalan sumberdaya yang dimiliki (Widjajanti, 2011)

Pemberdayaan masyarakat menurut (Irawan et al., 2020), memiliki 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan mikro yaitu pemberdayaan dilakukan kepada individu dalam rangka melakukan pembimbingan dan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan tugas kehidupannya.
2. Pendekatan Meso. Pemberdayaan yang dilakukan pada sekelompok orang untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu secara mandiri memecahkan permasalahan yang dihadapinya
3. Pendekatan Makro. Pemberdayaan yang dilakukan pada lingkup yang lebih luas dan menganggap kelompok memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Pemberdayaan masyarakat menurut sektor pembangunan dapat dibedakan menjadi beberapa sebagai berikut:

1. Pemberdayaan pendidikan

   Pendidikan merupakan faktor penting dari pemberdayaan masyarakat. Pendidikan menambah pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat sehingga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi (Zulkarnain, 2022), (Yefni, 2018) (Supsiloani, 2019). Contoh pemberdayaan bidang pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). (Pakasi et al., 2020).

2. Pemberdayaan ekonomi.

   Pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal (Hasan & Azis, 2018).

   Beberapa contoh pemberdayaan ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir.

3. Pemberdayaan sosial budaya.

   Pemberdayaan sosial dan budaya merupakan proses pembangunan masyarakat yang memanfaatkan potensi sosial dan budaya yang mengakar di tengah kehidupan masyarakat. Tujuan pemberdayaan sosial dan budaya bertujuan untuk menghilangkan adanya pembedaan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya pembedaan peran perempuan dalam sektor ekonomi, sosial dan lingkungan.

4. Pemberdayaan kesehatan dan lingkungan

   Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diatur dalam Peraturan menteri kesehatan Nomor 8 tahun 2019 tentang permberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dilakukan melalui usaha kesehatan bersumberdaya kesehatan masyarakat. Misalnya Posyandu yang memberikan pelayanan khusus bagi Kesehatan Ibu dan Anak.

   Pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan misalnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak atau terkait dengan sumber daya alam atau Lembaga non pemerintahan (Non Governmental Organization (NGO)) yang

bergerak dibidang pelestarian lingkungan hidup. Salah satu contoh pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk pelestarian lingkungan hidup adalah Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang atau Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP). (Didi, 2021). Contoh lainnya, yaitu pemberdayaan masyarakat lahan gambut. Menurut (Najiyat et al., 2005), pemberdayaan masyarakat lahan gambut bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan ketidakberdayaan serta menumbuhkan kesadaran terhadap pelestarian lahan gambut.

5. Pemberdayaan politik.

   Pemberdayaan politik adalah suatu aspek pemberdayaan yang fokus pada peningkatan kapasitas atau kemampuan anggota masyarakat lokal sehingga mereka mampu untuk mengontrol arah kegiatan atau memiliki peluang dan partisipasi yang sama dalam dalam proses pembangunan termasuk dalam kegiatan-kegiatan politik (Rachmawati, 2022).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia

Pemberdayaan masyarakat di Indonesia muncul pada tahun 90-an dengan berbagai macam program yang tersebar pada beberapa lembaga pemerintahan. Beberapa program pemberdayaan di Indonesia pada tahun tersebut, antara lain: Intensifikasi massal (Inmas), dan program peningkatan pendapatan petani/nelayan kecil (P4K) dari Departemen Pertanian, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dari BKKBN, koperasi unit desa (KUD) dan simpan pinjam (Departemen Koperasi), usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP), BKD, dan PKK (Departemen Dalam Negeri), kelompok usaha bersama (KUBE) dari Departemen Sosial, dan wajib belajar 9 tahun (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), imunisasi dan penyediaan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas, Departemen Kesehatan) (Sumodiningrat, 2011).

Pada masa orde baru terdapat Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program ini merupakan integrasi dari beberapa program yang telah dilaksanakan sebelumnya seperti Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana (UPPKS-KB), dan Program PKK. Program ini merupakan program penanggulangan kemiskinan yang terencana, terarah dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat secara mandiri.

Sejak tahun 1995/1996 dikembangkan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). Program ini merupakan program pendukung kegiatan ekonomi dalam bentuk bantuan teknis, bantuan modal maupun sarana prasarana pendukung seperti prasarana transportasi, sanitasi dan air bersih. Program ini merupakan hibah ke masyarakat desa khususnya desa tertinggal melalui wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Pada era reformasi (1998/1999), muncul Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri, Proyek Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) oleh Departemen Pekerjaan Umum, Proyek peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) oleh Departemen Pertanian, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Departemen Sosial dan lain-lain. Namun program-program tersebut tidak bersinergi dan tumpang tindih sehingga pada Tahun 2006, dicanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dilaksanakan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Selanjutnya dalam rangka mencapai target pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 ha, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap

sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar hingga tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, muncul Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program KOTAKU merupakan transformasi dari PNPM Mandiri Perkotaan dan dikoordinir oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu pada wilayah perdesaan, PNPM Mandiri Perdesaan berubah menjadi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program ini memiliki leading sektor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sumber pembiayaan program ini berasal dari dana desa.

Selain program pemberdayan yang telah diuraikan diatas, terdapat juga program lain yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang bersifat lokal. Misalnya program pemberdayaan dan stimulus yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial RI untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia, yaitu:

1. Program perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan untuk keluarga miskin (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Beras Sejahtera (Rastra)) dan
2. Program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) hermawati dan winarno, 2021.

Selanjutnya menurut Arfandi et al (2022) yang meneliti dampak program bantuan sosial di Indonesia menemukan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kebijakan yang mampu menghasilkan pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan tertinggi. Sedangkan PKH merupakan kebijakan yang menghasilkan pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan terendah. Kondisi ini sejalan dengan hasil temuan Hermawati & Winarno (2020) yang menunjukkan, bahwa pemahaman Kelompok Penerima Manfaat (KPM) tentang Program Penanganan Kemiskinan hanya sebatas pada

bantuan yang akan diterimanya, bukan pemahaman tentang hakikat program secara keseluruhan. Program lainnya, yaitu: Program Desa Mandiri Pangan (DMP) yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan di daerah rawan pangan.

Program Pemberdayaan yang Dilakukan oleh Pihak Swasta

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak swasta lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). CSR merupakan tanggung jawab aktivitas sosial kemasyarakatan yang tidak berorientasi profit (Parinduri et al., 2019). John Elkington dalam buku "Triple Bottom Line", CSR menganut prinsip 3P tipe yaitu: *Profit* yang bermakna mendukung laba perusahaan, *People* yang bermakna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan *Planet* yang bermakna meningkatkan kualitas lingkungan setiap perusahaan harus memegang prinsip-prinsip 3P (*proft, people, and planet*). CSR dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk membantu dalam proses pemberdayaan masyarakat

CSR memiliki istilah yang berbeda-beda misalnya pada Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) dikenal dengan istilah Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) (PP Nomor 47 Tahun 2012) sedangkan pada BUMN baik yang berbentuk Perusahaan umum, Perseroan, maupun Perseroan Terbuka dikenal dengan Program Kemitraan atau Program Pengembangan masyarakat (*community development*) dan Program Bina Lingkungan (Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/2007).

Selanjutnya CSR menurut Peraturan Menteri Sosial RI No. 9 Tahun 2020 dikenal dengan istilah Tanggungjawab sosial dan lingkungan badan usaha. Tanggung jawab sosial dunia usaha merupakan komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha

sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha baik di tingkat nasional maupun daerah dibentuk forum tanggungjawab sosial dan lingkunagn badan usaha.

Menurut Mardikanto (2010), CSR harus dirumuskan sebagai kegiatan dengan lima pilar yang mencakup:: (a) Pengembangan kapasitas SDM, di lingkungan internal perusahaan maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya (b) Penguatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. (c) Pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya, Jika tidak dikelola dengan baik, sering mengundang kerentanan konflik, (d) Perbaikan tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate management), dan (e) Pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik (sumberdaya alam) serta lingkungan sosial dan budaya (termasuk kearifan lokal).

Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Perguruan Tinggi

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi merupakan bagian dari Tri Darma Perguruan tinggi khususnya dharma pengabdian masyarakat. Penerapan Tri dharma melekat erat dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa. Beberapa Program Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi secara nasional meliputi:

1. Kategori Kompetitif Nasional, yaitu : Program Kemitraan Masyarakat, Program Kemitraan Masyarakat Stimulus, Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Pengembangan Kewirausahaan, Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus, Program Pengembangan Desa Mitra, Program Kemitraan Wilayah

2. Kategori Desentralisasi, yaitu: Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi
3. Kategori Penugasan, yaitu: Program Penerapan Ipteks kepada Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat

Organisasi Non Pemerintah (Non-Governance Organization/NGO) atau dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat (Ormas) merupakan sebuah organisasi yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dan memiliki tujuan sosial, kemanusiaan, atau kebajikan. Peran NGO dibagi kedalam dua kelompok besar: pertama, peranan dalam bidang non politik, yaitu memberdayakan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi, dan kedua dalam bidang politik yaitu sebagai wahana untuk menjembatani warga masyarakat dengan negara atau pemerintah.

Clark, (1995) memaparkan karakteristik LSM ditinjau dari pelaksanaan tujuannya adalah (a) Melayani kelompok miskin marjinal; (b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan; (c) Mengembangkan inovasi-inovasi yang bermanfaat dan memecahkan masalah.; (d) Program yang dilaksanakan adalah skala kecil agar mudah dipantau dan terukur pencapaiannya serta tepat sasaran; dan (e) Memiliki komitmen staf yang tinggi karena secara luas memberi andil nilai dan keyakinan tentang misi perubahan sosial.

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 6, dikatakan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana: Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi c. Penyalur aspirasi masyarakat d. Pemberdayaan masyarakat e. Pemenuhan pelayanan sosial f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Contoh NGO yang bergerak dalam program pemberdayaan masyarakat antara lain: Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) bergerak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam bidang lingkungan hidup (Herdiansah & Randi, 2016), Dompet Dhuafa bergerak di pelayanan kesehatan dan pendidikan (Mulyadi, 2012).

Daftar Pustaka

Andreas, & Savitri, E. (2016). Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir. *Repositiry UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, *1998*, 1–118.

Arfandi, R. Z., Studi, P., Pembangunan, E., Trisakti, U., Studi, P., Ekonomi, I., & Trisakti, U. (2022). Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Program Utama Bansos di Indonesia. *Media Ekonomi*, *30*(1), 1–15.

Chambers, R. (1983). *Rural Development : Putting The Last First* (1st ed.). Longman.

Clark, J. (1995). *NGO dan Pembangunan Demokrasi*. PT. Tiara Wacana Yogya.

Didi, L. (2021). Ecological conservation through COREMAP program governance perspectives in empowering coastal communities in Bahari village. *International Journal of Public Leadership*, *17*(2), 160–177. https://doi.org/10.1108/IJPL-05-2020-0031

Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, *1*(2), 106–134. https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778

Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Issue 1, p. 253). eprints.ipdn.ac.id. http://eprints.ipdn.ac.id/5504/1/Buku Manajemen Pemberdayaan Masyarakat PDF.pdf

Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal. In *CV. Nur Lina*.

Herdiansah, A. G., & Randi. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, *1*(1), 49. https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185

Hermawati, I., & Winarno, E. (2020). Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Tentang Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Sosio Konsepsia*, *9*(3), 257–270. https://doi.org/10.33007/ska.v9i3.1982

Irawan, D., Rambe, M. F., & Munasib, A. (2020). Peran Moderasi Kinerja Pendamping Pada Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungbalai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, *3*(1), 136–147. https://doi.org/10.30596/maneggio.v3i1.4667

Mardikanto, T. (2010). Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat Acuan bagi Aparat Birokrasi, Akademi, Praktisi dan Peminat/Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat. In *Universitas Negeri Surakarta* (1st ed.). Surakarta Fakultas Pertanian UNS.

Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. deepublish.

Mulyadi, M. (2012). Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dompet Dhuafa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. *Aspirasi*, *3*(2), 167–178.

Najiyat, Asmana, & Suryadiputra. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. www.wetlands.or.id%0Awww.wetlands.org

Pakasi, U., Veplun, D., & Sari, A. (2020). Community empowerment strategy for the development of small business units in indonesia-new guinea border region. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, *24*(4), 4859–4870. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201585

Parinduri, L., Marlanfar, & Halim, A. (2019). Penerapan Corporate Social Responsibility. *Buletin Utama Teknik*, *14*(3), 212–213.

Rachmawati, E. (2022). Pemberdayaan Politik Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata. *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika*, *4*(1), 1–8. https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i1.9

Sumodiningrat, G. (2011). *Platform Pemberdayaan di Indonesia*.

Suparjan, & Suyatno, H. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Aditya Media.

Supsiloani. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, *5*(1), 20–30.

Widjajanti, K. (2011). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Model pemberdayaan masyarakat. 12*.

Yefni, Y. (2018). Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, *3*(2), 42. https://doi.org/10.24014/jmm.v3i2.6362

Zubaedi. (2013). Pengembangan Masyarakat : Wacana & Praktik. In *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik (1st ed.).* (Issue Kencana Prenada Media Grup, p. 270).

Zulkarnain. (2022). *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat; Best Practice Pendidikan Non-formal dan Informal* (Issue January).

Profil Penulis



Afriyanni, SSTP., M.Sc

Penulis menempuh pendidikan D-IV di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor dan S2 di prodi kependudukan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Ketertarikan penulis terhadap dunia penulisan dan penelitian muncul ketika bertugas pada bidang penelitian dan pengembangan BAPPEDA Kota Padang. Pada akhir tahun 2017, penulis diangkat menjadi fungsional peneliti pada Balitbang Provinsi Sumatera Barat dan setelah empat tahun bertugas, pada awal tahun 2021 penulis pindah tugas ke Balitbang Kota Pekanbaru. Penulis aktif melakukan penelitian baik secara mandiri maupun memperoleh pendanaan dari instansi penulis bertugas. Beberapa penelitian yang telah dilakukan baik secara tim maupun mandiri terkait dengan topik-topik seperti pengelolaan dana desa, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, kependudukan, kesehatan dan lingkungan.

Penulis memiliki beberapa publikasi yang telah diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional dan aktif mengikuti seminar nasional dan internasional. Selain itu penulis berkolaborasi dengan peneliti, dosen maupun fungsional lainnya baik sebagai penulis tunggal maupun penulis kolaborasi dalam kegiatan penelitian maupun penulisan ilmiah.

Email Penulis: afriyannisubhan@gmail.com

19

EVALUASI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

Yuliana, S.Sos., M.Si
Universitas Sjakhyakirti

Pendahuluan

Didalam pelaksanaan pembangunan diperlukan landasan teori yang mampu menjelaskan hubungan korelasi antara fakta-fakta yang diamati, sehingga dapat merupakan kerangka orientasi untuk analisis dan membuat ramalan terhadap gejala-gejala baru yang diperkirakan akan terjadi. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus dipantau terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar hasil evaluasi dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tetap tercapai.

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan atau program. Evaluasi menurut PP 39/2006, adalah serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan, masukan untuk perencanaan yang akan datang. Menurut PP 39/2006 menyatakan bahwa monitoring merupakan kegiatan rutin, yang sedang berjalan dan internal, dipergunakan

untuk mengevaluasikan kinerja program. Evaluasi dilakukan secara periodik dan berkala, menganalisis data yang telah diperoleh dari monitoring untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan rencana dan sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Evaluasi pembangunan merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan serta menganalisa permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lesson learned bagi perbaikan kebijakan pembangunan pada tahap selanjutnya. Evaluasi adalah sebuah penilaian yang subjektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang sudah dilakukan.

Pengertian evaluasi adalah proses penilaian pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program atau proses kegiatan. Mengapa pelaksanaan pembangunan harus dievaluasi keberhasilannya? Karena tujuan evaluasi keberhasilan pembangunan antara lain untuk menjamin terlaksananya keberhasilan program dan proses sesuai dengan tujuan atau target dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam Bab ini menguraikan materi pengertian evaluasi, tujuan evaluasi dan fungsi evaluasi, Tahapan evaluasi, Keberhasilan Pembangunan, pengertian pembangunan.

Pengertian Evaluasi

Pada Umumnya evaluasi adalah suatu proses menilai, mengukur, mengoreksi dan perbaikan pada suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan membandingkan proses rencana dengan hasil yang dicapai. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan atau program.

Evaluasi adalah hal yang diwajibkan demi mewujudkan goals yang baik. Evaluasi pun diadakan guna memperbaiki sistem kerja yang belum maksimal tentunya adalah untuk memperbaiki kekurangan dan kendala-

kendala yang terjadi dilapangan. Tujuan evaluasi ini dilakukan supaya segala pekerjaan yang dilakukan tetap sesuai dengan rencana awal yaitu dari mengumpulkan data dan membandingkannya dengan standar tujuan yang ingin dicapai sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Evaluasi adalah salah satu cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas dalam kinerja manusia di berbagai bidang kehidupan.

Evaluasi adalah penilaian kinerja, dimana setelah bekerja atau belajar, ada uji kompetensi yang harus dihadapi untuk menguji pemahaman. Secara umum evaluasi adalah suatu proses menilai, mengukur, mengoreksi dan perbaikan pada suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan membandingkan proses rencana dengan hasil yang dicapai.

Pengertian Evaluasi Menurut Para Ahli sebagai berikut:

1. Pengertian Evaluasi menurut Abdul Basir (1996), Evaluasi adalah proses pengumpulan data yang deskriptif, informative, prediktif, dilaksanakan secara sistematik dan bertahap untuk menentukan kebijaksanaan dalam usaha memperbaiki pendidikan.
2. Pengertian Evaluasi menurut Sajekti Rusi (1988), Evaluasi adalah proses menilai sesuatu yang mencakup deskripsi tingkah laku siswa baik secara kuantitatif (pengukuran) maupun kualitatif (penilaian).
3. Pengertian Evaluasi menurut Anne Anastasi (1978), evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.
4. Pengertian Evaluasi menurut William A. Mehrens dan Irlin J. Lehmann (1978), evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.

5. Pengertian Evaluasi menurut A.D. Rooijakkers, evaluasi adalah suatu usaha atau proses dalam menentukan nilai-nilai. Secara khusus evaluasi atau penilaian juga diartikan sebagai proses pemberian nilai berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan.

Tujuan Evaluasi dan Fungsi Evaluasi

Dalam pelaksanaannya evaluasi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat penguasaan atau pemahaman seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui kesulitan atau rintangan yang dihadapi oleh sesorang dalam kegiatannya sehingga dengan diadakannya evaluasi dapat membantu memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi.
3. Bisa menjadi umpan balik informasi yang baik untuk pelaksana sehingga bisa memperbaiki kekuranganyang ada.
4. Dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi metode atau cara yang telah diterapkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan tujuan evaluasi sangatlah penting dalam peningkatan kualitas pekerjaan seseorang. Pelaksanaan evaluasi ini tentunya memiliki beberapa fungsi yang sangat penting.

Adapun fungsi-fungsi evaluasi sebagai berikut:

1. Fungsi Seleksi

   Fungsi Seleksi adalah fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misalnya Apabila menentukan seseorang diterima kerja atau tidak, menentukan seseorang naik jabatan atau tidak dan sebagainya.

2. Fungsi Diagnosa

   Fungsi diagnosa bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Misalnya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa dalam bidang studi yang didapatkannya di sekolah.

3. Fungsi Penempatan

   Fungsi Penempatan bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. Misalnya untuk mengetahui posisi terbaik seorang karyawan sesuai dengan bidangnya di dalam suatu perusahaan.

4. Fungsi Pengukuran Keberhasilan

   Fungsi Pengukuran Keberhasilan bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana dan pencapaian tujuan.

Tahapan Evaluasi

Terdapat beberapa tahapan penting yang saling mendukung satu sama lain dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi. Adapun tahapan-tahapan evaluasi sebagai berikut:

1. Menentukan topik evaluasi, yakni menentukan topik atau agenda yang akan dievaluasi sehingga tidak melebar dan fokus.
2. Merancang kegiatan evaluasi, yaitu merencanakan atau mendesain kegiatan evaluasi agar tidak ada aspek atau pelaksanaannya yang tertinggal.
3. Pengumpulan data, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan materi dan mencatat setiap data atau informasi yang akan disampaikan dalam evaluasi.
4. Pengolahan dan analisis data, yaitu kegiatan untuk mengolah informasi dengan mengelompokkan data sehingga lebih mudah dalam melakukan analisis serta

menjadi tolak ukur seberapa lama waktu evaluasi akan digelar.

5. Pelaporan hasil evaluasi, yaitu setelah melakukan berbagai kegiatan evaluasi, maka harus dilanjutkan dengan membuat laporan agar bisa menjadi acuan untuk membuat kegiatan di kemudian hari.

Keberhasilan Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu atau negara akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang.

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan ekonomi, karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, masih banyak penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi.

Adapun faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
2. Sumber Daya Alam
3. Pertumbuhan Ekonomi
4. Ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Faktor politik dan administrasi pemerintah
6. Pembangunan berkelanjutan

7. Akumulasi Modal
8. Tenaga manajerial dan organisasi produksi

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia digunakan indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah yang mencakup tiga dimensi pembangunan manusia yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indikatornya adalah pengetahuan, indeks kelangsungan hidup, dan indeks beli yang digambarkan melalui pengeluaran rata-rata perkapita.

Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok yaitu:

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs).
2. Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia.
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude).

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Todaro (2000: 28) mengatakan semua masyarakat harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikkan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas

nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap menghambat dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan salah satu kegiatan utama bagi pemerintah daerah disamping pelayanan dan operasional internal birokrasi. Dalam membangun pemerintahan dituntut untuk melaksanakannya dengan efektif artinya harus tepat sasaran dengan target yang jelas dan bisa diukur hasil dan dampaknya selain itu dalam membangun harus tertib administrasi dan keuangan, sehingga sebagai dampak akhir pembangunan akan bisa meningkatkan kesejahteraan diwilayahnya. Dalam proses pembangunan dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan monitoring proyek dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan menjadi kegiatan yang sangat penting.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang ikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Menurut Subandi (2011:9-11) Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang

Pengertian pembangunan menurut para ahli sebagai berikut

1. Pembangunan menurut Siagian (1994) adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.
2. Pembangunan menurut Ginanjar Kartasasmita (1994) adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
3. Pembangunan menurut Rogers (Rochajat, dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.
4. Pembangunan menurut W.W (Abdul: 2004:89) adalah proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.
5. Pembangunan menurut Deddy T. Tikson (2005) adalah bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.
6. Pembangunan menurut Sukirno (1995:13) adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang.
7. Pembangunan menurut Alexander (1994) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.

8. Pembangunan menurut Portes (1976) adalah pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.
9. Pembangunan menurut Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah (2005) adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.
10. Pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo adalah suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia manusia untuk perbaikan kualitas hidupnya. Proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Ide pokok pembangunan menurut Siagian mengandung makna sebagai berikut:

1. Pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir.
2. Pembangunan merupakan suatu usaha yang sadar dilaksanakan secara terus-menerus.
3. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
4. Pembangunan mengarah kepada modernitas.
5. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional.

Begitupun Tjokrominoto menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam persektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut :

1. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
3. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (value free).
4. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep transcendental, sebagai meta-diciplinary phenomenon, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, the ideology of developmentalism.
5. Pembangunan sebagai konsep yang syarat nilai (value loaded) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat.
6. Pembangunan menjadi culture specific, situation specific, dan time specific.

Hakekat pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus-menerus untuk menuju keadaaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu yaitu untuk kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimana dalam prosesnya melibatkan semua unsur masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak warga yang tidak berpartisipasi aktif dalam pembangunan dikarenakan keterbatasan. Jadi dengan demikian proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari suatu pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.

Pembangunan sebagai sebuah perubahan yang membawa kearah yang lebih baik butuh perencanaan agar tujuan yang diinginkan tepat sasaran. Perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam tujuan bernegara adalah ingin memajukan kesejahteraan umum yang direalisasikan melalui proses pembangunan. Dalam Undang-undang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

Pasal 3 Ayat 2 menjelaskan perencanaan dalam pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh kementerian/Lembaga sedangkan dalam perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan berdasarkan jangka periodenya dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. Jangka panjang dalam kurun waktu 10-25 tahun dan jangka menengah kurun waktu 5 tahun dan jangka pendek perencanaan setiap tahunan. Di dalam perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya dari 3 tersebut jangka waktu yang paling akurat merupakan jangka pendek karena di dalamnya terus menggali data dan informasi perencanaan dari musrenbang.

Perencanaan Pembangunan Menurut Tjakrowinoto terdiri dari dua aspek didalamnya mengenai kegiatan penentuan dan proses dalam peningkatan keberhasilan pembangunan yaitu bahwa didalam perencanaan pembangunan tidak bisa lepas dari isu strategi serta permasalahan yang diajukan dalam perencanaan pembangunan yang dimana akan disusun oleh pemerintah daerah dengan melihat aspirasi masyarakatnya dan focus daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan adanya kegiatan perioritas yang didukung dengan adanya dokumen perencanaan.

Pembangunan merupakan perjalanan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada bersama masyarakat sesuai dengan wilayah kerja di lingkup daerahnya. Kerja pemerintah daerah berjalan bersama dengan partisipasi masyarakat dengan semangat gotong royong untuk mewujudkan pembangunan di daerahnya. Perencanaan pembangunan daerah ini diarahkan untuk memanfaatkan potensi yang ada di daerah untuk mengembangkan sumber daya manusia, kualitas hidup, skill dan bantuan pemerintah.

Tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, antara lain:

1. Untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan.
2. Agar ada umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek, untuk diteruskan dilanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan.
3. Untuk membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan program dan proyek.
4. Agar kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik.

Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Hasil akhirnya adalah pelaporan. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang cepat dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hasil akhirnya berupa tindakan/keputusan.

Periodisasi Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan (ex ante). Tahapan dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan, tahapan ini untuk melihat rasionalitas pilihan, target dan kesesuaian antar dokumen perencanaan.
2. Tahapan Pelaksanaan (on going). Tahapan dilakukan saat pelaksanaan kegiatan, tahapan ini untuk menjamin kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Tahap Pasca Pelaksanaan (ex post). Tahapan dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir. Bertujuan untuk menilai pencapaian (Keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan, serta untuk menilai efisiensi, efektifitas dan dampak terhadap sasaran, ataupun manfaat dari suatu program.

Ringkasan

Evaluasi adalah penilaian kinerja, dimana setelah bekerja atau belajar, ada uji kompetensi yang harus dihadapi untuk menguji pemahaman. Secara umum evaluasi adalah suatu proses menilai, mengukur, mengoreksi dan perbaikan pada suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan membandingkan proses rencana dengan hasil yang dicapai.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan ekonomi, karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya.

Adapun faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia.
2. Sumber Daya Alam.
3. Pertumbuhan Ekonomi.
4. Ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Faktor politik dan administrasi pemerintah.
6. Pembangunan berkelanjutan.
7. Akumulasi Modal.
8. Tenaga manajerial dan organisasi produksi.

Daftar Pustaka

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. Pembangunan, Dileme, dan Tatntangan. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Suryono, Agus.2010. Dimensi-dimensi Prima Pembangunan. Malang: UB Press. Hal 46

Bappenas. Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral. Jakarta: Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan:2009.

Riyadi, Dady.S.2005. Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Roger M. Schwarz, The Skilled Facilitator, 1994: 9.

Siagian, S.P. Administrasi Pembangunan, Jakarta, Bumi Aksara.

Suryono, Agus.2010. Dimesi-dimensi Pima Teori Pembangunan. Malang: UB Press. Hal. 46

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.

Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan. Jakarta: PT. Gramedia.

Siagian P Siagian, Mamajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Bumi Aksara. 2006.

Siagian, P. Siagian. 2007. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi pembangunan, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika.

Sukirno, Sadono. 1998. Pengantar Teori Makro Ekonomi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukirni, Sadono.2006.Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan).Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith, 2003. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.

Peraturan Perundang-Undangan NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan daerah kota pekalongan nomor 9 tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan daerah kota pekalongan nomor 4 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota pekalongan tahun 2016-2021.

Profil Penulis



Yuliana, S.Sos., M.Si

Penulis Lahir di Palembang, 22 Juli 1979. Adapun pendidikan yang pernah ditempuh penulis di SD Negeri 446 Palembang pada tahun 1992, dilanjutkan SLTP Negeri 43 Palembang pada tahun 1995 dan SMK Negeri 3 Palembang pada tahun 1998 kemudian Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (SI) pada Program Studi Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Administrasi pada tahun 2003 di Universitas Sjakhyakirti Palembang dan melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) pada Program Studi Administrasi Publik pada tempat yang sama di Universitas Sjakhyakirti Palembang pada tahun 2013. Penulis Dosen Tetap Yayasan Perguruan Tinggi Sjakyakirti Palembang yang aktif mengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti dan sekarang penulis menjabat sebagai Kepala Program Studi Ilmu Administarsi Universitas Sjakhyakirti Palembang. No. HP: 082179055864.

Email Penulis: yulianaplg619@gmail.com

20

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN DI INDONESIA

Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si.
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Pendahuluan

Isu-isu terkait pembangunan kelembagaan menjadi hal menarik ditengah menguatnya isu restrukturisasi dan efektifitas kelembagaan pada Lembaga Pemerintahan. Hal ini sejalan dengan tugas pokok pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum (Razak, Firmansyah, et al., 2022). Berkembangnya paradigma konsep pemikiran; *reinventing government* dan gerakan reformasi birokrasi sebagai upaya pemerintah untuk membangun kelembagaan yang lebih produktif dan efesien. Berbeda dengan perusahaan atau sector swasta, tuntutan efektifitas dan efesiensi adalah mutlak karena berkaitan langsung dengan pencapaian untung rugi serta maju-mundurnya kinerja sebuah organisasi. Sehingga kinerja seorang pemimpin dalam perusahaan swasta, diukur dari besarnya pencapaian indikator dasar yang harus dipenuhi, sedang di Lembaga Pemerintahan penempatan pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi pekerjaan terdistribusi dalam unit-unit kerja. Upaya mengembangkan atau membangun kelembagaan tidak lepas dari naluri manusia yang senantiasa menginginkan adanya peningkatan dan kebaikan hidup.

Manusia sebagai mahluk social dalam memenuhi kebutuhannya baik masa kini dan masa depan senantiasa melakukan upaya perbaikan dan membangun sesuatu dari tidak ada menjadi ada dan memperbaiki dari

kontribusi kecil ke berkontribusi besar, dari sesuatu yang biasa menjadi hal luar biasa. Pembangunan tidak hadir dengan tiba-tiba tapi melewati proses sebagai sebuah paradigma, Menurut (Warjio, 2016:69) "pembangunan tidak hadir dengan sendirinya tetapi justru dihadirkan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang diinginkan".

Pengertian pembangunan menurut *Coralie Bryant* dan *Louise White* dalam, *Ndraha* (1990), adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia guna memengaruhi masa depannya (Ndraha, 1990). Pendekatan ini berimplikasi pada pengertian pembangunan yaitu;

1. Membangkitkan kemampuan optimal manusia secara individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Menumbuhkan kebersamaan dan kemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
3. Menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability)*,
5. Mengurangi saling ketergantungan, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara negara yang satu dengan negara lainnya (*interdefendence*) (Hadiwijoyo & Anisa, 2019).

Kehadiran konsep pembangunan, demikian juga tentu saja orientasi dan hasil-hasilnya, tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang hadir secara alamiah. Pembangunan tentu saja merupakan hasil dari sebuah proses". Paradigma pembangunan tidak hanya terbatas pada hal yang sifatnya fisik tapi juga ke pembangunan kelembagaan baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.

Pembangunan kelembagaan terkait langsung dengan penerapan prinsisp-prinsip organisasi baik ukuran kecil, sedang maupun organisasi ukuran besar. Pembangunan kelembagaan tidak terbatas pada organisasi bentukan

pemerintah tapi juga yang dibentuk oleh swasta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi lembaga. Secara umum sasaran pembangunan menurut Sondang P. Siagian (2000:168) adalah;

1. Pengembangan kelembagaan (*institutional building*),
2. Pengembangan sumber daya manusia (*human resource management*),
3. Peningkatan kapasitas kerja (*capacity building*),
4. Penumbuhan citra positif (*image building*), dan
5. Budaya organisasi (*organizational culture*).

Pada tulisan ini pembahasan akan dibatasi pada pembagunan yang sifatnya pengembangan kelembagaan dengan focus pada prinsip-prinsip dasar organisasi (Siagian, 2017).

Pengembangan Kelembagaan

Pembangunan Kelembagaan sebagai sasaran dari administrasi pembangunan tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah dan sesuai dengan keinginan public (Razak, Ramdani, et al., 2022) dan hal ini merupakan salah satu hal penting dalam pemerintahan, baik yang ada di Lembaga legislative, sebagai Lembaga pembuat dan pengawas pelaksanaan undang-undang, atau Lembaga yudikatif maupun Lembaga eksekutif yang merupakan representasi dari pemerintah yang melaksanakan undang-undang. Selain itu pembangunan kelembagaan juga digalakkan pada pemerintahan daerah dengan adanya pelimpahan wewenang tugas Bupati ke Camat, namun hasil penelitian oleh *Leonardus Leo*, dkk. (2016) dengan judul Implementasi Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pemerintah Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah (Studi di Kota Kupang dan Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa "pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Sikka dan Walikota Kupang kepada kecamatan belum berjalan efektif. Faktor penyebabnya adalah isi kebijakan yang bersifat umum atau tidak bersifat konkrit sesuai dengan karakteristik wilayah

kecamatan dan beban kerja kecamatan. Selain itu faktor lainnya adalah; sumberdaya manusia, faktor prasarana/sarana dan dukungan anggaran yang rasional belum sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kecamatan masing-masing" (Lelo et al., 2016).

Untuk mencermati secara umum bagaimana pembangunan kelembagaan di Indonesia, tulisan ini hanya focus pada hal-hal yang bersifat umum pada Lembaga baik Lembaga negara maupun swasta. Singkatnya pembangunan kelembagaan dapat dicermati dari beberapa hal penting, yaitu; 1) prinsip-prinsip organisasi, 2) Tipologi struktur organisasi 3) Pendekatan system, 4) Prosedur kerja, dan 5) etika kelembagaan.

1. Prinsip organisasi

Organisasi adalah sebuah perkumpulan yang berada dalam sistem kelembagaan yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu (Pusdiklat, 2015). Seperti dipahami bahwa, Organisasi adalah merupakan kumpulan dari beberapa orang yang memiliki beberapa prinsip dan hal penting sebagai ciri dari sebuah organisasi, dan pembahasannya dimulai dari tujuan pendirian organisasi, misi, fungsional, pembagian tugas, pengelompokan dan lainnya;

a. Tujuan Organisasi

Setiap organisasi yang didirikan baik oleh perorangan, kelompok, swasta atau negara tentu memiliki tujuan yang akan digunakan sebagai target capaian dan bisa juga menjadi pedoman di dalam menjalankan kegiatan organisasi. Tujuan ini merupakan cita-cita bersama yang dibangun oleh para pendiri dan selanjutnya akan selalu menjadi roh dari kegiatan organisasi. Tujuan juga dapat digunakan sebagai target capaian yang dapat dioperasionalkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat memudahkan dalam bahasa pencapaian tujuan organisasi. Pembangunan kelembagaan tidak boleh melenceng dari tujuan awal pendirian organisasi bahkan bisa mendorong

pembangunan yang focus pada tujuan pendirian Lembaga.

b. Misi

Penentuan misi, merupakan poin penting yang harus diemban dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Misi dijabarkan dari visi yang intisarinya diambil dari tujuan pendirian organisasi. Penetapan misi yang jelas akan mempermudah pengurus atau pengelola organisasi dalam menetapkan strategi dan perencanaan yang selanjutnya dapat menjadi acuan dalam pembuatan program kerja per unit kegiatan. Pembangunan kelembagan bisa juga bermakna dengan membuat misi organisasi yang dapat dipahami dengan baik oleh anggota organisasi. Pembangunan kelembagaan dengan membuat misi organisasi yang sifatnya operasional akan memudahkan elemen dalam organisasi memenuhi kewajibannya. Misi organisasi juga dapat dibangun dengan menjabarkan misi dalam bentuk kuantitatif dan hal ini banyak dilakukan di perusahaan swasta yang berorientasi *profit oriented*.

c. Fungsional

Organisasi pemerintah yang menjadi rujukan dalam tulisan ini memiliki fungsi yang banyak dan terkait langsung dengan peran-nya dalam hal; pelayanan public, fungsi pengaturan maupun fungsi dalam menjalankan pembangunan. Sehingga diperlukan adanya bagi-bagi fungsi atau ada pembagian tugas yang jelas dan semua pekerjaan dapat dibagi habis, tidak ada fungsi yang tidak tertangani dan tidak terjadi perebutan fungsi yang dipersepsikan sebaga fungsi penting atau basah. Pemahaman ini jadi hal penting agar tidak terjadi istilah fungsi utama dan fungsi penunjang, di sector swasta kondisi ini juga biasa terjadi perebutan antara fungsi yang pokok dan penunjang karena langsung berimplikasi pada

besarnya penerimaan pendapatan. Dengan adanya pembangunan administrasi kelembagaan dikotomi seperti ini bisa dikikis sampai habis. Dan para karyawan tidak lagi memandang adanya departemen basah dan dan departemen kering yang dapat diistilahkan, "basah pekerjaannya kering pendapatannya. Anggapan tempat basah dan kering ini menjadi pe-er (pekerjaan rumah) bagi para manajer dalam mendistribusikan fungsi-fungsi organisasi dalam bentuk tugas dan kewajiban bagi para elemen organisasi.

d. Pembagian tugas (*Job decription*)

Mengingat banyaknya tugas yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan seluruh jajarannya maka sebagai konsekuensi dari fungsionalisasi pekerjaan adalah perlunya kejelasan dalam pembagian tugas sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang. Pembagian tugas dan bobot kerja dalam organisasi pemerintahan ini menjadi penting karena;

1) Banyak pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus atau spsesialisasi,
2) Adanya beban kerja yang berbeda-beda,
3) Konstribusi satuan kerja terhadap pencapaian tujuan organisasi tidak sama,
4) Adanya tingkat pendidikan karyawan yang berbeda-beda,
5) Tingkat keahlian terutama terkait penggunaan teknologi informasi berbeda.

Selanjutnya struktur organisasi dapat disesuaikan dan tergambar dalam tuntutan dari berbagai pekerjaan tersebut. Adanya pembagian kerja yang tepat dan seseuai dengan keahlian seseorang akan menjadi salah satu upaya membangun kelembagaan yang baik.

e. Pengelompokan kerja (departementalisasi)

Salah satu upaya untuk meningkatkan efektifitas organisasi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsinya, bisa dilakukan dengan cara mengelompokkan berdasarkan tugasnya atau fungsinya dalam kelompok besar yang biasa juga disebut dengan departemen, dibawa departemen bisa terdiri dari beberapa seksi atau bagian. Dalam banyak organisasi khususnya di swasta penamaan kelompok ini juga beragam tergantung dari kebijakan dan beban kerja-nya. Di Perusahaan swasta, penentuan kelompok atau departemen menggunakan berbagai pendekatan.;

1) Pendekatan fungsional,
2) Pendekatan proses
3) Pendekatan produk,
4) Pendekatan pelanggan dan
5) Pendekatan umum/supporting.

Berikut beberapa uraian terkait dengan jenis pengelompokan yang biasa digunakan.

Pendekatan fungsional, pada perusahaan swasta banyak menggunakan pembagian kelompok berdasarkan fungsi-fungsinya, semisal; kelompok yang berfungsi sebagai pemasaran yang bertugas memasarkan produk, kelompok produksi dengan tugas melakukan kegiatan memproduksi barang/jasa produk yang akan dijual. Bagian mutu bertanggungjawab atas standar mutu yang telah ditetapkan oleh perusahaan, bagian *maintenance* bertanggungjawab atas perawatan alat-alat produksi. Bagian sumber daya manusia bertanggungjawab atas pengelolaan mulai dari penerimaan, penempatan, pembinaan sampai pada pengeluaran karyawan. Bagian logistik mengatur penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang. Bagian keuangan mengatur dan mengelola keuangan perusahaan. Bagian

umum mengatur dan mengurus hal-hal lain yang sifatnya umum dan tidak tercover oleh bagian lain. Fungsi-fungsi ini kemudian dilembagakan untuk membentuk satuan kerja tanpa membeda-bedakan adanya tugas pokok atau tugas penunjang.

Pendekatan proses, pada kantor-kantor pemerintahan untuk menghasilkan output hasil pekerjaan maka akan melewati beberapa proses dan tahapan sebelum menghasilkan output. Tahapan-tahapan ini kemudian membentuk satuan kerja yang didasarkan pada jenis prosesnya, sehingga pengelompokan-nya terbentuk karena melalui pendekatan jenis prosesnya. Pada organisasi sejenis pabrik elektronik ditemukan pembagian berdasarkan proses, seperti; *injection*, *assembling*, *adjustment*, dll. Jenis proses ini menjadi satuan kerja tersendiri karena ada kesamaan karakter dalam proses.

Pendekatan produk, pada organisasi perusahaan seperti halnya pabrik elektronik yang menjadi pengalaman penulis kurang lebih 20 tahun. Pengelompokan bisa juga dilakukan berdasarkan atas *output* prosesnya berupa produk, misalnya; komponen *sub assy* yang memproduksi berbagai jenis komponen *assembly*, *injection* yang produknya berupa komponen hasil mesin injeksi. Pengelompokan atas produk akhir seperti contoh pada produksi *main assembly* yang memproduksi set *DVD*, televisi, *AC*, Mesin Cuci, dan lainnya.

Pendekatan pelanggan, setiap organisasi seperti pemerintah memiliki pelanggan yang harus dilayani dan dipenuhi kebutuhannya agar pelanggan tersebut bisa loyal karena adanya kepuasan dan terpenuhinya kebutuhannya. Muncul istilah seperti; pelayanan umum yang melayani pelanggan umum seperti masyarakat atau bagian pelayanan korporate adalah pelayanan yang melayani kelompok perusahaan.

Pada perusahaan swasta yang memiliki berbagai jenis pelanggan. Untuk memastikan adanya pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dibentuk satuan kerja berdasarkan atas jenis pelanggannya, misalnya dari pengalaman penulis yang pernah bekerja di perusahaan multinasional Korea. Pelangganya dari *principal* seperti LG, *Samsung, Toyota, sharp* dan lain-lain. Pembagian pelanggan atas satuan kerja ini penting karena biasanya setiap pelanggan memiliki karaktristik yang berbeda.

Pendekatan umum/supporting, pengelompokan kerja ini dibentuk untuk mengakomodir fungsi-fungsi yang sifatnya umum dan tidak tertangani oleh kelompok lain yang ada dalam organisasi. Mereka yang ada di pengelompokan ini biasa menjalankan fungsi-fungsi yang terkait dengan hal-hal yang membutuhkan penanganan khusus, atau bisa juga hal-hal yang tidak bersifat rutin atau jarang.

f. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab penting untuk terus dibangun dan dikembangkan dalam kelembagaan. Ada kecenderungan manusiawai yang biasa berkembang pada pelaku organisasi yaitu, keinginan atas wewenang yang besar dengan tanggungjawab yang kecil. Jika hal ini terjadi maka sangat berpeluang untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang. Begitu juga sebaliknya tanggungjawab besar tapi tidak ada wewenang juga akan berdampak kurang kondusifnya organisasi. Hal-hal seperti ini perlu mendapat perhatian dalam membangun kelembagaan, karena Lembaga yang tidak menerapkan keseimbangan dalam pertumbuhannya akan sangat menyulitkan dalam mendorong semangat pertumbuhan organisasi.

g. Fokus pada Tujuan organisasi

Adanya kesatuan arah pada tujuan organisasi akan mendorong meningkatnya efesiensi dan efektifitas organisasi sehingga jenis kegiatan yang berpotensi tidak produktif dan menyimpang dari tujuan organisasi dapat dihindari. Focus pada arah dan tujuan organisasi menjadi hal penting didalam membangun dan mengembangkan kelembagaan.

h. Satu Komando

Sering kita mendengar salah satu penyebab terjadinya kekisruhan sebuah kelembagaan karena adanya dua matahari dalam organisasi, yang sering terekspos oleh media massa misalnya pada organisasi partai politik. Prinsip ini bisa juga dikaitkan dengan "sumber perintah di satu pihak" dan "jalur tanggung jawab di pihak lain", hal ini mengandung pengertian bahwa, seseorang yang mengembang tugas sebagai pelaksana tugas, baik manajerial maupun tehnis seyogyanya hanya menerima perintah atau komando dari satu sumber saja, yaitu dari Atasan langsungnya. Dan atasan bertanggungjawab sepenuhnya atas pekerjaan dari bawahannya. Penerapan satu komando bermakna bukan hanya pada kejelasan perintah tapi untuk menghindari kebingungan dalam organisasi, sesuatu tidak mustahil akan terjadi bila berbagai pejabat yang eselonnya lebih tinggi dari atasan langsungnya ikut memberikan perintah dan minta pertanggungjawaban secara langsung. Kondisi seperti ini yang perlu dihindari sehingga akan terbangun administrasi kelembagaan yang lebih tertib.

i. Pola Pengambilan Keputusan

Pembangunan kelembagaan dengan cara memperjelas kebijakan dalam pola pengambilan keputusan, merupakan salah satu factor penting dalam organisasi. Telah dipahami bahwa dalam system pemerintahan ada dua pola yang banyak

diterapkan yaitu; system *sentralistik* dan *disentralistik.* Istilah sentralistik atau pemerintahan yang terpusat banyak disematkan pada era pemerintahan Presiden Suharto sedangkan pola pemerintahan disentralistik banyak dikembangkan setelah berakhirnya pemerintahan orde baru. Namun diakui juga bahwa sulit melihat penerapan pola ini secara murni, biasanya ada bagian tertentu yang menggunakan sentralistik dan bagian lain diserahkan kewenangan lebih banyak kepada pemerintah daerah atau pemerintahan dibawahnya lagi. Biasanya untuk hal-hal yang penting dan krusial biasa menggunakan pola sentralistik sedangkan untuk hal yang sudah biasa dan sifatnya rutin lebih banyak menggunakan pola disentralisasi. Kehadiran teknologi informasi di dalam Lembaga-lembaga pemerintahan, terutama pasca *pandemic covid-19* membuat pola disentralisasi ini lebih banyak digunakan.

j. Rentang Kendali

Berkembangnya teknologi informasi sebagai salah satu instrumen penting dalam menjalankan aktifitas kelembagaan memberikan warna tersendiri dalam membangun dan meningkatkan kinerja kelembagaan, Banyak pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien dengan hadirnya teknologi informasi. Selain dukungan teknologi, kehandalan karyawan, motivasi dan disiplin yang tinggi akan menjadi modal dasar dalam meengembangkan kelembagaan. Dedikasi dan rasa pengabdian yang tinggi serta semangat kerja yang tinggi bukan jaminan untuk tidak melakukan pengawasan kepada karyawan. System pengawasan dalam bentuk "rentang kendali" (*span of control*) tetap diperlukan, dan dibutuhkan. Ada banyak pendapat terkait dengan "rentang kendali" yang oleh sebagian menganggap bahwa efektifnya sebuah pengawasan jika yang

diawasi tidak terlalu banyak, dan ada juga pendapat lain bahwa; rentang kendali bukan dilihat oleh berapa jumlah orang yang diawasi tapi tergantung dari sifat dan tingkat kesulitasnnya, bisa saja seorang manajer hanya bisa membawahi 3 atau 4 orang saja karena sifat pekerjaannya. Sedangkan untuk pekerjaan yang sifatnya rutin dan sudah tersistem bisa membawahi lebih banyak karyawan.

2. Tipologi Struktur Organisasi

Tipologi organsisasi klasik menggambarkan adanya beberapa tipe organisasi yang biasa dipraktekkab seperti halnya tipe;

a. Lini

b. Lini dan staff

c. Fungsional

d. Matriks

e. Kepanitiaan (adhocracy)

Tipe organisasi lini, model struktur ini memiliki karakteristik; organisasi kecil, jumlah karyawan sedikit, variasi produk kecil, proses pengolahan input menjadi output relative sederhana, tuntutan pengetahuan karyawan tidak terlalu tinggi, hubungan antara atasan dan bawahan sangat dimungkinkan secara langsung. Tipe ini kurang popular di lingkungan organisasi pemerintahan karena fungsi-fungsi organ lebih rumit dan beranekaragam sehingga kurang cocok berbeda halnya di perusahaan yang berbasis produksi tipe ini banyak digunakan karena terkait dengan standarisasi proses.

Tipe organisasi lini dan staf, karakteristik tipe ini adalah kebalikan dari tipe lini, yaitu; digunakan pada organisasi besar, jumlah karyawan banyak, produk variative, pengolahan lebih rumit, kadang dalam pekerjaan membutuhkan pengetahuan khusus, hubungan antara atasan dan bawahan menganut system step down atau satu langkah kebawah dan ada

perbedaan antara satuan-satuan kerja pokok dan penunjang dan model ini banyak digunakan di organisasi pemerintahan, dan biasa dikenal sebagai struktur yang birokratif dan benrbentuk piramida.

Tipe organisasi fungsional, tipe ini berkembang untuk mengatasi kelemhan-kelemahan yang ada pada tipe sebelumnya. Struktur pada tipe ini cenderung lebih datar dan terjadinya pemangkasan pada tingkatan birokrasi. Organ-organ berjalan sesuai dengan fungsi, pada tipe ini lebih banyak dibetuhkan pengetahuan yang bersifat spesialis dibandingkan dengan yang genaralis.

Tipe organisasi matriks, tipe ini relative baru berkembang dan banyak digunakan di dunia perguruan tinggi. Kelebihan tipe ini pada (1) adanya keterkaitan antara produk dengan prosesnya, (2) mempermudah kordinasi antara penanggungjawab produk dan proses. Hanya saja setiap tipe tentu ada kelemahannya, seperti halnya organisasi matriks. Seseorang bisa saja bertanggungjawab kepada dua pimpinan karena adanya keteraitan pekerjaan.

Tipe Organisasi adhoc atau kepanitian, adalah organisasi yang bersifat sementara dan berada di luar birokrasi pemerintahan dan diperlukan bila; (1) ada hal khusus yang perlu penanganan secara ad hoc dan berada diluar dari birokrasi yang ada, (2) Penanganannya memerlukan kerja lintas sectoral dan butuh fleksibilitas, (3) manajemen puncak merasa perlu perekrutan tenaga ahli untuk menyelesaikan hal khusus, (4) hal khusus tersebut perlu ditangani dalam jangka waktu tertentu, (5) tugas yang ditangani merupakan hal penting dan lembaganya bersifat sementara saja.

Penggunaan tipe-tipe ini disesuaikan dengan perkembagaan kelembagaan yang selalu menekankan pada aspek efesiensi dan efektifitas organisasi.

3. Pendekatan Kesisteman

Membangun kelembagaan dengan menjalankan adanya keterkaitan dan keterhubungan kerja antara organ satu dengan lainnya, merupakan pola interkoneksitas dibangun oleh terciptanya ketergantungan yang dijalankan oleh system organisasi. Setiap organ atau satuan dalam organisasi memiliki fungsi berbeda satu dengan lainnya. Pendekatan kesisteman menjadi trend manajemen modern yang mengedepankan pada interkoneksitas fungsi-fungsi kerja dan bukan pada adanya ketergantungan dan keterikatan yang digerakkan oleh figure pimpinan dalam organisasi, tapi fungsi-fungsi organisasi berjalan karena adanya kesadaran dan interkonesitas pekerjaan.

4. Prosedur Kerja

Kejelasan prosedur dalam organisasi kelembagaan merupakan hal penting di dalam mengembangkan kelembagaan. Prosedur yang jelas dengan sendirinya akan membangun budaya kerja yang berdasarkan pada system seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa hal menjadi pertimbangan kenapa prosedur kerja menjadi sesuatu yang penting dalam membangun kelembagaan;

a. Prosedur kerja terkait langsung dengan interkoneksitas antar unit kerja dan satua-satuan kerja, isinya merupakan buah dari kesepakatan antara satuan-satuan kerja yang didalamnya memiliki fungsi kordinasi, interdefendensi yang bersifat multidimensi.

b. Prosedur kerja memberikan penegasan akan beberapa pertanyaan dari teori organisasi, yaitu Siapa yang melakukan apa dan bertanggungjawab kepada siapa yang berinteraksi dan berkordinasi dengan siapa serta jalur komunikasi apa yang digunakan.

c. Prosedur kerja memberikan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga setiap orang dan

masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana sebuah Lembaga menjalankan fungsinya, khususnya dalam menciptakan dan membangun layanan public

5. Etika Kelembagaan

Membangun kelembagaan tidak hanya menyiapkan organ dan satuan kerja yang dapat menjalankan fungsinya secara efektif, tapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sebuah lembaga membangun etika kelembagaan, dengan adanya komitmen dari setiap orang untuk menjaga aturan-aturan yang ada dalam organisasi, seperti halnya taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atau pedoman organisasi yang telah dibuat dan disepakati sebagai pedoman satu-satunya dalam menjalankan berbagai fungsi kelembagaan yang telah dibentuk. Salah satu upaya membangun etika kelembagaan adalah dengan cara membesarkan lembaga tanpa harus mengesampingkan lembaga lain. Kehadiran lembaga yang mandiri dan memiliki daya saing sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Hadirnya beberapa undang-undang seperti undang-undang tentang organisasi massa, perguruan tinggi, perusahaan swasta, undang-undang kelembagaan bertujuan untuk bagaimana lembaga-lembaga yang ada bisa bersinergi dalam menjalankan pembangunan nasional. Dan sinergitas hanya dapat diperoleh jika masing-masing lembaga berusaha dan senantiasa menjaga etika kelembagaan khususnya dalam membangun lembaganya.

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Lembaga yang kuat dan unggul hanya dapat dicapai jika ada pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Karyawan, pegawai atau apapun istilahnya dalam sebuah Lembaga adalah asset penting di dalam memajukan sebuah lembaga. Era menjadikan manusia sebagai salah satu komponen produksi sudah mulai banyak ditinggalkan. Sumber daya manusia yang dimiliki tidak

hanya dipandang sebagai faktor produksi tapi justru diposisikan sebagai asset lembaga yang bisa terus berkembang. Dengan akal pikiran yang dimiliki, sumber daya manusia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh factor produksi lain. Era teknologi membuktikan pentingnya daya saing dimiliki oleh setiap orang. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, ke handalan teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh sumber daya manusia yang dimiliki untuk memajukan dan mengembangkan lembaga.

Penutup

Membangun kelembagaan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari upaya lembaga itu dalam menjalankan dan mengembangkan prinsip prinsip organisasi, juga penyesuaian lembaga dalam menyikapi perkembangan paradigma administrasi publik yang terus berkembang, seperti halnya perlunya penerapan prosedur standar dan penguatan etika kelembagaan yang tidak hanya fokus pada membangun lembaganya tapi juga harus bisa membangun sinergitas kelembagaan yang merupakan asset dari pembangunan kelembagaan secara nasional. Membangun kelembagaan diharapkan adanya keselarasan antara trend tuntutan publik dan kesesuaian antara regulasi dengan perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2019). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.

Lelo, L., Pandie, D., & Tamunu, L. (2016). Implementasi Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pemerintah Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah (Studi di Kota Kupang dan Kabupaten Sikka). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, *6*(1), 1. https://doi.org/10.26858/jiap.v6i1.2067

Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat*. Rineke Cipta.

Pusdiklat, B. P. S. (2015). *Pengembangan Kelembagaan dan Kordinasi.*

Razak, M. R. R., Firmansyah, H., Hutasoit, W. L., Wardhana, A., & Dkk. (2022). *New Public Service (NPS) in Agus Hendrayady (Ed.) Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru*. CV. Media Sains Indonesia.

Razak, M. R. R., Ramdani, A., Yuliana, Saleh, L. F., Junaidin, & Tauhid. (2022). *Kaitan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik in Ratna Rosmauli Pakpahan (Ed.) Good Governance dalam Pelayanan Publik*. CV. Media Sains Indonesia.

Siagian, S. P. (2017). *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi, dan strateginya*. PT. Bumi Aksara.

Warjio. (2016). *Politik Pembangunan. Paradoks, Teori, Aktor dan Ideologi*. PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Profil Penulis



Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si.

Menulis buku, impiannya sejak jadi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Saat bekerja lebih 17 tahun sebagai Manager di PT. LG Electronic dan Group Cibitung Bekasi, terlibat langsung perumusan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Tahun 2009 sampai 2014, Tenaga Ahli Anggota DPR-RI A015-Muchtar Amma dan aktif menulis pada tabloid dwimingguan Senayan.

Setelah menyelesaikan S2 Pemerintahan tahun 2011, mengajar di Fakultas Teknik dan Fisipol Unisma-45 Bekasi. Tahun 2016 bergabung dengan Stisip Muhammadiyah Rappang dan mengelola "Magister Administrasi Publik". Januari 2018, Ketua Penyatuan STISIP dan STKIP, hingga mendapat persetujuan Kemenristek DIKTI menjadi Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang kemudian diangkat menjadi Dekan Fakultas Sains dan Teknologi membawahi lima prodi. Milad pertama UMS-Rappang bersama dengan Kaprodi menulis Book Chapter "Sains Teknologi Merubah Peradaban Dunia". Pada Musyawarah Aptisi Ajatappareng, berkolaborasi menulis Book chapter, tentang Kampus Merdeka. Pada Milad kedua UMS Rappang dan HUT Kabupaten Enrekang ke-61. Menulis Buku Referensi, "Jejak Pemerintahan Toalala dan Silsilah Arung Enrekang". September 2021 menulis Book Chafter (BC) Reformasi Administrasi Publik. Tahun 2022 menulis BC; Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru, Pengantar Ilmu Administrasi Publik, *Good Governance* dalam Pelayanan Publik, Governansi Digital, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Selain menulis juga aktif melakukan riset, beberapa penelitian yang didanai oleh Kemenristek Dikti, telah dikerjakan dan menghasilkan output berupa Haki dan Jurnal Internasional bereputasi terindeks scopus. Saat ini Penulis juga sedang dalam proses penyelesaian disertasi di program Administrasi Publik dan Kebijakan Publik Universitas Negeri Makassar.

Email Penulis: mraisrahmat@gmail.com

21

REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA

Irfan Murtadho Yusuf, S.A.P., MPM
Universitas Diponegoro

Pelayanan publik yang unggul merupakan cerminan keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi administrasi publik secara luas. Tujuan utama dalam reformasi yakni menyempunarkan atau meningkatkan kinerja. Sehat atau tidaknya sebuah organisasi publik ditandai transformasi dari pamong praja yaitu orientasi pemerintahan yang bersifat hirarkis dan kaku ke arah pelayanan publik (public servant) yang memiliki orientasi melayani warga masyarakat dan tidak berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Pemerintahan modern memiliki jiwa yang dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan semakin baik (Haning, 2018).

Gaung reformasi administrasi publik dimulai sejak era orde baru tumbang hingga saat ini, peluang tersebut dirasa lebih besar karena bertepatan dengan derasnya arus globalisasi guna menjawab tantangan perubahan layanan publik. Secara garis besar reformasi ini ditandai dengan perubahan paradigma dari rule of government menuju good governance. Good governance bila dijalankan dengan baik akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kepuasan masyarakat dapat dicapai dengan menyediakan dan memajukan pelayanan masyarakat, untuk itu diperlukannya penyesuaian antara target reformasi administrasi publik dengan Mindset dan cara kerja regulator pemerintah.

Birokrasi memiliki kewenangan besar karena segala faktor kehidupan masyarakat dilakukan oleh birokrasi. Kewenangan besar ini mempengaruhi peran birokrasi yang awalnya sebagai pelaku kebijakan menjadi penyusun kebijakan yang terkesan lebih menguasai daripada melayani. Oleh karena itu masyarakat menganggap birokasi sebagai *problem* dibandingkan menjadi sumber pemecah bagi permasalahan masyarakat. Para birokrat pada pasca reformasi berusaha tidak membedakan antara jabatan karier dan non-karir. Pola pikir semacam ini membuat birokrasi pemerintah kembali pada masa orde baru.

Menurut Mubarok (2019) Secara umum reformasi administrasi memiliki tujuan memperbarui tatanan kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus tujuan reformasi administrasi diantara lain:

1. Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi
2. Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat sejahtera
3. Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
4. Reformasi sosial betujuan terwujudnya integrasi bangsa Indonesia

Terdapat tiga pilar utama reformasi administrasi yang tertuang dalam pedoman umum reformasi birokrasi dalam pedoman umum reformasi birokrasi yaitu penataan organisasi menuju *right sizing,* pembentukan budaya kerja untuk mewujudkan birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi; pengembangan manajemen yang efektif, transparan dan akuntabel; perumusan peraturan yang tertib dan tidak tumpang tindih; dan pembetukan sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten, profesionalm berkinerja tinggi dan sejahtera.

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perubahan yang menjadi tujuan reformasi administrasi publik

Area	Hasil yang diharapkan
Organisasi	Tepat fungsi dan tepar ukuran *(right sizing)*
Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip *good governance*
Peraturan perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih *(over lapping)* dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, cakap, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir *(mind set)* dan budaya kerja *(culture set)* aparatur	Birokrasi dengan integriras dan kinerja tinggi

Sumber: *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025

Sedangkan Pollit (2003) mengungkapkan bahwa terdapat tiga tujuan keberhasilan reformasi administrasi yaitu:

1. Penghematan *(to save money)*

   Krisis ekonomi global memasuki akhir tahun 1999 memaksa pemerintah melakukan pemotongan anggaran dengan tujuan dengan dipotongnya anggaran pemerintah dapat dialokasikan anggaran kesejahteraan masyarakat *(welfare costs)*

2. Keinginan untuk memperbaiki kinerja sektor publik

   Beberapa pejabat publik dan pejabat pemerintah meyakini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat salah satunya adalah dengan meningkatkan layanan dan produktivitas aparatur

3. Menemukan mekanisme baru bagi akuntabilitas publik

   Keterlibatan politisi, dan pejabat pemerintah berimplikasi pada model pertanggungjawaban baru kepada publik

Keberhasilan reformasi birokrasi merupakan sebuah proses yang saling berkaitan satu dan lainnya guna menjawab berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut muncul seiring dengan kebutuhan masyarakat meningkat. Reformasi birokrasi merupakan sebuah keharusan yang membutuhkan usaha yang besar dan komitmen yang sangat kuat dari seluruh elemen dan *stakeholder*s. Seluruh level manajemen dituntut untuk menjadi *innovator of change* untuk menjaga kesinambungan reformasi birokrarasi. Mencermati hal tersebut maka reformasi birokrasi harus didukung oleh para pemimpin organisasi emerintah sehingga mampu menciptakan pelayan publik *(public servant)* dengan masyarakat sebagai entitas yang wajib dilayani.

Birokrasi dan Perilaku Masyarakat

Birokrasi sering digambarkan sebagai kultur feodalisme dalam pemerintahan di Indonesia. Didalamnya mengandung hak komunikasi namun lebih condong untuk pemilik kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Secara umum birokrasi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi yang menonjolkan peran berbagai aktor dalam strukturnya. Menurut Weber birokrasi memiliki makna substantif melingkupi: (a) spesialisasi pada bidang produktivitas kerja, (b) struktur yang menggambarkan bentuk organisasi, (c) *predictability* (keadaan yang mampu diprediksi) (d) rasionalitas dalam melakukan tindakan. Meski birokrasi memiliki nilai plus, keadaan di lapangan memiliki dinamika yang tinggi sehingga birokrasi juga bersifat konvensional yang tidak mampu mengantisipasi perubahan.

Perilaku birokrasi merupakan hasil interaksi antara karakteristik individu dan birokrasi. Karakteristik individu meliputi penilaian, motivasi, penentuan

pendapat pribadi, dan pengkajian (Robbins, 2003). Karakteristik individu menurut Thoha (2002) mencakup kecakapan, kepentingan, keyakinan, pengetahuan dan permintaan. Karakterstik individu mempengaruhi perilaku setiap individu, dikarenakan karakteristik individu yang berbeda menyebabkan perilaku setiap individu juga berbeda. Namun perilaku setiap individu yang berbeda ini, dapat disatukan dengan ikatan utama yaitu tujuan organisasi dikarenakan setiap perilaku berujung pada tujuan organisasi.

Sifat-sifat organisasi birokrasi meliputi hierarki, tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem insentif, dan sistem kontrol sebagai sarana pencapaian tujuan pelayanan dan perlindungan masyarakat (Thoha, 2002). Ciri-ciri birokrasi meliputi spesialisasi, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan formalisasi (Lubis & Huseini, 1987; Robbins, 2003).

Menurut Robbins (2003) perilaku berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sebagai wujud tanggung jawab umum pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan rakyat, maka salah satu tugas pokok birokrasi pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Birokrasi pemerintahan merupakan alat untuk mencapai pelayanan publik yang efektif, efisien, adil, transparan, dan akuntabel. Artinya, agar organisasi birokrasi dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara efektif, maka harus profesional, reseptif, dan aspiratif terhadap berbagai tuntutan dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan, pembangunan aparatur negara (aparat birokrasi) harus dilakukan terus menerus secara berkesinambungan agar menjadi alat yang efektif dan efisien, bersih dan berwibawa, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, menggerakkan pembangunan dengan lancar, dan melaksanakan pelayanan publik (masyarakat) yang dilandasi semangat dan nilai-nilai.

Birokrasi juga mampu merubah karakter atau perilaku seseorang dalam organisasi sehingga menjadi bias. Sebagai contoh pada tahun 2019 merupakan awal mula pandemi wabah virus jenis baru yaitu corona virus (SARS-

CoV2) dimana penyakitnya dinamakan corona virus disease 2019 (Covid-19) dan pemerintah melakukan berbagai macam strategi salah satunya adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan Covid-19 khususnya disasar kepada keluarga tidak mampu yang berupa bantuan sosial baik berupa tunai maupun sembako. Bentuk bantuan tersebut terdiri dari berbagai jenis skema bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, dan subsidi listrik.

Bantuan Sosial sepanjang pandemi kenyataannya belum mampu melibatkan kelompok masyarakat, terjadi karut marut dalam penerapannya di lapangan seperti contoh kasus di Balai Gudang Rakyat Kota Depok ditemukan tiga ratus kg telur ayam sisa bansos yang membusuk karena tidak disalurkan ke masyarakat lantaran tumpang tindihnya data penerima bansos. Contoh lainnya yakni adanya ketidaktepatan sasaran penerima bansos dari kriteria yang sudah ditetapkan yang terjadi di Medan dan Lampung *(Indonesia for Global Justice, 2020)* Disisi lain ketidaktepatan sasaran juga disebabkan karena data yang tidak selaras antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut *Indonesian Corruption Watch (2020)* ditemukan sembilan jenis masalah yang sering diadukan warga diantaranya; pemotongan / pungli, *inclussion error,* bantuan tidak diterima warga, bantuan ganda, penyaluran bantuan terlambat, politisasi, sembako tak layak, penyalahgunaan lainnya dan non penyalahgunaan.

Tabel 2. Jenis-jenis penyimpangan penyaluran bantuan sosial

No	Jenis	Persentase (%)
1	Pemotongan / pungli	19,25%
2	*Inclusion error*	17,99%
3	Bantuan tidak diterima warga	9,62%
4	Bantuan ganda	9,79%
5	Penyaluran bantuan terlambat	4,60%
6	Politisasi	3,77%
7	Sembako tak layak	0,84%
8	Masalah lainnya	16,32%
9	Non penyalahgunaan	18,83%
Jumlah		100,00%

Sumber: Jaringan Pemantauan Penanganan Covid-19 Indonesia Corruption Watch (2020)

Berkaca pada pembahasan diatas dapat diidentifikasi bahwa masih terdapat penyakit birokrasi yang disebut sebagai patologi (penyakit) birokrasi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Caiden dengan istilah *bureaupathologis.* Penyakit yang melekat ini rawan menyebabkan birokrasi mengalami disfungsi. Penyakit birokrasi Indonesia ini bahkan sudah dalam kategori sangat parah, menurut *Transparency International Indonesia (TII)* dalam KumparanNEWS (2021) bahwa pada tahun 2020 indeks korupsi Indonesia terperosok tiga poin dibandingkan pada tahun sebelumnya, penurunan tersebut merupakan pengalaman pertama kali dari dua belas tahun terakhir. Sehingga saat ini Indonesia berada pada urutan 102 dari 180 negara di dunia.

Reformasi merupakan sebuah desakan untuk perbaikan perilaku dan kinerja pelayanan yang bersifat holistik seperti hukum, struktur, prosedur, kebijakan, dan budaya organisasi (Caiden, 1991). Namun transformasi yang terjadi di Indonesia masih sangat lamban jika dibandingkan dengan organisasi bisnis. Sejak pasca era reformasi bergulir Indonesia tercatat beberapa kali mengeluarkan kebijakan reformasi birokrasi diantaranya lahir berbagai Undang-Undang (UU) seperti UU Nomor 22 tahun 1999 (telah mengalami 4 kali perubahan, sekarang

UU Nomor 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 73 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonsia dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kebijakan diatas memiliki tujuan untuk peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas (Haning, 2015). Hal tersebut sesuai dengan *roadmap* reformasi birokrasi yang ditetapkan negara melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 yang menggantikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015. Terdapat penetapan tiga sasaran *roadmap* area reformasi birokrasi meliputi: 1) birokrasi yang bersih dan akuntabel, 2) birokrasi yang kapabel, 3) pelayanan publik yang prima. (lihat tabel 3)

Tabel 3. Area Reformasi Birokrasi di Indonesia

No	Area Reformasi	Masalah	Aksi yang diperlukan
1	Manajemen Perubahan	1. Beberapa Pemerintah Daerah tidak memahami filosofi program reformasi 2. Perilaku negatif masih nampak dan dipraktekkan oleh para birokrat	1. Pembangunan karakter dan budaya kinerja lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari KKN serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa 2. Peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit

			berdasarkan kualifikasi, komptensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi, dan karir
2	Deregulasi Kebijakan	Masih banyak peraturan perundang-undangan yang bersifat *overlapping,* disharmonis, dan multi tafsir	Melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dinilai menghambat
3	Penataan Organisasi	Struktur organisasi masih terlalu gemuk dan birokrasi yang *redtape*	Merampingkan struktur organisasi pemerintah melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional
4	Penataan Tatalaksana	Belum terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu, pemborosan pembelanjaan TIK, duplikasi pengembangan IT	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terpadu
5	Penataan SDM Aparatur	Manajemen kinerja yang belum efektif, kesempatan pengembangan karir yang minim, masih maraknya budaya feodal pada pejabat publik dan aparatur negara	Pelaksanaan sistem merit yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi melalui perbaikan sistem rekrutmen ASN dengan menggunakan *Computer Assisted*

			Test (CAT), dan diterapkannya *Talent Pool* nasional guna pengembangan karir ASN
6	Penguatan Akuntabilitas	1. Perumusan sasaran pembangunan tidak berorientasi hasil, 2. Program/kegiatan tidak mampu menjawab sasaran pembangunan, 3. Tidak terdapat sinergitas/kolaborasi antar unit kerja *(cross-cutting)* program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan	Mendorong penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
7	Penguatan Pengawasan	1. Luasnya wilayah Indonesia menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap reformasi birokrasi 2. Unit kerja yang belum mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima	Pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan *(role model)* yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM)
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Belum adanya jaminan atas kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan publik 2. Partisipasi masyarakat dalam perbaikan penyelenggaraan publik masih rendah 3. Penyelenggaraan pelayanan publik	1. Memberi jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik

		belum terintegrasi dengan baik sehingga belum sepenuhnya mampu mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, aman, nyaman, jelas dan profesional	melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) 3. Mengintegrasikan pelayanan publik antara pelayanan pusat dan pelayanan daerah dalam satu gedung

Sumber: Diadaptasi dari (1) Permenpan & RB No. 11 Tahun 2015, (2) Permenpan & RB No. 25 Tahun 2020, (3) Haning (2018)

Reformasi Administrasi melalui Perampingan Birokrasi

Penyederhanaan sistem birokrasi merupakan hal yang tidak baru dalam reformasi administrasi publik. Misi presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam menyongsong seabad Indonesia merdeka tahun 2045 yakni mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi pencapaian misi pemerintah tersebut, meliputi:

> "Pertama, pembangunan SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, memudahkan akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Ketiga, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan dua kebijakan nasional: Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

(UKMK). Keempat, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Kelima, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Implementasi UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kemajuan pemerintah dalam mewujudkan reformasi administrasi publik secara berkelanjutan salah satunya diterapkannya sistem merit yang berdasarkan atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manajemen sistem merit dinilai paling layak dalam pengembangan sumber daya manusia birokrasi, karena memberi kesempatan seseorang untuk bekerja secara profesional dan proporsional (Sahambangung et al., 2019). Indikator sistem merit terdiri atas delapan indikator diantaranya:

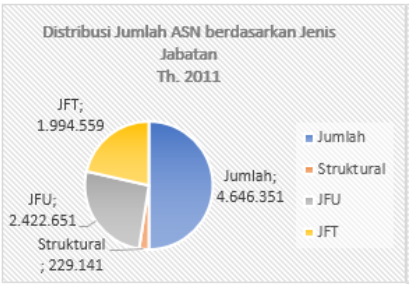
1. Perencanaan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan karir;
4. Promosi dan mutasi;
5. Manajemen kinerja;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. Perlindungan dan pelayanan; dan
8. Sistem informasi.

Pemerintah saat ini sedang berusaha membuat struktur baru guna menjawab problematika penganggaran untuk pelayanan publik yang dirasa masih membengkak sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Melalui penyederhadanaan birokrasi pemerintah diharapkan mampu menjawab persoalan dan mendukung upaya reformasi tata kelola sektor publik yang lebih luas.

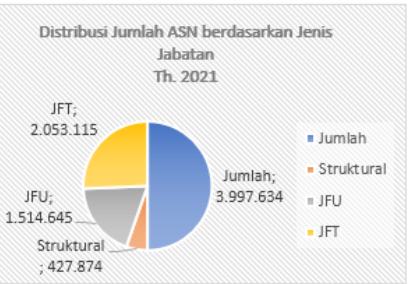
Dimana melingkupi empat bidang tematik yaitu: reformasi peran negara, reformasi fungsi pemerintah pusat, reofrmasi terhadap akuntabilitas dan mekanisme pengawasan, serta reformasi birokrasi dan manajemen layanan publik.

Pada kenyataannya implementasi dari perampingan birokrasi menghadapi berbagai hambatan salah satunya adalah kurangnya komitmen dan dukungan dalam pelaksanaan restrukturasi birokrasi di negara ini. Terdapat kesenjangan jumlah distribusi ASN yang mengakibatkan *missmatch* kompetensi dan kualifikasi jabatan. Pada tabel 1 dan tabel 2 terdapat komparasi yang menggambarkan kenaikan jumlah beberapa jabatan ASN.

Gambar 1.



Gambar 2



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah Jabatan Fungsional Umum dari tahun 2011 hingga tahun 2021 bahwa jumlah Jabatan Fungsional Umum (JFU) lebih banyak jika dikomparasikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) (gambar 1). Dilihat dari proposinya terhadap jumlah pegawai tahun 2011 jumlah JFT sebanyak 1.994.559 (42,92% dari jumlah 4.646.351 ASN) pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.053.115 (48,14% dari jumlah 3.997.634 ASN). Sedangkan pada tahun 2011 jabatan struktural berjumlah 229.141 (4,93% dari jumlah 4.646.351 ASN) dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 427.874 (10,70% dari jumlah 3.997.634 ASN).

Ketidakseimbangnya jumlah jabatan struktural dan JFT menunjukkan gejala *parkinson's law* pada birokrasi (Bappenas, 2013). Menurut Nurhestitunggal dan Muhlisin (2020) mengungkapkan bahwa sejak berjalannya desentralisasi justru JFT teknis di daerah tidak

berkembang dibandingkan dengan JFT Pusat. Hingga tahun 2019 pemerintah daerah tidak memiliki JFT Teknis yang memiliki keahlian khusus pada kompetensi tertentu yang mengindikasikan rancangan manajamen Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah tidak memiliki orientasi maju dan tidak ditujukan untuk merespon kebutuhan spesifik pemerintah daerah (Nurhestitunggal & Muhlisin, 2020).

Daftar Pustaka

Bappenas. (2013). *Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi*. https://www.bappenas.go.id/files/ekps/2013/4.Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi.pdf

Caiden, G. E. (1991). What Really is Public Maladministration? *Indian Journal of Public Administration*, *37*(1), 1–16. https://doi.org/10.1177/0019556119910101

Haning, M. Thahir. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, *4*(1), 25–37.

Haning, Mohammad Thahir. (2015). *Reformasi Birokrasi Desain Organisasi Yang Mendukung Pelayanan Publik Di Indonesia*.

KumparanNEWS. (2021). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok , Ini 3 Faktor Penyebabnya*. Diakses pada tanggal 20 November 2022 dari https://kumparan.com/kumparannews/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-jeblok-ini-3-faktor-penyebabnya-1v49PrO5XZc/1

Lubis, S. ., & Huseini, M. (1987). *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*.

Mubarok. (2019). *Reformasi Administrasi Publik*.

Nurhestitunggal, M., & Muhlisin, M. (2020). Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, *4*(1), 1–20. https://doi.org/10.37950/jkpd.v4i1.100

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024

Pollit, C. (2003). *The essential public manager*. Open University Press.

Robbins, S. P. (2003). *Perilaku Organisasi (Jilid 1 dan 2)*. PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Sahambangung, O., Pioh, N., & Waworundeng, W. (2019). MANAJEMEN SISTEM APARATUR SIPIL NEGARA (Studi tentang Sistem Merit dalam penempatan jabatan pimpinan tertinggi di lingkungan pemerintahan kabupaten kepulauan sangihe). *Jurnal Eksekutif*, *3*(3), 1–13.

Thoha, M. (2002). *Perspektif Perilaku Birokrasi (Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Watch, I. C. (2020). *Masalah Distribusi Bansos di Tengah Pandemi Covid-19 Pemantauan Distribusi Bansos*. *September*.

Profil Penulis



Irfan Murtadho Yusuf, S.A.P., MPM

Lahir pada tanggal 9 Oktober 1995 di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini merupakan Dosen Tetap Non-ASN di Universitas Diponegoro (Undip). Menyelesaikan pendidikan SMA Negeri 2 Semarang Tahun 2014, memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik dari Undip Tahun 2018, dan memperoleh gelar magister dengan fokus Ilmu *Public Management* di Universiti Utara Malaysia.

Saat menempuh pendidikan sarjana di Administrasi Publik-FISIP Undip aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan menjabat sebagai sekretaris Bidang Riset dan Kajian Strategis tahun 2015-2016. Sebagai Ketua pelaksana pameran fotografi UKM PRISMA pada tahun 2018. Selanjutnya menempuh pendidikan *Master Public Management* di Universiti Utara Malaysia dan lulus tahun 2020.

Irfan Murtadho Yusuf, S.A.P., MPM aktif melakukan riset dan pengabdian masyarakat. Pernah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian salah satunya menjadi anggota tim penelitian terapan unggulan perguruan tinggi sumber dana Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020-2022, anggota tim peneliti pengabdian masyarakat dalam advokasi kebijakan relokasi hunian sementara di Kampung Tambakrejo-Kota Semarang Tahun 2022 dan terdaftar menjadi Dosen KKN Undip Tim I 2022/2023. Beberapa artikel yang pernah ditulis diantaranya Analisis Kesesuaian Beneficiaries pada Program Bidikmisi di Undip Semarang, *Public Governance Perspective to Adressing Development Problems in Surabaya City*, *Penta Helix Model for Sustainable Coastal Area Management in Bangka Islands*, *The Role of Collaborative E-Government in Surabaya Intelligent Traffic System: A Case Study of Surabaya, Indonesia.*

Email Penulis: irfan.murtadho@gmail.com

22

PERBANDINGAN PRAKTIK ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Adhityo Nugraha Barsei, SAP
Pusat Riset Kebijakan Publik
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pendahuluan

Sebelum memasuki abad 19, tanggung jawab negara-negara eropa dan amerika hanya berfokus kepada belanja pertahanan dan keamanan. Pada saat itu negara dikenal sebagai *Watchdog* atau penjaga negara. Rasio pertumbuhan belanja pemerintah terhadap *Gross Domestic Product (GDP)* pada saat itu cenderung stagnan atau tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Setelah melewati abad 19, negara mulai dituntut untuk lebih peka terhadap masalah sosial yang dialami masyarakat dan bertanggung jawab terhadap pembangunan sosial ekonomi seperti penyediaan pendidikan gratis 6-9 tahun, penyediaan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat, jaminan sosial, dan bantuan kelompok usaha produktif. Gambaran diatas dapat menggambarkan bagaimana perubahan paradigma administrasi negara dari tahun ke tahun. Dalam paradigma *New Public Management (NPM)* dan *New Public Service (NPS),* pemerintah mulai melihat realitas masyarakat secara lebih luas bahwasanya masyarakat memiliki berbagai permasalahan seperti kemiskinan, kelaparan, ketimpangan pembangunan sehingga masyarakat harus dilayani berdasarkan kebutuhannya

dan perlu ditingkatkan kesejahteraannya (Rabin et al., 2007). Dalam konteks administrasi pembangunan, negara sebagai *welfare state* merupakan subjek dalam mencapai tujuan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik dalam jangka menengah dan jangka panjang (Anggara & Sumantri, 2016).

Administrasi pembangunan lahir dan tidak terlepas dari perkembangan administrasi publik karena memiliki karakteristik tertentu (Ngusmanto, 2015). Adapun administrasi pembangunan cenderung memiliki kajian terhadap perbandingan praktek – praktek administrasi di negara sedang berkembang. Namun, administrasi pembangunan yang sukses di suatu wilayah atau negara belum tentu dapat diaplikasikan di negara lainnya. Setelah melihat bagaimana perubahan paradigma administrasi di abad ke-19, pada bagian ini penulis akan mencoba mendeskripsikan bagaimana praktik administrasi pembangunan di Indonesia. Salah satu agenda utama administrasi pembangunan di Indonesia adalah penanggulangan kemiskinan.

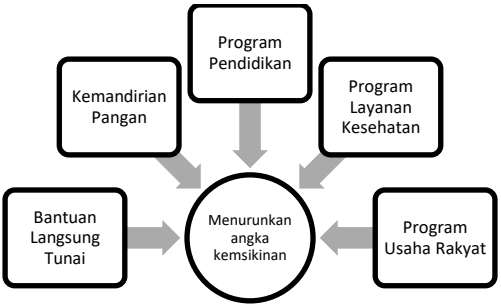
Progam Penanggulangan Kemiskinan

Masalah sosial yang kerap dialami negara maju maupun negara berkembang adalah kemiskinan (Addae-Korankye, 2019). Kemiskinan menimbulkan berbagai permasalahan seperti meningkatnya pengganggguran, kriminalitas dan permasalahan kesehatan di masyarakat (Fajriawati, 2016). Kemiskinan dianggap sebagai permasalahan utama dan mendesak yang harus segera dipecahkan dalam pembangunan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati hasil-hasil pembangunan dan kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan/*stakeholders* sangat diperlukan.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga menjadi fokus utama pembangunan di seluruh negara yang ada di dunia. Kita kenal norma pembangunan dunia seperti *Millenium Development Goals (MDGs)* yang berfokus

terhadap penurunan angka kemiskinan hingga *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau yang lebih dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs/TPB menjadi acuan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan nasional maupun daerah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, seperti mengurangi beban rumah tangga miskin melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyediaan pangan, akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, dan program usaha dan koperasi masyarakat miskin (bagan 1).

Bagan 1. Upaya Penanggulangan Kemiskinan



Sumber: data olahan penulis

Penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam BAB IV yang berisi tentang Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pasal 20 disebutkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
2. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang

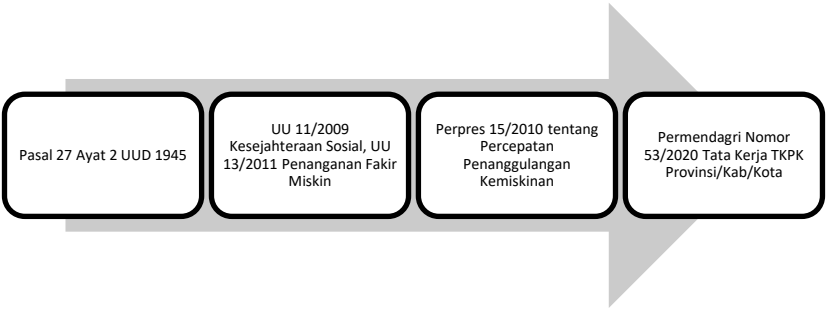
menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;

3. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
4. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Setelah diundangkannya UU Kesejahteraan Sosial, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam perpres tersebut diatur mengenai arah kebijakan, strategi, program, tim percepatan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin juga memiliki tujuan yang sama dalam pengentasan kemiskinan. Pasal 5 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melaksanakan penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provisnsi/Kabupaten/Kota (bagan 2).

Di awal era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pasal 1 ayat 2 ditegaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Bagan 2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan



Sumber: data olahan penulis

Perbandingan Program Pembangunan Pemerintah

Untuk melihat bagaimana praktek administrasi pembangunan di Indonesia, dapat dilihat dari bagaimana perbandingan program pembangunan yang dilakukan. Pada bagian ini, penulis mencoba melihat bagaimana program yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dalam 20 tahun terakhir dilihat dari strategi, program dan kebijakan pada RPJMN I hingga IV.

RPJMN 2004 – 2009

Permasalahan kemiskinan periode ini diawali dengan gagalnya pemerintah dalam pemenuhan hak dasar. Ini dapat dilihat dari masih rendahnya daya beli masyarakat terhadap konsumsi makanan dan minuman dan terbatasanya kecukupan dan mutu pangan. Selain itu, masyarakat miskin juga kerap terkendala dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Fokus utama pemerintah pada priode ini adalah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan kecukupan pangan.

Pada saat itu pemerintah memiliki berbagai program seperti (i) pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat miskin melalui distribusi dan diversifikasi pangan agar terjaminnya kecukupan pangan masyarakat miskin dan

kelompok yang rentan terhadap faktor ekonomi, sosial, dan bencana alam; (ii) pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan dalam bentuk meningkatkan partisipasi pengetahuan dasar kesehatan masyarakat miskin; dan (iii) pemenuhan hak atas pekerjaan dan usaha melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha; mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi serta mengembangkan kelembagaan masyarakat miskin.

RPJMN 2010 – 2014

Upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan terus menjadi fokus dalam RPJMN 2010 – 2014. Penanggulangan kemiskinan menjadi program prioritas nasional keempat. Terdapat empat program aksi penanggulangan kemiskinan dalam periode ini, yaitu:

1. Bantuan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada kelompok marginal, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi keluarga berpendapatan rendah, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program-program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat dan keluarga miskin dalam menjangkau akses pelayanan dasar guna memenuhi kebutuhan dan meringankan beban hidup keluarga miskin.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai bentuk pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 3 miliar per kecamatan termiskin di pedesaan. Pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin menyadari bahwa mereka memiliki potensi, sumber daya, dan akses yang dapat membawa dirinya keluar dari kemiskinan.
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini berusaha untuk mendorong dan merangsang berkembangnya sektor informal dan UMKM sehingga terciptanya lapangan pekerjaan dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu KUR bertujuan untuk

meningkatkan dan memperluas usahan agar masyarakat miskin semakin stabil dan meningkat pendapatannya.

4. Tim Penanggulangan Kemiskinan melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dibandingkan dengan priode sebelumnya, penanggulangan kemiskinan di periode ini mulai menjadi agenda nasional dimana penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas nasional. Kebijakan yang dilakukan juga lebih rasional dan berdampak, seperti memberikan BLT kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, membangun masyarakat melalui PNPM, meningkatkan pendapatan melalui program KUR, membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan menetapkan strategi penanggulangan kemiskinan melalui empat cara, yaitu: mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

RPJMN 2015 – 2019

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di periode sebelumnya ternyata masih menyisakan berbagai tantangan seperti ketimpangan pembangunan yang menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan. Hal ini ditunjukkan dengan melambatnya penurunan angka kemiskinan dan serapan tenaga kerja yang belum mampu menyerap kelompok pekerja rentan. Untuk itu, dalam periode ini pemerintah menerapkan strategi pembangunan nasional yang lebih komperhensif dan holistik dengan mengedepankan tiga dimensi pembangunan, yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan

pikiran dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan, dan perbaikan gizi. Pemerintah ingin menciptakan masyarakat yang kreatif, inovatif dan memiliki etos kerja bisnis sehingga mampu berdaya saing.

2. Dimensi pembangunan sektor unggulan prioritas. Fokus pembangunan ini menyasar pada empat sektor, yaitu pangan, energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri.
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya milik kelompok atau wilayah tertentu, tapi pembangunan ditujukan untuk seluruh wilayah. Untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan dan dan pembangunan antar wilayah, pemerintah mengeluarkan kebijakan membangun dari pinggiran melalui program Dana Desa sebagai bagian dari NAWACITA. Sasaran kebijakan ini adalah wilayah pedesaan, pinggiran (3T), luar pulau jawa, dan kawasan timur.

Ada dua hal yang menjadi pembeda strategi pembangunan dari agenda pembangunan kemiskinan periode sebelumnya, yaitu pemerintah melihat pembangunan dalam tiga dimensi pembangunan secara terintegrasi dimulai dari meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terlebih dahulu, kemudian optimalisasi sektor unggulan agar dapat membelikan nilai tambah, dan pemerataan wilayah dimulai dari pinggiran melalui program Dana Desa.

RPJMN 2020 – 2024

Ketimpangan pembangunan masih terjadi, terutama di kawasan timur. Untuk itu, sasaran pemerintah dalam periode ini adalah mengakselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan strategi memfokuskan wilayah sebagai basis pembangunan. Pemerintah melihat bahwa kemiskinan dan pengangguran dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sangat kompleks,

seperti kualitas SDM, ketersediaan infrastruktur, dan struktur ekonomi.

Terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam priode ini, yaitu kerangka kebijakan makro, dimana pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal sebagai basis pembangunan. Sedangkan dalam kerangka mikro, pemerintah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dengan dua strategi utama, yaitu: (i) penyempurnaan kebijakan bantuan sosial melalui program ekonomi produktif; (ii) menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi.

Pelajaran yang Diambil

Dari berbagai strategi penanggulangan kemiskinan diatas, dapat kita ambil pelajaran bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memiliki kompleksitas sehingga strateginya terus berkembang. Pada awal periode, fokus pemerintah adalah pemenuhan hak dasar kelompok miskin seperti pangan, pengetahuan dasar kesehatan, dan keterampilan masyarakat. Kemudian pada periode selanjutnya pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan yang lebih rasional dan berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan melalui BLT, PNPM Mandiri, dan KUR, dan membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Pusat dan Daerah. Namun, di periode selanjutnya kemiskinan mengakibatkan ketimpangan pembangunan sehingga diperlukan strategi yang lebih komperhensif dan holistik dengan berfokus pada dimensi pembangunan, yaitu pembangunan kualitas manusia, pembangunan sektor prioritas unggulan, dan membangun dari pinggiran melalui Dana Desa. Di akhir periode, pemerintah

mengeluarkan kebijakan makro dan mikro dan memfokuskan wilayah sebagai basis pembangunan. Arah periode akhir ini adalah masyarakat tidak lagi bergantung kepada bantuan pemerintah dan mendorong kelompok rentan dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

Perkembangan penanggulangan kemiskinan telah mampu menggambarkan bagaimana praktek administrasi pembangunan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ide-ide pokok administrasi pembangunan, yaitu: penanggulangan kemiskinan adalah proses yang tidak berkesudahan *(never-ending)* dan dilakukan secara berkelanjutan, dilakukan secara bertahap, dan mengarah kepada perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan adanya perubahan dan pertumbuhan multidimensional.

Daftar Pustaka

Addae-Korankye, A. (2019). Theories of Poverty: A Critical Review. *Journal of Poverty, Investment, and Development*, *48*, 55–62. https://doi.org/10.7176/JPID

Anggara, S., & Sumantri. (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*. Pustaka Setia.

Fajriawati. (2016). Dampak Perekonomian terhadap Masyarakat Miskin di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. *Ekonomikawan*, *16*(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fekonomikawan.v16i2.942

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provisnsi/Kabupaten/Kota, (2020).

Ngusmanto, H. (2015). *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Mitra Wacana Media. www.mitrawacanamedia.com

Rabin, J., Hildreth, W., & Miller, G. (2007). *Handbook Of Public Administration* (3rd ed.). Taylor and Francis Group.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (2009).

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, (2010).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, (2011).

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, (2014). www.djpp.kemenkumham.go.id.

Profil Penulis



Adhityo Nugraha Barsei, SAP

Ketertarikan penulis terhadap Administrasi Publik dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan di Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran tahun 2010. Sebelum menjadi PNS jabatan fungsional peneliti di BRIN, penulis sempat bekerja di sektor swasta sebagai Asisten Store Manager PT Lion Superindo dan Retail Data Analyst di Area Office PT Surya Madistrindo (Gudang Garam tbk). Saat ini penulis sedang melanjutkan Program Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Inovasi dan Kebijakan Publik. Selama tahun 2022, berbagai aktivitas telah dilakukan Peneliti untuk menyebarluaskan hasil penelitiannya sebagai pemakalah oral di berbagai konferensi nasional dan internasional, seperti 2nd SAICoPSS, Konferensi Nasional Perlindungan Anak, Konferensi Nasional Energi Terbarukan, 3rd IAPA, dan 4th ICoGPASS. Beberapa penelitian yang telah dipublikasikan diantaranya adalah: Layanan Pengaduan Inovatif terhadap Kekerasan Anak, Faktor-faktor pendorong dan penghambat inovasi daerah, Kebijakan Travel Bubble, dan Analisis Stakeholder dalam Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan.

Email Penulis: tyobarsei92@gmail.com

Indonesia menulis

1 PENGERTIAN ADMINISTRASI DAN PENGERTIAN PEMBANGUNAN
Muhammad Hasan
2 KONSEP DASAR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Rosidah
3 SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Ahmad Farouq Mulku Zahari
4 TUJUAN MEMPELAJARI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Ahmad Mustanir
5 ASPEK YANG MEMPENGARUHI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Hardianti
6 PERMASALAHAN DALAM PEMBANGUNAN
Abdul Jabbar
7 PERKEMBANGAN TEORI PEMBANGUNAN & ISU SENTRAL PEMBANGUNAN
Ade Putra Ode Amane
8 PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI BAGI PEMBANGUNAN
Ade Iskandar
9 STRATEGI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI
Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang
10 PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Wisber Wiryanto
11 PERANAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN BERENCANA
Iwan Henri Kusnadi
12 PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Ani Heryani
13 PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Siti Waliah
14 PERKEMBANGAN PRAKTEK ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG
Mochamad Rizki Fitrianto
15 PEMBANGUNAN NASIONAL YANG MULTI DIMENSIONAL
Firdaus
16 AKTOR PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE
Muliani
17 ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Sisca Nopralia
18 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA
Afriyanni
19 EVALUASI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
Yuliana
20 PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN DI INDONESIA
Muhammad Rais Rahmat Razak
21 REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA
Irfan Murtadho Yusuf
22 PERBANDINGAN PRAKTIK ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Adhityo Nugraha Barsei

Editor :
Agus Hendrayady

Untuk akses **Buku Digital,**
Scan **QR CODE**

Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id

IKAPI IKATAN PENERBIT INDONESIA

GET IT ON Google Play

ISBN 978-623-195-044-4 (PDF)
9 786231 950444